Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Biografi Gerakan dan Pemikiran

KH. M. Tolchah Mansoer

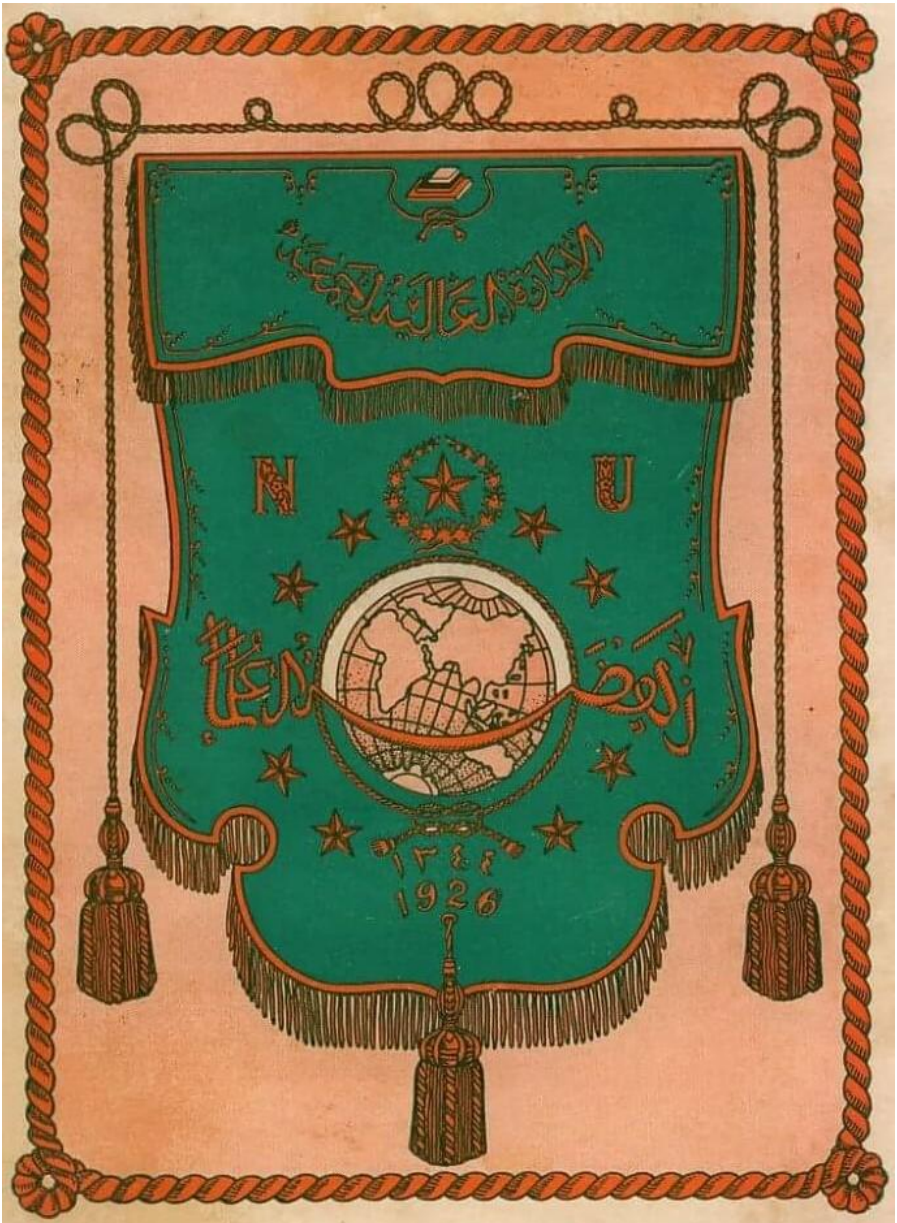

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Ridwan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Biografi Gerakan dan Pemikiran
Prof. Dr. K.H. Moh. Tolchah Mansoer, S.H.

Penulis:
Caswiyono Rusydie Cakrawangsa,
Zainul Arifin, &
Fahsin M. Fa'al

Prolog:
Prof. Dr. K.H. Moh. Tholhah Hasan

Epilog:
Idy Muzayyad, M.Si.

Editor:
Hamzah Sahal

Penerbit:
Pimpinan Cabang
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Kab. Batang - Jawa Tengah
bekerja sama dengan:
NUSAHADA PRESS

Desember 2022

“Pemimpin besar adalah pemimpin yang berhasil melahirkan orang-orang besar, bukan orang yang membesarkan diri sendiri”

Dipersembahkan untuk
kader-kader IPNU di seluruh Indonesia,
orang-orang terpelajar, dan
para penggiat gerakan sosial
di seantero Nusantara

PENGANTAR PENERBIT

Pertama kami panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semua sehingga biografi salah satu Kiai, Intelektual juga Aktivis ini dapat terwujud.

Yang kedua Shalawat Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukkan kita ke jalan yang terang, serta dapat mengambil hikmah dibalik terwujudnya buku ini.

Menulis biografi tentang seorang figure seperti KH. Moh. Tolchah Mansoer bukan perkara yang mudah. Sebab sebagai seorang tokoh yang memiliki berbagai sepak terjang yang luar biasa dalam masa hidupnya, bahkan sempat dijuluki Intelektual yang terlupakan dimana kehidupan beliau yang tidak mudah dijangkau.

KH. Moh. Tolchah Mansoer atau yang biasa akrab dengan panggilan Kiai Tolchah adalah Kiai Intelektual yang begitu sangat menginspirasi. Meski tidak terlalu populer dibanding dengan tokoh-tokoh NU yang lain, namun dikalangan pelajar NU beliau adalah tokoh yang sangat dicari biografinya. Mengapa demikian? Karena beliau pernah menduduki posisi puncak di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Konsistennya Kiai Tolchah muda ditengah gempuran kepentingan politik yang mulai menguasai pergerakan sosial tidak menggoyahkan idealisme beliau, meski lahir dari keluarga biasa Tolchah muda tidak pernah lelah untuk menimba ilmu, karena bagi beliau ilmu adalah hal yang utama.

Oleh sebab itu meskipun dijuluki intelektual yang terlupakan tidak menjadikan namanya tertelan begitu saja, sehingga buku **Idealisme Sang Kiai-Intelektual Biografi Gerakan Pemikiran Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH** ini merupakan salah satu hasil dari keresahan para aktivis untuk menyatukan penelitian serta hasratnya membukukan biografi sang Kiai Intelektual.

Dengan membaca buku ini, diharapkan makin mengenal dan mencintai KH. Moh. Tolchah Mansoer serta semakin bangga dengan Organisasi kita. Tidak hanya tekun mempelajari ilmu umum namun juga memperdalam ilmu keIslaman .

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Penerbit

Nusahada Press

PENGANTAR PENULIS

Sejarah adalah modal penting bagi konstruksi masa depan. Sejarah tentang seseorang yang penting pada masanya, dengan demikian, juga sangat penting dalam perjalanan sejarah di masa-masa berikutnya. Menyusuri kehidupan sang tokoh adalah menyusuri sejarah di mana ada nilai, pengalaman, kearifan dan pelajaran yang sangat penting untuk diangkat sebagai inspirasi bagi perjalanan generasi kini dan mendatang. Setidaknya kesadaran itulah yang mendorong kami menerima dengan mudah tawaran Rekan Idy Muzayyad (Ketua Umum PP IPNU Masa Khidmat 2006-2009) untuk menulis biografi Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH.

Sebagai salah seorang *founder* dan Ketua Umum pertama PP IPNU, sosok dan kehidupan Tolchah Mansoer menjadi sangat penting dalam perjalanan organisasi kita, dan tentu juga bagi masyarakat luas. Sebagai pewaris gerakan dan mungkin pemikirnnya, kita "berkewajiban" untuk mendokumentasikan riwayat dan kiprahnya dalam panggung sejarah. Terlebih, Tolchah Mansoer adalah figur penting dalam sejarah NU, dari mulai muda hingga masa tuanya. Jika masa muda beliau berhasil merintis gerakan pelajar NU, maka di masa tuanya beliau tetap mendampingi dan "membela" gerakan muda sekaligus telibat dalam proses pembaruan pemikiran dan orientasi jamiyyah NU. Beliau seorang aktivis sosial dan politik yang dedikatif.

Lebih dari seorang aktivis, Tolchah adalah seorang intelektual terkemuka pada masanya. Menurut penelusuran dalam penelitian ini, Tolchah Mansoer merupakan generasi awal orang NU yang menerjunkan diri mendalami keilmuan umum. Beliau tercatat sebagai doktor pertama di lingkungan NU dan doktor hukum tata negara pertama di UGM. Dalam kancah nasional, beliau merupakan pakar hukum generasi kedua di Indonesia. Karya-karyanya tentang ketatanegaraan hingga kini menjadi referensi penting dalam khasanah akademik ketatanegaraan di tanah air. Artinya, di tengah langkanya ilmuwan umum, keberadaannya sangat istimewa dalam komunitas NU kala itu.

Banyak orang menyebut, beliau merupakan aset tak ternilai bagi NU.

Yang lebih menarik, meskipun berbasis pendidikan umum, minat dan kemampuanya dalam penguasaaan ilmu keislaman tak kalah dengan para santri yang lain. Konon, beliau otodidak dalam mempelajari ilmu Islam dalam berbagai aspeknya. Berbekal itu, pada masa tuanya Tolchah menjadi seorang kiai terkemuka dengan pengetahuan agamanya sangat mendalam. Meski seorang pakar hukum tata negara, beliau menguasai banyak kitab kuning sebagaimana kyai-kyai di kalangan nahdliyin pada umumnya. Dengan demikian, tak berlebihan untuk dikatakan bahwa di dalam sosok Tolchah melekat tiga dimensi secara bersamaan, yaitu aktivis, intelektual, dan kyai.

Sayang, sejarah formal NU tidak mencatatnya secara memadai. Banyak orang mengatakan, beliau adalah tokoh yang terlupakan. Di tengah kekosongan sinilah buku ini hadir ke tangan pembaca. Beberapa keistimewaan yang melekat pada dirinya itulah yang benar-benar mendorong kami menulis riwayat kehidupan, pemikiran dan aktifitas gerakan Tolchah Mansoer. Buku hasil penelitian tokoh ini ditulis sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan referensi yang memadai tentang sosok Tolchah Mansoer. Dengan adanya rujukan ini maka diharapkan ada nilai, pelajaran, dan kearifan yang bisa kita petik untuk menjadi bekal sekaligus cambuk bagi generasi saat ini dan mendatang dalam meneruskan perjuangan di medan yang makin berliku. Dengan penulisan biografi ini diharapkan, visi, komitmen, dan integritasnya terwariskan kepada kita dan dapat menginspirasi perjalanan kita dalam melanjutkan cita-cita besarnya.

Dalam proses penelitian dan penulisan ini, dibentuk sebuah tim yang terdiri dari tiga orang dengan latar belakang akademis yang beragam. Di samping melakukan tugas kolektif sebagai tim peneliti, masing-masing bertugas secara khusus pada pokok masalah penelitian yang telah ditentukan. Caswiyono Rusydie Cw, yang kini tengah menggeluti studi politik di Pasca-Sarjana Universitas Indonesia bertugas mengkaji peran dan aktivitas Pak Tolchah dalam dunia gerakan sosial-politik. Zainul Arifin, yang kini sedang menyelesaikan studi Hukum Tata Negara bertugas menelaah pemikiran-pemikiran Pak Tolchah dalam bidang

ketatanegaraan. Sedangkan Fahsin M. Fa'al yang berlatar belakang sejarah, mengkaji perjalanan kehidupan Pak Tolchah secara kronologis. Ketiganya membentuk sebuah kajian utuh yang saling melengkapi.

Penelitian ini kami mulai dengan membuat sebuah desain sebagaimana penelitian sejarah pada umumnya, yaitu menentukan batasan masalah, metode penelitian, menentukan sumber, membuat draf wawancara, dan model serta sitematika penulisan. Penelitian ini dibatasi pada tiga masalah besar, yaitu: profil Pak Tolchah dari kecil hingga akhir masa hidupnya, aktifitasnya dalam gerakan sosial dan politik, dan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai lapangan keilmuan. Setelah desain penelitian disusun, kemudian kami menentukan sumber, baik sumber primer, sekunder, dan pendukung.

Terkait dengan sumber penutur sejarah, ditetapkan 44 narasumber yang diklasifikasikan berdasarkan periode waktu yang setidaknya dibagi menjadi tiga masa, yaitu sumber masa kecil di Malang, masa dewasa di Yogyakarta, dan masa tua di kota yang sama. Hal ini diperlukan untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Dengan metode tersebut, ada tiga kota yang kami jadikan lokasi utama penelitian. *Pertama*, adalah kota Malang sebagai kota tempat kelahiran Tolchah Mansoer dan kehidupannya di masa kecil dan remaja, sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta. *Kedua* adalah kota Yogyakarta, kota di mana Pak Tolchah dan keluarga menjalani hidup dan aktifitasnya, baik sebagai aktifis pelajar, akademisi, maupun sebagi seorang kyai yang kharismatik. Di sana juga dokumen-dokumen sejarah dan buku-buku karangannya kami dapatkan. *Ketiga*, Jakarta sebagai ibu kota di mana keluarga, kolega, dan para muridnya berada, berikut dokumen-dokumen organisasi. Kota-kota lain, seperti Jember, Nganjuk, dan Banyumas juga menjadi lokasi pendukung, karena di kota-kota tersebut juga terdapat orang-orang yang pernah dekat dengannya.

Seluruh rangkaian penelitan diawali dengan memohon ijin kepada pihak keluarga. Untuk kepentingan ini kami bertemu dengan Ir. Moch. Romahurmuziy, anak bungsu Pak Tolchah yang saat buku ini ditulis menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM. Dia adalah wakil sekretaris Yayasan As-

Sunny Darussalam, sebuah yayasan yang menaungi pondok pesantren yang didirikan oleh Pak Tolchah. Setelah berdiskusi panjang, pihak keluarga memberikan ijin dan siap mendukung pelaksanaan penelitian ini dari sisi penyediaan data. Pertemuan dilanjutkan beberapa kali secara lebih intensif. Romi, demikian Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini akrab dipanggil, begitu apresiatif menyambut gagasan penerbitan biografi ini. Perwakilan keluarga yang kami temui selanjutnya adalah Moh. Fajrul Falaakh, SH, MA, M.Sc. Putra pertama Pak Tolchah ini di samping menjadi pengajar pada Fakultas Hukum UGM, pada saat buku ini ditulis ia menjadi anggota Komisi Hukum Nasional (KHN).

Setelah keluarga menyetujui, selanjutnya kami melakukan kajian pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan di Ngadirejo, Reban, Batang, sebuah desa terpencil yang sejuk. Pada tahap ini dilakukan pengkajian awal terhadap berbagai dokumen, buku, dan informasi yang telah ada. Dengan terumuskan hipotesis sementara bahwa tokoh yang akan dikaji merupakan tokoh yang istimewa tidak saja bagi IPNU malainkan juga bagi NU dan masyarakat Indonesia secara luas, maka diputuskan untuk melakukan penelitian lebih luas dan mendalam. Di situ juga dilakukan penguatan desain dan metode penelitian serta menyusun *out-line*. Dalam tahap ini juga kami melakukan pemetaan data dan nara sumber; menginventarisasi buku dan dokumen; merencanakan hunting, penentuan jadwal dan pembagian tugas serta menentukan teknis hunting data.

Selanjutnya adalah berburu data. Perburuan diawali dengan menggali data-data literer di perpustakaan PBNU, Perpustakaan Nasional, perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan-perpustakaan lain. Informasi berupa penuturan sejarah langsung pertama kali diperoleh dari Drs. H. Asnawi Latif. Mantan Ketua Umum PP IPNU selama 3 periode (1963-1976) juga ini memberikan informasi melimpah tentang nama dan alamat nara sumber. Juga data-data pribadi Pak Tolchah. Untuk menguatkan penelurusan data, kami sangat sering mengajaknya diskusi. Sikapnya yang ramah, dan familiar membuat kami *kerasan* berlama-lama di rumahnya di Tebet Jakarta Selatan. Untuk kepentingan penelitian, kami berkunjung kerumahnya beberapa kali.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Salah satu kesulitan terbesar dalam penelitian ini adalah sudah teramat langkanya data primer yang bersumber dari penutur sejarah langsung. Namun kami bersyukur masih bisa bertemu dengan beberapa dari sedikit pelaku sejarah yang masih tersisa. Di Jakarta, satu-satunya aktivis satu generasi dengan Pak Tolchah yang masih hidup hanya H. Ismail Makky. Beliau adalah salah satu pengurus IPNU pada masa kepengurusan Pak Tolchah. Melalui Muktamar IV di Yogyakarta, Ismail Makki terpilih menjadi Ketua Umum IPNU. Saat itu usianya sudah mencapai 80-an tahun. Karena faktor usia, kini hari-harinya dihabiskan di atas kursi roda. Meski sudah tidak cukup komunikatif karena faktor usia, kami bisa mendapatkan data yang cukup banyak. Pertama kali kami sowan, beliau masih bisa banyak bercerita. Kedua kalinya kami ke sana, pembicaraannya sudah tidak begitu jelas. Beberapa bulan kemudian, saat penelitian ini masih berjalan, beliau meninggal dunia, tepatnya pada April 2008. Kita kehilangan seorang yang sangat penting dalam sejarah pergerakan pelajar NU.

Salah satu sumber kunci lain yang pernah dekat dengan pak Tolchah adalah Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., anggota DPR dari Fraksi Golkar. Kami menemui di rumahnya, Perumahan Citra Grand, Cibubur, Jakarta. Semasa mahasiswa, beliau dan sahabat-sahabatnya di PMII menjadikan Pak Tolchah sebagai "orang tua". Dalam ungkapannya, Pak Tolchah selalu *ngayomi* dan membela mahasiswa NU. Rumah Pak Tolchah di Kompleks Colombo No. 21 Yogyakarta menjadi semacam "markas" bagi anak-anak muda dan mahasiswa. Mas Slamet menyambut baik dan mendukung penulisan ini. Hal yang kami bangga dengan beliau adalah keramahannya. Meskipun telah menjadi tokoh nasional, beliau sangat mudah ditemui dan enak diajak ngobrol. Kami ngobrol di gasebo di taman di samping rumahnya. Selesai wawancara, kami diajak membuka-buka foto sampai lesahan di lantai ruang dalam. Lalu bersantai dan berfoto di belakang rumah sambil menunggu buka puasa.

Senior yang juga memegang peran penting sebagai nara sumber penelitian adalah M. Said Budairy. Mantan wartawan senior dan mantan anggota DPR-GR/MPRS ini pernah menjabat sebagai Sekretaris II Perwakilan Pimpinan Pusat IPNU di Jakarta. Sebagaimana yang kita tahu, dulu, kala IPNU masih berkantor

pusat di Yogyakarta, PP IPNU membentuk Perwakilan Pimpinan Pusat (PPP) IPNU yang beralamat di Jl.Kebon Sirih Barat Dalam No. 90 Jakarta Pusat. Pada tahun 1960, pak Said adalah salah satu orang yang turut mempelopori lahirnya PMII sebagai kelanjutan dari Departemen Perguruan Tinggi PP IPNU. Dalam sejarah PMII, Said Budairi adalah pencipta lambang PMII yang dipakai hingga kini. Untuk kepentingan wawancara, kami menemuinya di rumahnya, Mampang Prapatan Jakarta. Rumah tersebut pernah menjadi tempat yang sangat bersejarah dalam perjalanan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah NU, menjelang Muktamar ke-27 di Situbondo, anak-anak muda NU yang tergabung dalam Majelis 24 berdiskusi di rumah itu untuk merumuskan ”kembali ke khittah”. Meski kini sudah cukup tua beliau masih sangat sehat dan bahkan berjiwa muda. Saat kami datang, beliau menyambut sangat baik dan memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap penulisan ini.

Selanjutnya nara sumber utama yang kami temui adalah Drs. H. Muh. Ichwan Sam. Alumni PMII Yogyakarta yang menjadi lingkaran inti anak muda NU di Colombo ini juga merupakan mantan tokoh mahasiswa bimbingan pak Tolchah. Demikian juga Prof. Dr. H. Djahja Umar, MA yang juga menjadi “santri” Pak Tolchah pada masa di Yogya. H. Abdullah Syarwani, SH mantan Dubes RI untuk Lebanon, Drs. H. Adnan Harahap yang kami temui di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ta’mir Masjid Istiqlal Jakarta, Drs. H. A. Hafidz Ma’soem yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Dr. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Prof. Cecep Syarifuddin anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H. Imam Ansori Soleh, SH Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Kini orang-orang tersebut menjadi tokoh nasional.

Selanjutnya wawancara juga kami lakukan dengan Dra. Yis Sa’diyah Ma’sum, putri dari KH. Anwar Musaddad (teman Pak Tolcah, yang pernah menjadi Imam Besar Masjid Jami’ Syuhada’ Yogyakarta, Mantan Rektor IAIN Bandung, dan Pendiri Pondok Pesantren Al Musadadiyah Garut, Jawa Barat), KH. Ghozali Masruri (Ketua PP Lajnah Falakiyah), H. M. Sobich Ubaid (teman di PP IPNU), H. Zein Badjeber (Mantan Wakil Sekjen PBNU,

Panitia Munas Alim Ulama NU tahun 1983), Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid (Putri KH. Wahab Hasbullah), KH. A. Hamid Baidlowi (Suami dari ibu Aisyah Hamid Baidlowi), KH. Idris Abdul Hamid (Putra dari KH. Abdul Hamid Pasuruan), H. Chalid Mawardi, KH. Nuril Huda (yang kini menjabat sebagai Ketua PP LDNU), dan Prof. Dr. KH M. Tholhah Hasan yang saat kami wawancarai menjabat sebagai Wakil Rois Aam PBNU.

Sayang, di tengah hunting data ini kita kehilangan seorang senior generasi awal yang pernah menjadi ketua PW IPNU Jawa Barat, yaitu KH. Ilyas Ruchiyat. Dalam daftar nara sumber kami telah menjadikan mantan Rois Aam PBNU ini sebagai salah satu sumber penting. Namun belum menemuinya, kami mendapatkan berita bahwa Kyai Ilyas telah wafat. Kita berdoa semoga amal ibadahnya mengantarkannya ke sisi Tuhan. Kami juga tidak berkesempatan menemui mantan Ketua Umum PBNU KH. Idham Kholid, karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai. Hingga tulisan ini diterbitkan Pak Idham masih terbujur di tempat tidur dan tidak bisa diajak berkomunikasi.

Mengingat tokoh yang tengah kami teliti merupakan pakar hukum tata negara, maka untuk mendapatkan informasi dari sisi akademis kami harus menemui para pakar hukum tata negara yang bersentuhan secaraintelektual dengan pemikiran-pemikirannya. Untuk hal ini kami menemui Prof. Dr. Jimly Assidiqy, dan Prof. Dr. Sri Sumantri, SH, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, SH, dan Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH. Pak Jimly, selain pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, juga merupakan pakar Hukum Tata Negara yang tidak saja menggunakan, malainkan juga mengagumi pemikiran-pemikiran Pak Tolchah. Demikian juga Prof. Sri Sumantri merupakan orang yang mendalami dan sangat fanatik terhadap pemikiran Pak Tolchah. Selain bersentuhan secara intelektul Prof. Sri juga bersentuhan secara pribadi.

Salah satu perjalanan perburuan data yang menarik adalah di Yogyakarta, kota di mana Pak Tolchah mengabdikan hidupnya. Di kota itu, pertama-tama kami "sowan" dengan Bu Nyai Umroh Mahfudhoh, istri Pak Tolchah Mansoer, di rumahnya, kompleks Pondok Pesantren As-Sunny Darussalam, dusun Tempelsari Maguwoharjo Depok, Sleman. Untuk kepentingan penelitian, kami mengunjungi beliau dua kali. Perjalanan menuju tempat itu

menorehkan catatan lucu tersendiri. Untuk menempuh perjalanan, kami meminjam motor *butut* kepada seorang teman di Yogya. Di tengah perjalanan, bensin habis dan kami harus mendorongnya sampai cukup jauh. Meski dengan bercucuran keringat, akhirnya kami bisa sampai di kompleks yayasan tersebut. Pondok Pesantren As-Sunny Darussalam adalah sebuah pesantren yang dirintis oleh Pak Tolchah. Namun sebelum cita-cita itu terwujud, beliau sudah terlebih dulu dipanggil ke hadirat-Nya. Selanjutnya cita-cita pendirian pesantren itu dilanjutkan oleh sang Istri dan anak-anaknya. Kini, pondok pesantren tersebut diasuh oleh KH. Drs. Ahmad Fatah, menantu Pak Tolchah.

Di samping berwawancara, salah satu misi kami adalah menegaskan maksud penulisan biografi Pak Tolchah. Dengan sangat gembira cucu Mbah Wahab Hasbullah ini menyetujui dan memberikan dukungan data kepada kami. Banyak sekali data yang kami dapatkan dari Bu Umroh, sebab di samping sebagai istri, Bu Umroh adalah teman Pak Tolchah dalam berorganisasi. Sebagaimana kita ketahui, bu Umroh adalah pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Salah satu materi pembicaraan yang menarik di antara kami adalah tentang pertemuan antara Pak Tolchah dan Bu Umroh sehingga akhirnya menjadi suami-istri. Dengan tersipu-sipu malu, Bu Umroh bernostalgia tentang pertemuan pertamanya dengan Pak Tolchah saat pendirian IPPNU. Dalam wawancara ini beliau didampingi putrinya, Dra. Choirotun Chisaan, yang juga kami mintai informasi tentang sang ayah. Di sana kami juga menemui dan mengorek informasi dari KH. Drs. Ahmad Fatah, menantu Pak Tolchah yang dipercaya mengasuh pesantren.

Kebetulan, perjalanan perburuan data ini bertepatan dengan ulang tahun NU ke-82, 31 Januari. Sehingga kami memanfatakan momentum ini untuk sekaligus menapak tilas berbagai tempat bersejarah. Pada malam hari kami melakukan napak tilas kantor PP IPNU pertama di Jalan Gandean Yogyakarta. Daerah ini dekat dengan Malioboro, atau tepatnya di belakang lokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta. Kami telusuri masjid tua yang dulu menjadi pusat aktivitas IPNU pertama itu. Tentu, kini keadaannya sudah tidak seperti kala itu.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Pada pagi harinya perjalanan kami lanjutkan dengan mengunjungi rumah Pak Tolchah di Kompleks Colombo no. 21 Yogyakarta. Dulu, rumah itu adalah rumah dinasnya saat menjadi anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah tidak lagi menjabat, Pak Tolchah membeli rumah itu. Sehingga kini rumah itu menjadi milik pribadi. Rumah inilah, semasa pak Tolchah masih hidup, menjadi rumah yang sangat bersejarah. Di rumah inilah anak-anak muda NU berkumpul dan berdisikusi. Dengan terlalu seringnya anak-anak PMII menggunakan rumah itu untuk berkumpul, bahkan setiap hari, menjadikan rumah itu seakan menjadi markas anak muda NU. Ini wajar karena Pak Tolchah tak kenal lelah mendampingi dan menjadi guru bagi anak-anak muda NU ini. Pak Tolchah menjadi rujukan atas berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa, termasuk menjadi pengayom saat Orde Baru merepresi mahasiswa yang sering berdemo.

Di rumah itu pula kami berburu data literer dan dokumen-dokumen Pak Tolchah, termasuk foto-foto masa lalu. Untuk hal ini kami dibantu oleh mbak Entis, panggilan akrab Dra. Choirotun Chisaan, anak keenam Pak Tolchah. Karena dia juga konsen pada dunia penulisan, dia sangat tahu kebutuhan kami. Kami bersama mbak Entis *bongkar-bongkar* perpustakaan pribadi Pak Tolchah. Ribuan buku mengisi ruangan berukuran 4x5 meter itu. Sementara kitab-kitab pak Tolchah sudah diboyong ke rumah menantunya, Ahmad Fatah di pondok pesantren As-Sunny Darussalam. Di Colombo kami mendapatkan banyak sekali data dan informasi tentang masa lalu, baik dokumen-dokumen tentang NU, maupun karya-karyanya. Keterbukaan pihak keluarga terhadap kami sungguh sangat mengesankan. Kami haturkan terima kasih tak terhingga.

Kesan ini semakin mendalam ketika pada sore harinya, setelah kami bersama-sama menghadiri acara refleksi ulang tahun NU di Universitas Gadjah Mada, universitas dimana Pak Tolchah belajar, mBak Entis berkenan mengantar kami untuk berziarah ke makam pak Tolchah di Krapyak Yogyakarta. Makam Pak Tolchah berada di dalam kompleks pemakaman keluarga pesantran Krapyak, termasuk di dalamnya adalah makam KH. Ali Ma'syum dan KH. Munawir. Sungguh kesempatan yang sangat langka kami

dapat berkunjung dan ber*tawassul* kepada pendiri IPNU dan orang-orang sholeh itu. Selanjutnya, masih di Yogyakarta, perburuan data kami lanjutkan dengan mewawancari Dr. KH Thoha Abdurahman, mantan Ketua Pimpinan Cabang IPNU Magelang pada masa Pak Tolchah, Drs. KH. Ali As'ad, KH Abu Tauhid, dan Prof. Drs. KH. Prodjodikoro. Ketiganya adalah yunior dan "santri" pak Tolchah.

Kembali ke Jakarta. Salah seorang yang juga bersentuhan secara intelektual dan gerakan dengan pak Tolchah adalah KH. Abdurrahman Wahid. Gus Dur merupakan sumber kunci untuk menguak pemikiran Pak Tolchah tentang asas Pancasila. Dalam buku *"Gus Dur: Autorized Biography of Abdurrahman Wahid",* Gregg Barton merekam perdebatan antara Gus Dur dengan Tolchah Mansoer semalam suntuk tentang asas Pancasila pada Munas NU 1983 di Situbondo. Namun, ketika diminta konfirmasi tentang isi perdebatan itu, Gus Dur bungkam seribu bahasa. Beliau tidak berkenan sedikitpun berkomentar atau menginformasikan mengenai hal itu. "Saya tidak mau ngomong" tegasnya. Hal ini menimbulkan penasaran kami tentang sepenggal sejarah NU itu. Karena itu kemudian kami bersepakat untuk menguak sejarah dari pelaku sejarah kala itu. Menurut informasi, setidaknya ada dua tokoh NU penting yang tahu dan terlibat, yaitu KH. Muchit Muzadi dan H. Zain Badjeber. Pak Zain berhasil kami temui di Jakarta. Selain cerita, ada beberapa dokumen yang kami dapatkan untuk mendukung penelitian ini.

Untuk memenuhi kebutuhan data, selanjutnya kami meluncur ke Jawa Timur. Perjalanan perburuan data di sana sangat mengesankan. Pertama kali kami menuju Jember untuk *sowan* KH. A. Muchit Muzadi. Beliau merupakan salah seorang yang sangat penting dalam sejarah NU. Bahkan dapat dikatakan, Mbah Muchit saat ini adalah salah satu dari sedikit tokoh NU yang paham betul terhadap sejarah NU masa silam sekaligus menjadi saksi atas berbagai peristiwa penting di tubuh NU. Di samping karena juga pernah kenal Pak Tolchah secara pribadi, Mbah Muchit adalah saksi kunci yang kami jadikan sumber untuk menguak perdebatan tentang asas Pancasila. Hal ini karena pada masa transisi itu Mbah Muchit adalah sekretaris pribadi KH. Ahmad Sidiq, seorang yang dikenal sebagai perumuskan gagasan pemilihan Khittah 1926.

Dalam perjalanan dan sowan ini kami ditemani oleh seorang senior, yaitu Samanhudi, M.Si. Pria yang akrab dipanggil Simon ini adalah mantan salah satu Ketua PP IPNU masa khidmat 2003-2007. Kami sungguh berterima kasih pada beliau karena telah berkenan menjemput dan mengantar kami sowan Kiai Muchit. Karena lama tidak ketemu, kesempatan itu kami manfaatkan untuk bernostalgia tentang IPNU. Kami pun memutuskan untuk menginap di rumah pak Simon. Kesempatan ini kami manfaatkan sekaligus untuk bersilaturahmi dengan senior dan rekan-rekan IPNU Jember. Setelah selesai, pagi harinya, kami diantar Pak Simon ke terminal.

Dari Jember kami melanjutkan perjalanan ke Malang. Terlebih dahulu kami turun di Singosari. Di sana kami sowan KH. Munsif Nachrowi, tepatnya di Kampung Bungkuk Singosari. Putra mantan Ketua Umum PBNU KH. Nahrowi Thohir ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP IPNU pada masa Tolchah Mansoer periode terakhir. Beliau juga salah seorang yang diutus oleh PP IPNU untuk terlibat dalam pendirian PMII. Sunguh kami sangat terkesan dengannya. Meski putra seorang kyai besar, beliau berlaku sebagai orang biasa. Pak Munsif menerima kami dengan sepenuhnya. Setelah kontak sebelumnya, hari itu kami langsung menuju masjid di kompleks pesantren Miftahul Falah Bungkuk, sebuah pesantren yang didirikan oleh KH. Thohir, ayah Kiai Nahrawi Thohir. Kebetulan kami sampai di sana tepat pada waktu dhuhur. Kami langsung ambil air wudhu dan kemudian sholat di masjid tersebut.

Pada saat saya akan sholat, Pak Munsif menelpon saya dan bertanya: “Sudah sampai mana?” Saya menjawab, “Kami sudah di masjid”. Pak Munsif bertanya lagi, “Masjid mana?”. Jawabku, “Masjid Bungkuk?” Kami sungguh terkejut kalau yang telpon adalah orang yang baru saja sholat di sebelah kami. Ternyata Pak Munsif tiba-tiba ada di belakang saya dan berkata, “Sampean yang dari IPNU ya?” Kami sungguh malu, tak mengenalinya. Maklum saat itu kami baru pertama kali ketemu dengannya. Akhirnya kejadian itu menjadi bahan guyonan. Kebetulan waktu itu hujan lebat. Beliau menerima kami di masjid dan langsung menyuguhi kami makan siang di Masjid itu. Hujan belum juga reda. Pak Munsif mengajak kami untuk berziarah ke makam keluarganya di

belakang masjid. Di sana terdapat makam Kiai Thohir, KH. Nahrawi Thohir dan yang tak kami sangka, di pemakaman itulah KH. Masykur, mantan Menteri Agama yang pernah menjadi komandan Hisbullah, dimakamkan.

Hujan belum reda, Pak Munsif ngajak kami ke rumahnya menggunakan becak. Rumahnya terletak tidak jauh dari masjid tersebut. Di rumah, beliau hidup sendirian karena sang istri masih tinggal di Jakarta, menunggui cucunya yang masih sekolah di sana. Beliau sendiri baru pulang sekitar dua bulan. Kini beliau sudah memutuskan untuk hidup di kampung mengelola masjid dan pesantren warisan ayahnya. Sesampainya di rumah, kami langsung dipersilakan untuk beristirahat, dan tidak langsung berwawancara. Beliau memaksa kami untuk menginap di rumahnya. Awalnya kami menolak karena agenda wawancara masih sangat padat. Namun setelah "dipaksa" akhirnya kami menerima. Apalagi sebuah kehormatan dapat menginap di rumah senior dan putra kiai besar. Wawancara kami lakukan secara santai sambil ngobrol *ngalor-ngidul* mendengarkan nostalgianya di masa ber-IPNU dulu.

Yang lebih mengesankan, beliau menawarkan diri untuk mengantar kami berkeliling Malang untuk wawancara. Sungguh kami sangat tak enak diantar seorang senior dan orang yang terhormat. Tapi akhirnya kami tak dapat menolak, apalagi nyatanya kami juga butuh bantuan. Lebih tidak enak lagi ternyata beliau menyetir mobil sendiri untuk mengantar kami. Kami bertiga sore itu meluncur ke Malang. Pertama kali kami sowan keluarga (alm.) KH. Utsman Mansoer, kakak Pak Tolchah. Di rumah Jl. Selayar Malang itu, kami bisa bertemu langsung dengan ibu Nyai Hj. Fathonah, istri Pak Utsman yang masih cukup komunikatif untuk diwawancarai. Demikian juga anak-anaknya yang berarti para keponakan Pak Tolchah, salah satunya Nur Diana, sang putri terakhir. Keluarga Pak Utsman itu juga mengapresiasi upaya kami dan berkenan memberikan banyak informasi dan foto-foto keluarga.

Setelah menjelang malam, kami memutuskan untuk menunda perburuan berikutnya. Kami pulang ke Singosari lagi, ke rumah Pak Munsif. Di tengah perjalanan pak Munsif ngajak kami makan sate di Malang. Sungguh beliau seperti anak muda yang berkenan jaduman sambil makan sate dan berfoto-foto.

Sesampainya di rumah, kami menemani Pak Munsif nonton TV sambil ngobrol-ngobol tenang IPNU dulu dan kini. Kami mendapatkan banyak sekali motivasi dan spirit untuk mengabdikan diri melalui IPNU. Pengalaman-pengalamanya dalam berorganisasi menjadi inspirasi bagi kami dalam berorganisasi. Demikian juga perlakuannya kepada anak muda sungguh mengagumkan. Beliau mengakui tidak pernah sungkan untuk bergaul dan belajar dari anak muda. Cara beliau menerima, memperlakukan dan menghormati kami sungguh menjadi contoh berharga, terutama bagi para penerusnya.

Dukungan, apresiasi dan kebaikan Pak Munsif masih kami rasakan pada hari berikutnya. Meskipun sudah kami tolak, beliau tetap kembali mengantarkan kami untuk melanjutkan wawancara. Kali ini dengan ibu Hj. Khusnul Khotimah, kakak sepupu Pak Tolchah. Mantan pengurus PP Fatayat NU ini tinggal di kampung Kidul Pasar Malang, tempat di mana Pak Tolchah lahir dan dibesarkan. Rumahnya berdekatan dengan rumah tempat Tolchah lahir. Sehingga kami pun berkesempatan untuk melihat rumah itu, namun kini telah dipugar. Jadi sudah tidak otentik lagi. Kampung Kidur Pasar ini kini dikenal dengan nama Jl. Prof. Moh. Yamin. Letaknya di sebelah selatan Pasar Besar Malang, sebuah pasar di mana Pak Mansoer, ayah Pak Tolchah berdagang kala itu.

Sebenarnya sebelum kami pulang, Pak Munsif kembali menawari kami untuk jalan-jalan ke obyek wisata Batu. Namun karena keterbatasan waktu dalam hunting, kami menolak. Akhirnya beliau mengatarkan kami ke terminal Malang untuk melanjutkan perjalanan ke Nganjuk. Kami berpisah di teminal dengan ungkapan keharuan yang luar biasa. Dalam kesan kami, sungguh kini tidak mudah kita menemukan orang apalagi senior dan putra kiai besar sebaik Kiai Munsif Nahrawi. Dalam pejalanan kami merenung, ternyata masih ada senior yang penghormatan dan apresiasinya kepada yunior sebegitu besar. Atau memang umumnya, para aktivis kala itu memang memilik karakter yang sama, tidak seperti sekarang. Selanjutnya kami akan membukikan hal itu di Nganjuk.

Dari Malang, kami meluncur ke Nganjuk untuk bertemu dan mengorek data dari KH. Djamaluddin Abdullah Sadjad. Beliau adalah salah seorang pengurus IPNU generasi awal yang masih

tersisa. Di Nganjuk, kini beliau mengelola sebuah pesantren kecil benama Al-Halim. Tenyata kami sudah sangat ditunggu-tunggu. Setelah ketemu, belia menyatakan kegembiraaanya disambangi pengurus PP IPNU sekarang. Bahkan berita kedatangan kami sudah disampaikannya kepada pengurus PC IPNU Nganjuk, sehingga beberapa menit setelah kami sampai di rumahnya, ketua dan jajaran pengurus IPNU Nganjuk datang untuk bersama-sama sowan. Kami tidak lansung mewawancarainya. Kami sengaja memberikan waktu kepadanya untuk bercerita dan bernostalgia tentang IPNU masa lalu. Di tengah nolatalgia itulah kami mengarahkan pada pembicaraan tentang pak Tolchah. Meski tidak lama kami di sana, banyak juga informasi yang kami dapatkan. Saat akan berpamitan setelah mahgrib, Pak Jamaluddin setengah memaksa kami untuk menginap. Namun karena kami dikejar waktu dan harus segera ke Jakarta, maka tawaran itu kami tolak.

Nganjuk menjadi akhir perjalanan perburuan data di Jawa Timur. Dari seluruh perjalanan ini bukan saja data yang kami dapatkan, tetapi banyak sekali pelajaran kearifan dan nilai-nilai yang kami dapatkan dari para *founders* dan para pengurus IPNU terdahulu. Perjalanan ini menyadarkan pada kami betapa pentingnya mengunjungi senior. Bukan saja untuk kepentingan silaturahim, melainkan mengupayakan persambungan sejarah, nilai dan cita-cita agar apa yang kita lakukan sekarang tidak tercerabut dari sejarah dan cita-cita para pendiri IPNU. Dari pengalaman perjalanan itu, para senior sesungguhnya sangat terbuka dan sangat gembira serta merasa terhormat jika dikunjungi oleh yuniornya. Mereka umumnya masih ingin dan mengakui sebagai bagian dari IPNU hingga ini.

Untuk memperkaya, kami juga mewawancari Prof. Dr. Machasin, MA yang kini menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Agama RI. Beliau adalah santri yang turut dibesarkan oleh Pak Tolchah. Untuk menguak kehidupan Pak Tolchah selama menempuh studi S.1 di UGM kami juga berkesempatan meminta informasi dari Iskandar Tirtabrata, SH. Beliau adalah teman kuliah Pak Tolchah di Fakultas HESP UGM, kini tinggal di Sokaraja Banyumas. Untuk melengkapi data tentang kiprah Pak Tolchah selama menjadi pengurus PBNU, kami mendapatkan informasi dari Dr. H. Andi Jamaro Dulung, salah

seorang Ketua PBNU. Saat masih aktif di PMII, ia pernah menemani Pak Tolchah ketika berkunjung ke Makassar Sulawesi Selatan.

Perjalanan penelitian ini semakin panjang. Buku yang sedianya akan dilaunching pada Harlah IPNU, terpaksa harus ditunda, karena banyak data yang harus kami kayakan dan beberapa informasi yang harus kami konfirmasikan. Untuk kepentingan ini kami kembali menemui Fajrul Falaakh untuk mengonfirmasi beberapa data penting. Pada pertemuan yang kedua ini Mas Fajrul lebih apresiatif. Kami berkesempatan ngobrol panjang sambil makan siang di rumahnya di Kramat Jati Jakarta Timur. Hal yang sama juga kami lakukan dengan Mbak Entis di Yogyakarta. Sebagai salah satu etika dalam penelitian tokoh, kami juga perlu membaca ulang seluruh naskah bersama keluarga. Untuk ini kami bertemu dan kembali berdiskusi dengan Mas Romy, panggilan akrab putra bungsu Pak Tolchah, Muh. Romahurmuziy.

Setelah naskah dipandang lengkap, perjalanan perburuan ini diakhiri dengan pertemuan dengan Prof. Dr. KH.M. Tholhah Hasan, yang kami minta untuk memberikan kata pengantar. Kami menemuinya di rumahnya Perumahan Kota Wisata Cibubur. Wakil Rois Aam PBNU ini berkenan memberikan kata pengantar. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Untuk mengakhiri seluruh tulisan buku ini, Ketua Umum PP IPNU Idy Muzayyad berkenan memberikan catatan akhir. Kami ucapkan terima kasih kepadanya.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kepada pihak keluarga, seluruh nara sumber dan para pendukung penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang berkenan memberikan tulisan dalam buku ini, di antaranya: Dr. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si., Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Prof. Dr. Sri Soemantri, SH, H. Abdullah Syarwani, SH, Drs. H. Slamet Efendy Yusuf, M.Si., Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, H. Said Budairy, Prof. Dr. Machasin, MA, dan Prof. Dr. Yahya Umar, Ph.D.

Kami juga berterima kasih banyak kepada Direktur PP Lakpesdam NU, Ibu Lilis Nurul Husna yang telah memfasilitasi kami berdiskusi dan memfinalisasi penulisan di kantor PP

Lakpesdam, Jl H. Ramli Jakarta Selatan. Dengan ini kami juga memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang turut membantu penelitian ini, di antaranya adalah Muhamad Imron dan M. Yasin yang membantu mengumpulkan data, Abdul Ghofar yang telah turut membantu menemukan beberapa sumber penting, Dzul Fahmi Marjohan yang telah memfasilitasi suatu diskusi dan lain-lain. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Sahabat Hamzah Sahal yang telah menyempatkan menemani beberapa kali diskusi.

Ucapan terima kasih juga patut kami sampaikan kepada Ketua Umum dan rekan-rekan semua pengurus PP IPNU yang mendukung dan mengapresiasi penulisan dan penerbitan biografi ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Penerbit *LKiS* yang berkenan menerbitkan biografi ini. Semoga kontribusi dan dukungan semua pihak tersebut menjadi amal yang bermakna dan dibalas oleh Allah SWT.

Sepenuhnya kami sadar, penelitian dan penulisan biografi ini masih sangat jauh dari harapan. Untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kami berharap penerbitan biografi ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam pengembangan keilmuan sebagai rujukan ilmiah, maupun sebagai bahan refleksi untuk menumbuhkan inspirasi bagi generasi-generasi kini dan mendatang. Selamat membaca....[]

Jakarta, 3 Mei 2009
Penulis

PENGANTAR
Menyelami Sang Intelektual Kiai
Oleh: Prof. Dr. KH. Moh. Tholhah Hasan

Julukan "intelektual kiai" tampaknya sangat tepat dilekatkan pada sosok Prof. Dr. KH Moh. Tolchah Mansoer, SH. Ia merupakan *prototype* generasi awal intelektual NU yang secara akademis menempuh jalur pendidikan umum, namun juga memiliki minat dan kemampuan yang tinggi dalam ilmu keislaman secara otodidak. Sebelumnya tradisi intelektual di lingkungan NU lebih banyak ditempuh hanya melalui pendidikan pesantren. Mengenyam pendidikan di perguruan tinggi umum ternama kala itu merupakan barang langka di lingkungan nahdliyin.

Mas Tolchah, demikian saya memanggil Moh. Tolchah Mansoer, terhitung orang yang konsisten dan tekun dalam mendalami suatu ilmu. Dengan menempuh studi hukum tata negara di Universitas Gajah Mada (UGM) dari jenjang S.1 hingga program doktoral, Mas Tolchah mengantarkan dirinya menjadi pakar hukum tata negara ternama di Indonesia. Sebagaimana dicatat dalam buku ini, Ia adalah doktor pertama di lingkungan NU, sekaligus doktor hukum tata negara pertama di UGM. Bahkan, dalam kancah nasional, Tolchah Mansoer merupakan pakar hukum tata negara generasi kedua. Ia telah banyak menelorkan karya-karya penting yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian dan pengembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Sebagai seorang doktor hukum tata negara, Mas Tolchah menguasai keilmuan tersebut sebagaimana sarjana-sarjana hukum lainnya. Namun, yang membedakannya dengan akademisi lain adalah bahwa ia juga merupakan seorang kiai. Mas Tolchah Mansoer menguasai kitab kuning dan pengetahuan-pengetahuan agama Islam dengan baik dan sempurna, mulai dari aqidah, fiqih, akhlaq dan lain sebagainya. Sampai akhir masa hidupnya ia menghabiskan waktu dengan berdakwah dan mengajarkan ilmu agama kepada para mahasiswa, ustadz, dosen dan masyarakat pada umumnya. Kombinasi dua bidang inilah yang menjadikannya sebagai sosok istimewa.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Bagi NU, Tolchah merupakan aset yang tak ternilai. Ia telah melakukan apa yang dulu selalu diidolakan oleh para kyai, yaitu menjadi intelektual-kyai. Ungkapan ini sudah ada jauh sebelum kita sendiri bergerak dalam pengembangan intelektualitas itu sendiri. Intelektual kyai bisa bermakna intelektual kyai sebagaimana bahasa aslinya, bisa berarti kyai intelektual, kyainya intelektual, atau intelektualnya kyai. Namun keempat makna di atas, menurut saya, bisa semuanya benar melekat bersama-sama bila kata 'intelektual kyai" tersebut dialamatkan kepada Mas Tolchah.

Di sinilah, Mas Tolchah, bagi para kiai NU bukanlah sosok asing. Terlebih, perjalannnya yang panjang dalam jam'iyyah NU menjadikan sosok yang satu ini sebagai sosok yang tak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan organisasi tradisional ini. Dedikasinya dimulai dengan merintis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sebagai organisasi pelajar NU, hingga aktif dalam Syuriyah PBNU. Namun, sayang, sejarah formal kita memang tidak cukup menonjolkan peran dan kiprah tokoh organisatoris, politisi, intelektual dan kiai yang satu ini. Namun, saya telah mengenalnya secara cukup dalam dan merasakan Mas Tolchah sebagai sosok penting.

Saya pertama kali mengenalnya jauh sebelum saya menetap di Malang. Saya mengenalnya melalui organisasi, kerena kita sama-sama aktif di IPNU. Saat itu saya aktif di IPNU Jombang sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kader, sedangkan Mas Tolchah adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU pertama. Secara pribadi saya juga mengenal baik keluarga beliau di Malang. Bahkan kakaknya –Usman Mansoer- bersama-sama saya telah mendirikan Universitas Islam Malang (UNISMA).

Sebagai sesama kader IPNU, saya bisa merasakan beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Mas Tolchah. Dalam pendiriannya, IPNU akan dijadikan sebagai wadah bagi santri, pelajar umum dan mahasiswa. Karenanya, keberadaan IPNU di pesantren adalah sesuatu yang penting. Namun, pada awalnya tidak semua pesantren mau menerima keberadaan IPNU karena sebagian besar anggota IPNU adalah anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah formal. Penolakan ini terjadi karena tidak semua pondok pesantren memiliki sekolah formal. Mas Tolchah sebagai Ketua

Umum terus berupaya sekuat tenaga agar IPNU bisa diterima di pesantren. Cita-cita Mas Tolchah bahawa IPNU merupakan wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan santri NU, terus ia perjuangkan tanpa mengenal lelah.

Melalui IPNU Mas Tolchah telah menggoreskan sejarah pergerakan pelajar nahdliyin. Dengan jalan yang berliku dan penuh tantangan, ia telah berhasil meletakkan dasar-dasar ideologis dan organisatoris bagi oganisasi itu. Kini, organisasi itu menjadi medan kaderisasi bagi NU di masa mendatang. Mas Tolchah tegas berpendirian bahwa IPNU harus menjadi ajang kaderisasi bagi generasi mendatang, sambil terus mendorong para kader untuk menekuni pendidikan dan pada saat yang sama juga terjun dalam masyarakat untuk melakukan pengabdian yang nyata. Komitmen keorganisasian itu selanjutnya melekat dan menjadi spirit bagi Mas Tolchah dalam menelusuri medan perjuangan selanjutnya.

Peran politik yang ia mainkan selanjutnya dengan duduk sebagai anggota DPRD Yogyakarta dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) Propinsi DIY, dilakukan dengan semangat pengabdian yang sangat tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan ia menerjunkan diri sebagai akademisi. Hingga masa tuanya, ia dikenal sebagai seorang akademisi ternama dalam bidang ketatanegaraan sekaligus kiai yang pengetahuan keagamaannya mendalam, tapi sangat terbuka dan moderat. Pemikiran keagamaannya yang progresif tanpa meninggalkan konservatismenya, telah membuat Mas Tolchah dianggap sebagai ulama yang diidam-idamkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Kenyataan inilah yang menyebabkan ia diusulkan menjadi Menteri Agama, menggantikan KH. Muh. Dahlan setelah Pemilu 1971. Saat itu ada beberapa tokoh intelektual NU yang muncul, antara lain Mr. Kusnu, Tolchah Mansoer, Subhan ZE, Yahya Ubaid, dan Mahbub Junaidi. Dari beberapa tokoh di atas, saya memandang Mas Tolchah mempunyai kelebihan dan tipologi yang berbeda dengan yang lain, karena dia menguasai kitab kuning dan berbagai masalah kepesantrenan di satu sisi, dan menguasai hukum tata negara sesuai dengan bidang akademiknya di sisi yang lain. Namun, karena realitas politik di mana NU digusur dari kancah politik dan pemerintahan, NU gagal mengusungnya menjadi Menteri Agama.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Ada beberapa sikap dan pandangan Tolchah Mansoer yang turut mempengaruhi pemikiran saya sampai sekarang. Salah satunya, ketika lulus dari pesantren Tebuireng Jombang, saya tidak melanjutkan ke IAIN atau sekolah agama lainnnya, tetapi memilih bidang umum yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka (UNMER) Malang dan Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan Universitas Brawijaya (UNIBRAW). Seperti pendapat Mas Tolchah, keputusan ini saya ambil karena menyadari bahwa di lingkungan NU masih sangat langka kader-kadernya yang memiliki latar belakang pendidikan umum.

Di samping peran sosial dan intelektualnya, kekaguman saya sebagai yuniornya terhadap sosok Mas Tolchah adalah tentang karakter dan watak kepribadiannya. Saya memandang Tolchah Mansoer sebagai sosok yang santun dan *low profile*. Ia bisa menempatkan diri dengan siapa dia bicara. Ia biasa berbahasa dengan bahasa ulama dan santri, namun pada saat dia berada pada lingkungan kaum intelektual, dia bisa menampilkan diri sebagai intelektual. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang sangat bersahaja. Meskipun telah banyak menduduki jabatan politik, generasi seperti Tolchah Mansoer tidak banyak terkontaminasi dengan kemewahan dan ambisi mengejar kedudukan. Perjuangan masih merupakan 'ikon" dalam kehidupannya.

Buku ini sangat penting dibaca untuk menyelami sosok Tolchah Mansoer yang merupakan intelektual sekaligus kiai. Dengan membaca sejarah dan pengalaman hidupnya, kita tidak hanya tahu, melainkan bisa meneladani dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam perjuangan kita di masa kini dan mendatang. Saya mengakui sepenuhnya, bagi NU Mas Tolchah Mansoer adalah aset berharga yang telah berjasa banyak mulai dari peletakan dasar-dasar gerakan pelajar dan kaderisasi NU hingga pembaruan pemikiran dan arah organisasi NU. Karena itu, saya sangat bergembira atas diterbitkannya buku biografi ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi generasi kita dan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks.[]

Jakarta, 29 April 2009

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT....iii
PENGANTAR PENULIS....v
PENGANTAR Menyelami Sang Intelektual Kiai....xxii
DAFTAR ISI....xxv
BAB I Pendahuluan....1
A. Landasan Pemikiran....1
B. Memahami Sang Tokoh....7
C. Metode Penelitian....10
D. Model dan Sistematika Penulisan....15
BAB II Jalan Panjang yang Terukur....19
A. Berawal dari Jagalan....19
B. Idealisme Anak Muda....24
C. Persemaian Pengetahuan dan Politik....26
D. Mendidik dengan Cinta....30
E. Ritme Kehidupan yang Teratur....34
F. Mewakafkan Hidup untuk Umat....38
G. Dedikasi Sampai Akhir....44
BAB III Menapaki Dunia Gerakan Sosial-Politik....49
A. Merintis Organisasi Pelajar NU....52
B. Tolchah, IPNU dan PMII....77
C. Memasuki Medan Politik....90
D. Kampus yang Kian "Sempit"....95
E. Fenomena Colombo 21....108
F. Menekuni Dunia Dakwah....113
G. Situbondo: Khittah NU dan "Asas Tunggal"....117
BAB IV Intelektual Sejuta Khasanah: Dari Hukum Tata Negara, Demokrasi, HAM, hingga Pendidikan Pesantren....136
A. Pakar Hukum Tata Negara Generasi Kedua....138
B. Negara, Hukum, dan Pemerintahan....150
C. Demokrasi dan Proses Ketatanegaraan Indonesia....155
D. Kekuasan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif....172
E. Konstitusi Negara....177
F. Umat Islam dan Pancasila....183
G. Islam dan Hak Asasi Manusia....188

H. Kesejahteraan Sosial 196
I. Amar Ma'ruf Nahi Munkar 198
J. Islam dan Kesehatan 200
K. Pendidikan Pesantren 205
BAB V Moh. Tolchah Mansoer: Potret Ideal Generasi Bangsa 209
A. Kiai Nan Cendekia 215
B. Sosok Ideal Kaum Santri Masa Kini 219
C. Santri, Akademisi, dan Politisi 224
D. Prototipe Pemimpin NU Ideal 227
E. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Generasi Kedua 231
F. Sang Pencinta Burdah 234
G. Pelopor Gerakan Pelajar NU 237
H. Tokoh yang Terlupakan 242
I. Pakar Hukum Tata Negara Progresif 246
J. Tempat Mencari "Suaka" 250
CATATAN PENUTUP "Melahirkan Kembali" Pak Tolchah 254
DAFTAR SUMBER 261
TENTANG PENULIS 272

BAB I
Pendahuluan

A. Landasan Pemikiran

Dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU lain, nama Moh. Tolchah Mansoer barangkali tidak terlalu populer di mata masyarakat umum, kecuali di kalangan tertentu yang bersentuhan dengan pemikiran dan warisan gerakannya. Hal ini terjadi karena sejarah formal tidak mencatat dan memberikan perhatian pada sosok ini. Sejarah NU saja lebih banyak mencatat sosok politisi dan kiai yang menduduki posisi politik dan struktural yang strategis. Mengingat Tolchah Mansoer bukan elit politik NU, maka perannya tidak ditonjolkan. Sejarah NU belum banyak mencatat tokoh-tokoh intelektualnya seperti Tolchah Mansoer. Banyak orang mengatakan, sosok ini sebagai tokoh yang terlupakan.

Memang, ia pernah menduduki posisi puncak di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sebagai pendiri sekaligus ketua umum pertama. Namun, entah mengapa tidak banyak literatur yang menulisnya sebagai perintis gerakan terpelajar di kalangan tradisionalis ini. Penjelasan sementara memang dapat diberikan di sini, yaitu bahwa sisi politik lebih dominan dalam literatur-literatur sejarah NU. Meski pernah menjadi seorang politisi muda di Yogyakarta, kecenderungannya menjadi akademisi tampak meminimalisasi popularitasnya. Banyak orang menduga, tenggelamnya tokoh penting ini terjadi karena ia memilih tinggal di Yogyakarta, bukan di Jakarta sebagai pusat kekuasaan.

Katidakhadirannya dalam berbagai literatur sejarah NU bukan berarti sosok ini tidak berperan. Justru, peran yang dimainkan oleh Tolchah Mansoer tidak kalah penting dengan tokoh-tokoh elit NU di Jakarta. Sejak masa kecil, saat masih tinggal di Malang, Tolchah adalah aktivis di berbagai organisasi perlawanan terhadap kolonialisme. Bekal pengalaman dan semangat itu selanjutnya mengantarkannya pada aktivitas kemahasiswaan di Yogyakarta. Peran penting dalam sejarah NU, adalah ketika ia dan beberapa mahasiswa NU yang kala itu masih sangat sedikit, merintis organisasi pelajar yang

selanjutnya diberi nama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, pada tahun 1954. Ia lantas didaulat menjadi ketua umum pertamanya.

Tidak hanya itu, Tolchah Mansoer adalah sosok aktivis dan intelektual yang konsisten memegang prinsip dan idealisme. Di tengah arus deras kepentingan politik yang mulai memasuki dunia gerakan sosial kala itu, Tolchah tetap memegang teguh dan memperjuangkan idealisme yang diyakininya. Dalam kehidupan sehari-hari Tolchah juga dikenal sebagai orang yang sederhana. Meski pernah dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis pada pemerintahan daerah, Tolchah tetap mengedepankan kehidupan yang bersahaja. Kebiasaan dan karakter ketokohan seperti itulah yang saat ini semakin jarang dan dengan demikian harus dijadikan teladan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Meski lahir dari keluarga biasa, aktivitas gerakannya ini mengantarkannya menjadi politisi muda NU di Yogyakarta pada tahun 50-an. Ia menjadi anggota DPRD Yogyakarta di saat masih kuliah. Perjalanan politiknya menanjak ketika ia dipercaya mewakili NU untuk duduk menjadi anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH), sebuah ”kabinet” di bawah Gubernur Yogyakarta. Lembaga yang dianggotai oleh unsur-unsur partai poltik ini bertugas sebagai pelaksana pemerintahan provinsi.

Lepas menjadi aktivis dan politisi, darah gerakannya tidak padam. Sembari menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga, ia membina gerakan anak-anak muda NU di Yogyakarta. Rumahnya di Kompleks Colombo 21 selanjutnya menjadi markas gerakan muda di kota pelajar itu. Mahasiswa dan kalangan aktivis muda NU kerap berdiskusi di rumahnya, dan menjadikannya sebagai rujukan dari berbagai masalah politik dan kemasyarakatan. Tidak hanya itu, ia dijadikan sebagai pelindung dari gerakan kritis anak-anak muda itu. Tidak jarang, ia sampai dituduh menjadi “beking” para demonstran yang melawan rezim otoriter Orde Baru. Karena itulah oleh para “santri”nya, ia dijuluki *“good father”.*

Di samping semua jabatan politik itu, jati diri Tolchah yang sesungguhnya adalah seorang intelektual. Pendidikan umum yang dienyamnya pada akhirnya menjadikan pria

keturuan Madura ini sebagai doktor pertama di lingkungan NU. Bisa kita bayangkan, betapa hal ini merupakan lompatan luar biasa, di saat NU sebagai organisasi tradisionalis masih miskin intelektual yang berbasis pada pengetahuan umum. Sejak muda, Tolchah menjatuhkan pilihannya pada studi ilmu-ilmu umum dengan bersekolah di sekolah umum. Ketekunanannya pada disiplin keilmuan yang dipelajarinya, pada akhirnya menjadikannya sebagai pakar hukum tata negara. Bahkan, ia dicatat sebagai sebagai salah satu ahli hukum tata negara generasi kedua, segenerasi dengan ahli lain seperti Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., Prof, Dr. Sri Sumantri, S.H. dan Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, S.H. Namun demikian, di kalangan ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara saat ini, ia kurang dikenal mungkin hanya karena bukan merupakan tenaga pengajar di fakultas hukum, melainkan di IAIN Yogyakarta. Padahal ia merupakan salah satu tokoh yang produktif menulis buku, termasuk buku-buku Hukum Tata Negara. Sayang, karena persoalan politik, gelar profesornya dihambat hingga ia wafat.

Tidak hanya itu, di samping menekuni ilmu umum, komitmennya yang tinggi pada studi keislaman yang dipelajarinya secara otodidak mengantarkannya menjadi intelektual muslim terdepan pada masanya. Selain dikenal sebagai seorang intelektual dan organisator yang handal, KH. Moh. Tolchah Mansoer juga dikenal sebagai ulama yang kharismatik. Meskipun tidak *nyantri*, dalam pengertian yang wajar, penguasaannya dalam ilmu keislaman sangat mengagumkan. Konon, ia mempelajari ilmu agama secara otodidak. Kealimannya inilah yang mengantarkannya menjadi seorang kiai tersohor pada masanya. Ia menjadi tempat belajar agama bagi para mahasiswa, dosen, ustadz bahkan kiai-kiai di Yogyakarta. Garasi mobil di rumahnya komplek Colombo 21 disulap menjadi ”pesantren”.

Barangkali orang juga tidak menyangka jika ia juga turut memberikan kontribusi dalam sejarah perjalanan NU. Dalam momen sejarah penting pemulihan khittah NU 1926 dan penerimaan NU atas asas tunggal Pancasila, ia tak absen. Bahkan, banyak orang mengatakan, Tolchah merupakan salah

satu tokoh kunci di balik keputusan bersejara itu. Ia turut memberikan pencerahan tentang pentingnya khiitah dan penerimaan asas Pancasila. Meski tidak kita temukan dalam sejarah formal NU, terdapat fakta sejarah di mana saat Munas Alim Ulama NU tahun 1983 menemui kebuntuan, Tolchah tampil dengan tidak hanya menjelaskannya dari perspektif Islam, melainkan dengan kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara, ia merupakan satu-satunya orang yang memberikan perspektif dari sisi ketatanegaraan tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Dengan penjelasan inilah, kebuntuan tersebut diatasi. Perdebatan semalam suntuk dalam Munas tersebut antara Kiai Tolchah dengan Gus Dur juga menjadi catatan yang menunjukkan bahwa peran kiai ini tidak kecil. Konon, perdebatan itulah yang menjadi kunci penting bagi perubahan pandangan NU tentang Pancasila dan negara.

Dalam forum itu bersama KH Masykur, KH Achmad Siddiq dan H Imron Rosyadi, SH, Dr. KH Tolchah Mansoer, SH bertindak sebagai pendamping sidang Komisi III yang membahas Materi Pemulihan Khittah. Peran ini dilanjutkan pada Muktamar NU ke-27 yang mengukuhkan keputusan Munas sebelumnya. Dalam Muktamar yang juga diselenggarakan di Situbondo tersebut Tolchah bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi Khittah dan Organisasi, mendampingi KH. Chamid Wijaya yang bertindak sebagai ketua. Posisi ini tampaknya dipercayakan kepada Tolchah dengan maksud untuk mengawal keputusan Munas agar bisa dikukuhkan dalam Muktamar, karena dalam Munas Tolchah telah membidangi materi ini.

Peran multidimensi yang dimainkan olehnya membuat Tolchah kerap dijuluki sebagai aktivis-politisi-intelektual-kiai. Di masa remaja ia adalah aktivis pelajar, di masa muda ia adalah politisi, sedang di masa tua ia adalah seorang kiai-intelektual. Julukan terakhir ini diberikan karena di samping ia adalah seorang kiai yang berpengaruh dan karismatik, ia adalah intelektual progresif yang kritis, dan berpengaruh. Bahkan hingga kini pikiran dan karyanya di bidang Hukum Tata Negara masih dijadikan rujukan bagi kajian-kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Bermodalkan ilmu tata negara sekaligus ilmu

keislaman yang matang, Tolchah mampu menganalisis dan memadukan ilmu agama sesuai disiplin ilmu yang ia miliki. Ia sangat bersemangat dalam memadukan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum ketatanegaraan. Tak salah bila ia dijuluki sebagai ulama plus.

Berangkat sebagai orang biasa, Tolchah hadir sebagai orang yang luar biasa. Inilah fakta-fakta yang menarik dari sosok ini. Sayang, minimnya dokumentasi sejarah dan data tentang kiprah KH. Moh. Tolchah Mansoer membuat sejarah seakan terputus. Generasi saat ini tidak banyak mengetahui kiprah, visi dan peran besar yang telah dimainkan oleh pendahulunya. Tak heran jika gerakan generasi muda NU saat ini banyak kehilangan inspirasi dan kehilangan suritauladan akibat tidak adanya dokumentasi tentang tokoh-tokoh besar yang gerakan dan perjuangannya terwarisi saat ini.

Buku ini hadir di hadapan pembaca untuk menelusuri kehidupan, aktivitas gerakan, dan pemikiran-pemikiran Prof. Dr. KH Moh. Tolchah Mansoer, SH secara lebih utuh dan mendalam. Dapat dikatakan, penelitian dan penyusunan biografi tentang sosok ini merupakan tanggung jawab para pewaris gerakannya. Terlebih, terbatasnya dokumentasi tentang tokoh penting ini membuat penyusunan biografi ini dipandang semakin urgen.

Buku hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan penelurusan tentang figur Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH yang memiliki peranan penting dalam atmosfir gerakan pelajar/pemuda dan perkembangan pemikiran di kalangan NU dan bangsa Indonesia pada umumnya, dalam berbagai dimensi. *Pertama*, riwayat hidup Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer sejak lahir pada tanggal 10 September 1930, hingga wafat pada 20 Oktober 1986. Lika-liku kehidupanya sangat menarik untuk dikaji, mengingat Tolchah lahir dari kalangan orang biasa, namun melejit menjadi tokoh pelajar, politisi dan intelektual terkemuka. Selain kesederhanaanya, ia juga dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegangi prinsip, meski berada dalam terpaan "badai" yang menerjang. Kecenderungan inteletualnya juga sangat unik. Sampai kini,

teramat sulit kita menemukan sosok yang matang dalam dua disiplin keilmuan secara bersamaan.

Kedua, aktifitas Moh. Tolchah Mansoer dalam dunia gerakan sosial, politik dan keagamaan. Hal ini meliputi aktifitasnya semenjak ia masih kecil, remaja, pemuda, hingga masa tua. Ada fase-fase yang menarik dalam diri sosok ini jika dikaitkan dengan perkembangan sosial. Pada masa kecil hingga remaja, ia aktif dalam berbagai gerakan pelajar, hingga pada tahun 1954 merintis berdirinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi pelajar yang bernaung di bawah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada masa muda, ia terjun dalam dunia politik menjadi wakil rakyat dalam usia yang masih muda. Jabatan politik yang pernah dipegangnya adalah anggota DPRD Yogyakarta dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di masa tua ia lebih banyak menekuni dunia keilmuan. Selan menjadi dosen dan pemimpin berbagai perguruan tinggi, Tolchah juga banyak menelorkan karya-karya penting. Tidak hanya itu, di akhir perjalannnya, ia adalah seorang kiai terkemuka.

Ketiga, pemikiran-pemikiran dan aktifitas keilmuan Prof. Dr. KH. Tolchah Mansoer, SH. Julukan ulama multidimensi tampak dari pemikiran-pemikirannya yang terbentang dari hukum tata negara, politik, hingga wacana keislaman. Keilmuan umumnya ditekuni melalui pendidikan formal hingga program doktoral. Sedangkan keilmuan agamanya diperoleh secara otodidak. Kedua disiplin ini terintegrasi membentuk pemikirannya yang utuh. Dalam melihat suatu persoalan, hampir selalu ia mendekatinya dengan dua pendekatan itu. Hal ini tentu sangat menarik untuk ditelusuri, tidak saja karena langkanya sosok semacam ini, melainkan juga karena pemikiran-pemikirannya sangat kritis terhadap kekuasaan. Buku yang diadapasi dari disertasinya yang berjudul *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia* (1970) dikenal sebagai hasil karya yang sangat berani.

Dengan tiga fokus di atas, buku ini penting untuk disajikan kepada khalayak pembaca. Penerbitan biografi ini setidaknya akan memberikan beberapa manfaat. *Pertama*,

Secara teoretis penerbitan ini dapat memberikan sumbangan berupa kajian sejarah yang ilmiah tentang kehidupan, kiprah dan pergulatan KH. Moh. Tolchah Mansoer baik dalam ranah gerakan sosial maupun pemikiran. *Kedua*, secara praktis, dokumentasi ilmiah yang mendalam tentang tokoh ini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi dan semangat gerakan kaum muda NU saat ini dengan berkiblat pada perjuangan Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH. Hal ini semakin menemukan urgensinya mengingat bahwa tokoh yang keberanian, kegigihan, konsistensi dan keikhlasannya seperti yang dimiliki olehnya kini sudah teramat jarang kita jumpai.

B. Memahami Sang Tokoh

Konsensus kesejarahan tentang keilmuan dan tradisi yang berhubungan dengan perkembangannya telah banyak dilakukan. Hal ini didasarkan pada banyaknya penelitian dan penelitian yang membahas tentang biografi, karya pemikiran maupun genealogi pengetahuan. Akan tetapi sejauh ini peneliti belum banyak menemukan hasil penelitian yang secara spesifik membahas riwayat kehidupan Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH secara utuh dan lengkap.

Ada beberapa karya yang patut direview dalam penelitian ini, di antaranya adalah skripsi berjudul *Moh. Tolchah Mansoer: Aktivitas dan Pemikirannya*. Penelitian yang ditulis oleh Hoiri ini merupakan tugas akhir di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN). Dalam penelitiannya tersebut, Hoiri menguraikan riwayat hidup sang tokoh. Selain itu juga mengkaji beberapa pokok pikirannya. Dengan demikian karya tersebut dapat menjadi *guide of reference* dalam penelitian ini untuk dikembangkan lebih jauh. Hal ini karena pada prinsipnya, skripsi tersebut masih terbatas. Jejaring intelektual dan aktivitas organisasi, serta visinya ke depan tentang kaum muda NU belum terekam dalam skripsi yang disusun tahun 1988 tersebut.

Karya berikutnya adalah *Kharisma Ulama*: *Biografi 26 Tokoh NU*. Buku yang diedit oleh Saifullah Ma'shum dkk. ini diterbitkan pertama kali tahun 1994 oleh Yayasan Saefuddin Zuhri. Buku tersebut merupakan kumpulan biografi singkat tokoh-tokoh NU, salah satunya adalah Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer. Meskipun sangat terbatas, karya ini

membantu mengkronologiskan riwayat hidup Tolchah Mansoer. Selain itu, juga terdapat kumpulan biografi berjudul *Kisah Teladan Sepanjang Sejarah*, yang ditulis oleh Abdul Razak Naufal. Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Huzaimi Bandung ini juga berisikan sejarah hidup Kiai Tolchah Mansoer. Tetapi ia menggunakan prespektif lain untuk membaca sang tokoh.

Berbeda dengan karya yang telah ada sebelumnya, penelitian dan penerbitan biografi ini berusaha menghadirkan sejarah Moh. Tolchah Mansoer dengan lebih detail dan utuh. Selain perjalanan kehidupannya, kajian ini memfokuskan pada dua hal lainnya. *Pertama*, kiprah dan dedikasinya dalam dunia gerakan, mulai dari gerakan pelajar, gerakan politik, hingga gerakan keagamaan. *Kedua*, pemikiran-pemikirannya yang terbentang dari mulai hukum tata negara, hubungan negara dan masyarakat, politik hingga wacana keislaman. Dengan demikian buku ini diharapkan menjadi jawaban dari terbatasnya karya-karya mengenai sang profesor sarungan tersebut.

Untuk membedah obyek penelitian ini, penulis meminjam sebuah pisau teori yang bertujuan untuk menelusuri beberapa hal yang terkait erat dengan seorang tokoh seperti riwayat pendidikan, pengaruh sebuah pemikiran, serta situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan di sini adalah teori biografis. Teori ini mengarahkan pada suatu usaha untuk menelusuri serta memahami dan mendalami kepribadian seseorang yang dirunut berdasarkan pengetahuan, latar belakang sosial dan kultural di mana tokoh tersebut dibesarkan; dan bagaimana proses pendidikannya.[1] Dengan menggunakan teori biografis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepribadian, riwayat hidup, perkembangan pemikiran, serta aktifitas perjuangan Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, khususnya sejarah deskriptif analitis yang dikembangkan oleh

[1] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia), 1992, hlm. 77

Koentjaraningrat.[2] Pendekatan ini mencoba menggambarkan genealogi para ulama dengan menganalisis sejarah hidup Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer berkaitan dengan pemikiran dan aktifitasnya. Menurut Jakob Oetama, suratan sejarah tidak bisa ditafsirkan hanya berlandaskan pada dimensi suara dari langit, akan tetapi suratan sejarah harus pula ditafsirkan secara reflektif-kritis, mendalam dan terus menerus.[3] Sejalan dengan hal tersebut, maka kajian ini juga merupakan bagian dari penelitian biografi.[4]

Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer sebagai bentukan dari realitas sejarah masa lalu memiliki dimensi yang cukup luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin diungkap melalui satu disiplin ilmu saja. Hal ini karena pribadi tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya pada saat itu. Oleh karenanya dalam upaya melakukan rekonstruksi sejarah saat itu, peneliti juga menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain sebagai alat analisis terhadap fakta dan realitas kesejarahan tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan politik, sosiologi, antropologi dan filologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghindari apa yang disebut *"a use and abuse of history?"*[5] sebagaimana yang

---

[2] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia), 1985

[3] Jakob Oetama, *Milinium Baru Dan Pancaroba Serba Dilema*, dalam JB. Kristanto, *1000 Tahun Nusantara* (Jakarta: Kompas), 2000, hlm. xvi

[4] Menurut Taufik Abdullah penelitian biografi mampu mendekatkan kita kepada gerak sejarah yang sebenarnya dan membuat kita lebih mengerti tentang pergumulan manusia dengan zamannya, yang diatur oleh pandangan hidupnya maupun harapan masyarakatnya. Lebih jelas lihat, Taufik Abdullah, "Mengapa Biografi", *Jurnal Prisma*, Agustus, 1977, hlm. 117. Sementara Sartono Kartodirdjo menilai biografi seorang tokoh lebih merupakan seni daripada ilmu. Menurutnya rekonstruksi biografi sangat memerlukan imajinasi yang besar agar dapat dibuat "sulaman" yang indah dari biodata yang tersedia. Sartono Kartodirjo, *Pendekatan.*. hlm. 76-77

[5] Istilah tersebut dimaknai sebagai metode atau cara pemahaman terhadap sebuah teks atau peristiwa sejarah yang utuh, biasanya sejarah

biasa terjadi dalam penulisan sejarah konvesional selama ini. Menurut Kartodirdjo, metode multidimensional/ interdisipliner tersebut sebagai sejarah komprehensif.[6]

Dalam pemahaman sejarah komprehensif, sejarah merupakan ilmu yang mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan membukanya melalui optik politik maupun budaya. Sejalan dengan itu, maka pemahaman atas fakta sejarah pada gerakan dan pemikiran Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer dapat dikaji secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian tidak akan muncul pemahaman yang parsial atas pribadi sang tokoh itu. Pemahaman yang muncul adalah pemahaman yang utuh.

C. Metode Penelitian

Dalam tradisi ilmiah, penelitian tentang riwayat hidup dan pemikiran seseorang disebut juga dengan istilah studi tokoh. Sedangkan studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, maka paradigma yang dibangun dalam studi tokoh mengikuti kaidah kualitatif. Dengan mangadaptasi paradigma Ritzer (1996), studi tokoh ini berada pada kuadran empat tingkat ke empat. Artinya, studi tokoh merupakan penelitian kualitatif yang "tinggi tingkatan"nya, karena memfokuskan pada orang tertentu sebagai unit analisisnya.[7]

Oleh karena studi tokoh merupakan penelitian kualitatif maka metode yang digunakan dalam penelitian ini juga metode yang bercorak kualitatif. Melalui metode kualitatif memungkinkan kita dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh secara pribadi dan melihatnya mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan

---

yang 'diciptakan' akan sarat kepentingan politis. Oleh karenanya sumber-sumber yang mendukung seorang sejarawan dapat dipilih sesuai dengan kepentingannya.

[6] Sartono Kartodirjo, *Pendekatan ...,* hlm. 87.

[7] H. Arif Furchan, MA, Ph.D, dan H. Agus Maimun, MA, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustakan Pelajar), 2005, hal. 18-19

berbagai pemikiran, karya, dam perilaku yang dijalaninya.[8] Dengan basis metode kualitatif, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian sejarah. Sementara, penelitian tentang sejarah merupakan sebuah kajian yang mendasarkan pada kerangka ilmu. Artinya, sejarah tidak dapat terlepas dari metode-metode ilmiah.

Dalam hal ini sejarah merupakan upaya rekonstruksi masa lalu yang terkait dengan mekanisme dan prosedur-prosedur ilmiah.[9] Dengan demikian untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan melalui proses menguji secara kritis peristiwa dan peninggalan masa lalu, kemudian didekonstruksi secara imajinatif melalui penulisan sejarah.[10]

Dasar utama metode sejarah adalah bagaimana meramu bukti-bukti sejarah dan saling menghubungkannya satu sama lain. Setelah ditemukan berbagai macam bukti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan kembali sesuai dengan imajinasi peneliti dan tetap berdasarkan atas data-data yang ada. Jadi, potongan peristiwa dan fakta sejarah menjadi penting untuk membantu merumuskan fakta sejarah sehingga terbentuk gambaran sejarah yang utuh dan jelas.

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber penelitian biografi ini dibagi dua, yaitu sumber tak tertulis dan sumber tertulis. Sumber tak tertulis dalam penelitian ini adalah sumber lisan. Sumber ini secara metodologis merupakan bahan inti sejarah.[11] Mengenai sumber lisan ditetapkan 44 narasumber yang menjadi penutur riwayat hidup Moh. Tolchah Mansoer. Sumber lisan ini diklasifikasikan berdasarkan periode waktu yang

[8] H. Arif Furchan, *Studi Tokoh...*, hal. 16

[9] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), hlm. 12.

[10] Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1969), hlm. 32.

[11] Dudung Abdurrahman, M.Hum, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, hal. 37

setidaknya dibagi menjadi tiga masa, yaitu sumber masa kecil, masa dewasa dan masa tua. Hal ini diperlukan untuk menjamin validitas data yang terkumpul.

Data lisan penutur sejarah tersebut dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dengan nara sumber dari pihak-pihak terkait, yaitu keluarga Moh. Tolchah Mansoer, teman-temannya yang masih hidup, para murid dan mahasiswa, yunior (generasi penerusnya), kolega dan para tokoh yang semasa dengannya. Dalam hal ini, ada tiga kota yang kami jadikan lokasi utama penelitian. *Pertama*, adalah kota Malang sebagai kota tempat kelahiran Tolchah Mansoer dan kehidupannya di masa kecil dan remaja, sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta. *Kedua*, adalah kota Yogyakarta, kota di mana Tolchah Mansoer dan keluarga menjalani hidup dan aktifitasnya, baik sebagai aktifis pelajar, akademisi, sampai menjadi seorang kiai dan pemuka masyarakat. *Ketiga*, adalah Jakarta sebagai ibu kota di mana keluarga, kolega, dan para muridnya berada. Kota-kota lain, seperti Jember, Nganjuk, Banyumas juga menjadi lokasi pendukung, karena di kota-kota tersebut juga terdapat orang-orang yang pernah dekat dengannya. Daftar nara sumber selengkapnya terlampir.

Sedangkan sumber tertulis, dalam arti sempit, disebut dengan dokumen. Adapun dokumen, dalam arti yang luas meliputi monumen, artefak, foto-foto, dan sebagainya.[12] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang antara lain berupa dokumen organisasi, peraturan perundang-undangan, naskah pidato, surat pribadi, foto dan berbagai dokumen lain, termasuk catatan, syair puisi dan lain sebagainya.

Di samping kedua jenis data di atas, untuk memotret kehidupan sang tokoh secara utuh dalam suatu konteks sosio-historis, peneliti juga melakukan *library research* terhadap buku-buku dan pustaka lain yang terkait dengan obyek penelitian, baik yang mengungkap kehidupan sang

[12] Dudung Abdurrahman, M.Hum, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, hal. 31

tokoh, maupun yang memuat konteks sosial-politik di mana Moh. Tolchah Mansoer lahir dan hidup. Khusus untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Moh. Tolchah Mansoer, peneliti juga mengkaji secara mendalam buku-buku karya KH. Tolchah Mansoer dan sumber kepustakaan lainnya.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengisahan tentang kehidupan seseorang yang telah berlangsung pada waktu yang telah lewat. Penelitian sejarah ini diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis dan bertanggung jawab secara akademik sesuai prosedur ilmiah, sehingga menghasilkan laporan sejarah tentang perjuangan dan pengaruhnya terhadap pola organisasi dan kemajuan pengetahuan di masyarakat. Dengan demikian diharapkan penulisan sejarah gerakan dan pemikiran Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer ini dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu untuk mengkaji sejarah masa lalu juga dibutuhkan ilmu bantu sebagai alat analisisnya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan ilmu sosial,[13] dan digunakan juga metode analisis situasional.[14] Dalam metode yang disampaikan Ibrahim Alfian tersebut dijelaskan, seorang peneliti sejarah harus mampu memberi interpretasi dan aksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Selain itu, seorang peneliti juga harus melakukan sebuah penelitian atas sumber/subyek sejarah.

Untuk merealisasikan metode tersebut diperlukan langkah-langkah atau tahapan dalam proses penelitian ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Heuristik*, yaitu suatu tahapan dalam pengumpulan data, baik tertulis maupun lisan yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik

[13] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan …,* hlm. 149.

[14] Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: UGM Press, tt), hlm.9-11.

wawancara dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, catatan, manuskrip, dan dokumen-dokumen yang ada. Dari berbagai sumber tersebut akan dicari sumber-sumber yang merupakan karya-karya tulisan Moh. Tolchah Mansoer dan tulisan orang lain, sehingga akan memberikan informasi yang 'original' dan tidak menimbulkan multi tafsir terhadap kajian serupa.

2. *Verifikasi*, yaitu menguji dan menganalisis data secara kritis. Kritik sumber ini dilakukan dengan dua cara yaitu ekstern dan intern. Kritik ekstern berusaha menilai jawaban terhadap apa, di mana, bagaimana, dan dari bahan apa penulisan sejarah tersebut. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keautentikan sumber. Sedangkan kritik intern berusaha mencari pembuktian yang sebenarnya dari sumber tersebut. Dengan kritik ini diharapkan dapat didapatkan validitas sumber sejarah, sehingga dapat menentukan fungsi dan jenis sumber (yaitu, apakah sumber primer maupun skunder dan apakah sumber sejarah ataupun sumber teoritis) yang digunakan dalam penelitian.
3. *Interpretasi*, yaitu menafsirkan fakta-fakta yang saling berhubungan dari data yang telah teruji kebenarannya. Tahap ini penting karena merupakan upaya untuk mengkronologikan sebuah peristiwa sejarah, sehingga menghasilkan konstruksi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti dan fakta sejarah tidak dapat menjelaskan apapun kepada kita tanpa dibarengi dengan tafsiran manusia.[15]
4. *Historiografi*, yaitu merupakan langkah terakhir dalam penelitian dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Historiografi ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam proses penulisan hasil penelitian dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat penulis. Setiap pembahasan

[15] William H. Frederick dan Soeri Soeroto (Peny), *Pemahaman Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 10

ditempuh melalui deskripsi dan analisis, dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa[16]

Di samping langkah-langkah di atas, penelitian ini juga berusaha menjaga kredibiltas data. Kredibilitas data adalah upaya untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang ditemukan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran.[17] Dalam penelitian ini, untuk menjamin kredibilitas data dilakukan dua metode, yaitu triangulasi dan pengecekan sejawat (*peer debrifing*).

Triangulasi dimaksudkan untuk mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai perbandingan.[18] Triangulasi dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dengan sumber lain, baik sumber lisan, tertulis, maupun pustaka. Langkah ini dilakukan terutama pada bagian-bagin tertentu yang krusial.

Sedangkan pengecekan sejawat (*peer debrifing*) dilakukan dengan mendiskusikan data yang diperoleh dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang studi tokoh atau dengan seseorang yang mengenal Moh. Tolchah Mansoer. Dalam penelitian ini penulis melibatkan seorang peneliti lain di luar tim peneliti dan salah seorang perwakilan keluarga untuk membaca dan mendiskusikan besama hasil penelitian yang masih bersifat sementara. Selanjutnya, dari hasl pengecekan ini, dilakukan revisi dan koreksi seperlunya.

D. Model dan Sistematika Penulisan

Berkenaan dengan model penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, ada baiknya di sini dikutip penjelasan

---

[16] Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah,* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22-29

[17] H. Arif Furchan, *Studi Tokoh...*, hal. 76

[18] H. Arif Furchan, *Studi Tokoh...*, hal. 78

Kuntowijoyo tentang tiga model penulisan yang berkenaan dengan pendekatan sejarah. Model pertama disebutnya sebagai model sinkronis, yaitu penulisan yang mengutamakan lukisan secara meluas dalam ruang, tanpa terlalu banyak memikirkan dimensi waktu. Model yang kedua disebut model diakronis, yakni penulisan yang lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu, dengan hanya sedikit luasan ruangan. Struktur dan fungsi ditawarkan bersama-sama dengan gerak waktu kejadian-kejadian yang kongkret.[19] Model ini umum digunakan oleh ilmu sejarah.

Dari kedua model tersebut, Kuntowijoyo kemudian menawarkan model ketiga yang merupakan perpaduan dari kedua model sebelumnya. Model ketiga ini dapat digunakan dalam ilmu sosial yang menerapkan pendekatan sejarah.[20] Penulisan hasil penelitian ini dilakukan dengan model terakhir ini. Watak diakronis pendekatan sejarah tersebut, dalam penelitian ini difungsikan untuk memahami kronologi kehidupan Moh. Tolchah Mansoer sejak kelahirannya hingga wafat. Sedangkan watak sinkronisnya difungsikan untuk menelusuri gerakan dan aktivitas Moh. Tolchah Mansoer serta mengulas dan mendalami pemikiran-pemikirannya.

Berpijak dari model penulisan di atas, penulisan buku biografi ini secara garis besar berisi beberapa bagian yang disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab. Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi landasan pemikiran penelitian dan penulisan biografi ini, kajian-kajian terdahulu dan kerangka teoretik sebagai upaya untuk memahami tokoh yang menjadi obyek penelitian, metode penelitian dan model serta sistematika penulisan**.**

Bab Kedua memaparkan tentang profil dan perjalanan hidup KH. Moh. Tolchah Mansoer sejak kecil hingga masa-masa akhir kehidupannya. Bab ini meliputi latar belakang dan konteks sosial-politik dan historis kelahiran Moh. Tolchah

[19] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana), 1994, hal. 36

[20] Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hal. 112

Mansoer, kehidupannya di masa kecil, remaja dan muda, riwayat pendidikan dan kehidupan sosialnya, hingga kehidupannya di masa tuanya sampai wafat. Bagian ini mengulas Moh. Tolchah Mansoer sebagai seorang pribadi, yang meliputi kebiasaan, karakter, pandangan hidup dan cita-citanya.

Bab Ketiga menelusuri pergulatan Moh. Tolchah Mansoer dalam dunia gerakan sosial dan politik. Bab ini mengulas kiprahnya sejak merintis IPNU, sebagai organisasi pelajar NU, membidani kelahiran PMII, sebuah organisasi mahasiswa yang awalnya berafiliasi pada NU, kiprahnya dalam medan politik, pergulatannya sebagai seorang akademisi di tengah konflik dan gencetan kekuasaan, kegigihannya dalam membina dan membela gerakan kaum muda, ketekunannya dalam dunia dakwah, hingga peran pentingnya dalam momen sejarah NU, yaitu Munas Alim Ulama dan Muktamar Situbondo yang menelorkan keputusan penting, yaitu pemulihan khittah NU 1926 dan penerimaan asas tunggal Pancasila.

Bab Keempat memotret pemikiran Moh. Tolchah Mansoer dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Bab ini meliputi kiprahnya sebagai seorang akademisi dan doktor hukum tata negara; pemikirannya tentang hukum, negara dan pemerintahan; pemikiran tentang demokrasi dan proses hukum ketatanegaraan Indonesia; pemikiran tentang kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia; pemikiran tentang hubungan antara Islam dan Pancasila; pemikiran tentang konstitusi, pemikiran tentang Islam dan HAM; pemikiran tentang kesejahteraan sosial, pemikirannya tentang Islam dan dakwah islamiyah, serta pemikiran tentang pendidikan pesantren.

Sedangkan bab terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan tentang perjalanan dan kiprah KH. Moh. Tolchah Mansoer dalam panggung sejarah NU pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bagian ini menegaskan berbagai temuan tentang tokoh ini yang meliputi kehidupannya sebagai pribadi, perannya dalam gerakan sosial-politik, dan akademisi, serta pemikiran-pemikirannya yang kritis dan konstruktif.

Sebagai pendukung buku ini, kami lampirkan tulisan yang berisi testimoni tentang Moh. Tolchah Mansoer dari

berbagai perspektif. Testimoni-testimoni ini ditulis oleh Dr. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si., Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Prof. Dr. Sri Soemantri, SH, H. Abdullah Syarwani, SH, Drs. H. Slamet Efendy Yusuf, M.Si., Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, H. Said Budairy, Prof. Dr. Machasin, MA, dan Prof. Dr. Yahya Umar, Ph.D. Di akhir buku ini juga dilampiri beberap data pendukung seperti silsilah keluarga, galeri foto, daftar karya Prof. Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH., dan surat-surat penting Moh. Tolchah Mansoer.[]

BAB II
Jalan Panjang yang Terukur

Tolchah Mansoer adalah satu dari beberapa tokoh pemikir muslim Indonesia yang khas dan unik. Ia dilahirkan di kalangan nahdhiyin, dari keluarga yang terbatas secara ekonomi. Tetapi pada akhirnya ia menjadi tokoh garda depan di kalangan nahdhiyin. Pemikirannya melampaui semangat zamannya. Ia merupakan cerminan perpaduan antara pengetahuan umum (hukum tata negara) dengan kajian keislaman (*Islamic studies*). Tolchah Mansoer juga merupakan individu yang mampu begerak dalam dua ruas jalan yang berbeda. Satu sisi ia merupakan aktifis gerakan, baik melalui partai politik dan gerakan sosial. Sementara di pihak lain, ia adalah seorang akademisi dan kiai yang alim.

Perjalanan hidupnya yang unik menjadikan tokoh ini dikenal sebagai sosok yang langka. Keuletannya dalam belajar sejak dari kecil telah membentuknya menjadi intelektual dan ulama yang progresif. Tolchah juga dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kesederhanaan. Meskipun pernah meduduki posisi-posisi penting dalam kancah politik dan dunia akademik, ia tidak larut dalam kemewahan. Lahir dari kalangan orang biasa, namun ia telah mencatat sejarah sebagai orang yang luar biasa. Bagian ini akan menelusuri riwayat hidup Moh. Tolchah Mansoer sejak lahir hingga masa akhir hidupnya.

A. Berawal dari Jagalan

Jagalan merupakan sebuah kampung di selatan Pasar Besar Malang, yang lebih di kenal dengan kampung Kidul Pasar.[21] Daerah ini berpenduduk padat, seperti daerah-daerah kampung pasar lainnya. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar tersebut. Tidak sedikit dari mereka adalah para perantauan dari daerah-daerah lain, salah satunya berasal dari Madura. Kini, Kampung Jagalan telah banyak mengalami perubahan, namun kesan kota lama

[21] Jagalan berasal dari kata *jagal* yang artinya adalah memotong. Jagalan adalah tempat pemotongan hewan ternak, yang biasanya terdapat di sekitar pasar.

sangat dominan. Hal ini ditunjukkan dengan bangunan-bangunan lama yang masih berdiri.[22]

Di kampung inilah tinggal seseorang yang bernama Mansoer. Ia merupakan pedagang tikar dan perkakas dari bambu. Sebelum menempati kampung Kidul Pasar, ia menetap di Desa Sumber Pucung, Malang. Mansoer merupakan pedagang kecil perantauan dari Madura, tepatnya berasal dari Blega, Bangkalan.[23] Tidak banyak data yang dapat menjelaskan tentang sosok seorang Mansoer. Namun demikian, menurut penuturan keponakannya, Chusnul Chotimah, Mansoer adalah seorang yang gigih dalam berdagang. Usahanya tersebut tidak lain hanya untuk menyekolahkan putra-putrinya. Ia memiliki kemauan keras agar anaknya bisa menjadi orang sukses di dunia, lebih-lebih di akherat.[24] Oleh karena itu, ia sangat ingin anaknya bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Akan tetapi anak-anaknya memilih jalannya sendiri dalam menuntut ilmu.

Pada saat berjualan di kios Pasar Besar Malang inilah Mansoer berkenalan dengan seorang janda yang juga berasal dari Madura. Perempuan itu bernama Siti Nur Khatidjah. Para tetangganya menyebutnya Nurtijah. Nurtijah juga seorang pedagang di pasar yang sama. Ia berjualan pakaian jadi dan kain. Nurtijah pada mulanya adalah seorang putri saudagar kaya dari Madura, bahkan ia memiliki garis keturunan ningrat. Ibunya bernama Raden Ayu Srima, sedang ayahnya bernama Nur Abidin.[25]

---

[22] Penulis sempat mendatangi rumah kediaman Mansoer. Rumah tersebut tidak seberapa besar dan telah direnovasi oleh pemiliknya yang baru. Di depannya hanya terdapat gang sempit, berukuran ±1,5 m. Sementara di sisi jalan terdapat gedung tua, tempat pembuatan rokok tradisional, yang sudah tidak beroperasi lagi.

[23] Wawancara dengan Nyai Hj. Fathonah Utsman Mansoer, 27 Pebruari 2008.

[24] Wawancara dengan Hj. Chusnul Chotimah, pada tanggal 29 Pebruari 2008.

[25] Wawancara dengan Nyai Hj. Fathonah Usman Mansoer, 27 Pebruari 20o8.

Siti Nur Khatidjah adalah anak terakhir dari enam bersaudara. Kakaknya bernama Sholihudin, Nur Ismail, Nur Sali, Nur Mina, Muhammad Ali.[26] Sekalipun berasal dari kalangan ningrat, Siti Nur Khatidjah dapat bergaul dengan siapa saja dan tidak menutup diri. Di kemudian hari, sekalipun sudah tua dan telah memiliki banyak cucu dan pembantu, ia tetap menyapu halaman rumahnya sendiri, sambil membaca sholawat.[27]

Perempuan saudagar ini menikah pertama kali dengan Raden Jalaluddin Krama Asmara, salah seorang keluarga kerajaan di Bangkalan Madura. Dari pernikahan tersebut lahir seorang putra bernama Raden Isman, yang kemudian dikenal dengan Usman Mansoer. Usman lahir pada tahun 1924 di Madura. Belum genap satu tahun usia putranya itu, Jalaludin Krama Asmara bercerai dengan siti Nur Khatidjah. Akhirnya atas pertimbangan keluarga, Siti Nur Khatijah memutuskan untuk merantau ke Jawa bersama bayinya yang masih disusui.[28]

Setelah sampai di Jawa (Malang), nasib buruk menimpanya. Kapal barang dagangan yang ia kirim ke Kalimantan tenggelam dihantam ombak. Dengan demikian, ia mengalami kerugian besar. Dengan sisa-sisa barang dagangan ia mulai membuka kios di los Pasar Besar Malang. Di tempat inilah ia mulai mengenal Mansoer, seorang penjual tikar, keranjang, *besek, engkrak,* dan perkakas dari bambu lainnya. Dua orang ini memiliki kesamaan nasib, mereka berdua berasal dari daerah Blega, Bangkalan, Madura. Merasa satu nasib di perantauan, timbul rasa simpati satu sama lain. Dari perkenalannya inilah, selanjutnya pada tahun 1927 Siti Nur Khotidjah menikah dengan Mansoer.[29]

---

[26] Hj. Chusnul Chotimah adalah putra dari Muhammad Ali, kakak Siti Nur Khotidjah yang merupakan ibu dari Tolchah Mansoer. Wawancara dengan Hj. Chusnul Chotimah, 28 Pebruari 2008.

[27] Wawancara dengan Noor Diana, 27 Pebruari 2008.

[28] Wawancara dengan Nyai Hj. Fathonah Usman Mansoer, 27 Pebruari 2008..

[29] Wawancara dengan Chusnul Chotimah, 28 Pebruari 2008.

Setelah menikah, mereka tinggal di Desa Sumber Pucung Kabupaten Malang. Tapi seiring berakhirnya revolusi fisik, keduanya pindah ke Kampung Kidul Pasar. Mereka mulai membangun sebuah keluarga. Karakter sebagai pedagang dan sama-sama keturunan Madura membuat mereka cocok satu sama lain. Dari perkawinannya tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ahmad (meninggal saat masih bayi), Tolchah, dan Mardhiyah. Tolchah lahir pada 10 September 1930 di Malang. Sedangkan Mardhiyah, adiknya, lahir beberapa tahun kemudian. Selanjutnya mereka menambahkan nama ayahnya di belakang nama mereka. Begitu juga Usman, meskipun ia anak tiri. Alasan penambahan nama Mansoer bagi Usman menjadi Usman Mansoer, karena ia sejak bayi sudah dibimbing dan dibina oleh ayah tirinya tersebut. Sementara ayah kandungnya (R. Jalaluddin Krama Asmara) tidak diketahui keberadaannya.[30]

Usman, Tolchah, dan Mardhiyah merupakan sosok anak-anak yang cerdas dan cekatan. Rumahnya kecil di perkampungan yang padat. Antara satu rumah dengan rumah yang lain di pisahkan oleh lorong-lorong kecil. Kondisi lingkungan yang demikian tidak memungkinkan bagi mereka untuk terlalu sering main di luar rumah. Kalaupun harus bermain, mereka datang ke rumah saudara-saudaranya, seperti Abdul Khotib dan Chusnul Chotimah.[31] Oleh karena itu, Tolchah kecil lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan belajar. Bisa di mengerti jika sejak muda, ia telah menggunakan kacamata tebal, ini tidak lain karena kegemarannya membaca. Tolchah kecil memang cerdas dan rajin membaca. Ia bahkan sering membaca buku-buku kakaknya (Usman) sekalipun belum tingkatannya. Sebagaimana anak kecil yang lain, dia juga senang bermain, tetapi kebiasaannya membaca tak pernah ditinggalkan.

[30] Wawancara dengan Nyai Hj. Fathonah Usman Mansoer, 27 Pebruari 2008.

[31] Wawancara dengan Hj. Chusnul Chotimah, 28 Pebruari 2008.

Dia menempuh pendidikan pertama kali di Sekolah Rakyat Mualimin NU Malang pada tahun 1937. Semula sekolah tersebut bernama Madrasah Nahdhotul Wathon yang didirikan oleh KH. Nachrowi Tohir (Ketua Umum PB NU periode 1944-1951). Madrasah ini mendatangkan guru-guru dari berbagai daerah. Guru dan kiai yang mengajar memang mumpuni dan terpilih. Ada yang didatangkan dari Malang, Surabaya, Solo, bahkan Yogyakarta. Salah satu yang paling berpengaruh bagi Tolchah adalah KH. M. Syukri Gazali, seorang tokoh yang kemudian menjadi Ketua Umum MUI periode 1981-1984.[32] Mata pelajaran yang diajarkan Madrasah tersebut cukup variatif, tidak hanya mata pelajaran agama seperti aqidah, fiqh, akhlaq, dan nahwu, melainkan juga ilmu-umum seperti ilmu hitung, ilmu alam, geografi, dan bahasa Belanda. Bahasa Belanda inilah yang menjadi bekal bagi Tolchah, untuk mempelajari hukum tata negara. Sampai dewasa Tolchah lancar berbahasa Belanda, selain bahasa Inggris, dan bahasa Arab.

Selesai dari Sekolah Rakyat, Tolchah melanjutkan pendidikannya di SMP Islam sampai kelas tiga, antara tahun 1945-1947. Proses menuntut ilmunya sempat terhenti ketika terjadi revolusi fisik melawan kolonial Belanda. Pada saat itu ia beserta warga sekitar mengungsi ke daerah Malang Selatan yang relatif aman dari serbuan balatentara Belanda. Setelah keadaan berangsur membaik, ia kembali ke kota.[33] Saat itu Tolchah melanjutkan pendidikan d i Taman Madya dan Taman Dewasa Raya pada tahun 1949-1951. Dengan menempuh pendidikan di Yayasan Taman Siswa ini, ia melengkapi dirinya yang tidak pernah menempuh pendidikan di pesantren. Tolchah biasa mengikuti *ngaji pasanan*, mengaji khusus pada bulan Ramadhan ke beberapa pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh

[32] Wawancara dengan Chusnul Chotimah lihat juga Mastuqi HS, M. Ag, M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka), 2000, hal. 106.

[33] Mastuqi HS, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren* ..., hal 106.

Kiai Hasyim Asy'ary dan Pondok Pesantren Alhidayah Lasem yang diasuh oleh Kiai Ma'shum.[34] Bekal dasar dari Sekolah Rakyat Mualimin NU dan mengaji kilat di beberapa pesantren mendorongnya untuk gigih belajar secara otodidak terhadap kajian-kajian keislaman klasik. Dengan semangatnya tersebut, kelak ia menjadi sosok ulama dan pemikir Islam terkemuka.

B. Idealisme Anak Muda

Setelah tamat dari sekolah di Taman Madya dan Taman Dewasa Raya, Tolchah mendapat ijazah persamaan dari SMA Negeri Malang. Berbekal dari ijazah itu ia menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Dengan dorongan semangat dari ibunya, ia meninggalkan kota kelahirannya, Malang. Ibunya meyakinkan Tolchah muda, bahwa ia sanggup untuk membiayainya selama kuliah di Yogyakarta. Hal itu dilakukan agar anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dan berguna bagi masyarakat.[35] Tolchah muda membangun idealisme dengan menatap masa depan di Yogyakarta. Ia berangkat bersama kedua temannya yang sama-sama dari Kota Malang, yaitu Sukaji (yang dikemudian hari menjabat sebagai Rektor UGM) dan Saefullah Mahyudin. Tepat pada tanggal 28 Agustus 1951, mereka berangkat menggunakan kereta dari Stasiun Besar Malang menuju Stasiun Tugu Yogyakarta.[36]

---

[34] Saifullah Ma'shum(ed.). *Menapak Jejak Mengenal Watak; Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*, (Jakarta:Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994). KH. Ma'shum atau lebih dikenal dengan *mbah Ma'shum Lasem* adalah ayah dari KH. Ali Ma'shum Krapyak Yogyakarta (Rais Am PBNU periode 1989-1994).

[35] Wawancara dengan Nyai Hj. Fathonah Usman Mansoer, 27 Pebruari 2008. Menurut penuturannya Ibu Nurtijah sangat menginginkan putra-putrinya berhasil. Ia bertekad membiayai pendidikan putra-putrinya dengan tetes keringatnya sendiri. Dan akhirnya apa yang diharapkan terwujud. Di usia senjanya, ia masih sempat menyaksikan pengukuhan gelar doktor bagi putranya, Tolchah Mansoer, di Universitas Gajah Mada.

[36] Wawancara dengan Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudhoh, 21 Januari 2008, sebagaimana yang dikisahkan oleh Tolchah Mansoer kepadanya. Pada keberangkatannya menuntut ilmu di Yogyakarta,

Di Yogyakarta, ia menegaskan pilihannya kembali untuk menuntut bidang studi umum dengan masuk Fakultas Hukum Ekonomi Sosial dan Politik (HESP) Universitas Gajah Mada. Pada awalnya Tolchah memilih jurusan Sosial Politik, kemudian pindah ke jurusan Hukum Tata Negara.[37] Tolchah memiliki semangat yang meluap terhadap kajian hukum dan ketatanegaraan, sehingga ia memilih konsentrasi pada kajian tersebut.

Pada saat pertama kali menetap di Yogyakarta, Tolchah memilih kos yang letaknya stategis di jantung kota, tepatnya di selatan perempatan tugu Yogyakarta. Di Jalan Panembahan Senopati gang pertama inilah ia menghabiskan masa mudanya. Ditilik dari demografis kota Yogyakarta, tempat tinggalnya ini merupakan titik temu yang menghubungkan dua kampus besar, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN, saat ini berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga). Saat itu UGM masih menempati kampus di sekitar Keraton Yogyakarta.[38]

Menurut penuturan salah seorang teman kuliahnya, Iskandar Tirtabrata, Tolchah dikenal sebagai sosok yang pintar. Di kampus, Ia memiliki kebiasaan membaca. Selain itu, ia juga dikenal pintar ilmu agamanya, sehingga banyak teman-temannya yang bertanya soal agama. Meskipun ia serius dalam belajar, ia tetap pandai bergaul dengan siapa saja, humoris, dan menyenangkan.[39]

Selain konsentrasi kuliah, Tolchah juga aktif berorganisasi. Di kota pelajar ini ia meneruskan kembali

---

Tolchah diantarkan oleh ayahandanya dan kakanda Usman bebserta beberapa teman karibnya sampai di Stasiun Besar Malang.

[37] Wawancara dengan Fajrul Falaakh, SH, MSc, 27 April 2009. Informasi ini diperoleh oleh Fajrul Falaakh dari ibunya, Umroh Mahfudhoh.

[38] Penulis sempat melakukan penelusuran di kawasan tersebut. Informasi mengenai tempat kos Tolchah saat pertama kali kuliah di Yogyakarta ini di peroleh dari penuturan KH. Djamaluddin Abdullah Sajad dan KH. Toha Abdurrohman.

[39] Wawancara dengan Iskandar Tirtabrata, SH, 1 Mei 2009.

hobinya untuk berorganisasi. Pada mulanya ia aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI). Sampai akhirnya ia bersama rekan-rekan mahasiswa NU kala itu merintis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Ia memimpin organisasi ini hingga tiga periode. Pada saat menjabat sebagai Ketua Umum IPNU inilah ia menempa dirinya menjadi pemimpin. Bekal kepemimpinan inilah yang menjadi modal bagi Tolchah untuk menapaki jalan perjuangan selanjutnya. IPNU juga turut membentuk sekaligus merefleksikan komitmen keilmuan Tolchah. Tolchah adalah sosok muda yang punya idealisme tinggi. Idealisme inilah yang mengantarkan berdirinya organisasi kepelajaran di lingkungan Nahdlatul Ulama itu.

Karena semangatnya berkhidmat dalam dunia gerakan dan organisasi ini, pada tahun 1953 ia sampai meninggalkan kuliah. Hari-harinya ia habiskan untuk terjun di dunia aktivis. Pada tahun-tahun tersebut konsentrasinya bermuara pada pendirian organisasi kepelajaran di lingkungan Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia juga ikut menyiapkan NU memasuki medan politik pada Pemilu 1955. Namun berkat *ghirah*nya terhadap ilmu pengetahuan yang membara, enam tahun berikutnya ia kembali ke dunia kampus menyelesaikan gelar kesarjanaannya. Gelar sarjana hukum diraihnya pada tahun 1964.[40] Uniknya setahun sebelum ia selesai kuliah di UGM, tahun 1963, ia telah diminta oleh Rektor PTAIN Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) Prof. Sunaryo untuk mengajar di kampus tersebut.[41]

C. Persemaian Pengetahuan dan Politik

Di masa muda, konsentrasi Tolchah terfokus pada mencari ilmu dan dan berorganisasi. Dalam kesaksian teman-teman dan saudaranya, sekilas Tolchah memang model tipikal

[40] Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak....*, hlm. 106.

[41] Versi lain menyebutkan, saat itu PTAIN Yogyakarta sedang dilanda konflik internal. Sebagai dewan kurator Sultan Hamengkubuwono IX mengutus Tolchah Mansoer yang saat itu sebagai BPH, untuk menjadi penengah. Wawancara dengan Drs. Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

serius. Tetapi, di balik gayanya yang serius ia ternyata seorang yang humoris dan pandai menyenangkan orang lain. Dalam urusan asmara, Tolchah hampir tidak pernah menyempatkan waktunya untuk memikirkan hal tersebut. Kecuali pada saat dijodoh-jodohkan oleh teman-temannya terutama Ismail Makky bahwa Tolchah layak mendapatkan Umroh Mahfudzoh, cucu pendiri NU Kiai Abdul Wahab Chasbullah. Saat itu ia merupakan perintis organisasi pelajar putri NU.

Tolchah dan Umroh bertemu pertama kali di forum Konferensi Segi Lima di Solo pada tahun 1954, sebuah forum konsolidasi pertama organisasi ini setelah berdiri. Kala itu pelajar putri bermaksud akan bergabung, namun Tolchah menolak. Dalam pandangan Tolchah, kalau Muslimat dan Fatayat saja bisa berdiri, mengapa pelajar putri NU tidak bisa. Perbedaan pandangan ini ternyata menjadi awal pertautan keduanya. Dalam pandangan Umroh, Tolchah muda adalah sosok yang cerdas, pintar, dan tegas. Saat itu kesan yang lain segera muncul, sekalipun Tolchah berkulit hitam dan Madura, yang terkenal dengan berpendirian tegas atau bahkan keras, tetapi ternyata Tolchah bisa romantis. Kesan romantis tersebut karena Tolchah sering berkirim surat kepadanya.[42]

Sejak itu teman-temannya mulai meledek untuk memberikan semangat. Menurut Ismail Makky, kawannya akrab Tolchah di IPNU, awalnya Tolchah takut sama Umroh. Tolchah agak minder karena ia anak orang biasa, sedangkan Umroh adalah anak menteri dan tokoh NU. Kepada Tolchah, Ismail Makky berkata: ”Mengapa mesti takut? Kalau sampean nggak mau, saya yang mau”, gertak Ismail Makky memberikan semangat pada Tolchah. Ismail Makky mengaku menjadi *comblang* (penghubung-pen.) hubungan Tolchah dan Umroh. Dengan ledekan teman-temannya ini, akhirnya Tolchah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Menurut penuturan Munshif Nachrowi, Umroh Mahfudhoh

[42] Wawancara dengan Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudhoh, 21 dan 31 Januari 2008

merupakan cinta pertama sekaligus terakhir bagi Tolchah Mansoer.[43]

Pada awalnya Wahib Wahab, ayah Umroh, memang kurang menyetujui hubungan Umroh dengan Tolchah. Di mata banyak orang kala itu, konotasi orang madura itu keras. Sementara, Umroh adalah orang yang lembut dan cantik. Apalagi ia adalah seorang mubalighoh. Pak Wahib mengaku kasihan.[44] Pak Wahib tampaknya telah memilihkan calonnya sendiri, yaitu seorang aktivis GP Ansor yang secara fisik lebih ganteng, putih dan tinggi. Namun tampaknya, Umroh sudah terlanjur *kesengsem* dengan Tolchah. Dalam pandangannya, meskipun Tolchah hitam tetapi hitam manis. Umroh memilih Tolchah, karena ia punya karakter yang tegas.

Hubungan mereka mendapat dukungan Nyai Wahib yang telah beristikhoroh. Dukungan kuat juga datang dari sang kakek, Kiai Wahab Hasbullah. Akhirnya Tolchah pun diterima oleh keluarga Jombang itu. Menurut Mahfudzoh Ali Ubaid, salah satu putri Mbah Wahab, sang kakek melihat ini Umroh dan Tolchah memiliki kecokan karena sama-sama aktivis. Tolchah Ketua Umum IPNU dan Umroh adalah Ketua Umum IPPNU.[45] Mbah Wahab yakin Tolchah adalah yang terbaik bagi Umroh. Meskipun masih muda, tarafnya sudah setengah kiai.[46]

Pernikahan mereka dilaksanakan di Jombang, pada tanggal 5 Desember 1957.[47] Sementara itu resepsi

---

[43] Wawancara dengan KH. Munsif Nahrowi, 28 Februari 2008.

[44] Wawancara dengan Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid, 30 Januari 2008

[45] Wawancara dengan Hj. Umroh Mahfudzoh, Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudhoh, 21 Januari 2008. Menurutnya Kiai Wahab mengetahui sosok Tolchah melalui hubungan organisasi. Kiai Wahab saat itu adalah Rais Am PBNU, sementara Tolchah Mansoer adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU.

[46] Wawancara dengan H. Ismail Makky, 28 September 2007. Ismail Makky bersama Musa Abdillah adalah di antara teman-temannya yang turut mengantarkan Tolchah pada pernikahannya.

[47] Beberapa teman dan kolega Tolchah juga hadir. Salah satunya KH. Nuril Arifin, yang saat itu ia menjadi ketua cabang IPNU Tuban.

pernikahannya dilaksanakan di Gresik dan di Jakarta, tepatnya di restoran Metropolitan (kini dikenal dengan Megaria).[48] Pernikahan kedua pemimpin puncak organisasi pelajar NU ini berlangsung meriah. Beberapa tokoh penting hadir saat itu. Ini bisa dimengerti selain keduanya pemimpin organisasi, juga karena Umroh adalah cucu pendiri NU dan putri Menteri Agama, KH. Wahib Wahab.

Selain sebagai seorang terpelajar dan pimpinan organisasi pelajar, kala pernikahan berlangung, Tolchah sedang menjabat sebagai anggota DPRD Yogyakarta. Jabatan itu merupakan awal kiprah politiknya. Pengalaman di DPRD dan kedekatannya dengan Sultan Hamengkubuwono IX inilah yang pada akhirnya ia diangkat menjadi anggota Badan Pemerintahan (BPH) Yogykarta. Pada saat menjabat sebagai BPH ini, ia juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, serta tentunya menyelasaikan program doktoralnya.[49]

Saking *ngefans*-nya dengan Tolchah, ia rela bersepeda *onthel* sejauh 100 km dari Tuban ke Gresik dengan seorang temannya. Wawancara dengan KH. Nuril Huda, 31 Januari 2008.

[48] Wawancara dengan Hj. Mahfudloh Ali Ubaid, 30 Januari 2008, Wawancara dengan H. Cholid Mawardi, 16 Januari 2008. Sobich Ubaid menambahkan, pernikahan tersebut dihadiri oleh para pengurus teras PBNU, GP Ansor, dan kolega-kolega dari organisasi lain. Wawancara dengan H.M. Sobich Ubaid, 16 Januari 2008.

[49] Di tengah kesibukannya menjadi anggota BPH yang berkantor di Puro Kepatihan jalan Malioboro, ia masih sempat membimbing Ali As'ad untuk menerjemahkan kitab *Fathul Mu'in* ke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Ali As'ad, ia diminta untuk ke kantor BPH saat jam istirahat untuk berkonsultasi. Semula penerjemahan kitab *Fathul Mu'in* ditentang berbagai pesantren, termasuk Lirboyo Kediri dan Tegalrejo Magelang. Alasan penolakan tersebut karena dikhawatirkan dengan membaca terjemahan akan membuat para santri malas belajar *Fathul Mu'in* yang berbahasa Arab. Tetapi setelah diyakinkan oleh Tolchah, dengan alasan bahwa tidak semua umat Islam belajar di pesantren, maka penerjemahan kitab tersebut terus dilanjutkan. Bahkan Tolchah turut memberikan kata pengantar di edisi berbahasa Indonesia tersebut. Wawancara dengan KH Ali As'ad, 5 Maret 2008.

Pada saat menjabat sebagai BPH ini ia mendapatkan berbagai fasilitas, di antaranya adalah mobil dan rumah dinas yang ada di Compleks Colombo No. 21. Tetapi mobil tersebut hanya digunakan saat ke kantor, sementara kalau berangkat kuliah doktoralnya di UGM ia meninggalkan mobilnya dan cukup jalan kaki. Terkadang pula menggunakan sepeda motor jenis vespa yang masih terawat sampai sekarang. "Kalau kebetulan ada acara mendesak, dia membawa mobil, tapi parkirnya jauh dari kampus, supaya tidak dilihat teman-temannya", kata Umroh Mahfudzoh.

Pada masa akhir jabatannya mobil fiat warna biru tersebut dikembalikan kepada negara. Sementara itu, rumah dinas tersebut akhirnya dibeli oleh Tolchah dengan cara *nyicil.* Saat itu Menteri Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan sewa beli untuk rumah yang telah di huni selama lima tahun. Tolchah pun akhirnya membeli rumah tersebut, sehingga setelah selesai menjabat BPH, rumah tersebut menjadi hak pribadi.[50]

D. Mendidik dengan Cinta

Tolchah memiliki perhatian dan kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan. Sebagai putranya, Fajrul Falakh benar-benar merasakan hal itu. Ia juga mendorong dan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih dan menempuh jalur pendidikan.[51] Putra-putrinya dididik dengan caranya sendiri. Menurut Romahurmuziy, putra bungsu Tolchah, putra-putrinya tidak disuruh mondok (belajar di pesantren). Ia mengarahkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan

[50] Wawancara dengan Nyai Hj. Umroh Mahfudzoh, 21 Januari 2008. Di rumah ini pula beberapa tokoh penting pernah tinggal (kos) atau sekedar curhat kepada Tolchah saat mereka kuliah di Yogyakarta, di antaranya Slamet Effendi Yusuf, Arif Mudatsir Mandan, Jahja Umar, Nyai Nafisah Sahal (Isrinya KH. Sahal Mahfudz), Nyai Sinta Nuriah Wahid (Istri KH. Abdurrahman Wahid), Muhaimin Iskandar, dan beberapa tokoh yang lain.

[51] Wawancara dengan Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

umum, namun tetap belajar agama.[52] Pelajaran agama ini ia ajarkan sendiri di rumah.[53] Menurut Tolchah, idealnya anak-anaknya dapat menguasai dua bidang keilmuan, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Namun ia tidak memaksakan bagaimana metode untuk menempuh dan menguasai kedua bidang tersebut.[54]

Karena pendirian itulah, barangkali, kini anak-anaknya menempuh disiplin keilmuan yang beragam. Fajrul Falaakh, sang anak sulung, menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) dan gelar MA di University of London, serta gelar MSc dari London School of Economics and Political Science. Zuhrufussurur memperoleh gelar sarjana Teknik Elektro dari Fakultas Teknik IKIP Yogyakarta. Nisrinun Ni'mah menyelesaikan sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. Zunatul Mafruhah memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Safirotul Machrusah menyelesaikan S.1 di IAIN Yogyakarta, dan gelar masternya diperoleh dari Ausralian National University (ANU). Choirotun Chisaan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan master di Universitas Sanata

---

[52] Pendirian ini mendapatkan protes oleh sang istri. Karena latar belakang istrinya, Umroh Mahfudzoh, adalah dari pesantren, ia meminta ada anaknya yang masuk pesantren. Namun hal ini tidak disetujui oleh Tolchah. Tolchah ingin mengajari sendiri ilmu agama kepada anak-anaknya. Ketika kemudian ada orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan pondok kepada Tolchah, Umroh "komplain" kepadanya soal siapa nanti yang akan mengasuh Pondok karena semua anaknya disekolahkan umum semua. Namun Tolchah dengan tenang menjawab "Golekke mantu sing pinter." Ternyata benar sekarang yang memegang pesantren adalah sang menantu, Ahmad Fatah, suami Nisrinun Ni'mah. Saat menjadi mahasiswa Ahmad Fatah adalah murid Tolchah. Wawancara dengan Ir. Romahurmuziy, MT, 10 September 2007

[53] Wawancara dengan Ir. Romahurmuziy, MT, 10 September 2007

[54] Wawancara dengan Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009

Dharma Yogyakarta. Romahurmuziy memperoleh gelar sarjana teknik dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar master teknik industri dari perguruan tinggi yang sama.

Meskipun mengenyam pendidikan yang beragam, anak-anaknya juga dibekali dengan pengetahuan agama. Dalam memberikan pengetahuan agama kepada anak-anaknya, Tolchah secara rutin memberikan pelajaran dengan cara *ngaji* bersama pada setiap ba'da maghrib. Pelajaran ini disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Berbagai pengetahuan agama yang diajarkan seperti ilmu alat seperti *Jurumiyah*, *Imriti*, dan *Alfiyah.* Juga diajarkan ilmu fiqih seperti *Fathul Qarib*, *Bidayatul Mujtahid*, dan hadist seperti *Riyadush Sholikhin, Sahih Bukhari, Shohih Muslim* dan lain-lain.

Putra-putrinya kalau siang diperbolehkan main, tetapi kalau menjelang maghrib harus sudah sampai di rumah. Anaknya tidak ada yang tinggal di pesantren, semua dibimbingnya sendiri di rumah, sambil sesekali mengundang guru *ngaji* untuk mengajarkan beberapa kajian agama dan ilmu alat, seperti nahwu, shorof, dan balaghah kepada putra-putrinya.[55] Bukan Karena ia tidak percaya dengan lembaga pesantren, akan tetapi karena ingin lebih dekat dan mengetahui perkembangan putra-putrinya. Tolchah mendambakan anak-anaknya menjadi santri yang intelek, intelek yang santri.

Tolchah mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih sayang dan disiplin yang tinggi. Jika Tolchah sibuk dengan aktivitas kantor, maka Umroh Mahfudzoh mengambil peran mendidik dan menjaga putra-putrinya. Bahkan ia memutuskan untuk kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta setelah anak-anaknya beranjak besar. Sementara itu menurut penuturan putrinya Choirotun Chisaan, sang ayah sering mengumpulkan

[55] Sebagaimana dikisahkan oleh Fajrul Falaakh, seringkali jika ia dan adik-adiknya masih terlelap tidur, dibangunkan oleh ayahandanya dengan penuh kasih sayang. Sembari berbisik, Tolchah membangunkan mereka untuk diajak mengaji. Tiada kata lelah untuk mendidik putra-putrinya menjadi manusia yang baik dan berkarakter. Wawancara dengan Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

putra-putrinya sepulang dari sekolah. Mereka diminta menjelaskan kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah. Di forum itu pula, biasanya anak-anak akan menyampaikan *curhat* kepada ayahnya tersebut. Itu membuktikan perhatian Tolchah pada mereka. Terkadang pula Tolchah demi menyenangkan hati anaknya, ia memainkan gitar, sekalipun tidak berirama. Tetapi itu telah memberikan kedamaian di hati putra-putrinya. Meski tidak bisa memainkan gitar, tapi ia lincah bermain piano dan seruling. Menurut cerita yang dituturkan kepada anak-anaknya, sejak di SMA Taman Siswa di Malang, ia pandai memainkan jemarinya untuk bermain piano. Salah satu lagu favorit Tolchah adalah *One Day in Your Live* yang dinyayikan oleh penyayi pop legendaris Michel Jackson.[56]

Dalam mendidik anak, Tolchah juga memberikan semangat untuk membaca. Baginya yang penting membaca, termasuk membaca komik sekalipun. Di samping membaca buku-buku yang berat, Tolchah memang memiliki hobi membaca komik. Dalam ingatan Romahurmuziy, setiap hari pada jam setengah sepuluh malam, biasanya Tolchah membaca komik silat. Ia juga mengajari Romi, panggilan akrab Romahurmuziy, untuk membaca komik.[57]

Membaca memang menjadi dunia Tolchah. Sebagaimana kesaksian anak-anaknya, sang abah adalah seorang kutu buku. Bahkan sejak kecil ia sering membaca buku yang yang belum seharusnya dia baca. Tolchah meyakini, membaca dapat membuka cakrawala terhadap dunia. Kegemarannya Tolchah ini tampanya terinspirasi juga oleh Soekarno. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Mahbub Djunaidi, Tolchah mengutip kata-kata Bung Karno berikut:

---

[56] Wawancara dengan Ir. Romahurmuziy, MT, 10 September 2007

[57] Saat itu hiburan sangat terbatas, oleh karenanya membaca komik dapat menjadi alternatif. Komik yang dibaca Tolchah Mansoer di antaranya adalah karangan Ko Ping Ho, Gan Kok Ling, dan Khu Lun. Wawancara dengan Ir. Romahurmuziy, MT, 10 September 2007

"Karena aku melarat, aku tidak bisa kemana-mana. Pergiku hanya ke dalam buku-buku. Dengan dan karena buku-buku itu aku bisa mengembara ke seluruh dunia, bahkan ke dunia silam".[58]

Kegemarannya membaca inilah yang menjadikannya menguasai keilmuan dalam berbagai disiplin. Kemampuannya belajar secara otodidak dilakukan melalui membaca. Kebiasaan ini dilakukan hingga masa tuanya. Ia juga menekankan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan hobi ilmiahnya itu. Tak heran, jika di rumahnya di Kompleks Colombo 21 terdapat perpustakaan pribadi yang masih terawat hingga kini. Buku-buku dalam berbagai disiplin keilmuan dapat didapati di sana.[59]

Keluarga Tolchah memang sebuah keluarga yang sangat peduli dengan pendidikan. Di samping pendidikan di keluarga, mereka juga sangat peduli terhadap pendidikan untuk masyarakat di sekitarnya. Umroh Mahfudhoh bahkan mendirikan sebuah Taman Kanak-Kanak (TK). Sekolah itu hingga kini masih berdiri. Usaha lainnya adalah perintisan pondok pesantren As-Sunni Darussalam yang digagas oleh Tolchah sendiri. Sayang, sebelum lembaga pendidikan ini berhasil, Tolchah meninggal dunia.

E. Ritme Kehidupan yang Teratur

Mencermati kehidupan Tolchah memang menarik. Ia memiliki ritme kehidupan yang teratur. Agendanya setiap hari dijalani dengan disiplin seolah ada terjadwal sedemikian rupa. Seolah tidak ada waktu yang terbuang. Setelah sholat subuh dan membaca *wirid*, ia kemudian mengajar ngaji untuk para dosen. Selesai ngaji, kemudian makan pagi dan kegiatan domestik lainnya, ia mengoreksi tugas-tugas mahasiswa. Baru kemudian berangkat ke kampus. Demikian juga di sore hari. Setelah sholat maghrib, ia memberikan pelajaran agama kepada anak-

[58] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada H. Machbub Djunaidi, tanggal 29 Juni 1979

[59] Penulis sempat mengunjung perpustakaan pribadi Tolchah Mansoer. Di ruangan berukuran sekitar 3x5 m itu dipenuhi dengan buku, terutama buku-buku klasik.

anaknya. Rutinitas itu ia jalani sebagai nikmat Allah yang harus disyukuri.

Pribadi yang penuh disiplin ini, tidak hanya diterapkan di keluarganya. Dalam beraktifitas sosial pun ia melaksanakan sikap disiplin yang tinggi. Pernah suatu saat ia mengajar di AMN Magelang, berangkat jam 05.30. padahal mengajarnya jam 10.00. perlu diketahui jarak tempuh Yogyakarta-Magelang kurang lebih satu setengah jam saat itu. Inilah yang menunjukkan kedisiplinan dan dedikasinya yang tinggi untuk mengamalkan ilmunya.

Tokoh yang menolak mengikuti upacara selama rezim Orde Baru ini, memang sosok yang sangat mendambakan kader-kader muda NU untuk terus berpikiran maju dan visioner. Ia mengabdikan sebagian besar dari hidupnya pada masyarakat luas khususnya Jami'iyyah NU. Di tengah kesibukannya yang padat, ia juga masih menyempatkan untuk mengajar di berbagai tempat. Tolchah pernah mengajar di Madrasah Mu'alimat NU Yogyakarta tahun 1956.[60] Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Ushuludin, mengajar di Fakultas Adab dan akhirnya menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 1965-1975 ia menjadi direktur Akademi Administrasi Niaga Negeri (AANN). Pada saat yang sama juga mengajar di Akademi Militer (AKMIL) Magelang, IKIP Yogyakarta, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Hasyim As'ary Jombang (1970-1983), Rektor Perguruan Tinggi Imam Puro Purworejo (1975-1983), Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo. Di samping itu, ia juga menjadi anggota tim Pengkajian Hukum Tata Negara dan Hukum Islam

[60] Madrasah ini didirikan oleh beberapa kaum muda NU dengan dukungan sepenuhnya oleh para kiai sepuh di Yogyakarta. Ismail Makky ditunjuk sebagai kepala sekolah tersebut. Menurut cerita Mu'sinah yang sempat menimba ilmu di sekolah tersebut sempat dibimbing Tolchah. Dalam ingatannya, Tolchah adalah sosok guru yang cerdas dan mampu memahai karakter para anak didiknya. Wawancara dengan Mu'sinah, 29 Februari 2009.

pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mulai tahun 1964 sampai meninggal menjadi anggota Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Tolchah juga pernah aktif sebagai anggota Badan Penyantun Universitas Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1965. Hingga akhir hayatnya, ia menjadi Ketua Rukun Warga Tri Kompleks RRI Colombo Demangan Baru desa Caturtunggal, Sleman Yogyakarta.

Selain mengajar dan berorganisasi, ia juga menulis banyak artikel di berbagai harian baik lokal maupun nasional, di antaranya adalah majalah *Bangkit* di Yogyakarta, *Aula* di Surabaya, *Gema* di Yogyakarta, *Masakini* di Yogyakarta, *Pelita* di Jakarta, *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta. Di samping itu Tolchah juga menerjemahkan kitab Alfiyah Ibnu Malik, Al Burdah karangan Al Bushiri, dan "Taburan Permata" (*ad Darrul Muntatsiroh*) Karya Khadharatus Syaikh KH Hasyim As'ary yang dicetak oleh percetakan Menara Kudus pada tahun 1974.[61]

Dalam menapaki kehidupannya, Tolchah selalu mendapat dukungan sang Istri. Saat sedang menempuh gelar doctor di tengah-tengah kesibukannya sebagai anggota BPH, Umroh terus mendorong agar disertasinya segera selesai. Demikian pula saat Tolchah mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gelar profesor, Umroh adalah orang yang tak lelah mengurus segala persyaratannya, termasuk yang menyiapkan cum/point kenaikan pangkat.[62] Namun, lama diurus, gelar itu belum juga turun dengan berbagai alasan. Ada kabar burung yang mengatakan bahwa berkas-berkas pengajuan gelar guru besarnya di Departemen Agama terus dikurangi sehingga tidak

[61] Tolchah juga menerbitkan puluhan buku, dengan berbagai konsentrasi keilmuan. Yang paling menonjol adalah tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Tolchah juga hafal syair-syair dari kitab Alfiyah Ibn Malik yang berjumlah 1000 bait. Wawancara dengan KH. Toha Abdurrohman, 30 Januari 2008.

[62] Wawancara dengan Nyai Dra. Umroh Mahfudhoh, 21 dan 31 Januari 2008

pernah lengkap. Gelar guru besar ini akhirnya baru turun setelah Tolchah meninggal.

Memang, Tolchah dikenal sebagai orang yang "cuek" dengan urusan pangkat dan gelar. Pendirian ini juga tampak dalam isi sebuah surat yang ditulis Tolchah untuk Asnawi Latif:

".....Rektor sudah mengusulkan saya ke 4 c di awal Desember yll (78). Mestinya kalau menurut konsesus, sudah bisa di akhir 77 yll.... tetapi saya teramat jengkel dan acuh tidak acuh saja terhadap kenaikan-kenaikan itu.... ya, diberi dua tahun, sampai guru besarnya....tetapi buat apa? Ini saja karena didesak-desak, baru mau...."[63]

Tidak hanya soal pangkat, Tolchah bahkan tak pernah peduli dengan urusan gaji. Ia tidak pernah mengambil gaji sendiri, selalu Istrinya yang mengurus. [64] Hal ini juga dilakukannya saat mendapat Tolchah amplop dari berbagai acara atau mengisi pengajian, selalu Umroh yang membuka. Umroh memang pendamping setia bagi Tolchah.

Menurut pengakuan Umroh, suaminya adalah sosok yang menjalani pola hidup sangat sederhana. Kesederhanaan kehidupan keluarga Tolchah ini diakui oleh Jahja Umar, aktifis PMII Yogyakarta yang menjadi 'santrinya' kala itu. Dalam ingatan Jahja Umar, Tolchah adalah pejabat negara yang menerapkan pola hidup cukup. Sebagai contoh tentang kesederhanaannya, sewaktu ia masih menjabat sebagai anggota BPH Yogyakarta, Jahja Umar mencontohkan bahwa tidak menemukan kulkas (lemari es) di rumahnya. Ketika ditanya kenapa tidak membeli kulkas, ia menjawab: "Es batu kan sudah

[63] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 20 Desember 1978

[64] Dari gaji yang tak seberapa tersebut, selalu ia sisihkan setiap bulannya untuk membeli buku dan kitab-kitab. Wawancara dengan KH. Idris Abdul Hamid, 6 Januari 2008.

banyak yang jual, beli saja es yang sudah jadi". Demikian Jahja mengenang.[65]

Selain itu, Tolchah adalah sosok pribadi yang disiplin, terbuka, penyayang terhadap keluarga, dan menghormati kaum perempuan. Sejak menjadi keluarga muda, ia memiliki kegemaran bersilaturahmi. Setiap lebaran ia tak pernah melewatkan waktunya untuk berkunjung ke Gresik, Jombang, dan Malang. Tolchah berkunjung ke rumah saudara satu per satu. Sekalipun di tengah kesibukannya yang padat ia tetap melaksanakan tradisi itu. Tatkala ia tak bisa datang, sepucuk suratnya pastilah tiba sebagai pengganti. Karena memang salah satu hobinya adalah surat menyurat.[66]

F. Mewakafkan Hidup untuk Umat

Pada awal-awal dekade 70-an, Tolchah mulai mengadakan pengajian rutin di rumahnya. Atas masukan dan saran dari beberapa dosen muda di IAIN Sunan Kalijaga, ia diminta membuka pengajian kitab-kitab salaf klasik. Menurut pengakuan Abu Tauhid, salah seorang peserta pengajian di garasi rumahnya, ia yang pertama kali meminta dilaksanakan pengajian. Ia menuturkan bahwa Sepulang *nderekke* pengajian di Maos Cilacap, di atas kereta api ia mengusulkan kepada Tolchah agar mengaji kitab-kitab yang belum pernah di kaji di pesantren. Akhirnya Tolchah menyanggupinya.[67] Di garasi rumahnya di kompleks Colombo no. 21 dibukalah forum pengajian. Kitab-kitab yang dikaji diantaranya adalah *Al Umm*, *Ihya Ulumuddin, al Risalah, Riyadush Sholohin, Tadzhib*, dan lain-lain.

Dalam pengajian tersebut, Tolchah diminta oleh dosen-dosen muda untuk membaca kitab-kitab yang belum mereka kaji di pesantren. Di antara beberapa dosen muda di IAIN Sunan Kalijaga saat itu yang mengaji kepada Tolchah adalah

[65] Wawancara dengan Prof. Jahja Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[66] Bahkan karena kegemarannya dengan surat-menyurat, Tolchah Mansoer sempat menulis sebuah buku tentang filateli (surat menyurat).

[67] Wawancara dengan KH. Abu Tauhid, 5 Maret 2008.

Prodjodikoro, Abu Tauhid, dan Toha Abdurrohman. Sekalipun Tolchah bukan alumni pesantren, tetapi ia bisa mengajarkan kitab-kitab tersebut dengan baik dan gamblang.[68] Selain mengaji untuk dosen-dosen muda IAIN setiap senin sampai jum'at setelah sholat Shubuh, Tolchah setiap sore juga membuka pengajian untuk mahasiswa, diantara pesertanya adalah Machasin.[69]

Tolchah bisa mengaji kitab-kitab klasik sekalipun ia tidak pernah menjadi santri karena beberapa faktor. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa latar belakang pendidikan Tolchah adalah berbasiskan pada pendidikan umum. Sekalipun demikian, Tolchah sangat membanggakan pendidikannya saat ia belajar di Madrasah Nahdhotul Wathon yang didirikan KH. Nachrowi Thohir. Disinilah rupanya Tolchah mendapatkan dasar-dasar ilmu agama yang kuat, salah satunya yang berpengaruh dikemudian hari adalah ilmu tata Bahasa Arab. Dengan ilmu *Nahwu, Shorof,* dan *Mantiq* yang sudah ia miliki, ia melanjutkannya dengan belajar secara otodidak terhadap kitab-kitab klasik.

Faktor berikutnya adalah, keikutsertaan Tolchah dalam pengajian-pengajian *pasanan* (Pengajian secara kilat dan singkat terhadap kitab kuning yang diselenggarakan selama bulan suci Ramadhan) di beberapa pesantren ternama. Tolchah

---

[68] Bahkan sesekali KH. Ali Maksum Krapyak juga ikut mengaji kepada beliau. Menurut Prof. KH. Prodjodikoro, ia belajar dengan Tolchah saat dijelaskan sulit mengerti. Tetapi saat pak Tolchah telah meninggal, apa yang sudah diajarkan olehnya baru bisa dipahami. Wawancara dengan Prof. Drs. KH. Prodjodikoro pada tanggal 5 Maret 2008.

[69] Mulai tahun 1974, Machasin ikut mengaji dengan Tolchah, pengajian dilaksanakan setiap sore, mulai hari Senin sampai Kamis. Kitab-kitab yang di baca berbeda dengan yang diajarkan kepada dosen-dosen muda IAIN, yaitu, *Tajridus Shorih* (Matan Bukhori) dan *Riyadussholihin*, untuk Kitab Hadist. Selain itu juga mengaji *Al Jauharul Maknun* (Balaghoh), *Ar Ruud* (Matan Kaafi), dan *Alfiyah Ibn Malik* (Nahwu: Tata Bahasa Arab/ ilmu *Alat*). Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin, MA., 27 April 2009.

sempat ikut *pasanan* di Pesantren Tebuireng, Pesantren Alhidayah Lasem yang diasuh oleh mbah Ma'shum, dan lain-lain. Ini juga memberikan bekal penting bagi penguasaan ilmu agamanya kelak di kemudian hari.

Selanjutnya adalah faktor psikologis. Setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum di UGM, Tolchah *sowan* kepada kakek mertuanya, yaitu KH. Abdul Wahab Chasbullah. Pada saat itu Kiai Wahab juga seorang *pokrol* (pengacara). Ia menyampaikan kepada Tolchah, kalau hanya sekedar sarjana hukum, Kiai Wahab sendiri, tidak sekolah hukum pun bisa menjadi pengacara. Tapi sebaliknya, mampukah Tolchah menjadi seorang alim dalam penguasaan ilmu agama (menjadi kiai) tanpa harus di belajar pondok pesantren. Mendengar "tantangan" Kiai Wahab tersebut, ada semangat yang membara bagi Tolchah untuk membuktikan bahwa sekalipun ia bukan keluaran pesantren, tetapi mampu menguasai ilmu-ilmu agama, terutama dalam kajian kitab-kitab klasik.[70]

Ada beberapa kejadian menarik sekaligus aneh yang pernah dialami oleh Tolchah. Salah satu kejadian aneh itu di ceritakan oleh Abu Tauhid, salah satu dosen yang mengaji kepada Tolchah. Ia menuturkan bahwa Tolchah pernah berkisah tentang ketertarikan dan kekagumannnya kepada mbah Hasan Mangli, ulama kharismatik dari Magelang dan merencanakan untuk *sowan* bersama-sama para santrinya ke Magelang. Tetapi keesokan harinya, sebelum mereka berangkat ke Magelang, tiba-tiba ada seseorang yang datang mengetuk pintu. Saat ditanya oleh Tochah, orang tersebut mengaku *mbah* Hasan Mangli dari Magelang yang menyengaja sowan ke kediaman Tolchah di komplek Colombo no. 21 Yogyakarta.[71]

Kejadian aneh lainnya disampaikan oleh Ali As'ad. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang, Tolchah sangat senang dengan sya'ir-sya'ir *Burdah*.[72] Suatu ketika, ia

[70] Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin, MA., 27 April 2009.

[71] Wawancara dengan Prof. Drs. KH. Prodjodikoro, 5 Maret 2008.

[72] Mungkin ia meniru perilaku Mbah Wahab Hasbullah yang juga suka membaca *burdah*. Sebelum menerjemahkan kitab burdah, ia

bersilaturrahmi ke *ndalem* Mbah Khamid (KH. Abdul Khamid Pasuruan yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai *wali*), ada peristiwa yang aneh dialami oleh Tolchah. Ali As'ad yang saat itu menyertai Tolchah menceritakan bahwa sebelum Tolchah sampai di gerbang pintu *ndalem* Mbah Khamid, ia telah disambut oleh tuan rumah dengan bacaan-bacaan qasidah *Burdah,* padahal ia belum pernah bertemu dengan mbah Khamid. Hal ini karena Mbah Khamid sudah tahu kalau tamunya adalah pecinta dan mengamalkan syair-syair *Burdah*.[73] Tolchah yang suka gulai kambing dan kikil ini juga mengamalkan bacaan *maulayasholl* tiga kali dan *huwal habib* sampai seribu kali. Amaliah ini *dilanggengkan* (istiqomah) hingga akhir hayatnya.

KH. Bisri Musthofa (Pengarang Kitab Tafsir *Al-Ibriz* dan pendiri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien, Leteh, Rembang, Jawa Tengah), kagum dan mangakui ke'aliman Tolchah akan ilmu dunia dan akhirat dengan membuat syair-syair pujian kepadanya yang dia serahkan langsung kepada Tolchah di kediamannya, Komplek Colombo No. 21, Yogyakarta. Sebagaimana yang di ceritakan Umroh Mahfudzoh, pada saat KH. Bisri Mustofa hendak menyerahkan puisinya kepada Tochah, ia sengaja untuk tidak duduk di kursi, sambil jongkok (posisi seperti orang rukuk) ia menyerahkan puisinya. Saat diminta oleh Tolchah untuk tidak melakukan dengan cara tersebut, KH. Bisri Mustofa hanya tersenyum. Setelah penyerahan puisi tersebut, lantas duduk kembali seperti semula.

Terjemahan syair KH. Bisri Mustofa itu adalah sebagai berikut:

Wahai Ibnu Mansoer, selamat untukmu.
Selamat atas keberuntungan yang kamu peroleh.
Terimalah salam hormat dan ucapan selamat dariku, salam dari orang yang mencintaimu.

---

sempat ke Tambakberas untuk meminta restu dari mbah Wahab. Wawancara dengan Mahfudloh Ali Ubaid, 30 Januari 2008.

[73] Wawancara dengan KH. Ali As'ad, 5 Maret 2008

Hai Ibnu Mansoer, Engkaulah orangnya, yang ketika aku memuji, semua orang akan ikut memuji.

Dan jika aku mencela, maka hanya aku yang mencela

Di dunia ini aku tak pernah melihat seorang mulia, tekun, pintar, dan bijaksana sepertimu.

Hai Ibnu Mansoer, kalau orang lain mumpuni satu Ilmu, maka Tolchah mumpuni dua ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat.

(Bisri Mustofa, 28 Ramadhan 1394 H)

Tolchah juga sangat dekat dengan anak-anak muda dan yuniornya. Rumahnya di komplek Colombo no. 21 dijadikan markas bagi aktifis PMII Yogyakarta. Mereka *curhat* tentang banyak hal, baik persoalan pengetahuan umum dan agama, politik kampus, organisasi, hingga persoalan-persoalan pribadi. Tolchah juga perhatian pada masalah asmara para yuniornya.[74] Menurut kenangan Jahja Umar, ia biasa menitipkan barang dagangannya berupa obat-obatan di rumah Tolchah ketika ia menjadi *medical representatif* (tenaga pemasaran obat). Tolchah sangat mendukung dan apresiatif terhadap generasi muda yang kreatif dan mandiri.

Pribadi Tolchah adalah sosok yang menyenangkan. Dalam ingatan sahabat, murid, dan keluarganya, ia sangat disiplin. Gaya berbicaranya selalu bersemangat, sehingga meyakinkan lawan bicaranya.[75] Kalimatnya pendek-pendek (*impusing*), sehingga "memaksa" pendengarnya untuk percaya. Ia adalah sosok kiai tradisional pada umumnya, tetapi pada level tertentu ia sangat modern, namun tidak sampai liberal. Hal ini disebabkan pergaulan *"ke-kiai-an"*-nya sangat kompleks. Tolchah bisa bergaul dengan kiai-kiai sepuh pesantren,

[74] Sebagai contoh pernikahan yuniornya yang difasilitasi adalah pernikahan Asnawi Latief dan pernikahan Jahja Umar.

[75] Saat berbicara, Tolchah sangat bersemangat, ekspresif dan menggebu-gebu, menarik minat hati bagi para pendengarnya. Wawancara dengan Nur Diana, 27 Februari 2008.

sementara di pihak lain, ia juga "gaul" dengan dunia akademik, sehingga mendorongnya untuk berpikiran maju.[76]

Tochah adalah pribadi yang humoris. Kiai yang hobi main catur ini saat menyampaikan *mauidzhoh khasanah* di beberapa pengajian umum tidak lupa menyampaikan *joke-jokenya*. meskipun demikian, kesan serius dan ilmiahnya tak hilang. Ia juga tetap membawa kitab-kitab rujukan di atas mimbar.[77]

Menurut Slamet Efendi Yusuf, Tolchah merupakan sosok ayah, guru, sekaligus sahabat dalam berdiskusi. Ia sangat menghargai pemikiran-pemikiran kaum muda. Jika terjadi perbedaan pendapat, ia hanya bisa menyampaikan "*mbok yo ojo ngono".*[78] Di kisahkan oleh Jahja Umar, karena posisinya

---

[76] Salah satu contoh, pemikiran "tradisional" (untuk tidak menyebut konservatif misalnya adalah, Tolchah percaya pada syair-syair burdah ada keutamaan-keutamaan tertentu bila di baca secara terus-menerus (istiqomah). Sementara dalam hal lain menunjukkan pemikirannya yang modern, misalnya ia tidak mau dicium tangannya saat berjabat tangan oleh para santri atau yuniornya (dalam tradisi pesantren hal ini disebut *ngalap barokah*, berharap berkah). Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin, MA., 27 April 2009.

[77] Suatu saat ketika memberikan sambutan dalam acara *khaul* (peringatan kematian) KH. Munawir Krapyak yang diselenggarakan oleh KH. Ali Ma'sum, Tolchah menuturkan: "Karena Kiai Ali sering menyelenggarakan *khaul*, maka beliau mendapatkan *kol* (sejenis bis angkutan yang diberikan oleh pemerintah untuk Kiai Ali. Transportasi ini digunakan untuk mengangkut santri-santri Krapyak yang kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Mendengar penuturan tersebut, Kiai Ali hanya bisa senyum-senyum, sementara hadirin tertawa, wawancara dengan Ali As'ad. Contoh lain, yang menggambarkan Tochah adalah sosok humoris adalah, ketika ia menjelaskan *mudhof ilaih* (pen. Salah satu sub bahasan dalam ilmu nahwu/tata Bahasa Arab), menurut penjelasannya, bahasa sederhana *mudhof ilaih*, ialah yang disandari, "seperti ketika kalian bersama pacar di bis, saat pacarmu menyandari kamu, kamu itu *mudhof ilaih",* sontak para hadirin yang ikut mengaji pun tertawa. Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin, MA., 27 April 2009.

[78] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Efendi Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

sebagai anggota BPH, Tolchah sering dijadikan *"bumper"* para aktifis PMII saat berdemonstrasi. Pernah pula beberapa diantaranya ditangkap dan di bawa ke Kodim. Tolchah datang menjemput dan membebaskan mereka.[79]

Tolchah pada tahun 1984 menerima tanah wakaf dari Hj. Rodhiah seluas 1000 m2 melalui Kiai Abbas, di daerah Tempelsari, Maguwoharjo, Sleman, sekitar 15 km arah timur laut kota Yogyakarta. Tahun 1985 mulai dibangun Masjid, yang sekarang menjadi Masjid Sunan Ampel. Akan tetapi sepeninggal Tolchah masjid tersebut "dikuasai" kembali oleh Kiai Abbas, tokoh kiai setempat. Sejak saat itu sampai tahun 1993 diambil alih oleh Kiai Abbas, yang selanjutnya menjadi Pesantren Sunan Ampel.

Pada perkembangan berikutnya, atas saran dari isterinya, Umroh Mahfudzoh. Anak-anak Tolchah mendirikan pesantren yang dicita-citakan ayahandanya, yaitu pesantren As-Sunni Darussalam, di tanah wakaf tersebut. Keluarga Tolchah juga mendapatkan wakaf tanah seluas 245 m2 di desa setempat. Tanah tersebut selanjutnya dijadikan gedung Madrasah Diniyah As-sunni Darussalam. Selain itu Umroh Mahfudzoh juga membeli tanah disekitar tanah wakaf seluas 1800 m2. Mulai pada tahun 1999 gedung pesantren yang dicita-citakan Tolhah mulai di bangun dan berada di bawah Yayasan As-sunni Darussalam Yogyakarta.[80] Saat ini pesantren tersebut telah berdiri megah, dihuni oleh santri yang semuanya adalah mahasiswa-mahasiswa di beberapa kampus di Yogyakarta.

G. Dedikasi Sampai Akhir

Sebenarnya, pada masa-masa menyelesaikan disertasi, kesehatan Tolchah mulai terganggu. Hampir seluruh hari-harinya pada saat itu digunakan untuk membaca dan menulis disertasi. Puncaknya ketika ujian disertasi, kesehatannya menurun drastis. Ia dikawal oleh beberapa dokter untuk

[79] Wawancara dengan Prof. Jahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[80] Wawancara dengan Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudhoh, 21 Januari 2008, dan Wawancara dengan KH. Ahmad Fatah, 20 Januari 2008.

menjaganya. Meskipun dalam keadaan capek, tetapi ia tetap bersemangat dalam ujian karena ditunggui ibunda tercinta, yang telah berjuang membiayainya sejak kecil. Ibunya, Siti Nur Khotijah datang dari Malang untuk menyaksikan putranya meraih gelar doktor. Ujian tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1969. Pada saat ia telah memiliki lima anak.

Meskipun dalam keadaan lelah dan sering sakit-sakitan, Tolchah tetap mau meluangkan waktunya untuk mengajar dosen-dosen muda dan beberapa mahasiswa dan aktifis muda NU di kediamannya. Selain itu, kegiatan dakwahnya juga tak pernah kendor seiring bertambahnya usia. Ia biasa mengisi pengajian di Jepara, Lasem, Rembang, Magelang, Gunung Kidul, bahkan sampai Cilacap. Ketika berpidato, sosok yang melanggengkan berwudhu ini memiliki karakter yang khas. Ia juga tak lupa selalu membawa kitab-kitab kuning sebagai refrensi dan dibawanya di atas mimbar untuk ditunjukkan kepada jama'ah pengajiannya.[81]

Di tengah-tengah pengabdiannya pada umat, Tolchah seringkali menulis, baik buku, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya. Ratusan artikel telah dituliskannya. Baginya menulis juga merupakan merupakan bagian dari dakwah. Suatu hari keluarga Tolchah pernah dikejutkan oleh hadirnya rombongan ibu-ibu yang berasal dari Madiun, Mereka itu ternyata adalah jamaah pengajiannya.[82] Itu semua adalah bukti dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan Tolchah di dunia dakwah. Karena itu, Sudah selayaknya apabila NU memberikan kepercayaan kepada Tolchah masuk menjadi salah satu jajaran Rais Syuriah PBNU Muktamar NU ke 27 di Situbondo Jawa Timur tahun 1984.

---

[81] Tentang menjaga wudhu ini disampaikan oleh KH. Abu Tauhid. Ia menyaksikan, selama perjalanan ketika menghadiri Munas NU tahun 1983 di Situbondo, Tolchah menjaga wudlunya. Wawancara dengan KH. Abu Tauhid, 5 Maret 2008.

[82]Saifullah Ma'sum (ed), *Menapak Jejak*, hal. 108.

Namun, ternyata muktamar itu adalah muktamar terkhir yang ia ikuti.[83] Pada masa puncak keemasan karir intelektual dan organisasi ini, Tolchah dipanggil ke rahmatullah, tepat setelah 40 hari setelah kunjungan ibu-ibu jama'ah pengajiannya dari Madiun. Setelah sempat dirawat di RS. Dr. Sardjito Yogyakarta, ia akhirnya meninggal karena serangan penyakit jantung yang dibawanya sejak lahir.[84]Tolchah pernah menyampaikan kepada istrinya bahwa ia ingin meninggal dunia saat bertugas. Seringkali ia menyampaikan buat apa umur panjang tetapi tidak bermanfaat.[85] Bahkan, di tengah kegelisahannya, ia menyatakan jika sudah tidak bermanfaat, ia siap untuk dipanggil oleh Allah Swt. Dengan demikian, bisa dipahami jika selama hidupnya ia senantiasa jalankan untuk dapat memberikan kemanfaatan baik pada diri, keluarga, dan masyarakat, relebih-lebih bermanfaat dalam pandangan Allah.

Tolchah berpulang kembali ke rahmatullah meninggalkan catatan sejarah emas yang senantiasa dikenang dan diteladani oleh anak cucu dan generasi-generasi berikutnya.

---

[83] Pernah suatu saat, pasca Muktamar NU di Situbondo, Tolchah ditawari menjadi Duta Besar oleh Presiden Soeharto. Ia lantas mengatakan pada kakaknya (Usman Mansoer) yang juga seorang tentara intelektual, "lebih baik saya jualan pisang goreng daripada jadi dubes di Irak". Konteks saat itu Tolchah dianggap terlalu kritis, dan membahayakan pemerintahan Orde Baru, Oleh Karena itu, Soeharto berkeinginan "mengamankannya" ke luar negeri. Wawancara dengan Nur Diana, 27 Februari 2008.

[84] Sebenarnya pada saat menulis disertasi kesehatan Tolchah mulai menurun. Hampir sepanjang malam, waktunya dihabiskan untuk membaca dan menulis. Bahkan di tengah kesibukannya di siang hari, jika ide-ide muncul dalam benaknya, langsung saja ia tulis di mesin ketiknya yang terawat hingga sekarang. Wawancara dengan Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

[85] Tim dokter pernah memintanya untuk menghentikan disertasinya, karena dalam kondisinya sakit dan kepayahan tetapi tetap saja Tolchah punya keinginan kuat untuk menyelesaikan disertasinya, bahkan ia mengatakan "seandainya saya mati dalam menyelesaikan disertasi ini, maka mati saya adalah syahid". Wawancara dengan KH. Ahmad Fatah, 20 Januari 2008.

Tolchah memberikan firasat beberapa hari menjelang kematiannya dalam sebuah bait puisi:

Langkah panjangku
Telah lama kuukur
Aku tak tahu
berapa lagikah.
Hari-hariku telah berlalu
Dan berapa hari lagikah
Sudah dekatkah
Langkahku akan berhenti
Dan apakah hari-hariku
Hingga hari ini[86]

Beriring dengan rintik hujan setelah Maghrib, tanggal 17 Shafar 1407 H bertepatan 20 Oktober 1986, ia menghadap sang Khaliq[87]. Tokoh yang sederhana dan bersahaja ini, meninggalkan keluarga, murid, organisasi, dan puluhan karyanya yang akan terus di kenang sepanjang zaman. Aktifitas dakwah, mengajar di berbagai perguruan tinggi, dan karya-karyanya tersebut menjadi amal jariyah yang ia bawa menjumpai penciptanya.[88]

Malam itu pula, KH. Ali Ma'sum Krapyak Yogyakarta (Rais Syuriah PBNU 1989-1994) bermusyawarah dengan pihak keluarga tentang tempat pemakaman. Pada akhirnya atas usul dan saran Kiai Ali, maka jenazah beliau dikebumikan di makam keluarga Pesantren Krapyak. Pagi harinya, sebagaimana yang diberitakan Harian *Kedaulatan Rakyat*, ribuan pelayat mengantarkan dari kediamannya di Colombo no. 21. Sejenak

[86] Bait puisi ini ditemukan oleh pihak keluarga (salah satu putranya), beberapa bulan setelah kematian Tolchah. Wawancara dengan Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

[87] Setiap tanggal 17 Shafar oleh anak cucu Tolchah diperingati dengan acara khaul, beserta keluarga besar Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam Yogyakarta.

[88] Pada saat meninggal dunia, pihak keluarga mendapatkan kawat ucapan Belasungkawa dari Presiden Soeharto. Pemimpin Orde Baru tersebut, mengetahui sepak terjang Tolchah, karena substansi isi disertasinya mengkritik pemerintahan Orde Baru.

disholatkan di Masjid kampus dan mendapatkan penghormatan terakhir dari segenap civitas academik PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di tengah kerumunan para *takziyin* itu tampak pula Sri Pakualam ke VII, dan beberapa tokoh nasional. Mewakili sambutan dari PBNU adalah KH. Masykur (Komandan Hisbullah pada masa revolusi fisik dan Mantan Menteri Agama Republik Indonesia)[89]. Sedangkan sambutan dari pihak IAIN Sunan Kalijaga disampaikan oleh Drs. Mu'in Umar, MA. Sementara dari pihak keluarga adalah paman dari pihak Umroh Mahfudzoh, yakni M. Najib Wahab di dampingi oleh kakanda tercinta Usman Mansoer.

Jalan panjang Tolchah telah berakhir. Bukan hanya keluarga, tetapi dunia ini ini telah kehilangan sosok pentingnya. Tapi sejarah tentang dirinya seolah belum juga berakhir. Karakter, idealisme dan cita-citanya akan terus berkibar. Ia tidak saja dikenang oleh keluarga dan para temannya, tetapi juga oleh setiap generasi yang menapaki jejak dan pemikiran-pemikirannya. Bagi keluarga, ia tentu ia merupakan sosok yang tak terlupakan. Karena kehangatannya sebagai sosok sang ayah, hingga kini Fajrul Falaakh, sang putra sulung, masih merasakan seolah ayahnya masih bersama dengannya. Bagi kawan, kolega, penerus dan pengikut pikiran dan gerakannya, ia adalah cahaya yang masih terus menerangi dunia ini.[]

[89] KH. Masykur dalam pidatonya menyebutkan bahwa Tolchah adalah sosok ulama dan ilmuan.(lihat *Kedaulatan Rakyat*, 21 Oktober 1986). Sementara itu Paku Alam VIII dalam pidato pelepasan jenazahnya mengatakan bahwa Tolchah adalah sosok pemimpin yang bijak. Lihat juga Mastuqi HS, M. Ag, M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren*.. hal 108.

BAB III
Menapaki Dunia Gerakan Sosial-Politik

Pergulatan Tolchah Mansoer dalam dunia gerakan berawal sejak negeri ini berdiri; kala pergerakan muda di tanah air menemukan momentumnya. Pada tahun 1945, saat masih duduk di SMP, Tolchah menjadi Sekretaris Umum Ikatan Moerid Nahdlatoel Oelama (IMNO) Wilayah Kota Malang. Waktu itu ia juga tercatat sebagai anggota Organisasi Putra Indonesia, salah satu organisasi yang mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1945-1948. Ia juga tergabung dalam Pengurus Himpunan Putra Islam Indonesia Malang. Di masa yang sama, Tolchah remaja juga menjabat sebagai sekretaris Barisan Sabilillah untuk daerah pertempuran Malang Selatan dan sekaligus menjadi sekretaris bagian penerangan Markas Oelama Djawa Timur (MODT).[90] Saat duduk di SMA Taman Siswa di Malang, ia sudah menjadi pengurus PII cabang Malang.[91] Di samping beraktivitas dalam organisasi ini, sejak tahun 1948, Tolchah sudah mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan dengan menjadi guru di Sekolah Rakyat (SR) NU dan Sekolah Menengah Agama Islam (SMAI) di Malang.[92]

Aktivitas berorganisasinya berlanjut selama ia mengenyam kuliah di Yogyakarta mulai tahun 1950-an. Pada saat menempuh studi pada Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik (HESP) Universitas Gajah Mada (UGM), pikiran Tolchah sudah terfokus untuk organisasi. Kegemaran Tolchah berorganisasi sangat tinggi,

---

[90] Saifullah Ma'shum (ed.), *Kharisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung: Penerbit Mizan), 1998, hal. 374. Baca juga H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista-LTNU NU Jawa Timur), 2007, hal. 288.

[91] Saat itu kantor PII Malang bertempat di rumah sekretarisnya, Ismail Makky, Jl. Kawi Nomor 9 Malang. Ismail Makky adalah kawan akrab Tolchah Mansoer yang pada masa berikutnya juga menjadi kawan seperjuangan di IPNU. Ia meninggal di Jakarta pada tahun 2008.

[92] Mastuqi HS, M.Ag. dan M. Ishom El-Saha, M.Ag, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 1995, hal. 107.

sampai-sampai pada tahun 1953 ia rela mengorbankan kuliahnya. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 1959, ia baru meneruskan studinya dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1964.[93] Keterlibatan Tolchah dalam berbagai gerakan dan organisasi ini menunjukkan bahwa minatnya pada dunia organisasi dan gerakan sosial sangat tinggi.

Dengan berorganisasi Tolchah muda dapat mengembangkan kepekaannya terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, di samping untuk menyalurkan bakat kepemimpinannya. Sederet jabatan pernah ia pegang. Di kota pelajar itu ia menjabat Ketua Departemen Penerangan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Selanjutnya, sejak tahun 1952 ia dipercaya menjadi Ketua I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Panitia Kongres Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia.[94]

Bergabungnya Tolchah Mansoer dan beberapa aktivis mahasiswa NU di PII dan HMI disebabkan karena saat itu hanya kedua organisasi itulah yang merepresentasikan pelajar dan mahasiswa Islam dan bersifat nasional.[95] Sementara itu organisasi-

[93] Saifullah Ma'shum (ed.), *Kharisma Ulama....*, hal. 372.

[94] H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU.....*, hal. 288.

[95] Masuknya Tolchah Mansoer ke dalam PII dapat dilihat sebagai kecenderungan umum pelajar dari kalangan tradisonalis kala itu. Menurut Yudi Latif, selama beberapa tahun setelah revolusi kemerdekaan, kalangan pelajar dari keluarga-keluarga tradisonalis tidak memiliki pilihan lain kecuali bergabung dengan PII dan HMI. Alasannya bukan hanya karena afiliasi NU dengan Masyumi hingga tahun 1952 dan keputusan Kongres al-Islam pada 1949 yang merekomendasikan PII dan HMI sebagai satu-satunya organisasi pelajar/mahasiswa muslim. Namun, yang lebih penting lagi adalah karena para pelajar dari keluarga-keluarga tradisionalis yang masuk ke sekolah-sekolah modern masih relatif sedikit. Jadi, para mahasiswa dari keluarga-keluarga tradisionalis seperti Toha Mashudi (lahir 1923) dan Mukti Ali dari STI turut mendirikan HMI dan PII. Para mahasiswa tradisionalis yang masuk universitas pada 1950-an, seperti Tolchah Mansoer (UGM), Ismail Makky (IAIN Yogyakarta), dan Mahbub Djunaedi (UI) juga bergabung dengan HMI sebelum kemudian mendirikan organisasi pelajar dan mahasiswa tradisionalisnya sendiri.

organisasi pelajar berbasis NU masih bersifat lokal. Setidaknya bisa dicatat, sejak tahun 1930-an, di kalangan tradisionalis berdiri organisasi pelajar seperti *Tsamrotul Mustafidzin* di Surabaya pada 11 Oktober 1936; Persatoean Siswa Anak-anak NO (Persano) pada 1939; Persatoean Anak Moerid NO (PAMNO) di Malang pada 1941; Ikatan Moerid Nahdlatul Oelama (IMNO) pada tahun 1945 di Malang; *Idjtimauttolabah Nahdlatul Oelama* (ITNO) di Sumbawa pada 1946; Subbanul Muslimin yang berdiri di Madura, dan masih banyak lagi.[96]

Selain bersifat lokal, organisasi-organisasi tersebut hanya menampung pelajar yang berasal dari sekolah-sekolah NU dan pesantren-pesantren. Dengan begitu, organisasi-organisasi tersebut belum bisa menjadi alat konsolidasi pelajar secara nasional, sebab masih memberikan ruang senjang antara para pelajar yang berasal dari pesantren, madrasah, dan sekolah umum baik negeri maupun swasta. Corak dan watak gerakannya masih bersifat lokal dan parsial. Yang menyatukan mereka hanyalah imajinasi kolektif yang dibentuk dari tradisi keagamaan Sunni yang sama.[97]

Secara umum, memang gerakan-gerakan pemuda pada sebelum perang dunia kedua masih bersifat lokal. Sedangkan pada jaman jepang gerakan-gerakan tersebut hampir tidak terlihat. Hal ini karena seluruh kegiatan pemuda dipusatkan pada Gerakan Pemuda Pelopor (Barisan Pelopor) dan selanjutnya dibentuk *Seinendan*. Namun begitu, tokoh-tokoh Nahlatul Ulama kala itu mulai berkecimpung dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat, yang dulu belum pernah mereka masuki. Hal ini tentu saja mampunyai pengaruh yang tidak kecil bagi pertumbuhan pelajar dan masyarakat Islam.

Bahkan, meskipun NU telah mengundurkan diri dari Masyumi, hal ini tidak segera membuat pelajar/mahasiswa NU memisahkan diri dari PII dan HMI. Baca lebih lanjut Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: mizan), 2005, hal. 432.

[96] M. Tolchah Mansoer dkk, *Sedjarah Perdjuangan IPNU dari Masa ke Masa*, (Jogjakarta: Jajasan Lima Empat), 1964, hal. 7.

[97] Mujtahidur Ridho, *Reinventing IPNU: Mengayuh Sampan di Perkampungan Global* (Yogyakarta: eL-Kutz) 2003, hal. 31.

Pada masa proklamasi, seluruh bangsa Indonesia bangkit, termasuk umat Islam dan khususnya kaum nahdliyyin. Gerakan muda juga kembali bergeliat, namun gerakan pelajar kala itu belum tampak menasional. Gerakan-gerakan pelajar baru memperlihatkan bentuk konkritnya di kancah nasional setelah tahun 1950-an. Pada periode ini ada beberapa organisasi pelajar NU yang muncul, seperti PERPENO (Persatuan Pelajar Nahdlatul Olama') yang lahir pada 13 Juni 1953 di Kediri, IKSIMNO (Ikatan Siswa Mubalighin Nahdlatul Oelama') yang lahir pada 1952 di Semarang, IPINO (Ikatan Pelajar Islam Nahlatul Oelama) yang lahir tahun 1953 di Bangil, IPNO (Ikatan Pelajar Nahlatul Oelama) yang lahir pada 27 Desember 1953 di Surakarta dan lain-lain. Namun, sekabli lagi, organisasi-organisasi itu belum sepenuhnya menjadi organisasi yang bersifat nasional.

Sementara itu di bagian lain, di luar komunitas NU sudah lebih dulu tumbuh berbagai organisasi pelajar dan mahasiswa, seperti Perkumpulan Pemuda Kristen (PPKI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Germasos), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi pemuda itu pada umumnya berafiliasi pada kekuatan politik tertentu. Dalam konteks sosial-politik seperti itulah Tolchah Mansoer dibentuk oleh sejarah menjadi bagian dari dunia gerakan kaum muda.

A. Merintis Organisasi Pelajar NU

Dalam konstelasi gerakan muda di atas, melalui keputusan Kongres al-Islam pada 1949, PII dinobatkan sebagai satu-satunya organisasi pelajar muslim dan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa muslim. Karena itulah pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang Islam, baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis, turut menjadikan kedua organisasi ini sebagai wadah kaderisasi dan aktualisasi gerakan. Namun, bagi kalangan pelajar nahdliyin, keikutsertaaan mereka ke dalam dua organisasi itu bukan tanpa masalah. Masalah ini terkait dengan kontestasi politik para "orang tua"nya yang berafiliasi di NU dan Masyumi. Kontestasi antara kalangan modernis dan tradisionalis tampaknya sudah merambah di kalangan pelajarnya.

Barangkali berdasarkan kenyataan itulah dalam suatu pengantar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU yang pertama kali diterbitkan, Tolchah Mansoer menulis:

> *.....haruslah diinsjafi berdirinja organisasi Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama' bukan sekedar tumbuh dan ditumbuhkan begitu sadja, apalagi kalau diingat suasana dan waktu pertama kali organisasi ini dilahirkan di persada tanah air, sungguh waktu itu merupakan saat jang pahit, jang terdapat di dalamnja pertentangan dan perselisihan jang dirasakan tidak enak oleh masjarakat kita terutama masjarakat Islam.*[98]

Ismail Makky mengakui, saat itu sudah muncul kegelisahan terhadap PII. Kegelisahan ini terjadi karena organisasi pelajar itu tidak mengakomodasi pelajar-pelajar dari pesantren sehingga para santri NU ini tidak ada yang mengurus. Tolchah bersama Ismail Makky termasuk yang menggelisahkan kondisi itu.[99] Kegelisahan inilah yang pada gilirannya menginspirasi para aktivis mahasiswa NU ini untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa mencakup pelajar pesantren dan pelajar umum. Di sinilah cita-cita penggabungan dua komponen pelajar itu mulai terbangun di benak Tolchah Mansoer. Dalam kesaksian Ismail Makky, orang yang merepresentasikan dua dunia pelajar itu adalah Tolchah Mansoer. Sebagaimana diketahui, Tolchah merupakan satu dari sedikit kalangan santri tradisionalis kala itu yang mengenyam pendidikan umum. Pemikiran-pemikiran Tolchah muda kala itu juga merefleksikan pemikiran pesantren dan pendidikan umum.[100]

Kegelisahan Tolchah tampaknya menemukan momentum dengan gagasan yang sama di kalangan aktivis

---

[98] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama'*, (Jogjakarta: PP IPNU), 1957, hal. 5-6.

[99] Wawancara dengan H. Ismail Makky, 28 September 2007.

[100] Kegelisahan itu mudah dipahami karena militansi Tolchah terhadap NU sudah terbangun sejak kecil, sejak ia berproses dalam IMNO, sebuah organisasi pelajar NU lokal yang selanjutnya menjadi salah satu embrio berdirinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

mahasiswa NU di Yogyakarta kala itu Kegelisahan itu bertaut dengan fakta bahwa organisasi pelajar NU yang ada kala itu masih bersifat kedaerahan. Karena itulah kesadaran pentingnya pengorganisasian pelajar NU di tingkat nasional semakin menguat. Beberapa mahasiswa NU dari Yogyakarta, Solo dan Semarang, berkumpul untuk merealisasikan gagasan pembentukan organisasi pelajar NU yang berskala nasional. Berdasarkan fakta adanya gagasan yang sebangun inilah, menurut beberapa sumber sejarah, Tolchah sudah terlibat dalam diskusi penggagasan organisasi pelajar NU bersama M. Shufyan Cholil (Yogyakarta), H. Musthafa (Solo), dan Abdul Ghony Farida (Semarang).[101]

Dalam kesaksian Djamaluddin Abdullah Sadjad, sejak awal Tolchah Mansoer dan kelompoknya (yang dimaksud adalah para pendiri) sangat aktif dalam mengkonsolidasikan gerakan kaum muda NU. Mereka sering berkumpul di daerah Bumijo Yogyakarta (kawasan sebelah barat perempatan tugu). Di sebuah rumah kos-kosan di daerah tersebut gerakan kaum muda NU itu dirumuskan.[102] Setelah matang, gagasan perintisan organisasi selanjutnya dibawa oleh ketiga orang ini pada Konferensi Besar LP. Ma'arif di Semarang pada Pebruari 1954.[103]

Gayung pun bersambut. Gagasan progresif ini diakomodir untuk dijadikan agenda pembahasan. Akhirnya Konferensi Besar Ma'arif Semarang tersebut mengesahkan berdirinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada tanggal 24 Pebruari 1954, ber`tepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1373

[101] Bahkan menurut sebuah versi yang disampaikan oleh Toha Abdurahman, Tolchah Mansoer adalah penggagas pertama organisasi pelajar ini. Wawancara dengan Toha Abdurrahman, 31 Januari 2008.

[102] Wawancara dengan KH Djamaluddin Abdullah Sadjad, 29 September 2008.

[103] Tidak diketahui sebabnya, pada perhelatan ini Tolchah Mansoer tidak turut serta. Sehingga, dalam dokumen dan catatan sejarah, pendiri IPNU yang disebut hanya M. Shufyan Cholil, H. Musthafa, dan Abdul Ghony Farida.

H.[104] Tanggal inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal kelahiran organisasi pelajar NU ini. Dalam perhelatan tersebut, Tolchah Mansoer ditunjuk oleh Konferensi Besar sebagai Ketua Umum IPNU, meskipun yang bersangkutan tidak hadir.

Setelah disetujui dalam Konferensi Besar di Semarang itu, selanjutnya diselenggarakan Konferensi Segi Lima di Solo pada 30 April-1 Mei 1954. Pertemuan yang melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri tersebut merupakan konsolidasi organisasi setelah resmi berdiri.[105] Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi yaitu *ahlussunnah wal jamaah*; tujuan organisasi yakni mengemban *risalah Islamiyah*; mendorong kualitas pendidikan; dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini juga menetapkan Yogyakarta sebagai kantor pusat organisasi.[106] Keputusan penting lainnya dalam konferensi ini adalah penetapan Moh. Tolchah Mansoer sebagai Ketua Umum pertama.[107] Penetapan Tolchah sebagai ketua umum ini sebenarnya hanya merupakan formalisasi dan peneguhan atas

[104] PB Ma'arif sebenarnya memang sudah memasukkan isu tentang pelajar NU sebagai agenda pembahasan Konbes. Langkah ini menindaklanjuti kegelisahan para tokoh NU, termasuk KH Wahid Hasyim, tentang langkanya mencari kader intelektual NU. Baca Asrorun Niam Sholeh dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah: 50 Tahun Pergulatan dan Kiprah IPNU dalam Mengabdi Ibu Pertiwi*, (Jakarta: eLSAS), 2003, hal. 5.

[105] M. Tolchah Mansoer dkk, dkk, *Sedjarah Perdjuangan IPNU*....., hal. 8.

[106] Yogyakarta dipilih sebagai pusat kedudukan organisasi karena di samping sebagian para penggagasnya adalah mahasiswa di Yogyakarta, juga karena Yogyakarta adalah kota pelajar. Kala itu kantor pusat organisasi perlajar, termasuk PII, juga di Yogyakarta.

[107] Dalam pertemuan ini Tolchah sudah terlibat. Namun kala itu sebenarnya ia masih menjabat sebagai pengurus PB PII. Menurut riwayat, setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum, kemudian ia tidak lagi aktif sebagai kader PII.

penunjukkan yang dilakukan pada Konferensi Besar Ma'arif di Semarang.

Di samping karena Tolchah adalah mahasiswa yang paling cerdas dan menonjol di antara teman-temannya, penunjukkan ini dilakukan lebih karena Tolchah merupakan tokoh pelajar yang mempunyai gagasan dan pemikiran untuk menggabungkan kaum santri dan pelajar umum. Menurut penuturan Ismail Makky, pemikiran tersebut merupakan pemikiran otentik dari Tolchah Mansoer.[108] Bahkan, bersama Ismail Makky, kegelisahan terhadap PII yang tidak mengakomodir kedua komponen pelajar ini pada tahun 1949 sudah memuncak pada penggagasan organisasi meskipun belum sampai pada tahap pendirian. Gagasan ini baru menemukan momentumnya setelah mereka bertemu dengan dan berkumpul dengan Sofyan Kholil, Abdul Ghani Faridha dan A. Mustahal. Dari sinilah sejarah IPNU itu dimulai.

Moensif Nahrawi, mantan Sekretaris Jenderal PP IPNU masa Tolchah Mansoer menuturkan testimoninya sebagai berikut:

> *"Alasan penunjukkan tersebut didasarkan atas senioritas Tolchah Mansoer. Selain itu Tolchah sejak awal juga punya kegelisahan yang sama tentang generasi muda NU. Tolchah berpandangan bahwa NU harus memiliki organisasi kepelajaran, sehingga kader-kader NU (putra-putra orang NU yang kuliah di Jogyakarta saat itu) tidak lagi bergabung dengan PII ataupun HMI, karena dianggap ideologinya telah berbeda. Dengan bertemunya tiga penggagas dengan Tolchah Mansoer inilah yang merupakan awal pendirian organisasi kepelajaran di Nahdhatul ulama."*[109]

---

[108] Baru kemudian, Ismail Makky, Sofyan Kholil, dan Hartono mengikuti pemikiran tersebut. Itulah mengapa kemudian dalam susunan kepengurusan Tolchah Mansoer menunjuk Ismail Makky untuk menjadi ketua bidang yang menangani penggabungan antara pelajar pesantren dan pelajar umum ini.

[109] Wawancara dengan KH Munsif Nachrawi, 28 Pebruari 2008.

Pada pertemuan lima kota di Solo tersebut, hadir juga beberapa pelajar putri Sekolah Guru Agama (SGA) Solo, yang selanjutnya menyepakati berdirinya organisasi pelajar putri NU. Pelopornya organisasi ini adalah Umroh Mahfudhoh, Atikah Murtadlo, Lathifah Hasyim, Romlah, dan Basyiroh Saimuri.[110] Umroh Mahfudhoh adalah putri KH Wahab Hasbullah yang akhirnya menjadi istri Tolchah Mansoer. Di forum inilah mereka pertama kali bertemu. Tentang pendirian organisasi itu, dia mengisahkan:

> *"Dulu saya kos di Pak Mustahal Ahmad, (putra bapak Kyai Mashud -pen) Solo. Pada saat itu, Pak Mustahal lah yang mendukung berdirinya organisasi pelajar putri. Dia yang menyemangati agar kami mampu secara mandiri untuk mendirikan organisasi. Demikian juga Pak Tolchah yang sejak awal menghendaki IPNU dan IPPNU terpisah, sekalipun banyak di kalangan kader putri mengusulkan untuk bergabung, tapi di tolak oleh Pak Tolchah. Baginya, kalau Muslimat dan Fatayat saja bisa berdiri secara mandiri, mengapa IPPNU tidak bisa…"*[111]

Kelahiran organisasi pelajar NU ini seperti memulai babak baru sejarah organisasi tradisional ini. Kelahiran IPNU dan IPPNU menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika Nahdlatul Ulama. Karena perintisan organisasi ini terjadi pada saat NU sedang berkiprah sebagai partai politik, maka keberadaannya jelas tidak bisa dilepaskan dengan konstelasi perpolitikan kala itu. Namun, semangat pendirian organisasi bukanlah semangat politik. Banyak orang menganggap bahwa berdiri IPNU sebagai bagian dari konsolidasi politik partai. Namun hal ini segera diklarifikasi oleh Tolchah Mansoer. Tolchah menulis:

---

[110] Baca Muchammad Romahurmuziy dkk (ed.), *Sejarah Perjalanan IPPNU 1955-2000,* (Jakarta: Pimpinan Pusat IPPNU), 2000, hal. 10-11.

[111] Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 31 Januari 2008.

Mungkin orang menganggap kita ini berpolitik. Tetapi orang tidak tahu bagian apa dari Nahdlatul 'Ulama' itu jang berpolitik.

Dalam hal ini perlulah dimengerti hubungan IPNU adalah dengan Ma'arif (bagian pengadjaran) dan IPNU tidak akan berbitjara dalam hal politik. Itu urusan tanfidziyah Nahdlatul 'Ulama'.

Ja, IPNU adalah anak Nahdlatul 'Ulama'.

Jang harus diketahui: IPNU mempunjai hak atas dirinja sepenuh-penuhnja.[112]

Bagi Tolchah meskipun IPNU menjadi onderbow NU, sebuah organisasi kemasyarakatan yang tengah berstatus sebagai partai politik, namun ia lahir bukan untuk kepentingan politik praktis. Tolchah memandang IPNU tetap memiliki otonominya sebagai organisasi pelajar. Memang tidak bisa dipungkiri, IPNU berdiri menjelang Pemilu 1955. Keberadaannya merupakan bagian dari keluarga Partai Nahdlatul Ulama'. Karena itu kelahiran IPNU memang terkait dengan keberadaan PNU. Di sinilah tantangan Tolchah Mansoer untuk mampu memposisikan IPNU sebagai organisasi penyatuan sekaligus pengkaderan pelajar NU tanpa harus teritervensi oleh kegiatan-kegiatan politik. Jelasnya, PNU besar bukan karena keberadaan IPNU, karena basis NU memang ada dan cukup kuat, terutama di Jawa, namun IPNU juga turut membesarkan NU dari sisi kaderisasainya. Tidak mudah untuk mengembangkan organisasi kader yang non politik di saat organisasi induknya menjadi partai politik.

Untuk menegaskan bahwa IPNU adalah organisasi kader maka PP IPNU memfokuskan diri pada proses kaderisasi untuk meningkatkan kualitas kader. Hal ini karena IPNU didirikan karena ada kebutuhan kaderisasi. Baik sebagai partai politik maupun sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan, NU dituntut untuk mendiversifikasi kader-kadernya. "Jadi saya merasakan tidak semata-mata untuk kepentingan politik, tapi memang perkembangan zaman harus ditanggapi dan salah satu

[112] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....*, hal. 7.

tanggapannya harus mempunyai kader-kader di semua bidang," tutur H. M. Said Budairy.[113]

Berdasarkan kebutuhan itulah, IPNU lahir dengan misi penyatuan dua komponen pelajar sebagaimana digelisahkan oleh Tolchah Mansoer tersebut. Menurut Asnawi Latif, IPNU ingin meraih kembali para santri yang dimarjinalkan dalam pergaulan sosial oleh organisasi-organisasi pelajar kala itu, salah satunya PII.[114] Memang, Tolchah adalah orang yang berada di garda depan dalam cita-cita penyatuan ini. Namun, bagi Tolchah, tujuan berdirinya IPNU lebih dari sekadar pemenuhan harapan itu. Menurut Tolchah:

> ..... *berdirinja organisasi Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama' tidak hanja sekedar mengumpulkan kawan baik dari pesantren, dari sekolah2 menengah Nahdlatul 'Ulama' dan umum ataupun dari universitet2. Bukan hanja itu. Ada dasar jang bersifat ideologisch jang menjebabkan dia tumbuh. Dia mempunjai sebab dan memiliki principe idoelogisch jang memerlukan ideologiese dranger jang melaksanakannja walau bagaimana djuga zaman dan orang berkata tentangnja.*[115]

Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, berdirinya IPNU jelas merupakan momentum penting. Pendirian IPNU merupakan langkah yang sangat menumental bagi perkembangan organisasi terbesar di Indonesia ini. Sejak menyatakan dirinya sebagai partai politik pada tahun 1952 NU tidak memiliki kader potensial kecuali para santri di pesantren-pesantren dan madrasah. Dengan kata lain, di saat NU tengah menempati posisi menantang, justru belum memiliki perangkat kaderisasi yang dapat menjamin keberlanjutan organisasi. Pada saat yang sama, putra-putra orang NU hampir semuanya terfokus pada pendidikan agama, padahal kebutuhan NU akan sumberdaya

---

[113] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

[114] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

[115] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....*, hal. 6.

pada semua bidang sangat mendesak. IPNU didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[116]

M. Said Budairy, seorang yang turut terlibat dalam pergulatan IPNU pada masa-masa awal, menggambarkannya sebagai berikut:

> *"Pada tahun 1954 NU baru berusia 2 tahun menjadi partai politik. Dibutuhkan kader-kader. Dimanapun partai politik adalah sebuah sarana untuk bisa ikut berkuasa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka kemudian di samping kenyataan bahwa putra-putra orang NU itu juga terus tumbuh termasuk yang di sekolah sekolah umum, maka kemudian berdirilah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tersebut."*

Perintisan IPNU merupakan suatu langkah yang sangat monumental karena dari sinilah awalnya NU memiliki kader-kader dengan berbagai arah profesinya. Dengan demikian, kelahiran IPNU sesungguhnya bukan untuk kepentingan politik praktis semata, melainkan untuk kepentingan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Kader-kader perintis IPNU yang kala itu tumbuh di Yogyakarta itu oleh M. Said Budairy disebut sebagai aset yang luar biasa bagi NU. Merekalah yang kemudian menggerakan dan akhirnya mengembangkan IPNU ini dengan kepemimpinan utamanya Tolchah Mansoer. Selain Tolchah Mansoer dan ketiga pendiri di atas, yang termasuk tokoh awal organisasi ini antara lain Najib Wahab, Ismail Makky, Al Fatih, Musa Abdillah, dan Jamaludin Abdullah Sadad.[117]

Setelah resmi berdiri, selanjutnya IPNU melakukan konsolidasi. Sebagai tempat berkumpul dan pusat aktivitas organisasi, IPNU selanjutnya menetapkan sekretariatnya di sebuah masjid sederhana di Jl. Gandekan Lor 52 Yogyakarta (kini masjid yang bernama An-Nadzar yang terletak di sebelah barat Pasar Kembang). Masjid tersebut bersebelahan dengan

[116] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

[117] Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 31 Januari 2008.

rumah KH Cholil yang menjadi sesepuh masjid tersebut.[118] Menurut riwayat, Kiai Cholil lah yang selalu memfasilitasi berkumpulnya anak-anak muda di sana kala itu.[119]

Dari masjid yang tidak terlalu besar itu, selanjutnya IPNU bergerak mengepakkan sayapnya. Hasil Konferensi segi lima digodok untuk selanjutnya di sebarkan keseluruh pelosok Tanah Air, terutama kota-kota yang terdapat pesantren. Ternyata masyarakat pelajar NU cukup antusias menyambut kelahiran IPNU. Dalam waktu singkat IPNU dikenal secara luas. Berbagai cabang bermunculan. Setelah Konferensi Segi Lima tersebut, para pengurus Pusat IPNU sering menerima permintaan daerah-daerah yang mengajukan pengesahan dan pelantikan Pengurus Cabang IPNU.[120]

Untuk mendapatkan legitimasi keberadaan IPNU sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, maka Pimpinan Pusat IPNU menghadiri dan menyampaikan pendirian organisasi ini dalam Muktamar NU ke-20 di Surabaya pada 9-14 September 1954. Di bawah pimpinan langsung Tolchah Mansoer, dalam perhelatan itu IPNU mengirimkan utusanya yaitu M. Syufyan Cholil, M. Najib Abdul Wahab, Abdul Ghoni Farida, dan M. Asro'. Perkembangan baru dunia pelajar dan santri NU ini mendapat respon dari muktamirin. Lewat Muktamar NU ini, selanjutnya IPNU diakui secara resmi sebagai satu-satunya organisasi pelajar putra yang berada di bawah NU. Pengakuan NU resmi diberikan setelah Ketua Umum PP. IPNU, Tolchah Mansoer menyampaikan urgensitas keberadaan IPNU dihadapan peserta Muktamar NU saat acara sidang pada tanggal 14 september 1954.[121]

Dalam kesaksian KH A Muchit Muzadi, dalam penjelasannya Tolchah Mansoer mengatakan bahwa IPNU

---

[118] Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 31 Januari 2008.

[119] Wawancara dengan KH Toha Abdurrahman, 31 Januari 2008.

[120] Asrorun Niam Sholeh dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah*....., hal. 6.

[121] Asroroun Niam dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU*...., hal. 7.

berdiri sebagai wadah kaum muda terpelajar NU, agar mereka tidak masuk HMI, PII, dan lain-lain. Pendirian IPNU merupakan usaha untuk membuat rumah sendiri agar bisa lebih berkreasi, berjuang membawa nilai-nilai *ahlussunnah wal jamaah*. Hal ini bisa dipahami karena kala itu banyak anak muda NU yang dari Jawa Timur yang mengenyam kuliah di Yogyakarta. Mereka membutuhkan tempat untuk berorganisasi. Wadah yang paling tepat adalah IPNU.

> *"Jadi tujuan utama IPNU memang didasari menjaga agar kader NU tidak ikut-ikutan masuk PII dan HMI. Alasan berikutnya adalah memang IPNU di harapkan mampu mencetak kader unggulan yang bermanfaat bagi tanah airnya kelak".*[122]

Setelah mendapatkan legitimasi dari organisasi induknya Nahdlatul Ulama, IPNU terus bergerak. Kepengurusan IPNU periode Proklamasi (1954-1955) langsung menjalankan tugas keorganisasiannya. Dalam menjalankan organisasinya, Tolchah Mansoer dibantu oleh kepengusuan sebagai berikut: Musa Abdillah (Ketua I), M. Syufyan Cholil (Ketua II), Md. Asrof Wibisono TN (Sekretaris Umum), Ahmad Al-Fatih (Sekretaris I), Moh. Zamroni (Sekretaris II), Abdullah Azmi dan Slamet Effendi (Bag. Keuangan), A. Djari, Mulyono, Mustahal A.M (Bag. Pendidikan), Musa Abduk Aziz (Bag. Olah Raga), Djamal A. Sajad (Bag. Sosial), Moh. Janhari A.S, Rifa'i Yusuf, Ismail Makky, Moh. Qudsy, dan Masyhury (masing-masing sebagai Pembantu Umum).

Karena Pimpinan Pusat berkedudukan di Yogyakarta, sementara ibukota Negara RI ada di Jakarta, maka untuk membantu penyelenggaraan organisasi dan hubungan ekternal, pada saat itu PP IPNU membentuk Perwakilan Pimpinan Pusat IPNU yang selanjutnya disebut PPP IPNU yang berpusat di Jakarta. Perwakilan organisasi ini dipimpin oleh AA. Murtadhlo yang kala itu menjadi mahasiswa ADL. Dalam menjalankan organisasi dibantu oleh Suwigjo (wakil ketua), A.C Mawardi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sekretaris),

[122] Wawancara dengan KH A. Muchit Muzadi, 27 Pebruari 2008.

Shobih Ubaid (sekretaris I), M. Said Budairy (sekretaris II), Jusuf Mustaqim (Bendahara I), A. Baidlowi (Bendahara II), Mahfud Nur, dan Qomaruddin Arifin (masing masing pembantu umum)[123]. PPP IPNU berkantor di Jl. Kebon Sirih Barat Dalam No. 90. Dibentuknya PPP IPNU ini berdasarkan kenyataan bahwa pusat kekuasaan dan aktifitas gerakan organisasi kepemudaan berada di Jakarta. Tugas PPP IPNU adalah mewakili PP IPNU dalam hubungannnya denan organisasi lain, termasuk federasi organisasi kepemudaan dan kepelajaran. Di samping itu PPP IPNU ditugasi oleh PP IPNU untuk menangani hal-hal yang bersifat kemahasiswaan.[124]

Di bawah kepemimpinan Tolchah Mansoer Pimpinan Pusat IPNU periode awal ini segera melakukan kerja-kerja organisasi sebagaimana diamanatkan Konferensi Lima Daerah di Surakarta. Kegiatan organisasi pada masa awal ini lebih ditujukan untuk melakukan konsolidasi dengan mendirikan cabang-cabang. Untuk melakukan ini Tolchah Mansoer mengunjungi berbagai daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang IPNU. Sementara itu untuk pembentukan cabang-cabang IPNU di daerah-daerah, PP IPNU meminta kepada PB. Ma'arif agar dapat mengeluarkan instruksi kepada cabang-cabangnya untuk segera memfasilitasi pembentukan IPNU di daerahnya.

Pengakuan resmi dari NU merupakan spirit baru bagi IPNU. Anak-anak muda terpelajar ini semakin bekerja keras melebarkan sayap-sayapnya ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Sehingga pada tahun pertama semenjak kelahiranya, IPNU telah mampu meluas ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Sembari melakukan konsolidasi di daerah-daerah, Tolchah melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan Muktamar pertama. Malang adalah daerah yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Karena

[123] Baca selengkapnya Asrorun Niam Sholeh dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU.....*, hal. 8.

[124] Wawancara dengan H.M. Sobich Ubaid, 16 Januari 2008.

itu Tolchah mengutus tim yang dipimpin oleh Djamaluddin A. Sadjad untuk menindaklanjuti rencana ini ke Malang.[125]

Muktamar pertama ini dilangsungkan di Malang pada tanggal 28 Pebruari-5 Maret 1955. Forum permusyawaratan tertinggi ini diikuti tidak kurang dari 30 cabang dan beberapa utusan pesantren di Indonesia. Meskipun baru berumur satu tahun, di bawah kepemimpinan Tolchah organisasi pelajar ini telah mendapat tempat di masyarakat dan diperhitungkan oleh pengusasa. Hal ini dapat dibaca dengan kebesaran Muktamar pertamanya. Perhelatan ini semakin istimewa dengan kehadiran Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin dan Menteri agama RI KH. Masykur.[126] Dalam pembukaan, ketiganya memberi sambutan. Sedangkan dari jajaran PBNU hadir Rais Aam NU KH. Abdul Wahab Chasbullah, Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama KH. Dachlan, dan Ketua Umum PB. Ma'arif NU KH. Syukri Ghozali. Pidato kenegaraan di arena Muktamar pun disiarkan langsung oleh RRI dan diliput media massa. Masyarakat Malang tumpah ruah di halaman Pendopo Kabupaten Malang.

Bertolak dari muktamar itu, IPNU menjadi pijakan awal partai NU dengan dukungan Soekarno untuk kemudian menjadi sebuah partai besar. Sebagai ketua umum pertama organisasi pelajar pertama di lingkungan NU, Tolchah Mansoer telah turut mengantarkan kebesaran NU dengan keberhasilannya mendatangkan Bung Karno dalam Muktamar pertamanya itu.

---

[125] KH Djamaluddin Abdullah Sadjad menceritakan, kala itu mahasiswa PTAIN mengadakan studi tour dari Yogyakarta ke Gontor, Blitar, dan bermalam di Malang. Saat di Malang inilah mereka mengontak pengurus Pimpinan Cabang IPNU Malang. Atas maka atas kesepakatan dengan pimpinan Pusat Ketua PC IPNU Malang, Bachtiar, diamanati sebagai pelaksana Muktamar pertama di Malang. Wawancara dengan KH Djamaluddin A. Sadjad, 29 Pebruari 2008 di Mertosono Nganjuk Jawa Timur.

[126] Menurut beberapa sumber sejarah, di samping menghadiri Muktamar IPNU saat itu Presiden Soekarno juga menghadiri suatu agenda sidang di Malang.

Sehingga dalam pemilihan umum pada tahun yang sama, NU menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia.[127]

Muktamar yang dibuka langsung oleh Presiden mengandung makna tersendiri secara politis. Kehadiran Bung Karno tersebut secara politik dapat dilihat sebagai keinginan untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik. Itulah mengapa beliau mendorong supaya partai NU maju.[128] Hal ini dapat dipahami mengingat tahun 1955 adalah tahun politik karena akan diselenggarakan pemilu pertama. M. Said Budairy menggambarkan situasi politik saat di mana ada momen IPNU lahir, ada momen bermuktamar pertama, ada Bung Karno yang membuka, kemudian langsung pemilihan umum. Selain memang NU memiliki akar yang kuat tapi perkembangan-perkembangan seperti itu diyakini berpengaruh juga, sehingga partai NU menjadi kekuatan politik ketiga dalam pemilu pertama itu. Di sinilah Tolchah Mansoer memberikan jasa yang sangat besar terhadap NU.[129]

Muktamar I IPNU Malang ini kembali memberi amanat memilih Tolchah Mansoer sebagai Ketua Umum PP IPNU periode 1955-1957, dengan susunan pengurus tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kesediaan Tolchah Mansoer untuk dipilih sebagai Ketua Umum terjadi setelah Tolchah didaulat dan diyakinkan oleh teman-temannya, seperti Sofyan Cholil, Jamhari, Ismail Makky. ”Merekalah yang tau betul siapa Pak Tolchah”, tutur Kholid Mawardi yang mengikuti perhelatan tersebut.[130]

Sebagai organisasi pelajar dan terpelajar, sebagian besar aktivis IPNU periode awal adalah anak-anak muda yang masih menempuh pendidikan, baik dipesantren maupun di sekolah-sekolah dan kampus. Seperti M. Tholchah Mansoer yang tercatat sebagai Mahasiswa UGM Yogyakarta, Mahbub Junaedy mahasiswa Universitas Indonesia, M. Sahal Makmun

[127] Wawancara dengan H. M. Said Budairi, 29 September 2007.

[128] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

[129] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

[130] Wawancara dengan Drs. Cholid Mawardi, 16 Januari 2007.

dari Universitas Islam Jakarta, Munsif Nachrawi dari SMA Malang Jawa Timur, dan lain-lain. Muktamar ini juga dipandang berhasil menyatukan ikatan emosional antar pelajar pesantren dan pelajar umum, sebagaimana yang dicita-citakan Tolchah Mansoer.[131]

Penyatuan ini dipandang penting mengingat saat itu NU perlu melakukan konsolidasi kader. Kala itu NU berada dalam konstelasi politik tanah air yang penuh pertarungan. Pada era itu Indonesia dilanda instabilitas politik. Kondisi ini disebabkan pertarungan ideologi antarkekuatan partai politik dan diperparah dengan keterlibatan militer dalam panggung politik. Konflik politik dan ideologi dalam pentas nasional di atas merembes pada semua organ onderbow parpol. Kondisi ini memaksa organ-organ muda pun terbelah dalam pertentangan ideologis sesuai dengan afiliasi politik masing-masing. Garis *front kiri* dan *front kanan* dalam organ kaum muda kian jelas. Perpecahan terjadi antara GMNI, HMI, GMKI, PMKRI, dan Gerrmasos. HMI berafiliasi ke Masyumi, GMNI ke PNI, Germasos ke PSI, dan IPNU serta neven-neven NU lainnya berafiliasi ke Partai NU.[132]

Dalam pergolakan itulah, di bawah kepemimpinan Tolchah Mansoer, IPNU meniti garis perjuangannya sambil terus melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi dilakukan dengan pembentukan cabang-cabang IPNU di seluruh Indonesia. Untuk melakukan konsolidasi, praktis waktu Tolchah tersita untuk keliling ke daerah-daerah. Pasca dibaiat menjadi Ketua Umum, Tolchah Mansoer menghabiskan banyak waktunya untuk membesarkan IPNU. Sosialisasi, konsolidasi dan pengembangan IPNU di daerah terus dilakukan.

---

[131] Pada perhelatan ini jugalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) resmi dideklarasikan, tepatnya pada 2 Maret 1955. Organisasi ini awalnya bernama IPNU Putri. Dengan bantuan pengurus IPNU yang ada di cabang-cabang Nyai Umroh Mahfudhoh dkk mengundang kader pelajar putri dari berbagai daerah untuk datang di Muktamar IPNU pertama ini. Baca Muchammad Romahurmuziy dkk (ed.), *Sejarah Perjalanan IPPNU.....*, hal. 11.

[132] Mujtahidur Ridho, *Reinveting IPNU.....*, hal. 34.

Selama dua tahun pertama, praktis program IPNU belum diarahkan keluar. Pimpinan Pusat IPNU mengkonsentrasikan programnya untuk konsolidasi dan penguatan kelembagaan interna serta membangun kesadaran ideologis kader. Hal itu tergambar dalam pengakuan Tolchah berikut:

> *Ja, memang dalam sa'at dua tahun ini IPNU tidak banjak melangkahkan kakinja keluar, so'alnya konsolidasi ke dalam. Dalam segala arti dan sifatnja. Dan terutama pada meletakkan dasar2 jang bersifat ideologisch ini. Sebab, jang diinginkan (djuga mendjadi tugas) oleh Pimpinan Pusat, ataupun oleh Pimpinan2 Wilayah dan Pimpinan Tjabang dan selandjutnja tertanamnja kesadaran jang sebenarnja tentang berorganisasi dan berideologie. Dan selandjutnja atas basis kekokohkuatan ini mentjoraki masjarakat dan memberikan sumbangan jang berarti kepada masjarakat.*[133]

Untuk menunaikan itu, menurut kesaksian Munsif Nachrawi yang sering mengikutinya, Tolchah tidak pernah bosan keliling daerah mendirikan IPNU. "Saya pernah diajak pak Tolchah ke Jawa Timur untuk mendirikan IPNU cabang termasuk di daerah Madura. Saat masih kelas 3 SMU, saya dilantik menjadi Ketua PC. IPNU Malang pada 1955" tutur Munsif Nachrowi, putra KH Nahrawi Thohir Singosari Malang di mana pernah Tolchah Mansoer belajar. Munsif Nachrawi inilah yang selanjutnya mendampingi Tolchah Mansoer dalam menjalankan roda organisasinya di Yogyakarta. Setelah lulus SMU pada tahun 1957 Munsif muda menyusul Tolchah Mansoer ke Yogyakarta.

Atas permintaan KH Nahrawi Thohir, sang ayah, Tolchah mencarikan asrama untuk Munsif di daerah Bumijo yang saat itu merupakan sentra anak-anak muda NU yang kuliah di Yogyakarta. Sementara Tolchah sendiri tinggal di sebuah tempat kos di selatan perempatan Tugu Yogyakarta. Tidak berselang lama, Munsif Nachrawi ditunjuk menjadi Ketua Pimpinan Cabang IPNU Yogyakarta untuk pertama

---

[133] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....*, hal. 13.

kali.[134] Perhatian terhadap Munsif merupakan cara Tolchah mengader yuniornya. Tolchah memang tergolong orang yang perhatian dengan kader penerusnya. Mungkin inilah mengapa Umroh Mahfudhoh mengakui bahwa di IPNU, Tolchah sangat bangga dengan generasi sesudahnya.[135]

Konsolidasi terus dilakukan. Sejak saat itu Tolchah melakukan kerja-kerja konsolidasi organisasi bersama IPPNU. Ketua Umum IPPNU Umroh Mahfudhoh, juga rajin turun ke daerah. Karena seringnya mereka turba bersama inilah akhirnya Tolchah muda dan Umroh muda semakin dekat. Kedekatan inilah yang mengantarkan keduanya sampai ke pelaminan. Keduanya sama-sama giat dan kuat dalam berorganisasi. Umroh adalah sosok perempuan yang ulet, gigih melakukan pembinaan ke daerah-daerah. "Keduanya merupakan pasangan yang harmonis dalam berorganisasi," ujar Mahfudhoh Ali Ubaid mengenang kala itu.[136]

Kegiatan turun ke daerah ini berlangsung hingga akhir kepemimpinannya di IPNU. Pada saat Umroh tidak lagi menjadi pengurus IPPNU, Tolchah masih sibuk dengan organisasinya itu, meski sudah menikah. Kesibukan Tolchah itu membuat Umroh sering ditinggal pergi sendirian. Akan tetapi karena sama-sama memahami, Umroh sangat mendukung kegiatan suaminya itu.

Hasil dari konsolidasi ini cukup menggembirakan. Setelah dua tahun berdiri IPNU saat itu sudah memiliki kurang lebih 100 cabang yang tersebar di seantero Nusantara. Menyaksikan ini, kebahagiaan dan kebanggaan Tolchah tampak tak bisa disembunyikan. Setidaknya hal ini bisa dibaca dalam tulisannya berikut:

> *.....tjahaja2 indah mulai bersinar terang temarang.....alangkah indahnja dan alangkah bahagianja.....Tjabang2 telah berserakan dimana2. Sudah*

[134] Wawancara dengan KH Munsif Nachrawi, 28 Pebruari 2008.

[135] Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 31 Januari 2008.

[136] Wawancara dengan Mahfudhoh Ali Ubaid, 30 Januari 2008.

seratus tjabang. Dan masih akan banjak berdiri lagi. Pesat sekali perkembangan dan pertumbuhanja. Tidaklah ni'mat Allah jang besar ini kita sjukuri? Ja, tidakkah patut kita sjukuri?[137]

Sebagai organisasi pelajar, Tolchah berupaya merapatkan IPNU di pesantren-pesantren. Hal ini sesuai dengan misi awalnya untuk menyatukan pelajar umum dan pelajar pesantren. Meski akhirnya menuai banyak keberhasilan, namun perjalanan konsolidasi ini menemui berbagai kendala. Pada awalnya tidak semua pesantren mau menerima. Karena sebagian besar anggota IPNU adalah pelajar sekolah formal. Padahal tidak semua pondok pesantren memiliki sekolah formal. Tolchah berupaya keras untuk menjembatani, namun tetap kesulitan untuk bisa masuk ke pesantren-pesantren yang tidak punya sekolah formal. Hal ini karena waktu itu masih ada sikap yang kaku antara pendidikan umum dan salaf. "Di Tebuireng IPNU sejak lahir sudah langsung diterima karena di sana sudah ada sekolah-sekolah formal. Dan sekolah formalnya ini sudah membuka beberapa bidang studi yang di beberapa pondok pesantren lain masuk dalam kategori yang "tidak begitu halal". Hal inilah yang membuat IPNU di Jombang cepat sekali berkembang" tutur Prof. Dr. KH. Moh. Tholhah Hasan yang kala itu menjadi pengurus Departemen Pengembangan Kader PC IPNU Jombang.[138]

Di tangan Tolchah Mansoer, IPNU berkembang pesat ke seluruh pelosok Indonesia. Animo pelajar dan santri NU terhadap IPNU di luar perkiraan. Setiap hari ribuan surat masuk

---

[137] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....,* hal. 16.

[138] Wawancara dengan Prof. Dr. KH M. Tholhah Hasan, 18 Januari 2008. Menurut penuturannya, Tholhah Hasan bertemu pertama kali dengan Tolchah Mansoer sebelum dia di Malang, yakni saat ia aktif di IPNU Jombang. Tolchah Mansoer bersama Ismail Makky berkomunikasi secara intensif dengan Kholid Narbuko, generasi awal yang mengembangkan IPNU di Jombang. Tholhah Hasan inilah yang pada masa-masa selanjutnya mendirikan Universitas Islam Malang (UNISMA) bersama Utsman Mansoer, kakak kandung Tolchah Mansoer.

ke PP. IPNU, mulai dari meminta dikirimi AD/ART, kartu anggota, permohonan peninjauan dan lainnya. Tolchah Mansoer berhasil menanamkan militansi anak muda NU, sehingga keberadaan IPNU telah menjadikan anak muda NU merasa sejajar dengan organisasi pelajar Islam lainnya, seperti HMI, PII dan lain sebagaimnya. Tolchah Mansoer mampu menjadikan IPNU lebih menarik bagi mahasiswa NU dibanding organisasi kemahasiswaan lainnya. Bahkan banyak kader HMI dan PII kembali ke IPNU karena merasa mempunyai kesamaan ideologi.[139]

Dengan konsisten pada visinya untuk menyatukan pelajar umum dan santri ini, Tolchah menjadikan organisasi menyedot perhatian banyak orang. Dalam pandangannya, dua elemen terpelajar itu menempati posisi penting dan dengan demikian perlu saling melengkapi dan bertukar ilmu. Pelajar umum dan santri bisa saling belajar dan memperkaya pengetahuannya. Dalam hal ini IPNU adalah ruang dimana pertukaran dan sinergi itu dimungkinan. Dalam menggambarkan peran IPNU sebagai ”perkawinan intelektual” ini Tolchah menulis:

> ..... *Anggauta IPNU terdiri dari kawan2 pesantren, sekolah2 umum menengah dan djuga universitet. Hal ini alhamdulillah di dalam masa dua tahun telah terpadu baik dan tidak ada rasa jang kurang indah sebagai pada sa'at2 sebelum IPNU berdiri.*
>
> *Kita insafi, mereka jang dari pesantren, oleh karena waktu mereka banjak diconcentreer kepada menuntut pengetahuan agama, tak sempatlah mereka begitu banjak djuga mentjurahkan perhatiannja kepada pengetahuan umum. Sedang mereka jang dari sekolah2 umum oleh karena waktu mereka banjak diconcentreer kepada pengetahuan umum dan tidak bisa begitu banjak djuga memusatkan fikirannja kepada pengetahuan agama, tak sempatlah mereka memiliki dengan baik pengetahuan agama, tetapi mereka masih memiliki dasar2 jang bersifat ideologisch. Di samping itu terdapat mereka jang oleh*

[139] Baca Asrorun Niam Sholeh, *Kaum Muda NU*....., hal. 163

karena mempunjai bakat jang tjukup baik, bisa memiliki kedua2nja. Tiga subject ini diperlukan bagi merealisir adjaran2 agama. Dan kalau tidak bisa pada sa'at2 sebelumnja mempeladjari pengetahuan itu setjara studie jang umum, dapatlah waktu2 digunakan untuk saling bertanja, saling meminta tuntunan, dan saling mengerti dan saling menginsafi akan kekurangan2nja dalam beberapa lapangan.

Di sinilah IPNU telah berbuat. Dan harus lebih banjak hasilnja pada hari2 jang akan datang. Ja, harus berhasil jang sebenar2nja. Dan bersjukurlah hingga sa'at kini djalan2 ini telah ditempuh dengan baik. Dan di dalam hal ini, oleh karena watak jang ini mendjadi djuga dasar IPNU, hendaklah anggauta2 IPNU melaksanakannja dengan penuh tanggungdjawab.[140]

Dengan peran tersebut IPNU telah menegaskan diri sebagai organisasi kader. Peran khas inilah yang pada masa-masa selanjutnya dijadikan pijakan strategis untuk membangun strategi dan pola gerakan. Dalam titik inilah peranan IPNU menjadi sangat strategis dalam upaya membangun "perkawinan intelektual" melalui integrasi khasanah keilmuan yang dinisbatkan dengan ilmu-ilmu ukhrowi dan duniawi. Sumber daya pelajar dan santri memiliki potensi untuk menggabungkan tradisi keduanya secara matang.[141]

Setelah berjalan dua tahun, Muktamar II IPNU diselenggarakan di Kota Batik Pekalongan pada tanggal 1-5 Januari 1957. Sebagai hasil kerja keras Tolchah Mansoer dalam melakukan konsolidasi organisasi, cabang-cabang peserta Muktamar II jauh lebih banyak dibanding Muktamar I. Dalam perhelatan tersebut, kebijakan-kebijakan strategis yang dirumuskan antara lain konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang ke luar Jawa dan pondok pesantren. Keberhasilan Tolchah Mansoer dalam membesarkan organisasi

[140] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar*....., hal. 8-9.

[141] Mujtahidur Ridho, *Reinventing IPNU*....., hal. 166.

membuatnya kembali dipercaya oleh Muktamirin untuk memimpin IPNU untuk ketiga kalinya. Kepengurusan hasil Muktamar II Pekalongam ini efektif sejak tahun 1957-1959. Program utama yang dihasilkan Muktamar II Pekalongan adalah memperluas cabang-cabang IPNU di seluruh Indonesia terutama luar Jawa dan pondok-pondok pesantren. Sebagaimana cita-cita awalnya, Tolchah terus bekerja keras dalam menyatukan pelajar umum dan pelajar pesantren.

Sebagaimana dituturkan oleh para penerusnya, Tolchah Mansoer adalah Katua Umum IPNU yang punya pendirian kuat agar semua kader NU dari sekolah umum, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi, berkumpul di IPNU sebagai "kawah candradimuka"nya. Ia terus berusaha terus mengembangkan IPNU dan ingin menjadikan IPNU wadah satu-satunya pengembangan kader NU. "Beliau sangat gigih mempertahankan prinsip itu" tutur M. Said Budairy.[142]

Cita-cita besar Tolchah Mansoer yang ingin mempersatukan pelajar dan santri NU dalam wadah IPNU baru menemukan indikasi keberhasilannya ketika Kongres IPNU III Cirebon pada 1958. Saat itu ada kebanggaan pada diri Tolchah Mansoer bahwa anak muda NU semakin maju dan mempunyai kesadaran tinggi terhadap pentingnya berorganisasi. Muktamar III dilaksanakan di Cirebon pada 27 Desember 1958-2 Januari 1959. Muktamar tersebut dimeriahkan dengan Pekan Olah Raga (POR) I. Krisis politik dan ekonomi menjadi salah satu bahan pembahasan. Pengembangan cabang masih menjadi prioritas. Juga diputuskan penerbitan buku panduan organisasi, administrasi dan pola kerja organisasi. Dalam Muktamar ini untuk pertama kalinya muncul gagasan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi sebagai respons atas desakan pendirian Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU). Untuk memperlancar jalannya Muktamar, satu hari sebelum perhelatan tersebut PP IPNU mengundang PPP IPNU dan PW

[142] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

IPNU se-Indonesai untuk menggelar Konferensi Antar Wilayah.[143]

Yang menarik, meskipun sudah menjabat selama tiga kali, pada Muktamar Cirebon ini Tolchah Mansoer kembali didaulat untuk memimpin IPNU. Dengan demikian, Tolchah Mansoer menjabat sebagai Ketua Umum IPNU empat kali selama tiga periode. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa figur Tolchah masih dibutuhkan untuk membesarkan organisasi, meskipun dari sisi percepatan kaderisasi hal ini tidak cukup bagus.

Setelah Muktamar Cirebon ini, Tolchah Mansoer kembali bekerja keras untuk membesarkan organisasi sebagaimana diamanatkan Muktamar. Pengembangan organisasi terus berjalan seiring dengan tumbuhnya cabang-cabang dan wilayah-wilayah baru bak cendawan di musim hujan. Perjuangan di IPNU dilakukan secara total oleh Tolchah dan para pengurusnya. Munsif Nachrawi, misalnya, termasuk orang yang sebagian besar waktunya didesikasikan untuk membantu Tolchah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya, bahkan kuliahnya sampai terbengkalai. Begini Munsif Nachrawi menggambarkannya:

> *"Apa yang bisa kita berikan, ya diberikan. Saya seringkali tidur di sekretariat. Bahkan jarang sekali berangkat kuliah di UGM. Kalo ada tugas ke cabang di daerah-daerah seringkali saya yang diajak berangkat, karena kebetulan punya uang lebih[144] Jadi akhirnya sayalah yang seringkali ditunjuk untuk ke daerah, baik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Madura. Karena*

[143] Lebih lengkap tentang Muktamar III ini baca *Kenang-Kenangan Mu'tamar ke III, POR ke-I, Panel Discussion, dan Lustrum I Ikatan Peldajar Nahdlatul 'Ulama'* (Yogyakarta, Bag. Publikasi/Dikumentasi Sekretariat Panitya Mu'tamar III & POR I IPNU), 1959.

[144] Saat itu anak-anak mantan pengurus NU mendapatkan tunjangan beasiswa dari LP. Ma'arif. Munsif adalah yang termasuk mendapatkan beasiswa tersebut karena ia adalah anak mantan Ketua Umum PBNU, KH Nahrawi Thohir.

saking sibuknya ngurus organisasi, kuliah saya terbengkalai. Sampai saat ini saya belum selesai kuliah di UGM."[145]

Tolchah mengakui, perjalanan organisasi yang baru berumur muda ini memang telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran para kadernya. Banyak dari mereka yang akhirnya mengorbankan studinya hanya untuk mengurus organisasi. Munsif Nachrawi adalah salah satu contohnya. Bahkan, Tolchah sendiri sempat mengorbankan waktu kuliahnya selama beberapa tahun. Hal ini terjadi karena tantangan organisasi yang sangat berat di masa-masa awal. Namun, segera Tolchah mengingatkan bahwa tugas belajar adalah tugas utama yang mestinya tidak terkorbankan. Dalam refleksinya soal hal ini Tolchah menulis:

Telah dua tahun organisasi Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama. Pengurbanan –sekalipun tidak banyak- berupa segala hal oleh anggauta2 IPNU telah diberikan. Lebih2 berupa waktu, banjak jang menunda peladjaran, udjian, malah gagal dan hantjur dalam sekolah. Ja, itu oleh karena kita pertama kali berorganisasi, di samping itu, saat satu setengah tahun dalam berorganisasi banjak mengalami taufan dan badai jang menghadjatkan segenap fikiran dan segenap perasaan kita untuk menjelamatkan organisasi kita jang telah kita bina dengan penuh semangat sadar, tjinta dan keteguhan hati. Dan tentu sadja kita insjaf tugas kita menuntut pengetahuan tidak boleh dilupakan. Ini tugas utama dan pokok. Dan tudjuan kita bukanlah meluluhlantakkan usaha2 kita menuntut pengetahuan.[146]

Pada masa ini juga dirintis Perwakilan IPNU di Kairo Mesir, dengan nama Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU).[147] Di samping itu, konsolidasi juga dilakukan dengan

[145] Wawancara dengan KH Munsif Nachrawi, 28 Pebruari 2008.

[146] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....,* hal. 15-16.

[147] Nama KMNU dipilih karena di negara tersebut terdapat aturan yang melarang adanya organisasi yang bernaung di bawah organisasi di luar negeri. Dengan surat ketetapan PP Nomor 336 tanggal

restrukturisasi Perwakilan Pimpinan Pusat IPNU di Jakarta di bawah kepemimpinan A. Cholid Mawardi. Beberapa aktivis mahasiswa NU di Jakarta masuk dalam kepengurusan perwakilan organisasi ini. Pada masa itu PPP IPNU telah berhasil menjalin kemitraan dengan organisasi lain dan mewakili IPNU dalam berbagai konfederasi organisasi kepemudaan dan kepelajaran, seperti PORPISI, KAPPI dan lain-lain. PPP inilah yang mewakili IPNU di forum internasional *World Assembly of Youth* (WAY), sebuah organisasi internasional yang berada dalam naungan UNESCO PBB.[148] Sementara itu Tolchah Mansoer berkonsentrasi di Yogyakarta, sebagai tempat kedudukan PP IPNU, meskipun juga kerap mondar-mandir ke Jakarta untuk berkoordinasi. Namun secara umum dia banyak menyerahkan kepada perwakilan di Jakarta, terutama karena orang-orang yang di Jakarta lebih banyak tahu perkembangan organisasi-organisasi pelajar di Ibu Kota.[149]

Di sisi lain, Tolchah konsisten menempatkan IPNU sebagai organisasi kader. Untuk itu sesuai dengan amanat Muktamar IPNU terus meningkatkan kualitas kadernya dengan mengadakan kursus kader. Berbeda dengan tahun 1956 di mana kursus kader diadakan di tingkat nasional, pada periode ini kegiatan tersebut diadakan di tingkat wilayah dan cabang. Beberapa Pimpinan Cabang IPNU berhasil menyelenggarakan latihan kaderisasi, di antaranya Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Ponorogo, Wonopringgo, Batang dan Yogyakarta.[150]

Tolchah adalah orang yang memegang prinsip sangat kuat dalam menjaga identitas dan komitmen organisasi IPNU didirikan, yaitu sebagai wadah kaderisasi. Dengan semangat

---

27 Mei 1959 KMNU telah disahkan sebagai Perwakilan IPNU du Republiak Persatuan Arab. Baca Laporan Pertanggungdjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada Muktamar IV IPNU tanggal 11-14 Pebruari 1961 di Yogyakarta, hal. 3.

[148] Wawancara dengan H.M. Sobich Ubaid, 16 Januari 2008.

[149] Wawancara dengan H. M. Said Budairy, 29 September 2007.

[150] Lihat Asrorun Niam Sholeh dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU*....., hal. 28.

memadukan potensi pelajar umum dan pelajar agama, Tolchah mengidealkan IPNU mampu mencetak kader-kader penerus dalam berbagai lini kehidupan. Pendirian ini terus ia tegaskan agar IPNU tidak kehilangan jati ditinya. Menurut Kiai Nuril Huda, dalam mengkampanyekan ini Tolchah berulang kali mengatakan, ”Kalau organisasi lepas dengan waktu pendiriannya, maka ia akan rusak”.[151] Dengan penegasan itu Tolchah ingin IPNU konsisten memegang mandat sejarahnya sebagai organisasi pelajar yang bergerak dalam kaderisasi.

Obsesi Tolchah tentang IPNU tampaknya menuai hasil. Di saat IPNU telah berusia tujuh tahun, tanda-tanda keberhasilan kerja keras yang diirintisnya mulai bisa dilihat. Dalam menggambarkan ini, Tolchah menyatakan:

> *Setelah tudjuh tahun lebih berorganisasi, kelihatan djelas hasil jang nampak, walaupun tidak seluruhnja. Terutama menghidupkan kepercayaan kembali di kalangan santri2, mengumpulkan kawan2 jang berserakan, terutama jang sudah mengindjak pendidikannja di sekolah2 umum dan di bangku2 perguruan tinggi, jang tadi2nja enggan2an dengan kesantriannja dan kurang harga diri bila dikatakan santri lalu achirnja memupuk dan memperdalam saling pengertian di dalam kalangan anggauta2 jg berbeda-beda ketjakapan ilmunja, satu fihak jang mempunjai ketjakapan jang mendalam di dalam ilmu agama, di lain fihak kurang pengetahuanja dalam lapangan agama dan jang lain lagi jang mempunjai kedua-duanya itu dengan seimbang, jang terachir ini djarang sekali. Semua ini diperlukan untuk menghadapi masa jang akan datang, membina masjarakat Indonesia jang gemilang di hari depan jang sangat membutuhkan sjarat2 pengetahuan modern. Ja, hari jang akan datang adalah hari kita, milik kita, kita pewaris2 zaman jang akan datang..... Kita bersyukur, selama tudjuh tahun ini sekalipun belum banjak, kita telah mempunyai akademikus, beberapa orang insinjur, doktorandi, jang mereka ini telah terdjun ke dalam masjarakat. Telah pula*

[151] Wawancara dengan KH Nuril Huda, 31 Januari 2008.

menghasilkan kyahi2 muda langsung memimpin pesantren2 dan kita lihat di antara mereka jang menjadi anggauta-anggauta DPR, BPH, DPR Pusat, MPR dan lain-lain lagi.[152]

Dengan adanya kader yang tersebar dalam berbagai lini kehidupan sebagaimana digambarkan di atas, IPNU telah berhasil mewujudkan apa yang dicita-cita Tolchah. Pemaduan potensi pelajar umum dan santri yang digagasan dan diidealkan oleh Tolchah sejak organsasi ini mulai dirintis, bukan impian kosong, melainkan sesuatu yang bisa dilakukan dan sangat bermakna dalam perjalanan organisasi NU di masa-masa berikutnya.

B. Tolchah, IPNU dan PMII

Di bawah kepemimpinan Tolchah masa terakhir ini, IPNU menoreh sejarah penting dalam sejarah gerakan pelajar, yaitu membidani lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebuah organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Keputusan ini telah melewati perjalanan panjang dengan segala dinamikanya. Aspirasi dibentuknya organisasi kemahasiswaan setidaknya sudah mulai tampak sejak Muktamar Pekalongan, mengingat jumlah mahasiswa NU kian banyak. Kian banyaknya mahasiswa yang aktif di IPNU memang menjadi latar belakang utama kemunculan gagasan ini.[153]

Hal ini ditambah dengan munculnya organisasi kemahasiswaan yang dipelopori oleh beberapa aktivis IPNU. Bermula dari Muktamar Pekalongan ini, beberapa mahasiswa aktivis IPNU mengadakan konferensi kecil dengan agenda menggagas berdirinya organisasi kemahasiswaan dilingkungan NU. Diantara mereka terdapat Cholid Mawardi, Moensif Nachrowi, H Mahbub Junaedi, Hartono dan Ismail Makky. Penyusunan konsep pendirian organisasi diserahkan kepada Ismail Makky.

---

[152] "Pidato Resmi Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, Moh. Tolchah Mansoer dalam sidang Mu'tamar IV IPNU di Jogjakarta, tgl. 11/2-61" dalam *Risalah Organisasi IPNU*, edisi 1 th. 1 September 1961, hal. 7.

[153] Wawancara dengan H. Ismail Makky, 28 September 2007.

Gagasan tersebut selanjutnya digulirkan di tingkat Pimpinan Pusat IPNU. Rupanya Tolchah Mansoer sangat berhati-hati menyikapi perkembangan wacana tersebut. Sebagai ketua umum PP IPNU, Tholhah Mansoer menilai bahwa mendirikan organisasi kemahasiswaan di lingkungan NU di tengah proses IPNU yang masih dalam tahap konsolidasi mahasiswa NU merupakan ide yang prematur.[154] Tholhah Mansoer juga menilai masih belum melihat indikasi-indikasi lain yang mendorong untuk itu. Maka pasca Muktamar II Pekalongan, PP IPNU tetap berpendirian bahwa NU masih belum memerlukan organisasi kemahasiswaan karena dua alasan, *pertama,* PP IPNU masih melakukan riset seberapa besar massa mahasiswa NU. *Kedua,* seberapa jauh kemampuan berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi mahasiswa.

Wajar jika gagasan ini membuat Tolchah Mansoer dirundung dilema; antara mengakomodasi aspirasi itu atau mempertahankan idealismenya untuk membuat IPNU sebagai arena penyatuan potensi kepelajaran NU. Memang secara pribadi, gagasan tersebut mengusik idealisme Tolchah Mansoer yang sejak lama berobsesi menyatukan potensi pelajar, mahasiswa dan santri NU dalam sebuah wadah organisasi IPNU. Baginya, cita-cita besar itu harus terus diperjuangkan. Persoalan Mahasiswa yang belum diperhitungkan dalam percaturan kemahasiswaan saat itu sama sekali tidak merisaukannya. Tolchah Mansoer merujuk kepada kasus IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) yang dapat berperan besar mewakili elemen pemuda PKI.[155]

Tolchah Mansoer kuat memegang prinsip itu. Dalam obsesinya IPNU akan dibentuk seperti IPPI sebelum lahirnya CGRI (Central Guru Republik Indonesia) organisasi guru *underbow* PKI. Di sinilah mengapa ia getol untuk menyatukan pemuda-pemuda pelajar di pesantren dengan pelajar di luar pesantren. Namun, gagasan Tolchah Mansoer ini tidak mudah

[154] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

[155] Lihat Asrorun Niam Sholeh, *Kaum Muda NU ……,* hal. 37.

dipertahankan, karena dinamika dunia kemahasiswaan dan kepelajaran terus berkembang, terutama sebagaimana dirasakan di kota besar.[156]

Meski bertentangan dengan idealisme yang telah lama diperjuangkan, secara organisatoris Tholchah Mansoer tetap memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bijak dan aspiratif. Ia tidak melakukan upaya pencegahan terhadap ide tersebut. Buktinya, pada Muktamar III Cirebon, wacana ini di akomodasi dan menjadi perbincangan resmi Muktamar. Gairah mahasiswa NU diapresiasi peserta Muktamar yang berpendapat bahwa saat itu merupakan waktu yang tepat dalam menentukan status mahasiswa NU yang berada di dalam IPNU. Banyak cabang IPNU yang memandang perlu dibentuknya organisasi khusus bagi mahasiswa.[157]

Dalam pandangan yunior sekaligus sahabatnya, Munsif Nachrawi, pada prinsipnya Tolchah Mansoer sepakat pendirian organisasi mahasiswa ini. Bahkan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi di IPNU (yang merupakan cikal bakal berdirinya PMII -pen) muncul dari Tolchah Mansoer. Memang saat itu perdebatannya, apakah harus sekarang pendirian organisasi kemahasiswaan dari kalangan nahdhiyyin, sementara IPNU baru saja berdiri, belum berkembang.[158] Muktamar pun

---

[156] Wawancara dengan H.M. Sobich Ubaid, 16 Januari 2008. Sebagaimana diketahui, hasrat untuk mendirikan wadah mahasiswa NU sudah bermunculan. Pada bulan Desember 1955 di Jakarta, telah berdiri IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama) yang diketuai oleh Khasbullah Chalid (adik Idham Chalid). Namun kelahirannya belum diterima oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan sesepuh NU. Pada tahun yang sama, di Surakarta, sekelompok mahasiswa nahdliyin juga mendirikan organisasi yang diberi nama KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama). Di Bandung juga ada usaha serupa, yakni berdirinya wadah mahasiswa dengan nama PMNU (Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama). Baca Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII), 2004, hal. 3.

[157] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

[158] Wawancara dengan KH Munsif Nachrawi, 29 Pebruari 2008.

menyepakati dibentuknya Departemen Perguruan Tinggi IPNU.[159] Rupanya Muktamar masih belum memandang perlu membentuk sebuah oganisasi mahasiswa NU tersendiri. Pembentukan Departemen Perguruan Tinggi itu sendiri sesungguhnya merupakan "kompromi" antara yang mendesak pembentukan organisasi mahasiswa dengan yang pendirian Tolchah dan kelompok yang mempertahakan penyatuan santri, pelajar dan mahasiswa di IPNU.[160]

Ruang gerak baru berupa departemen khusus yang berada dalam naungan PP IPNU dalam perjalanannya ternyata tidak memuaskan mahasiswa NU yang makin membesar jumlahnya. Keberadaan Departemen Perguruan Tinggi lama-lama dipandang tidak lagi cukup untuk mewadahi kader-kader IPNU yang ada di Perguruan Tinggi. Departemen perguruan tinggi dianggap terlalu sempit dan tidak bisa mewadahi sepak terjang mahasiswa. Sementara rivalitas politik antara partai-partai pada saat itu berimbas ke mahasiswa, sehingga HMI disudutkan dan akan dibubarkan. Demikian juga PKI semakin agresif. Di sinilah NU harus punya organisasi mahasiswa.[161] Mereka tidak sabar lagi menunggu saat-saat di mana IPNU sejajar dengan organisasi kemahasiswaan lain yang telah lebih dulu ada. Keanggotaan mereka sangat terlihat terutama setelah IPNU mahasiswa mengalami peristiwa pahit saat mengikuti Kongres Pemuda se-Indonesia di Bandung.[162] PB Ma'arif pun menyempatkan untuk berkirim surat kepada PP IPNU agar

[159] Ismail Makky, seorang mahasiswa senior Fakultas Syari'ah PTAIN Yogyakarta, ditetapkan sebagai ketua depertemen tersebut, dan didampingi Asnawi Latif, sebagai sekretaris. Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

[160] Wawancara dengan M. H. Said Budairi, 29 September 2007.

[161] Wawancara dengan Chalid Mawardi, 16 Januari 2008.

[162] Pada saat yang sama, IPNU juga kecewa dengan Kongres Pemuda di Bandung, karena IPNU tidak dilibatkan secara proporsional lantaran tidak bisa menggunakan bendera mahasiswa. Dua peristiwa inilah yang menjadi latar belakang para aktivis Perwakilan Pimpinan Pusat IPNU mendesak kepada PP IPNU untuk mendirikan organisasi yang khusus mewadahi mahasiswa.

segera memberikan kejelasan terhadap organisasi mahasiswa NU. Hal ini semakin diperparah dengan perjalanan Depertemen Perguruan Tinggi IPNU yang tidak bisa maksimal.

Bagi M. Said Budairy, pembentukan organisasi kemahasiswaan NU ini menjadi penting mengingat kenyataan bahwa ada kebutuhan yang berbeda antara pelajar dan mahasiswa. Program untuk pelajar berbeda dengan program untuk mahasiswa. Di samping terdapat federasi untuk lingkungan organisasi pelajar ada juga ada federasi yang untuk lignkungan organisasi mahasiswa. JIka NU tidak memiliki organsasi kemahasiswaan, maka tidak akan punya perwakilan di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), dan Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) misalnya.[163]

Aspirasi ini menguat dan menemukan momentumnya dalam Konferensi Besar I IPNU yang berlangsung di Kaliurang Yogyakarta pada Maret 1960. Di samping membahas beberapa agenda besar lainnya, forum tersebut juga mengevaluasi persoalan mahasiswa aktivis IPNU yang ditangani secara khusus dalam Departemen Perguruan Tinggi ternyata masih belum tuntas. Akhirnya Forum Konbes mendapat kesempatan mendengarkan masukan dari Ismail Makky tentang perkembangan persoalan kemahasiswaan di kalangan NU. Uraian jelas Ismail Makky tersebut dijadikan referensi peserta Konbes untuk melahirkan sikap. Maka pada sidang acara II pada tanggal 16 Maret 1960, Konferensi Besar IPNU Kaliurang memutuskan bahwa di bidang kemahasiswaan, diperlukan adanya organisasi mahasiswa NU yang secara organisatoris administratif terlepas dari IPNU.[164]

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Pimpinan Pusat IPNU mempercayakan kepada Ismail Makky untuk melakukan konsolidasi dan penyiapan pembentukan organisasi

[163] Wawancara dengan M. Said Budary, 29 September 2007.

[164] Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah.....*, 2004, hal. 6. Setelah melaksanakan Konbes I Kaliurang, pada tanggal 21 Maret 1960, PP IPNU mengeluarkan edaran no XIII/PP/'60 yang berisi penberitahuan perpindahan alamat kantor, yang semula di JL. Gandekan Lor 52 pindah ke JL. Jagonegaran 11 Yogyakarta.

kemahasiswaan tersebut. Penunjukkan Ismail Makky dilakukan karena saat itu ia adalah koordinator Departemen Perguruan Tinggi IPNU, di samping Ismail Makky merupakan salah satu pelopor gagasan ini.[165] Dalam kenangannya, Tolchah Mansoer lah yang langsung menunjukknya. ”Is, garap ini sama Mahbub (Mahbub Junaidi –pen.) dan Cholid (Cholid Mawardi –pen.)”, tutur Ismail Makky menirukan Tolchah Mansoer kala itu.[166]

Tugas berat ini kemudian ditindaklanjuti Ismail Makky secara cukup sistematis. Sebagaimana perintah Ketua Umum, ia selanjutnya melakukan konsolidasi dengan mahasiswa IPNU lainnya: Mahbub junaidi, Cholid Mawardi, Shobih Ubaid, Hasbullah HS, dan seorang lagi dari Banjarmasin. Tim kecil ini dibentuk untuk menyusun sebuah draf pemikiran pembentukan organisasi kemahasiswaan di lingkungan NU. Salah satu hasil tim kecil adalah menyepakati untuk segera mengadakan pertemuan lanjutan yang cakupannya lebih luas. Disepakati, pertemuan tersebut digelar di Surabaya.

Kondisi finansial internal IPNU yang baru saja telah mengadakan Konferensi Besar tidak menyurutkan semangat untuk menyelenggarakan pertemuan perintisan organisasi mahasiswa tersebut. Hal ini karena pada hakikatnya, pertintisan organisasi mahasiswa tersebut merupakan pelaksanaan hasil Konferensi Besar Kaliurang. Keberangkatan rombongan mahasiswa Yogyakarta dikoordinir oleh Munsif Nachrawi dan Hisbullah Huda, fungsionaris PP IPNU yang bertugas mencari dana keberangkatan ke lokasi pertemuan. Tholchah Mansoer yang berhalangan hadir mengikuti pertemuan di Surabaya menitipkan sejumlah dana untuk kelancaran acara. ”Saya yang diutus Pak Tolchah untuk ke Surabaya, untuk mendeklarasikan berdirinya PMII pada 17 April 1960. Dari Yogyakarta yang berangkat saya dengan pak Ismail Makky. Bahkan pak Tolchah memberikan uang saku untuk ongkos perjalanan ke surabaya.

[165] Menurut Asnawi Latif, Ismail Makky termasuk setuju dengan gagasan pendirian organisasi kemahsiswan karena ingin menyaingi HMI yang didomisnasi oleh mahasiwa non-NU.

[166] Wawancara dengan H. Ismail Makky, 28 September 2007.

Itu membuktikan Pak Tolhah sangat apresiatif dengan berdirinya organisasi mahasiswa tersebut" tutur Munsif Nachrawi mengenang.

Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 17 April 1960 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1379 H, bertempat di komplek perguruan NU Wonokromo Surabaya. Meski hanya dengan agenda tunggal, yaitu f*ollow up atas gagasan pendirian organisasi kemahasiswaan NU, pertemuan tersebut* berlangsung selama satu minggu. Hadir dalam pertemuan tesebut sebanyak 13 orang yang mempresentasikan 15 daerah. Mereka adalah: Ismail Makky (Yogyakarta), Munsif Nachrawi (Yogyakarta), M. Said Budairy (Jakarta), Cholid Mawardi (Jakarta), Moch. Shobich Ubaid (Jakarta), Hisbulloh Huda (Surabaya), Makmun Sjukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), Nuril Huda Suady HA (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Abdul Wahab Jaelani (Semarang), M. Cholid Marbuko (Malang), dan Ahmad Husein (Makassar).[167] Peserta pertemuan merupakan hasil pemantauan Ismail Makky sebagai satu-satunya orang yang mendapat mandat dari PP IPNU sekaligus mempertanggungjawabkannya di kemudian hari.

Forum tersebut mengasilkan beberapa keputusan. Pertama, menyepakati berdiri organisasi mahasiswa NU, dengan nama "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia", disingkat PMII. Keputusan tentang nama ini dicapai setelah melalui perdebatan panjang yang alot.[168] *Kedua*, susunan

[167] 13 orang inilah yang selanjutnya disebut debagai sponsor pendiri PMII. Lihat *Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia* (Jakarta: PB PMII), 1985.

[168] Forum sepakat untuk tidak menggunakan nama "NU" untuk menyertai nama organisasi mahasiswa tradisionalis tersebut. Nama PMII sendiri adalah usaha dari delegasi Bandung dan Surabaya yang mendapatkan dukungan dari utusan Surakarta. Sementara delegasi dari Yogyakarta mengusulkan nama"Perhimpunan Persatuan Mahasiswa Ahlussunnah Wal jamaaah", dan nama "Perhimpunan Mahasiswa Sunny". Sedangkan utusan dari Jakarta mengusulkan nama "Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU)" baca selengkapnya dalam Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah .....*, hal. 10

peraturan dasar organisasi yang dalam Mukadimahnya jelas sinyatakan bahwa "PMII merupakan kelanjutan/matarantai dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU". *Ketiga*, menetapkan tanggal 17 April 1960 yang bertepatan dengan 21 Syawal 1379 sebagai hari lahir PMII.[169] Pada hari itu juga Peraturan Dasar PMII resmi diberlakukan. *Keempat*, musyawarah juga memutuskan pembentukan formatur yang terdiri dari tiga orang, yaitu H. Mahbub Junaidi, sebagai Ketua Umum, A. Chalid Mawardi sebagai Ketua Satu, dan M. Said Budairi sebagai Sekretaris Umum PP PMII periode pertama.[170]

Tak pelak, berdirinya PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang dibidani oleh IPNU tersebut mendapat tanggapan beragam, karena itu pada tanggal 21 Mei 1960, PP IPNU mengeluarkan siaran No.XIV/PP/60 yang dikirim ke PW IPNU dan PC IPNU di seluruh Indonesia. Siaran tersebut berisi informasi tentang kronologi dan penjelasan resmi tentang pendirian PMII. Siaran yang ditandatangi oleh Tolchah Mansoer dan Munsif Nachrawi tersebut juga berisi penjelasan tentang kedudukan mahasiswa dalam IPNU, kedudukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU, dan kedudukan pesantren dalam PMII.[171]

---

[169] Kelahiran PMII ini kemudian diproklamirkan di Balai Pemuda Surabaya dalam suatu resepsi yang mendapatkan perhatian besar dari massa mahasiswa, organisasi-organisasi ektra dan intra kampus di Surabaya serta dihadiri juga oleh wakil-wakil golongan politik.

[170] Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah .....*, *h*al. 11-10

[171] Baca Laporan Pertanggungdjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada Muktamar IV IPNU. Siaran ini diterbitkan sebagai antisipasi atas kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran berita sekaligus sebagai penjelasan resmi Pimpinan Pusat IPNU atas proses pergumulan wacana hingga lahirnya PMII. Siaran resmi PP IPNU yang memperjelas kedudutan PMII sebagai bagian dari NU (dalam hal ini PB Ma'arif) dalam kenyataanya mempercepat perkembangan PMII. Apa yang terjadi di Jawa barat misalnya, Ketua PW IPNU Jawa Barat, Ilyas Ruchyat ikut aktif mendorong dan membidani kelahiran PMII Jawa Barat sebagai jawaban atas menggeliatnya gairah mendirikan perguruan tinggi

Sikap yang diambil oleh Tolchah Mansoer menunjukkan bahwa ia adalah seorang organisatoris yang bijak dan demokratis. Meskipun pada awalnya ia keberatan dengan pembentukan organisasi kemahasiswaan di saat IPNU sedang bekerja keras untuk melakukan konsolidasi, namun karena aspirasi ini terus berkembang dan dipandang sebagai kebutuhan oleh banyak kadernya, Tolchah pun akhirnya tidak hanya merestui, melainkan mendukung penuh usaha ini. Hal ini dibuktikan dengan keputusannya untuk menunjuk Ismail Makky untuk menindaklanjuti mempersiapkan pendirian organisasi tersebut serta mengupayakan dana bagi pelaksanaan musyawarah mahasiswa di Surabaya. Dari seluruh perjalanan panjang lahirnya PMII menunjukkan dengan jelas bahwa PMII dilahirkan oleh IPNU secara kelembagaan.[172] Bahkan di masa-masa selanjutnya Tolchah berulang kali menegaskan bahwa PMII adalah anak IPNU, karena dilahirkan oleh IPNU.[173]

Pergulatan di atas menempatkan Tolchah Mansoer sebagai figur sentral yang sangat menentukan dalam pembentukan gerakan pelajar dan mahasiswa di lingkungan NU. Aktivitasnya dalam organisasi sejak kecil membuat Tolchah sangat matang dalam dunia gerakan muda dan gerakan sosial selanjutnya. Di mata Tolchah, organisasi adalah wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Organisasi memberi bekal kepada para anggota berupa ketrampilan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, serta mendidik dan menyadarkan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. IPNU didirkan dengan

---

berbasis NU wilayah tersebut. Lihat Asrorun Niam Sholeh dan Sultan Fathoni, *Kaum Muda NU*....., hal. 49.

[172] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

[173] Wawancara dengan Drs. H. Moh. Ichwan Sam, 29 September 2008. Dalam pidato resmi pada Muktamar IV IPNU di Yogyakarta, Tolchah menegaskan bahwa didiridikannya PMII didorong oleh adanya kebutuhan praktis dan agar ada perhatian khusus terhadap mahasiswa. Baca *Risalah Organisasi IPNU,* edisi 1 th. 1 September 1961, hal. 8.

cita-cita mulia, yaitu berdedikasi kepada masyarakat. Penegasan ini dikemukakan Tolchah sebagai berikut:

> *Saja masih djelas teringat akan masa2 awal IPNU ini didirikan bersama2 dengan para sponsors, pendiri2 organisasi kita ini. waktu itu bekal kami tidak lebih dari tawakkal dan kejakinan teguh, bahwa pada suatu saat organisasi kita akan mentjapai kedjajaanja, berdiri setaraf dengan organisasi2 lain dalam menjumbangkan karyanja kepada masjarakat.*
>
> *Tapi bukanlah kedjajaan dan keagungan organisasi itu jang mendjadi tjita-tjita utama, bukan dimaksudkan organisasi itu menjadi unggul segala-galanja, tapi bagaimana organisasi itu bisa memberikan sumbangan kepada masjarakat dalam segala bidangnja, bidang materiil dan lebih2 spirituil. Tudjuan organisasi masih jauh; apa jang nampak di depan mata kita ini hanja sekelumit jang tidak banjak artinja.*
>
> *Untuk tercapainya izzul Islam wal muslimin dan masjarakat adil dan makmur jang diridhoi Allah tidak akan djatuh begitu sadja dari langit. Masih diperlukan karya2 jang luar biasa. Tugas-2 masih membentang di hadapan kita. Dan bukan orang lain jang akan mengerdjakannja, melainkan kita sendiri angkatan muda jang penuh spirit, energy dan idee2 jang dinamis ini"*[174]

Tolchah terus berupaya memotivasi dan menggerakkan kader organisasi agar dapat berkarya, yang berarti berkhidmat dalam masyarakat. Tolchah juga dengan tegas menginginkan kader IPNU "membumi" dan tidak tercerabut dari masyarakat. Kader IPNU harus terjun dan berkecimpung melakukan kerja-kerja nyata dalam masyarakat. Dalam hal ini Tolchah menegaskan:

> *Sifat jang karakteristiek ada pada IPNU ini pada hakekatnja untuk tidak mendjadikan IPNU ini merasa golongan elite, merasa mempunjai harga diri jang besar*

[174] Pidato pengantar Laporan Pertanggungdjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada Muktamar IV IPNU, tanggal 11-14 Pebruari 1961 di Yogyakarta.

> *dan penuh dengan ketjongkakan oleh karena dirinja termasuk golongan terpeladjar. Tidak, sifat dan pengetahuan serta djiwa ke-kyahi-an dan ke-santeri-an harus tetap ada. Kita djangan membuat diri kita terpisah dari masjarakat. Dan harus kembali kepada masjarakat serta berketjimpung di dalamnja. Untuk itu sekalipun nampak perbedaan jang djauh ketjakapan otak kita dari masjarakat, adalah tidak bidjaksana kalau kita menganggap kita ini golongan bangsawan fikir. Tidak, kita berpengetahuan adalah untuk mendjadikannja pedoman bagi kita dan atas dasar itu kita memimpin masjarakat kelak. Dan, oleh karenanja kita harus tidak sadja dekat dan tidak mendjauhi masjarakat, tetapi, sekali lagi, terdjun berketjimpung ke dalam dan di dalam masjarakat.*[175]

Pendirian ini tampaknya dipegang kuat dan terus dikampanyekan oleh Tolchah. Dalam pidato resminya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU pada Muktamar IV di Yogyakarta, ia kembali kenegaskan:

> *Tjita2 daripada Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama' jalah membentuk manusia jang berilmu, tetapi bukan manusia calon kasta elite di dalam masjarakat. Tidak. Kita menginginkan masjarakat jang berilmu. Tetapi jang dekat dengan masjarakat. Oknum jang berbuat karena ilmunya. Dan berilmu tetapi jang mau berbuat dan beramal. Sungguh akan merupakan malapetaka jang amat besar baik negara dipimpin oleh orang-orang jang tidak berilmu. Kita tidak menjandarkan semata-mata kepada kariere, lebih2 kariere dengan kekosongan ilmu dan bekal dalam kepala.*[176]

Penegasan Tolchah tersebut dirasa sangat penting bagi peneguhan komitmen organisasi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang lahir dan berkembang dari basis sosial

---

[175] Moh. Tolchah Mansoer, "Dua Tahun Telah Berlalu" dalam Pengantar *Peraturan Dasar.....*, hal. 9.

[176] "Pidato Resmi Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, Moh. Tolchah Mansoer dalam sidang Mu'tamar IV IPNU di Jogjakarta, tgl. 11/2-61" dalam *Risalah Organisasi IPNU*, edisi 1 th. 1 September 1961, hal. 5.

tradisional. Pernyataan tersebut seperti menjadi ”platform” bahwa IPNU lahir untuk masyarakat, bukan untuk orgaisasi itu sendiri, terlebih untuk kepentingan para elitnya. Bagi Tolchah, pendirian tersebut juga tertanam dalam-dalam yang menjadi ”karakter” pribadi pada perjalanan selanjutnya.

Tolchah Mansoer mengakhiri kiprahnya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU pada tahun 1961, melalui Muktamar IV IPNU di Yogyakarta,. Kepemimpinan IPNU selanjutnya dipegang oleh Ismail Makky sebagai Ketua Umum dan Munsif Nachrawi sebagai Sekretaris Umum. Meskipun sudah demisioner, Tolchah masih memberikan perhatiannya yang besar terhadap perjalanan IPNU pada masa-masa selanjutnya.[177] Ide-ide Tolchah terus dikembangkan dalam kepemimpinan IPNU berikutnya. Meski sudah tidak menjadi Ketua Umum IPNU, di era Ismail Makky, ia masih suka mengisi pertemuan-pertemuan IPNU sebagai salah seorang pendiri.[178]

Perhatian Tolchah terhadap IPNU bahkan masih terus dicurahkan sampai masa-masa berikutnya. Asnawi Latif, ketika menjabat Ketua Umum IPNU, mengaku masih banyak dibimbing oleh Tolchah Mansoer. Suatu saat ketika IPNU mendapat “jatah kursi” untuk mewakili NU duduk DPR GR, sebagai penasehat Tolchah mengingatkan Asnawi Latif agar tidak terseret ke dalam politik praktis. Bahkan, menurut pengakuan Asnawi Latif, Tolchah Mansoer sempat memarahi Asnawi karena dianggap terlalu larut dalam politik.[179]

---

[177] Pada masa Asnawi Latif misalnya, Tolchah masih sering berkunjung ke Jakarta untuk sekadar menengok dan memberikan masukan kepada IPNU. Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007. Bahkan sampai pada kepengurusan PP IPNU dipegang Ahsin Zaidy (1981-1988) Tolchah masih menjadi Pembina IPNU. Lihat Asrorun Niam Sholeh, *Kaum Muda NU* ....., hal. 89.

[178] Wawancara dengan Drs. KH. Ghozali Masroeri, 5 Pebruari 2008.

[179] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

Barangkali ini juga bisa dibaca sebagai usaha Tolchah untuk menjadi IPNU agar tidak dipolitisir.

Perhatian dan keakraban Tolchah dengan IPNU dan para yuniornya tampak dari surat-menyurat antara Tolchah Mansoer dan beberapa yuniornya, seperti Fahmi Djakfar Saifuddin, Mahbub Djunaedi, Asnawi Latif, dan lain-lain. Dalam sebuah surat yang ditulis pada tanggal 12 Mei 1975, Tolchah membanggakan teman dan yuniornya yang aktif di Jakarta. Tolchah mengungkapkan:

> *Ada rupanya masih terpelihara baik semangat idealisme.*
>
> *Itu saya lihat dalam rapat, sikap dan cara penyelenggaraan pertemuan. Dan saya berdo'a, mudah-mudahan itu terpelihara terus.*
>
> *Ya mudah-mudahan.*
>
> *Mengapa saya berkata begitu, sebab Jakarta, tetapi juga daerah lain, bisa membuat orang berubah. Ada-ada saja sebab yang membuat perubahan. Kalau perubahan itu itu baik tidak mengapa, tetapi kebanyakannya jelek. Dan tidak luput pula saya sendiri. Karena itu saya mengharap do;a adik dan adik2 di Jakarta. Atau mari kita saling berdo'a semoga kita tetap seperti adanya sekarang ini tentang semangat. Artinya sekalipun kelak mendapat apa-apa.*[180]

Demikianlah, Tolchah bertindak sebagai senior yang memiliki perhatian besar terhadap para penerusnya. Ia selalu meyakinkan kepada penerusnya tentang pentingnya menjaga mandat organisasi. Di samping masih sering berkirim surat dan menyempatkan datang ke Jakarta, sebagai wujud perhatian dan kepeduliannya terhadap organisasi yang dulu dirintisnya itu, Tolchah selalu datang pada setiap Kongres IPNU. Ia terus memotivasi para kader untuk mengembangkan budaya intelektual dalam organisasi dan kehidupan masyarakat.

[180] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H Asnawi Latif, tanggal 12 Mei 1975. Dalam surat tersebut Tolchah juga menyampaikan keinginannya untuk setiap bulan atau dua bukan sekali datang ke Jakarta untuk bertemu dengan para yuniornya.

Tolchah memang *prototype* organisatoris intelektual yang sukses dalam dunia akademik dan organisasi. Dengan kelebihannya dalam penguasaan keilmuan umum dan agama menjadikan Tolchah bak "generasi ideal" sebagaimana yang dicita-citakan IPNU sejak berdirinya. Bagi para penerusnya, Tolchah merupakan inspirator bagi munculnya para intelektual di lingkungan NU.[181] Ia telah banyak menginspirasi para penerusnya di IPNU dan PMII untuk mengikuti jalur akademis Tolchah yang memilih studi di bidang studi umum. Jiwa IPNU ini melekat pada diri Tolchah hingga masa tuanya, yaitu menjadi intelektual sekaligus agamawan. Dunia politik yang pernah dijalaninya tidak sedikitpun mengubah karakter dan komitmen keilmuan dan keagamaannya, justru karakter itu menjiwainya dalam aktivitas politik.

C. Memasuki Medan Politik

Pada tahun 1955 Pemilu pertama digelar. Saat itu Nahdlatul Ulama (NU) tampil sebagai salah satu peserta pemilu. Pada Pemilu pertama itu NU mendapat sukses yang luar biasa. Dari 8 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara meningkat menjadi 45 kursi dengan 18,4 persen suara, tepat di belakang Masyumi (20,9 persen), Partai Nasional Indonesia (22,3 persen), dan berada di depan Partai Komunis Indonesia (16,4 persen). Partai-partai lain hanya mendapat kurang dari 3 persen suara.[182] Namun begitu, di Yogyakarta NU menempati rangking keempat. Perolehan suara Pemilu 1955 di Yogyakarta dimenangkan oleh PKI dengan 43.954 suara, disusul PNI dengan 21.839 suara, Masyumi 17.983 suara, dan NU 2.395 suara.[183]

---

[181] Wawancara dengan Drs. KH Ghozali Masroeri, 5 Pebruari 2008.

[182] Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,* (Yogyakarta: LKiS), 1999, hal. 49.

[183] *Harian Pagi Nasional*, tanggal 16 Desember 1955. Sebenarnya sebelum Pemilu 1955 pada bulan September sampai Desember, di Yogyakarta pernah diadakan pemilu pertama pada tahun 1951 untuk DPR Daerah Istimewa Jogjakarta. Namun mungkin sebab tujuan yang lokal dan eksperimen untuk menyelenggarakan dan

Hasil pemilu inilah yang selanjutnya mengantarkan Tolchah Mansoer duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta.[184] Ditunjuknya Tolchah ini mempertimbangkan bakat dan potensinya sebagai anak muda progresif yang diyakini mampu memperjuangkan kepentingan nahdliyin kala itu.[185] Pilihan ini tentu tidak lah mudah bagi Tolchah. Di samping ia harus membagi waktu untuk IPNU, ia juga tertantang untuk memisahkan kepentingan gerakan pelajar dengan gerakan politik praktis. Terlebih kala itu kehidupan perpolitikan tengah memanas dan menjadi isu sentral. Suasana politik telah menjangkiti semua lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Komitmen Tolchah ini dimaksudkan untuk menjaga IPNU sebagai organisasi kader. Tolchah bertindak tegas dengan mengeluarkan siaran yang isinya memberikan pengertian kepada semua pimpinan IPNU bahwa tidak dibenarkan membawa-bawa nama organisasi ke dalam percaturan politik. IPNU merupakan organisasi kederisasi yang dapat digunakan untuk mengasah dan menempa diri sesuai dengan bidang kecenderungannya. Siaran PP IPNU XV menegaskan bahwa pimpinan IPNU harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan fungsi organisasi.

Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Laporan Pertanggung-jawabannya pada Muktamar IPNU IV di Yogyakarta. Dalam laporan itu Tolchah menegaskan:

> *Masalah jang tampaknja remeh tidak djarang malah merupakan malapetaka jang besar. Dan malapetaka itu*

---

mempersiapkan pemilu yang lebih besar, pemilu 1951 di Yogyakarta kenyataannya tidak dapat mendekatkan antara partai politik dengan rakyat.

[184] Beberapa sumber menyebut, meskipun pemilu dilaksanakan pada tahun 1955, namun DPRD Yogyakarta baru dibentuk pada tahun 1958. Hal ini barangkali disebabkan karena situasi politik yang belum stabil.

[185] Dalam salah satu versi sejarah, sejak Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, Tolchah sudah dipercaya menjadi Ketua Pengurus Wilayah Partai NU Daerah Istimewa Yogyakarta.

djustru menjangkut suatu organ jang seharusnya tidak usah diikut tjampurkan. Hal2 jang demikian ini nampak achir-achir ini pada masa di mana suasana politik sudah mendjangkit di mana2. Siaran PP IPNU XV jang dimaksudkan agar pada Pimpinan IPNU ini ada tjukup pengertian bahwa membawa-bawa organisasi ke dalam gelanggang dan pertjaturan politik sangat tidak dapat dibenarkan. Organ2 jang lebih kompeten –dalam keluarga kita sendiri- sudah tjukup mendjadi penampungan akan pengembangan bakat jang demikian. Dan saja harapkan kalau toch bakat jang demikian ini tjukup besar pada Pimpinan2 itu, tidaklah ada salahnja, hanja saja pesan bisalah membedakan antara pribadi dan fungsinja.[186]

Di samping harus memiliki ketegasan sikap politiknya, Tolchah harus pandai-pandai membagi waktu antara menjadi anggota DPRD, menjadi Ketua Umum PP IPNU, dan menyelesaikan kuliah S.1. Namun, ia berhasil menjalani semuanya dengan baik, meskipun kuliahnya sempat tersendat beberapa tahun. Jabatan sebagai anggota DPRD ini dijalani sejak tahun 1958 hingga tahun 1959.

Selesai memimpin IPNU dan lengser dari jabatannya sebagai anggota legislatif, tidak membuat karir politik Tolchah berhenti. Kecerdasan intelektual dan kematangan berorganisasi membuatnya kian terpandang. Bahkan manurut Sobich Ubaid, sebelum meletakkan jabatan Menteri Agama tahun 1961, Kyai Wahib Wahab diminta oleh Presiden Soekarno untuk mencari calon penggantinya. Kemudian ia memandang Tolchah Mansoer adalah orang yang tepat. Kepada istrinya, Kyai Wahib berkata: "Bu, saya usul ke Presiden, yang akan menggantikan saya adalah Tolchah Mansoer". Namun, Tolchah menyatakan menolak, karena menurutnya masih banyak kiai yang lebih senior dan lebih layak.[187] Desakan dan usulan agar Tolchah

[186] Laporan Pertanggungdjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada Muktamar IV IPNU, hal. 11.

[187] Wawancara dengan HM. Sobich Ubaid, 16 Januari 2008. Sebagaimana diketahui, beberapa hari menjelang berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja ke-2, KH Wahib mengajukan pengunduran diri dari jabatan

diangkat menjadi Menteri Agama kembali muncul pada masa-masa selajutnya.

Saat memimpin IPNU Tolchah memang sangat menonjol. Meskipun masih aktif dalam dunia organisasi pelajar, di akhir masa jabatannya sebagai Ketua Umum IPNU, Tolchah sudah mendapatkan kepercayaan untuk duduk dalam jabatan strategis. Selesai menjabat sebagai anggota DPRD Yogyakarta, pada akhir tahun 1959 Moh. Tolchah Mansoer ditunjuk menjadi anggota Badan pemerintahan Harian (BPH), sebuah lembaga yang menjadi "kabinet" pemerintahan daerah kala itu.[188] BPH bertugas sebagai pelaksana pemerintahan untuk membantu Gubernur. Badan ini beranggotakan perwakilan dari partai-partai politik. Saat itu komposisi BPH Yogyakarta terdiri dari elemen Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai NU. Tolchah adalah anggota BPH yang diusulkan oleh Partai NU. Masing-masing anggota membidangi satu bidang tertentu. Tolchah Mansoer adalah anggota BPH Bidang Kesejahteraan Rakyat.[189]

Menteri Agama. Tidak diketahui secara pasti apa alasannya. Dalam analisis Abdul Aziz, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut diambil karena desakan Soekarno. Tapi yang jelas, sebenarnya Wahib tidak mendukung gagasan Soekarno untuk menyatukan kaum nasionalis sekuler, agamawan, dan komunis yang dikonsepsikan dengan Nasakom. Labih lanjut tentang hal ini baca Abdul Aziz, "KH Muhammad Wahib Wahab: Kementrian Agama pada Masa Demokrasi Terpimpin" dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Depag RI), 1998, hal. 197.

[188] Badan Pemerintah Harian (BPH) merupakan struktur pemerintahan daerah pada masa Orde Lama yang berkedudukan di bawah Gubernur. Struktur pemerintahan ini ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

[189] Pada saat menjadi BPH ia mendapatkan rumah dinas di Kompleks Colombo Nomor 21. Komplek Colombo adalah sebuah kompleks yang diperuntukkan untuk pejabat DIY kala itu. Pada masa Orde Baru Menteri Perumahan Ahmadi mengeluarkan kebijakan bahwa rumah dinas yang telah berusia lebih dari lima tahun dapat dibeli. Karena

Di saat menjabat sebagai anggota BPH inilah Tolchah berkesempatan menerapkan ilmunya di bidang ketatanegaraan. Menurut Abdullah Syarwani, sebagai akademisi hukum tata negara, Tolchah mengaplikasikan pemikirannya tentang ketatanegaraan yang ia miliki.[190] Memang, meskipun menjadi pejabat daerah, Tolchah dikenal tampil beda. Sebab, tidak seperti pejabat atau politisi pada umumnya, Tolchah adalah kombinasi yang menarik antara politisi dan ulama. Dalam pandangan Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, dalam kesehariannya, sungguh ia orang yang luar biasa. Meski menjadi politisi, sosok intelektual dan integritas keulamaannya mengemuka. Kompetensi keilmuannya tidak hanya sebatas teori di dunia akademik, melainkan juga dipraktekkan ketika dia menjadi anggota BPH. Dalam menjalankan tugasnya sebagai BPH, peran Tolchah sangat menonjol.[191] "Dia tampil gagah, berwibawa, terpancar aura keulamaannya, intelektualitasnya, juga integritas kesantriannya," tutur Prof Drs. Cecep Syarifuddin.

Di samping menjadi anggota BPH ia tetap beraktivitas dalam dunia keilmuan. Selain mengajar di sejumlah perguruan tinggi, pada tahun 1965 ia juga menjadi Ketua Ikatan Sarjana Islam Indonesia.[192] Saat jabatannya di BPH berakhir pada tahun 1974, ia masih meneruskan khidmatnya sebagai pendidik, akademisi, dan menghabiskan waktunya untuk membina masyarakat melalui jalur dakwah. Pada bagian-bagian selanjutnya akan ditelurusi perjalanannya dalam dunia akademik dan gerakan kultural sebagai juru dakwah keliling.

---

itu akhirnya Tolchah bersama keluarganya membeli rumah tersebut. Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 21 Januari 2008

[190] Wawancara dengan H. Abdullah Syarwani, SH, 27 Januari 2008.

[191] Wawancara dengan Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, 15 Januari 2008.

[192] OG. Roeder, *Who's Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesia Personalities in All Fields* (Jakarta: Gunung Agung), 1971, hal. 212.

D. Kampus yang Kian "Sempit"

Selama menjadi BPH, Tolchah tidak meninggalkan aktivitasnya sebagai pendidik. Menurut Tolchah, dunia akademik merupakan satu-satunya kanal untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. Karena itu, di samping menjadi BPH, ia tetap aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Pada tahun 1956 ia menjadi pengajar di Madrasah Mu'alimat NU Yogyakarta. Sejak tahun 1963 menjadi dosen Fakultas Ushuludin dan Fakultas Adab.[193] Di kampus tersebut ia juga menjabat Ketua *Ulum Asy-Syariah* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Di perguruan tinggi ini Tolchah dipercaya menjabat sebagai pembantu rektor dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin. Menurut A. Muin Umar, kepemimpinan Moh. Tolchah Mansoer sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin telah berhasil mendorong para civitas akademika untuk berkreasi secara inovatif.[194] Pada bagian ini akan diulas tentang pasang surut karir akademis Tolchah Mansoer di IAIN Sunan Kalijaga. Namun terlebih dahulu akan ditelusuri perjalanan pengabdian Tolchah dalam dunia pendidikan.

Di samping di IAIN Sunan Kalijaga, Tolchah Mansoer juga pernah mengajar dan memimpin berbagai perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 1965-1975, ia menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga Negeri (AANN), saat yang sama juga mengajar di Akademi Militer (AKMIL) Magelang, IKIP Yogyakarta, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Hasyim As'ary Jombang (1970-1983), Rektor Perguruan Tinggi Imam Puro Purworejo (1975-1983), Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo. DI samping itu, ia juga menjadi anggota tim Pengkajian Hukum Tata Negara dan Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

---

[193] Wawancara dengan Prof. Dr. Machasin, MA, 27 April 2009.

[194] Pidato pelepasan jenazah KH Moh. Tolchah Mansoer, Yogyakarta 21 Oktober 1986).

Di samping mengajar, Tolchah juga terlibat dalam berbagai kagiatan pendidikan lainnya. Pada tahun 1964, ia duduk sebagai anggota Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII). Ia juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1965 ia menjadi anggota Badan Penyantun Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Pengabdiannya di dunia pendidikan ini baru berhenti sampai akhir hayatnya.[195]

Pada tahun 1968 dia sudah meraih gelar doktor. Di kalangan nahdliyin, Tolchah adalah orang pertama yang meraih gelar doktor, sesuatu yang sangat istimewa di saat sebagian besar kaum tradisionalis itu terbelakang dalam soal pendidikan. Kala itu menjadi sarjana (doktorandus) saja merupakan sesuatu yang sangat sulit, terlebih di kalangan NU. Ia merupakan doktor hukum pertama di UGM. Sedangkan di Indonesia, ia tercatat sebagai pakar hukum tata negara generasi kedua di Indonesia, seangkatan dengan Prof. Dr. Ismail Sunny.

Pada saat Menteri Agama dijabat oleh KH Muh. Dahlan, Tolchah diminta pindah ke IAIN Sunan Kalijaga. Langkah ini ditempuh dengan proyeksi Dr. Moh Tolchah Mansoer dipersiapkan menjadi rektor, sebab Prof. Soenarjo akan segera berhenti dari jabatan rektor. Banyak orang respek kepada Tolchah karena dia menguasai ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Lalu, pindahlah dia ke IAIN Yogyakarta.[196] Menurut versi lain, masuknya Tolchah ke IAIN adalah permintaan Sri Sultan Hamengubuwomo IX selaku Dewan Kurator IAIN. Sri Sultan meminta kepada Tolchah untuk membantu di IAIN dengan menjabat sebagai Pembantu Rektor.[197] Hal ini dilakukan

---

[195] *Kedaulatan Rakyat,* 2 Oktober 1986. Baca juga Saifullah Ma'shum (ed.), *Kharisma Ulama.....*, hal. 376, H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU.....*, hal 290, dan Mastuqi HS, M. Ag. dan M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren:* ..... hal. 107.

[196] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[197] Wawancara dengan Drs. Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009. Jabatan ini diemban sejak tahun 1965, di saat Tolchah masih

karena IAIN sangat membutuhkan orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan sosial seperti Tolchah Mansoer. Pada saat menjabat sebagai pembantu rektor itulah, Tolchah Mansoer banyak mencetak tokoh-tokoh NU yang kemudian menjadi dosen di kampus tersebut.[198]

Pada tahun 1970, saat akan berlangsung pemilihan Dekan Fakultas Ushuluddin, terjadi pertarungan antara kelompok HMI dan PMII. HMI mencalonkan Dr. A. Mukti Ali, sedangkan PMII dan NU mengusung Dr. Moh. Tolchah Mansoer.[199] Dr. A. Mukti Ali adalah seorang intelektual lulusan McGill yang juga mengajar di Fakultas Ushluddin. Selain persentuhan intelektual, hubungan keduanya lebih banyak diwarnai dengan persentuhan "politis". Ini terjadi dalam sebuah konstelasi politik kampus di mana terjadi rivalitas antara NU dan Muhammadiyah. Kala itu, hubungan keduanya lebih banyak diwarnai ketidakharmonisan daripada kerjasama. Di tengah konstelasi itu, baik Mukti Ali maupun Tolchah Mansoer sama-sama dinominasikan sebagai calon Dekan Ushuluddin oleh kelompoknya masing-masing. Dalam rivalitas itu akhirnya yang terpilih menjadi dekan adalah Tolchah Mansoer. Dengan demikian Mukti Ali gagal menjadi dekan. Padahal, Mukti Ali adalah orang yang kelak oleh kelompoknya akan diproyeksikan menjadi Rektor IAIN. Karena kegagalan pada suksesi dekan itu, gagal pula proyeksi itu.[200]

Setelah Pemilu 1971, di mana dengan berbagai cara, kecurangan dan intimidasi Golongan Karya (Golkar) menang,

---

menjabat sebagai anggota BPH. Baca OG. Roeder, *Who's Who in Indonesia*..... hal. 212.

[198] Wawancara dengan Umroh Mahfudzoh, 31 Januari 2008.

[199] Wawancara dengan Drs. H. Hafidz Ma'sum, 7 Januari 2008.

[200] Wawancara dengan Prof. Djahja Umar, Ph.D, 29 September 2008. Pada tahun 1964, Mukti Ali memangku jabatan Pembanu Rektor III bidang urusan publik, dari situ selanjutnya ia dipercaya menjadi Pembantu Rektor I bidang akademik, tahun 1968. Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru" dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI*....., hal. 286 .

terjadi perubahan formasi politik. Kelompok NU disingkirkan dari posisi-posisi strategis di pemerintahan dan kancah politik. Menteri Agama yang pada masa-masa sebelumnya selalu dipegang oleh kader NU digantikan dengan orang yang berasal dari kelompok lain. Saat itu, sebenarnya, Tolchah Mansoer adalah orang yang akan diusung menjadi Menteri Agama. Dorongan ini berbeda dengan keinginan beberapa orang pada tahun 1960-an. Terbukti, untuk mengegolkan hal ini sekelompok anak muda yang terdiri dari Moh. Ichwan Sam, Slamet Effendy Yusuf, dan Nadhir Muhammad sampai menemui Ali Murtopo, Sudomo dan beberapa tokoh penting Orde Baru kala itu untuk melobi agar Tolchah Mansoer diangkat menjadi Menteri Agama.[201] Dorongan muncul bukan dari keinginan Tolchah Mansoer sendiri.

Menurut KH Idris Abdul Hamid, saat itu dalam sebuah forum diskusi Kiai Ali Ma'sum juga mengkandidatkan Tolchah Mansoer menjadi Menteri Agama menggantikan KH Muh. Dahlan. Bersaing dengan Mukti Ali. Namun, tampaknya dia tidak bersedia, apalagi berambisi. Padahal sudah sewajarnya dia menjadi menteri.[202] Menurut Tolchah Hasan, memang pada waktu itu ada suara bahwa Tolchah Mansoer adalah salah satu kandidat Menteri Agama. Ada beberapa tokoh intelektual NU yang dinominasikan, seperti MR Kusnu, Moh. Tolchah Mansoer, Subhan ZE, Yahya Ubaid, dan Mahbub Junaidi. Dari beberapa tokoh tersebut, Tolchah Mansoer mempunyai tipologi yang berbeda dengan yang lain karena dia menguasai kitab kuning dan pada saat yang sama juga menguasai keilmuan umum.[203] Abdulah Syarwani mencatat, waktu itu isu pengusungan Tolchah Mansoer menjadi Menteri Agama sangat santer.[204]

---

[201] Wawancara dengan Drs. H. Moh. Ichwan Sam, 29 September 2008.

[202] Wawancara dengan KH Idris Abdul Hamid, 6 Januari 2008.

[203] Wawancara dengan Prof. Dr. Tholhah Hasan, 18 Januari 2008.

[204] Wawancara dengan H. Abdullah Syarwani, SH, 27 Januari 2008.

Sayang, karena rivalitas politik, penguasa Orde Baru tak menghendaki Departemen Agama dipegang oleh NU. Kala itu NU tengah berada pada barisan oposisi. Sedangkan pemerintah waktu itu tidak mau mengambil resiko opsisi. Karena pertimbangan politik, Presiden Soeharto menginginkan Menteri Agama yang tidak berasal dari NU. Menurut Drs. Hafidz Ma'sum, saat itu Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Kafrawi, bisa meyakinkan Soeharto sehingga A. Mukti Ali dipilih menjadi Menteri Agama.[205] Akhirnya, diangkatlah Mukti Ali menjadi Menteri Agama.[206]

Mukti Ali merupakan tokoh yang tidak merepresentasikan kekuatan NU. Meskipun latar belakang keluarganya NU, Mukti Ali dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah. Ia dilantik pada 11 September 1971, menggantikan KH Muhammad Dachlan, Menteri Agama dari NU pada Kabinet Pembangunan I 1968, yang belum habis masa jabatannya. Pengangkatan Mukti Ali sebagai Manteri Agama terkait dengan usaha pemerintah Orde Baru –dalam hal ini ABRI dan Golongan Karya- untuk mengakhiri pengaruh partai NU di departemen tersebut. Bagi Orde Baru, keberadaan KH. Mohammad Dachlan secara jelas menjadi ganjalan bagi upaya kooptasi politik Departemen Agama ke dalam barisan pendukung Golkar. Karena itu, salah satu cara yang dimungkinkan adalah mencari pengganti Menteri Agama dan, dari situ, memutus hubungan politik Departemen Agama dari

[205] Wawancara dengan Drs. H. Hafidz Ma'sum, 7 Januari 2008.

[206] Menurut Abdullah Syarwani, di lingkungan ormas keagamaan muncul pemikiran-pemikiran pembaharuan terhadap Islam. Dalam hal ini NU dianggap ketinggalan. Oleh karena itu dicari figur yang dianggap memilki latar belakang pendidikan Barat. Pada waktu era Mukti Ali itulah seolah-olah Islam dan Barat berkembang bersamaan di Indonesia. Pada era Mukti Ali ini muncul program pengiriman mahasiswa ke Mcgill Canada. Kemudian orang-orang NU di Departemen Agama dicopot dan diganti dengan orang-orang dari Mcgill. Wawancara dengan H. Abdullah Syarwani, SH, 27 Januari 2008.

NU.[207] Langkah ini bisa dipahami sebagai bagian dari strategi Orde Baru untuk memarginalisasi peran politik NU yang kala itu banyak melawan hegemoni kekuasaan.[208] Fenomena ini dan berbagai kebijakan akomodasi yang diambil oleh Orde Baru, pada gilirannya semakin melebarkan jarak kesenjangan sosial antara NU dan Muhammadiyah.[209]

Peminggiran terhadap NU membawa konsekuensi yang berat, yaitu pembabatan terhadap tokoh politik, birokrat dan akademisi NU. Kenyataan ini juga lah yang menimpa kader NU seperti Tolchah Mansoer, Karena berasal dari unsur NU,

---

[207] Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI,* ....., hal. 290. Para pengamat berpedapat, Mukti Ali dijadikan menteri dengan tugas kilat menghancurkan kendali NU atas Departemen Agama. Sebagai akibat dari penunjukkan menteri baru ini jumlah orang NU yang menempati posisi kunci di Departemen Agama berkurang dengan cepat dan kemungkinan untuk melimpahkan berbagai kesempatan kepada para anggotanya pun semakin kecil. Baca Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKiS), cet. V, 2008, hal. 98.

[208] Pemilu Orde Baru yang pertama ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap rezim baru. Di antara partai-partai yang diakui, NU memperlihatkan dirinya sebagai partai yang bersikap paling kritis. Pada saat menjelang pemilu, Subhan ZE melakukan kampanye keras, yang secara langsung mengkonfrontasikan Golkar dan secara pribadi mengkritik beberapa tokoh penting seperti Ali Murtopo dan Amir Mahmud. Selama masa kampanye banyak terjadi intimidasi terhadap calon pemilih dan tekanan keras dari Angkatan Bersenjata dan pemerintah agar memilih "partai" Orde Baru, Golkar. Juru bicara kampanye Partai NU dengan keras menyerang intimidasi tersebut dan menghimbau para anggotanya agar tidak membiarkan diri mereka diteror. Pemilu tersebut dapat dikatakan menggambarkan persaingan antara Angkatan Bersenjata dan Golkar di satu pihak, dan Islam –paling mencolok NU- di pihak lain. Tak pelak lagi, Golkar keluar sebagai pemenangnya, dengan 62,8% dari keseluruhan suara, tetapi NU tidak terkalahkan. NU bahkan berhasil meningkatkan, walaupun tidak besar, jumlah perolehan suaranya daripada pemilu 1955, dari 18,4% menjadi 18,7%. Baca Martin van Bruinessen, *NU*....., hal. 83-84.

[209] Martin van Bruinessen, *NU*....., hal. 91.

Tolchah Mansoer gagal dinominasikan oleh kalangan NU untuk menjadi Menteri Agama. Tidak hanya itu, karena posisinya sebagai kader NU, karir akademis Tolchah juga terhambat. Di kampus Tolchah hanya menjadi dosen biasa. Alih-alih jabatan rektor, Tolchah bahkan dicopot dari posisi dekan. Bagi Tolchah kampus seakan semakin "menyempit". Perlakuan ini dalam kaca mata Daniel Dhakidae disebut pengabaian (*exclusionary measure*) dan pengucilan terhadap para akademisi dan cendikiawan yang menolak mengambil bagian dalam wacana Orde Baru.[210]

Dalam menggambarkan kondisi yang menimpa Tolchah Mansoer, Ichwan Sam mengungkapkan:

> *"Saya mengalami kekaguman yang luar biasa kepada Pak Tolchah, tetapi kadang-kadang juga merasa iba. Ia menjadi korban sistem rezim saat itu, terutama di IAIN, yang berlangsung antara tahun 1969 sampai 1980-an. Bentuk-bentuk ketidakadilan rezim kepadanya saat itu salah satunya dilakukannya dengan pembatasan mata kuliah yang dia ajar. Pak Tolchah memang sangat kritis terhadap penguasa."*[211]

Puncak dari "pembunuhan" karakter ini adalah dihambatnya gelar guru besar Tolchah. Padahal sebagai akademisi senior, persyaratan untuk menjadi guru besar sudah lebih dari cukup. Pengabdian Tolchah di dunia akademik sudah sangat lama. Kegiatan-kegiatan ilmiahnya juga sudah tidak diragukan. Berbagai buku dalam berbagai disiplin telah ditulisnya. Tolchah juga seorang intelektual yang rajin menulis artikel popular di media massa. Setiap minggu tulisannya selalu muncul di surat kabar Kedaulatan Rakyat dan berbagai surat kabar lain seperti Sinar Harapan. Meski dari sisi akademik sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan gelar ini, namun secara politik terhambat. Bandingkan dengan Mukti Ali yang

---

[210] Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2003, hal. 301.

[211] Wawancara dengan Drs. H. Moh. Ichwan Sam, 29 September 2008.

pada Oktober 1971, sebulan setelah diangkat menjadi Menteri Agama.[212] Yahya Umar mencatat, banyak anak didiknya yang kala itu sudah jadi professor, tapi sang guru belum menjadi profesor.[213] Sebagaimana diketahui, gelar guru besar itu baru turun 3 bulan setelah Tolchah Mansoer wafat.

Memang, Tolchah dikenal sebagai orang yang "cuek" dengan urusan pangkat dan gelar. Ia bahkan enggan mengurus gelar guru besarnya. Yang rajin mengurus adalah Umroh, sang istri. Termasuk yang menyiapkan cum/point kenaikan pangkat. Namun, lama diurus, gelar itu belum juga turun dengan berbagai alasan. Ada kabar burung yang mengatakan bahwa berkas-berkas pengajuan gelar guru besarnya di Departemen Agama terus dikurangai sehingga tidak pernah lengkap. Ia pernah mengeluh tentang persoalan ini kepada Asnawi Latif. Memang Asnawi Latif saat itu ada bekerja di Departemen Agama, namun kala itu perannya sangat terbatas, sehingga tidak bisa membantunya.[214] Pada saat itu memang, keberadaan kader-kader NU di birokrasi, khususnya Departemen Agama terus dipinggirkan. Kenaikan pangkat bagi kader NU adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Terhadap fenomena ini, Tolchah sudah menyadari sepenuhnya.

Dalam menggambarkan suasana batin kala itu, Tolchah mengungkapkannya dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Asnawi Latif:

> *..... adalah suatu impian, ketika kita mengharapkan sesuatu dari keadaan sekarang. Tadinya orang-orang pada mengejek saya ketika orang-orang menyampaikan optimismenya lantaran perubahan orang-orang..... Saya berpendirian: jangan bermimpi. Apalagi terakhir, saya mendapat cerita suatu pendirian yang jelas: apapun juga kita ini tidak akan mendapatkkan di echelon satu. Ini sudah*

[212] Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Drs. Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI, ...*, hal. 286.

[213] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[214] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

saya dengar setengah tahun yll.... bahkan untuk echelon kedua saja, harus diperhitungkan benar-benar.[215]

Hambatan karir akademis yang dihadapi oleh Tolchah jelas sebuah persoalan politik yang *by design*. Banyak orang menyesalkan pemerintah, khususnya Departemen Agama waktu itu, yang telah berbuat kejam kepada Tolchah Mansoer dengan penghambatan kenaikan pangkatnya selalu dihambat.[216] Di samping karena ada persoalan "politik" dengan penguasa Departemen Agama kala itu, hal ini juga diakibatkan oleh sikap kritisnya terhadap kekuasaan Orde Baru yang saat itu tengah mengokohkan rezimnya. Selain dianggap pernah "melindungi" para aktivis mahasiswa yang kritis, Tolchah sendiri tampil sebagai sosok yang "nyeleneh". Dalam kesaksian istrinya, meskipun Tolhah seorang PNS, tetapi ia tidak pernah memakai baju Golkar, apalagi ikut upacara Golkar.

Barangkali sikap kritis ini juga yang turut menjadikannya sebagai tokoh yang dibatasi. Karena semua kegiatannya dibatasi, dia tidak bisa masuk kemana-mana, termasuk ke kancah politik PPP, karena NU secara keseluruhan juga sedang dimarginalisasi secara politik dalam PPP[217]. Fenomana ini sebenarnya juga dialami oleh tokoh-tokoh NU lainnya yang berani "melawan" penguasa. Zaman itu semua orang NU yang memegang prinsip terus dikucilkan, termasuk tokoh mudanya seperti Subhan ZE. Sebagaimana banyak dicatat dalam sejarah, Subhan adalah aktivis NU yang kerap mengambil garis oposisi

[215] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 20 Desember 1973.

[216] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[217] Masa itu merupakan masa suram bagi perpolitikan NU. Meskipun menjadi komponen mayoritas dalam PPP, NU dipinggirkan. Tentang hal ini bisa baca Syaifuddin Zuhri, "NU Sekedar Mempertahankan Asas Musyawarah" dalam KH Syaifuddin Zuhri dkk, *PPP, NU dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Integrita Press), 1984, hal. 7-17.

yang kritis dan bahkan keras terhadap penguasa.[218] Namun, beda dengan Subhan, Tolchah Mansoer tidak keras dan terbuka dalam melontarkan kritik. Tapi beliau punya sikap, kalau tidak setuju ya tidak setuju. Karena bukan pemimpin teras organisasi, maka jarang orang yang mengutip pendapatnya. Kelebihannya, Tolchah dekat dengan elit mahasiswa dan bahkan membimbing dan membela mereka saat direpresi. Akibat dari sikap yang diambilnya itu ia rela kehilangan jabatan di IAIN. Namun, di pemerintahan Tolchah tetap menjadi anggota BPH, karena dia adalah kepercayaan Sultan Hamengkubuwono IX.

Di tengah gencetan kekuasaan terhadap Tolchah dan tokoh-tokoh potensial NU pada umumnya, Tolchah tetap tegar. Ia justru memberikan motivasi kepada para kader NU untuk tetap berbuat di tengah keterjepitan itu:

> *..... sulit, sulit sekali kita mendapatkan apa-apa.....walaupun tidak berarti kita harus jatuh menyungkurkan diri untuk mendapatkan apa-apa. Biarlah kita di atas kepribadian kita, menunjukkan kita ini ada, kita ini diperlukan oleh bangsa dan negara, dan itu banyak jalannya. Bagi saja menulis, sebanyak-banyaknya....tidak sekarang, kelakpun akan bermanfaat, tidak generasi kita, tetapi untuk kemudianpun tidak mengapa. Kita berbuat untuk diri kita, juga untuk anak keturunan kita.*[219]

Tolchah merasakan, di tengah penyingkiran itu, banyak orang, bahkan termasuk pengusa, masih memerlukannya. Hal ini benar-benar disadari oleh Tolchah ketika ia diundang dalam benyak kesempatan. Karenanya ia mengaku tidak terkecut ketika *Central of Strategic and International Studies* (CSIS) dan Majelis Luhur Taman Siswa mengundangnya bersama 20 orang sarjana dan guru besar. Demikian pula ketika pemikiran dan pendapat-pendapatnya didengar dan diapresiasi dalam

[218] Lebih lengkap tentang tokoh ini baca Arif Mudatsir Mandan (ed.), *Subhan Z.E. Sang Maestro: Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu), 2001.

[219] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 20 Desember 1973.

berbagai seminar, termasuk yang diselenggarakan oleh Kowilhan.

Meskipun begitu ia tetap menyadari bahwa kala itu NU tetap dipinggirkan. Kalaupun pemikiran-pemikirannya didengar, hanya dimanfaatkan semata. Secara politik potensi kelompok NU tetap dipinggirkan. Hal ini diungkapkan oleh Tolchah:

> ..... *ada lalu kesimpulan: betapapun hebatnya kita ini, kita harus seperti kelapa. Apa itu? Seperti halnya kelapa, kan cuma diperas, ampasnya dibuang, dan ia sendiri tidak ikut apa-apa, cuma dimakan dan tidak memakan hasilnya sendiri..... Saya hanya berkata: yang penting bagi kita adalah berbuat untuk bangsa dan negara saya, apakah itu sebagai warga negara, sebagai sarjana, kalaupun memang masih dihitung sebagai sarjana, sebagai guru, ya sebagai apa sajalah.*[220]

Kata-kata di atas menunjukkan bahwa Tolchah bukan orang yang putus asa. Meskipun keberadaannya tidak diakui, namun ia bertekad tetap berbuat untuk bangsanya. Barangkali karena kondisi dan pendirian seperti inilah yang membuatnya menekuni dunia akademik dan dakwah hingga akhir hidupnya. Berbagai karyanya yang kritis tampaknya juga merupakan refleksi dari pendirian dan prinsipnya ini.

Sikap kritisnya terhadap kekuasaan Orde Baru sebenarnya tampak dalam banyak hal. Selain sikap politiknya yang kuat, hal ini juga tertuang dalam berbagai tulisannya di media massa dan karya-karya bukunya. Salah satu buku karya yang kritis terhadap kekuasaan adalah buku berjudul *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia* (1970). Dalam buku yang diadaptasi dari disertasi doktoralnya itu, ia mengkritik praktek ketatanegaraan yang dilakukan oleh Soeharto yang dianggap secara hukum menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.[221] Bisa dibayangkan, pada saat semua orang kala

---

[220] Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer, *ibid.*

[221] Lebih lanjut baca Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif*

itu masih tunduk terhadap kekuasaan, ia sudah malontarkan kritik keras. Lebih lengkap tentang isi disertasi tersebut, dapat dibaca pada bab selanjutnya.

Setelah terbitnya buku tersebut, Presiden Soeharto menawari Tolchah untuk diangkat menjadi duta besar di Timur Tengah. Tawaran ini diberikan kepada Tolchah karena ia dianggap terlalu kritis, dan membahayakan pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya Soeharto berkeinginan "mengamankannya" keluar negeri. Terhadap permintaan ini Tolchah menolak.[222] Penolakan ini bisa dipahami karena saat itu posisi duta besar adalah buangan. Menurut Tolchah, meskipun status sosialnya naik, namun secara sosial keagamaan dan politis itu berarti penghapusan perjuangan, karena dijauhkan dari basis perjuanganya. Dengan kata lain, Orde Baru ingin membungkam Tolchah dengan cara menjadikannya sebagai duta besar. Penolakan Tolchah disebabkan ia ingin meneruskan pengabdiannya sebagai "pekerja kultural". Sejak penolakan itulah nuansa bahwa NU sebagai kelompok yang berseberangan dengan pemerintah sangatlah terasa. Terlebih, sebagai pegawai negeri Tolchah beristrikan seorang anggota DRR dari PPP. Sementara dalam rezim Orde Baru, pegawai negeri harus memiliki monoloyalitasnya kepada Golkar.[223]

Keberaniannya menjadi oposan itu bukan saja karena posisinya di NU, melainkan lebih karena keyakinan intelektualnya. Dalam pandangan Much. Romahurmuziy, sang anak bungsu, Tolchah adalah *a man of principle,* orang yang sangat teguh dalam memegang prinsip. Dalam konteks oposisi kepada penguasa, beliau sadar betul tidak akan bisa berhubungan dengan konteks pemanfaatan fasilitas pemerintah,

---

dan Legislatif Negara Indonesia (Jojakarta: Percetakan Radya Indria), 1970.

[222] Kepada sang kakak, Ustman Mansoer, Tolchah Mansoer mengatakan,, "Lebih baik saya jualan pisang goreng daripada jadi dubes". Wawancara dengan Nyai Ustman Mansoer, 27 Pebruari 2008.

[223] Wawancara dengan Much. Romahurmuziy, 10 September 2007.

termasuk dalam mengembangkan pondok pesantrennya waktu itu.[224]

Pada Munas Alim Ulama NU menjelang Pemilu 1971 di Tebuireng Jombang, sikap kritis itu juga ia tunjukkan dengan lantang. Saat itu Tolchah menjadi Ketua Tim Perumus, yang dianggotai antara lain oleh Yusuf Hasyim dan Prof. Cecep Syarifuddin. Waktu itu dia menegaskan dalam rekomendasi Munas bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memilih partai Islam. Spontan pernyataan tersebut membuat forum itu geger.[225] Rekomendasi yang akhirnya menjadi fatwa 700 ulama itu dikeluarkan sebagai respons terhadap upaya pemenangan Golkar yang dilakukan dengan berbagai cara. Sebagaimana diketahui, menjelang Pemilu 1971, untuk kepentingan pemenangan Golkar, pemerintah dan ABRI melakukan berbagai intimidasi terhadap semua kelompok pesaing, termasuk NU yang menjadi pesaing berat. Banyak ulama, tokoh NU dan pemuda NU yang saat itu mendapat perlakuan kejam akibat kegetolannya memenangkan partai NU.[226]

Lontaran pendapat yang selanjutnya menjadi fatwa itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa, di saat semua orang kala itu bungkam. Bahkan, sebagaimana dicatat oleh Sidney Jones, banyak kyai yang melompat ke Golkar dan menjadi pendukung rezim Soeharto. Sebagaimana Subhan, Tolchah adalah orang yang memegang prinsip dengan berani. Saat warga nahdliyin ditekan, Tolchah bicara dengan lantang untuk melawan ketidakadilan. Itu merupakan *warning* bagi

---

[224] Wawancara dengan Much. Romahurmuziy, 10 September 2007. Banyak orang menduga, ketidaksetujuannya dengan praktek politik dan ketatanegaraan yang diterapkan oleh Orde Baru itu sudah disampaikan melalui surat kepada Presiden Soharto. Hal ini dibuktikan, ketika Tolchah meninggal dunia, Soharto mengirimkan surat kawat.

[225] Wawancara dengan Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, 25 Januari 2008. Partai-partai Islam yang ikut berkntestas dalam pemilu 1971 adalah NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

[226] Tentang peristiwa itu Andree Feillard mendokumentasikannya dengan sangat bagus. Baca Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara.....*, hal. 151-170.

pemerintah. Fatwa itu bukan sektarianisme, sebab muncul dengan kepentingan untuk membangun keseimbangan politik, karena otoritarianisme pemerintah yang begitu kuat. Karakter "perlawanan" inilah yang terus melekat hingga masa tua.

E. Fenomena Colombo 21

Menjadi pejabat pemerintahan dan menjadi akademisi ternyata tidak cukup bagi Tolchah. Darah gerakannya seakan tidak pernah berhenti mengalir sampai usianya yang semakin tua. Dia tidak saja menjadi founder organisasi pelajar dan mahasiswa NU, melainkan hingga masa tua ia adalah "pengasuh" bagi anak-anak muda NU di Yogyakarta. Setelah tidak lagi menjadi aktivis mahasiswa, Tolchah masih mendampingi dan membina para mahasiswa NU. Pada setiap PMII mengadakan acara, Tolchah Mansoer hampir selalu datang dan memberikan arahan dan materi di berbagai pelatihan kader. Dengan posisinya sebagai pembina, para aktivis PMII hampir setiap hari datang dan berdiskusi di rumahnya.[227]

Kedekatannya dengan mahasiswa membuat rumahnya di Kompleks Colombo nomor 21 menjadi semacam "markas" bagi gerakan muda NU di Yogyakarta.[228] Di tempat itu para aktivis mahasiswa NU (PMII) datang untuk berdiskusi atau membawa persoalan untuk dimintakan nasehat. Tidak hanya mahasiswa IAIN, aktivis yang suka *nongkrong* di rumah Tolchah adalah para aktivis dari berbagai universitas, termasuk UGM. Di samping karena keramahannya, mereka suka berdiskusi dengan Tolchah karena pengetahuannnya luas, baik soal agama maupun umum. Ichwan Sam menyebut Tolchah Mansoer sebagai "good father" bagi aktivis muda NU di Yogyakarta. Hampir seluruh jajaran PMII, maupun IPNU dan IPPNU di Yogyakarta jika membutuhkan klarifikasi, mencari restu, atau

[227] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007

[228] Bagi kalangan aktivis dan gerakan, terutama di Yogyakarta, nama Komplek Colombo 21 barangkali bukanlah tempat asing. Colombo adalah sebuah kompleks perumahan pejabat pemerintah Yogyakarta. Di Sinilah Tolchah Mansoer berdiam sejak menjadi anggota BPH, hingga wafatnya.

bahkan mencari pembenaran, Tolchah Mansoer adalah sumber gagasan. Bagi generasi muda dia adalah pemasok gagasan. Ia juga pandai memberi sugesti. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain di Yogyakarta waktu itu, dia jauh lebih enak dan akrab diajak berbicara.[229]

Memang, sebagai mahasiswa para aktifis kala itu selalu menjalin hubungan baik dengan para seniornya, terlebih pembina organisasi. Namun, untuk diskusi masalah-masalah gerakan dan kemahasiswaan, mereka lebih banyak merapat kepada Tolchah, karena lebih enak.[230] Pada saat ada gagasan untuk menjadikan PMII independen dari NU, misalnya, banyak senior yang marah. Namun, meskipun juga tidak sepenuhnya setuju, Tolchah dianggap orang yang paling bisa diajak berfikir ilmiah dan rasional. "Pak Tolchah bisa menerima argumentasi-argumentasi yang saya kemukakan, cuma dia bilang belum saatnya" tutur Yahya Umar. Ketika suatu saat PMII berbeda tentang sesuatu hal dengan Kiai Ali Ma'shum Krapyak, misalnya, Tolchah Mansoer membela anak-anak PMII. Bahkan ia sampai bentrok dengan kiai.[231]

Saking terlalu seringnya rumah Colombo 21 dijadikan tempat berkumpul sampai banyak yang menyebut rumah Tolchah sebagai rumah para aktivis PMII, IPNU dan lain-lain. Memang kala itu selain memiliki kantor PMII, para aktivis mahasiswa NU itu juga menggunakan rumah-rumah para dosen itu. Tetapi yang paling banyak ditempati adalah rumah Tolchah tersebut. Tamu-tamu dari Jakarta juga dibawa ke sana. Kedekatannya bahkan sampai seperti keluarga sendiri. Bagi para aktivis PMII rumah Colombo 21 sudah dianggap rumah sendiri. Tolchah Mansoer sudah dianggap seperti ayah sendiri.[232] "Selain membawa persoalan-persoalan tidak jarang

---

[229] Wawancara dengan Drs. H. Moh. Ichwan Sam, 29 September 2008.

[230] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[231] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[232] Wawancara dengan Drs. H. Hafidz Ma'sum, 7 Januari 2008.

para mahasiswa ini juga numpang makan di sana", tutur Slamet Effendy Yusuf.

Lebih dari itu, Tolchah Mansoer dan Colombo 21 adalah tempat di mana para mahasiswa mengadu dan meminta perlindungan dari tindakan represif penguasa. Khususnya sejak tahun 1972, PMII Jogya dan seluruh orang NU tergencet oleh Orde Baru. Mereka membutuhkan patron sebagai tempat berlindung. Di antara senior NU, yang berani adalah Tolchah Mansoer.[233] Bahkan jika ada aktivis PMII yang ditahan, yang membebaskan adalah Tolchah Mansoer.[234] Tolchah seakan menjadi tempat pencarian suaka politik bagi para aktivis pergerakan mahasiswa. Langkah ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Banyak pihak menuduh Tolchah Mansoer menjadi dalang demonstrasi mahasiswa.

Yahya Umar, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi "santri"nya kala itu, mengaku kasihan dengan Tolchah atas ulah teman-temannya, seperti Slamet Effendy Yusuf, Firdaus Basuni, dan "anak-anak nakal" lainnya yang menjadikan Tolchah Mansoer sebagai "bemper". Setelah berdemonstrasi mereka berkumpul di rumah Tolchah Mansoer untuk mencari perlindungan. Saat akan ditangkap, mereka bersembunyi di rumah Tolchah Mansoer. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa seolah-olah aksi mereka dilakukan atas perintah Tolchah, padahal sama sekali tidak. Sebab dia adalah tokoh dan anggota BPH. "Pemerintah dan militer menuduh Pak Tolchah yang berada di balik aksi-aksi mereka," tutur Yahya Umar mengisahkan dengan detail.

Kesediaan Tolchah menjadi "beking" mahasiswa merupakan wujud sikap oposisinya terhadap Orde Baru. Sikap oposisi inilah yang membuat pengajuan guru besarnya terus dihambat. Terlebih hal ini ditambah dengan rivalitas dengan Mukti Ali yang kala itu menjadi Menteri Agama. Dihambatnya gelar guru besar oleh penguasa membuat Slamet Effendy

[233] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[234] Wawancara dengan Nyai Umroh Mahfudhoh, 31 Januari 2008.

mengatakan bahwa "kesalahan" Tolchah Mansoer adalah karena dia orang NU, di suatu zaman di mana NU dipinggirkan.[235]

Kontestasi NU dengan kekuasaan kala itu memang melatari dinamika perpolitikan tanah air, termasuk perpolitikan kampus.[236] Semenjak Pemilu 1971, di mana Golkar tampil sebagai kekuatan politik berkuasa, NU sebagai kekuatan politik yang tak kalah penting, tampil sebagai pengkritik keras penguasa. Sementara itu pada tahun 1972 digelar pemilihan Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Dari pemilihan tersebut, terpilih Prof. Sunaryo, namun kemudian pemerintah membatalkan dan menetapkan Kolonel Bahri Syahid sebagai rektor. Melihat kenyataan itu, mahasiswa, termasuk PMII, mengobrak-abrik pelantikan. Akhirnya rektor tidak dilantik di kampus. Beberapa aktivis mahasiswa ditahan. Peristiwa ini selanjutnya dikenal dengan peristiwa IAIN.[237] Di tengah perseteruan tersebut, Tolchah Mansoer selalu mendukung mahasiswa, walaupun sebagai orang tua ia tidak setuju dengan terlalu kerasnya sikap mahasiswa. Meski tidak setuju, Tolchah tak pernah menghalangi sikap kritis mahasiswa. "Paling-paling beliau bilang 'kalian itu gimana sih?'", kenang Slamet Effendy Yusuf yang kala itu menjadi aktivis mahasiswa.[238]

Sebagai pemuka masyarakat Tolchah berperan penting dalam peredaman konflik akibat persitiwa tersebut. Adnan

---

[235] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[236] Nuansa politik kampus kala itu memang sangat kental. Para mahasiswa NU yang mayoritas tergabung dalam PMII terus berupaya melawannya. Sementara itu, pimpinan kampus dipegang oleh bukan orang-orang NU. Namun, kekuatan mahasiswa dipegang oleh aktivis NU, temasuk dewan mahasiwa dan pers mahasiswa. Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[237] Tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1972 ini baca Ridwan Saidi, "Antara Dongeng dan Sejarah" dalam KH Syaifuddin Zuhri dkk, *PPP, NU dan MI, ...,* hal. 59-60

[238] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007

Harahap, Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga kala itu, mencatat, Tolchah Mansoer berperan besar dalam memulihkan kembali kondisi IAIN setelah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa menolak pelantikan rektor IAIN yang didrop oleh Pemerintah Pusat itu. Saat itu sempat terjadi kevakuman sampai satu semester, namun berkat pendekatan yang dilakukan Tolchah Mansoer, akhirnya kondisi kampus bisa kembali normal.[239]

Sebagai seorang pendidik dan pemimpin masyarakat, Tolchah terhitung ulet dalam membina anak muda. Banyak mahasiswa datang ke rumahnya untuk ngaji rutin, atau konsultasi. Tolchah tidak pernah menolak kapanpun mahasiswa datang, asal dia sehat. Ia orangtua yang enak diajak ngomong apa saja. Istri dan keluarganya yang kala itu anak-anaknya masih kecil tidak terganggu dengan keadaan tersebut. Bahkan sang Istri, Umroh Mahfudhoh, sangat *welcome* dan justru merasa senang karena setiap hari rumahnya selalu ramai. Begitulah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Colombo 21 seakan telah menjadi fenomena gerakan muda NU. Mengingat begitu pentingnya rumah itu bagi gerakan muda NU, Ichwan Sam sampai mengagas Colombo 21 dijadikan sebagai monumen perjuangan gerakan mahasiswa.[240]

Menurut sang istri, Umroh Mahfudhoh, Tolchah memang dikenal sebagai bapak bagi aktivis gerakan mahasiswa NU di Yogyakarta. Sebagai mantan aktivis sekaligus akademisi, Tolchah sangat rajin mendorang anak-anak muda untuk menjadi ilmuwan, ketimbang menjadi politisi. Kalaupun menjadi politisi, adalah politisi yang intelektual. Dalam kenangan Yahya Umar, ia pernah berpesan bahwa lebih baik menjadi doktor dulu kemudian jadi politisi, daripada menjadi politisi lalu menjadi doktor. Hal ini disampaikan karena ia sudah pernah mengalami dua dunia itu. Sebelum menjadi doktor, ia adalah seorang politisi. Akhirnya berbicara seilmiah

[239] Wawancara dengan Adnan Harahap, 15 Maret 2008

[240] Wawancara dengan Drs. H. Moh. Ichwan Sam, 29 September 2008

apapun, tetap dinilai politis. Akan tetapi, menurutnya, kalau menjadi doktor dulu baru masuk politik, maka berbicara sepolitis apapun tetap dinilai sebagai ilmiah.[241]

F. Menekuni Dunia Dakwah

Di samping menjadi akademisi dan pernah mengenyam profesi sebagai politisi, Tolchah adalah seorang kiai. Meskipun bukan keturunan kyai, tapi karena kealimannya ia dijuluki sebagai kiai. Namun, kala itu ia tidak menunjukkan ke-kiai-annya. Ke-kiai-annya tampak ketika berdiskusi di mana ia mengeluarkan dalil-dalil keagamaan dengan fasih.[242] Kelebihannya dalam penguasaan ilmu agama secara dalam inilah yang membuatnya semakin kharismatik di masa tua. Kharisma keagamaannya itu terus bersinar mengiringi perjalanan dedikasinya hingga usia senja. Hingga masa tua, ia tetap menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada masyarakat.

Komitmen untuk mengabdi tampaknya memang sudah menjadi pilihannya. Saat menjabat sebagai anggota BPH, selain mengajar di IAIN, ia masih aktif sebagai salah satu wakil Ketua PWNU Yogyakarta yang kala itu diketuai oleh M. Jamhari. Khidmatnya di NU ini terus ia jalani hingga ia tidak lagi menjabat sebagai anggota BPH. Setelah tugasnya menjadi anggota BPH selesai pada tahun 1974, ia memilih jalur perjuangan kultural. Hingga akhir hidupnya ia mengabdikan diri untuk berdakwah, dengan berbagai cara.

Menurutnya, ada empat sarana yang bisa menunjang suksesnya penyampaian dakwah Islamiyah.[243] *Pertama*, pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini tidak diragukan lagi kemampuan dan pengorbanan Tolchah. Sejak masih berusia remaja sampai akhir hayatnya. Tolchah selalu menaruh perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Seluruh hidupnya

---

[241] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[242] Wawancara dengan Sobih Ubaid, 16 Januari 2008.

[243] Baca Saifullah Ma'shum (ed.), *Kharisma Ulama*....., hal. 376-377.

diabdikan untuk dunia pendidikan. Sasaran akhir kegiatan pendidikan di samping untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan keimanan juga untuk meningatkan kesejahteraan sosial setiap individu. Prinsip ini selalu melakat pada diri Moh. Tolchah.

Kedua, organisasi. Sebagai aktivis organisasi, Tolchah mendudukkan organisasi di samping merupakan sarana yang paling efektif untuk berdakwah, juga sebagai wahana pembinaan kader menuju insan yang sempurna, yaitu kader yang tidak hanya tertarik terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga selalu memperhatikan sisi ukhrawi. Tolchah Mansoer juga menghimbau kepada setiap pimpinan organisasi agar mendirikan sarana pendidikan dan sarana sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. Sarana seperti itu, menurut KH. Tolchah bisa mempermudah jangkauan dan efektifitas dakwah.

Ketiga, tulisan. Di samping dua jalur diatas, Moh. Tolchah Mansoer juga memanfaatkan media tulis sebagai sarana dakwah kepada masyarakat. Dakwah lewat tulisan lebih efektif dan bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Karya tulisnya di samping berupa buku, juga artikel yang dimuat di beberapa media cetak, baik majalah maupun surat kabar harian. Dan *keempat,* lisan. Sebagian besar waktu Tolchah digunakan untuk ber*amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk melaui lisan. Tolchah dikenal sebagai da'i segala lapisan. Ia akan memenuhi undangan masyarakat dari manapun mereka berasal.

Berangkat dari keyakinannya itulah, Tolchah menghabiskan waktnya untuk berdakwah dan mendidik masyarakat. Dalam menunaikan "tugas" ini Colombo 21 bukan hanya markas bagi gerakan muda. Rumah itu juga menjadi "pesantren" bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Di sebuah garasi mobil yang tidak terlalu lebar, setiap pagi dan sore dipenuhi oleh para "santri". Di sini Tolchah memimpin pengajian kitab kuning. Di samping mengajarkan berbagai kitab kuning dengan berbagai kelas, untuk kalangan tertetu ia juga biasa ngaji syair Al-Burdah yang kemudian diterjemahkan olehnya ke dalam bahasa Indonesia. Dengan

kemampuan hafalan yang sangat bagus, Tolchah juga hafal syair-syair *Alfiyah* Ibnu Malik.

Pengajian itu diikuti oleh berbagai kalangan sesuai dengan segmen kitab yang dibaca. Selain untuk mahasiswa, ia juga mengajar para dosen dari berbagai kampus, seperti IAIN dan IKIP, bahkan UGM.[244] Banyak ustadz, mubaligh, dan kiai juga mengikuti pengajian tersebut, termasuk Kiai Abu Tauhid. Bahkan, Kadang-kadang Kiai Ali Ma'shum pun datang mengikuti pengajian di di Colombo 21.[245] Kiai Thoha Abdurahman, seorang mantan aktivis IPNU, setelah menjadi dosen di IAIN sering mengaji kepada Kiai Tolchah. Dia ingat, sehabis Subuh ia mengikuti Kitab Alfiah, Tafsir Ibn Kastir, Ushul Fiqh.[246]

Prof. Drs. KH Projodikoro, yang juga seorang dosen, mengaku pertama kali bertemu dengan Tolhah pertama kali saat mulai mengaji dengan beliau pada tahun 1975, bersama KH Abu Tauhid, KH Thoha Abdurohman, dan KH Hasan Baidhowi. Beberapa kitab yang dikaji antara lain *al-Hikam, ar Risalah, al Um, Jurumiyah, Syarah Ibnu Aqil, Qowaidul Ahkam, Riyadussolihin*, dan lain-lain. Para dosen itu juga mengaji kitab *Shohih Bukhori, Shohih Muslim*, dan termasuk karya penting yang dikarang Imam Malik yaitu *Al Muwatho'*. Sayang sebelum khatam, Tolchah terlebih dulu meninggal. Tolchah orang yang ulet dan tak kenal lelah dalam memberikan pengajian. Bahkan meskipun sakit, Tolchah tetap menyempatkan pengajian.[247]atas masukan para santrinya, Tolchah akhirnya membangun sebuah musholla disamping rumahnya sebagai tempat mengaji yang biasanya diadakan di garasi.

---

[244] Wawancara dengan H. Abdullah Syarwani, SH, 27 Januari 2008.

[245] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008.

[246] Wawancara dengan KH Thoha Abdurrahman, 30 Januari 2008.

[247] Wawancara dengan Prof. Drs. KH Projodikoro, 5 Maret 2008.

Di mata para "santri"nya, Tolchah dipandang orang yang istimewa. Meskipun belum pernah nyantri di pondok pesantren, Tolchah sangat pandai membaca kitab-kitab ala pesantren. Termasuk keistimewaannya adalah setiap mencari referensi ketika membaca kitab, langsung ketemu dengan maksud yang dituju, meski telah berganti berlembar-lembar. Namun, meskipun mengaji tema-tema serius, ia tetap membawakanya dengan rasa humor yang tinggi. Ia memang dikenal sosok guru yang humoris, namun humor yang tetap mengesankan ilmiah.[248]

Tidak hanya di rumah, Tolchah juga rajin "blusukan" ke kampung-kampung untuk berceramah. Sebagaimana kiai tradisonal pada umumnya, Tolchah banyak diundang untuk memberikan ceramah ke berbagai daerah. Bahkan jika diundang pengajian di pelosok daerah pun akan tetap datang. Bahkan Moh. Tolchah tidak segan segan menggenjot sepeda ontel naik turun perbukitan. Tolchah dikenal sangat mencintai jamaahnya.[249] Pernah suatu saat, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan kritik kepada Tolchah, "untuk apa pak Tolchah *kluyuran* malem-malem, makomnya (maksudnya kapasitasnya) pak Tolchah itu bukan itu. Serahkan saja tugas itu kepada orang lain". Tolchah menjawab, "Ya gak bisa". Belakangan setelah tua Slamet baru tahu maknanya, yaitu komunikasi dengan umat.[250]

Salah satu cirinya dalam ceramah adalah dengan membawa kitab ke mimbar untuk ditunjukkan referensinya, seperti memberikan kuliah.[251] Menurut Slamet Effendy yang kerap mengikutinya berceramah, hal itu dilakukan karena ia tidak mau asal berbicara. Kiai Tolchah ingin apa yang

[248] Wawancara dengan Prof. Drs. KH Projodikoro, 5 Maret 2008.

[249] Wawancara dengan Prof. Drs. KH Projodikoro, 5 Maret 2008.

[250] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[251] Wawancara dengan KH Abu Tauhid, 5 Maret 2008. Abu Tauhid mengaku sering menemani Kiai Tolchah berceramah di berbagai daerah.

disampaikan tepat sesuai dengan rujukan.[252] Meski seorang intelektual, ia menggunakan bahasa popular, sebab audiens yang dihadapi adalah masyarakat biasa.

Selain dakwah keliling daerah, Kiai Tolchah juga sering memberi kuliah subuh di Masjid Syuhada' Yogyakarta. Bahkan ia juga sering memberikan ceramah di masjid IAIN Sunan Kalijaga. Meski waktu tuanya habis untuk berceramah dan mengaji, identitas sebagai ilmuwan dan akademisi tetap tak hilang. Sampai masa tuanya, Tolchah masih menyempatkan diri untuk menulis. Selain, menelorkan karya-karyanya dalam bentuk buku, ia juga masih menulis di majalah *Al-Jamiah* milik IAIN Yogyakarta. Pada tahun 1978 Tolchah juga diminta untuk masuk dalam kepengurusan Risalah Nahdlatul Ulama, sebuah majalah yang diterbitkan oleh PBNU.[253] Perpaduannya sebagai seorang kiai-intelektual ini membakalinya dalam berkriprah di medan perjuangan Nahdlatul Ulama yang akan ditelurusi pada bagian berikutnya.

G. Situbondo: Khittah NU dan "Asas Tunggal"

Jika pada masa muda Tolchah Mansoer sukses menorehkan sejarah dengan mendirikan dan memimpin organisasi pelajar, di masa tua komitmen gerakannya terus didedikasikan. Sejak tahun 1962 ia sudah terlibat dalam kepengurusan PWNU DIY. Pada masa Ketua PWNU dijabat M. Jamhari, Tolchah dipercaya menjadi wakil ketua. Saat itu M. Jamhari menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Yogyakarta, sedangkan Tolchah masih menjabat sebagai anggota BPH sekaligus dosen. Jika M. Jamhari bergaul di lingkungan para politisi, Tolchah Mansoer bergaul dengan para akademisi dan mahasiswa. Pada periode 1980-1984, ia menjadi KH Dr. Tolchah Mansoer, SH menjabat sebagai Rois Tsani Syuriyah

[252] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[253] Permintaan ini disampaikan oleh Fahmi Saifuddin. Surat pribadi Fahmi Saifuddin kepada Moh. Tolchah Mansoer, tanggal 8 Agustus 1978.

PW Nahdlatul Ulama DIY. Kala itu Roisnya adalah KH. Ali Ma'shum.[254]

Ada momentum penting saat ia aktif sebagai pengurus NU, yaitu keterlibatannya dalam berbagai perhelatan yang bersejarah, salah satunya adalah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983. Munas tersebut menjadi salah satu momentum yang bersejarah bagi perjalanan NU, karena melalui forum itulah NU menorehkan sejarah penting dalam perjalanan republik ini, yaitu penerimaan asas tunggal Pancasila dan mengembalikan jam'iyyah terbesar ini pada garis perjuangannya, yaitu Khittah 1926.[255]

Sebagaimana dicatat dalam sejarah, sejak tahun 1966, Orde Baru sudah mulai melakukan upaya penyeragaman ideologi. Setelah mendapatkan tantangan selama bertahun-tahun, upaya ini mencapai puncak pada tahun 1978. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Menteri Agama waktu itu, melakukan berbagai pedekatan terhadap ormas Islam agar bisa menerima asas tunggal Pancasila. Langkah ini juga dilakukan terhadap NU dengan cara mendekati para kiai dan tokoh NU yang berpengaruh, yang menonjol waktu itu adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin.[256] Namun di internal NU, wacana ini menjadi perdebatan yang berkepanjangan.

Perdebatan ini memuncak pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur.[257]

---

[254] Surat Keputusan PBNU tanggal 3 Pebruari 1981 No. 1675/Tanf/PB/II-81.

[255] Sebenarnya isu Khittah 1926 sudah muncul sejak Muktamar XXVI pada tahun 1979 di Semarang. Muktamar tersebut telah memutuskan untuk menjernihkan identitas NU sebagai organisasi keagamaan, akan tetapi karena semangat politisnya masih sangat kuat, maka identitas itu menjadi kabur kembali. Keputusan Muktamar hanya berhasil untuk mengembalikan NU menjadi organisasi keagamaan secara konsepsional, tetapi gagal secara operasional.

[256] Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*....., hal. 234

[257] Munas tersebut mengagendakan beberapa pembahasan, yaitu: 1) Pemantapan proses pemulihan NU kepada Khittah 1926, 2)

Dalam sidang pleno pertama, Kiai Achmad Siddiq mengemukakan argumen-argumen menurut fikih melalui makalah "Pemulihan Khittah NU 1926".[258] Melalui pidato yang panjang, Ahmad Siddiq tampaknya mampu meyakinkan kepada para kiai akan pentingnya NU untuk menerima asas Pancasila.[259] Memang secara formal Ahmad Siddiq adalah orang yang dikenal sebagai orang yang meyakinkan para kiai, namun sesungguhnya perdebatan panjang telah melibatkan banyak kiai.[260]

Pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi, 3) Penegakan batasan-batasan yang jelas bagi penyaluran aspirasi politik warga NU, dan 4) Masail diniyah/ijtimaiyyah. Baca "Laporan Penyelenggaraan Musyawaran Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama" dalam *Laporan Muktamar NU Ke-27* (Jakarta: Panitian Penyelenggara Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama), 1984, hal. 84-85.

[258] Pemikiran-pemikiran KH Achmad Siddiq tentang khittah baca KH. Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur), cet. VI, 2006

[259] Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara*.....,., hal. 243

[260] Menurut Zein Badjeber, mantan Wakil Sekjen PBNU dan anggota Steerimg Comitte Munas Alim Ulama NU, penerimaan terhadap Pancasila sebagai Asas dalam AD/ART NU sudah terjadi sebelum pelaksanaan Munas Alim Ulama NU di Situbondo. Menurut dia, sebelum Munas sudah ada pengarahan dari Syuriah NU di rumah KH. Masykur untuk Peserta Munas yang intinya NU menerima Asas Pancasila dan menunjuk KH. Ahmad Siddik untuk merumuskan konsep makalah tersebut guna disampaikan dalam munas nanti. Kerena sesungguhnya NU sudah tidak lagi mempermasalahkan Pancasila. Bahkan dalam salah satu pasal Anggaran Dasarnya sudah sejak lama mencantumkan landasan perjuangan Pancasila dan UUD 1045. Permasalahan yang ada di Munas menurutnya adalah seputar pergeseran pasal asas Islam dalam anggaran dasar menjadi Asas Pancasila. Karena itu yang ditinjau adalah apakah sudah benar NU mendudukkan Islam pada pasal asas yang ditinjau dari berbagai segi seperti secara etimologi apakah kata asas itu dan bagaimana pemakaiaannya dalam bahasa dan ketatanegaraan kita. Misalnya bagaimana dalam kitab suci al-Qur'an, UUD, GBHN dan sebagainya, dan mengapa pula NU yang sejak kebangkitannya tahun 1926 tidak memakai pasal asas, kemudian ikut-ikutan memasang asas khususnya setelah NU menjadi partai politik. Wawancara dengan Zein Badjeber, 21 Februari

Materi Pemulihan Khittah dibahas secara mendalam oleh Komisi II yang dipimpin oleh KH Chamid Wijaya sebagai ketua, HM Said Budairy sebagai sekretaris dan HM Anwar Nurris sebagai wakil sekretaris. Dalam sidang ini Dr. KH Moh. Tolchah Mansoer, SH bertindak sebagai pendamping sidang bersama KH Masykur, KH Ahmad Siddiq dan H Imron Rosyadi, SH.[261] Dibandingkan dengan komisi lain, komisi ini merupakan komisi yang paling menarik dan menyedot perhatian, sehingga anggota komisi ini paling banyak dibandingkan dengan komisi lain. Hal ini dapat dimaklumi mengingat komisi ini membahasan masalah-masalah krusial dan strategis meliputi hubungan Pancasila dengan Islam, mukadimah Anggaran Dasar/ Rumah Tangga NU, dan Pokok-pokok pikiran tantang Pemulihan Khittah NU 1926.

Setelah melalui perdebatan yang panjang dengan melibatkan 34 pembicara, untuk mempercepat penyelesaian pembahasan dibentuk sebuah tim kecil yang beranggotakan 25 orang. Tim tersebut selanjutnya dibagi menjadi tiga sub-tim yang masing-masing menangani "Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam" diketuai oleh H. Abdurrahman Wahid, "Rancangan Mukadimah Anggaran Dasar/Rumah Tangga NU" diketuai oleh Drs. HM Zamroni dan "Pokok-Pokok Pikiran Pemulihan Khittah 1926" diketuai oleh Dr. KH Moh. Tolchah Mansoer, SH.[262]

2008. Lihat juga Zain Badjeber, "Munas NU dan Pancasila", dalam *Sinar Harapan*, 9 Februari 1984.

[261] "Laporan Penyelenggaraan Musyawaran Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama" dalam *Laporan Muktamar NU Ke-27* ....., hal. 86.

[262] Wawancara dengan Zein Badjeber pada tanggal 21 Februari 2008. Zain Badjeber, *Munas NU dan Pancasila*, Sinar Harapan, 9 Februari 1984. Setelah melalui proses pengesahan pada sidang pleno komisi dan sidang pleno Munas, menghasilkan tiga keputusan Munas, yaitu: 1) Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: II/Maunu/1404/1983 tentang Kembali ke Khittah Nahdlatul Ulama 1926; 2) Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: III/Maunu/1404/1983 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Muktamar

Di luar sidang resmi yang tercatat dalam sejarah NU, ada sepenggal sejarah dalam perhelatan tersebut yang tidak terdokumentasikan secara formal, yaitu momen penting yang menjadi salah satu tonggak penerimaan NU atas asas Pancasila, yaitu diskusi panjang –tepatnya bisa disebut perdebatan- antara Gus Dur dengan Kiai Tolchah Mansoer yang berlangsung dalam salah satu sesi pada Munas itu. Dalam biografi Abdurrahman Wahid, Greg Barton menggambarkan:

> *Gus Dur ingat bahwa (saat itu) KH. Tolchah Mansoer dari Yogyakarta, yang tidak ikut serta dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta, berbicara dalam munas itu: "Saya mempunyai pandangan sendiri , yang berbeda dari apa yang disampaikan di sini." Gus Dur segera menghampirinya dan berkat dalam bahasa Arab, "Kiai gunakan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia." "Mengapa?" "Gunakan sajalah." Gus Dur sadar bahwa agen agen intelijen dari BAKIN ada dalam pertemuan ini dan dengan cermat mengikuti setiap topik pembicaraan. Ia merasa prihatin bahwa jika Kiai Tolchah melancarkan kritik panjang mengenai Pancasila, hal ini bisa merepotkannya karena agen-agen intel itu akan menyampaikan laporan negatif mengenai dirinya. Untunglah para peserta yakin bahwa jika pembicaraan dilakukan dalam bahasa Arab, agen-agen itu (saat itu biasa direkrut dari kaum abangan dan kaum non-muslim dan tentu belum pernah mendapatkan pendidikan pesantren) tidak dapat memahami apa yang mereka diskusikan.* [263]

Konon perdebatan ini berlanjut pada keesokan harinya selama semalam suntuk, sejak jam 22.00 hingga 04.00 pagi hari. Memang akhirnya terjadi kesepahaman dengan kata-kata Tolchah: "Oleh karena Islam lebih lengkap dari pada Pancasila,

---

NU XXVII, dan 3) Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: IV/Maunu/1404/1983 tentang Rekomendasi Larangan Perangkapan Jabatan Pengurus. Lihat *Laporan Muktamar NU Ke-27* ....,, hal. 87.

263 Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS), cet. ke 6, 2006, hal. 164-165.

tentu saja Islam mencakup keduanya, baik dunia ini dan dunia akhirat." Gus Dur Menjawab: "Tepat sekali, Pancasila hanya berkaitan dengan dunia ini."[264]

Setelah selesai perdebatan tersebut, ungkap Greg Barton, Gus Dur dan kiai Tolchah berpelukan hangat di hadapan peserta Munas. Terdapat rasa lega dan gembira oleh karena masah yang pelik ini akhirnya dapat diatasi dan bahwa organisasi ini dapat maju terus. Terdapat juga rasa lega bahwa konfrontasi yang mungkin terjadi dengan pemerintah telah dapat dihindari dan bahwa ulama telah mampu memecahkan masalah-masalah tanpa mengompromikan prinsip-prinsip mereka.

Perdebatan antara Tolchah dan Gus Dur waktu itu tampaknya memang merupakan puncak dari perdebatan panjang sejak sebelum Munas hingga Munas digelar. Setelah debat inilah keputusan penerimaan asas tunggal disepakati. Namun dalam biografi yang ditulis oleh Greg Barton itu dapat dibaca bahwa seolah-olah Tolchah r adalah salah satu kiai yang awalnya menentang pemberlakukan asas Pancasila, dan di sisi lain Gus Dur adalah orang yang menerangkan kepadanya sehingga Tolchah dapat menerimanya.[265]

Dalam versi yang lain, pada Munas Alim Ulama tersebut Tolchah Mansoer bersama dengan Gus Dur berusaha meyakinkan dan mensukseskan masuknya asas Pancasila ke dalam AD/ART NU. Hal ini karena Penerimaaan terhadap Pancasila telah menjadi keyakinan Tolchah.[266] Pancasila, menurut Tolchah, merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam teks Proklamasi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dan

---

[264] Greg Barton, *Gus Dur ……,* hal. 244.

[265] Sayang, ketika kami minta konfimasi kepada KH Abdurrahman Wahid, ia tidak berkenan memberikan keterangan sama sekali tentang hal ini. Ketika kami desak dalam wawancara dengannya (Pebruari 2008), Gus Dur masih juga sama sekali tidak mau membuka sejarah yang masih misterius ini.

[266] Mastuqi HS, M. Ag. dan M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren* ..... hal. 111.

Supersemar[267] Bahkan, TAP MPR XX Tahun 1966 yang menerima memorandum DPR GR 9 Juli 1966 semakin memperkuat keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia.[268] Dengan membaca pemikiran-pemikirannya, dapat disimpulkan bahwa Kiai Tolchah adalah orang yang paling terdepan dalam soal penerimaan Pancasila, karena di samping dari perspektif Islam, ia memandangnya dari perspektif tatanegara.[269]

Ada beberapa bukti yang mendukung hal ini. Salah satunya, sebelum berangkat ke Munas tersebut, Tolchah Manseor dan Kiai Ali As'ad sering berdiskusi di Krapyak dengan mengundang segenap pengurus NU se-DIY. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk menyamakan presepsi tentang penerimaan asas tunggul Pancasila oleh NU. Dengan argumentasi Tolchah Mansoer para kyai di Yogyakarta akhirnya mau menyetujui NU menerima Pancasila. Selain itu, dalam buku ke-NU-an yang diterbitkan oleh PW NU Yogyakarta yang ditulis oleh Kiai Ali As'ad, Tolchah Mansoer menulis khusus di bagian hubungan antara NU dengan negara.[270] Kejadian-kejadian di atas membuktikan bahwa Tolchah sudah terlibat dalam mengkondisikan penerimaan asas tunggal Pancasila.

Sementara itu, dalam ingatan KH Muchit Muzadi, orang yang dipercaya oleh Kiai Ahmad Siddiq untuk menyusun makalah tentang pemulihan Khittah pada Munas tersebut, perdebatan tersebut hanya mempermasalahkan redaksi

---

[267] Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tata Tertib Hukum* (Yogyakarta: Bina CItpa), 1979, hal. 32.

[268] Moh. Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif* (Djakarta: Pradnya Paramita), 1977, hal. 74.

[269] Lebih lanjut tentang pemikiran Tolchah tentang Pancasila dan Islam, baca Moh, Tolchah Mansoer, *Peranan Ummat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah IAIN Sunan Kalijaga), 1971.

[270] Wawancara dengan KH Ali As'ad, 5 Maret 2008.

penerimaan Pancasila. Gus Dur berangkat dari logika pengetahuan keislaman pesantren semata, sedangkah Tolchah Mansoer memang merupakan pakar hukum tata negara. Artinya, dalam hal ini Tolchah bisa menjelaskan tentang pentingnya Pancasila dalam perspektif ketatanegaraan maupun dalam pandangan Islam.[271]

Dari berbagai sumber sejarah yang ada, kesimpulan Greg Barton di atas memang perlu diuji kembali, terutama jika dikaitkan dengan beberapa sumber pelaku sejarah kala itu. Menurut beberapa sumber, justru Gus Dur adalah orang yang dalam forum tersebut cukup keberatan jika NU menerima asas Pancasila. Dalam kesaksian Slamet Effendy Yusuf misalnya, anak-anak muda yang tergabung dalam Majelis 24 sudah mempersiapkan konsepnya dengan matang dari Jakarta.[272] Kemudian dalam perhelatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam dari Kiai Ahmad Siddiq tentang Pancasila dan Indonesia sebagai upaya final kaum muslimin mendirikan negara.

Di samping Kiai Ahmad Siddiq, dalam rapat Komisi Khittah di Munas tersebut, Majelis 24 mengundang orang-orang untuk membentuk tim 7 pemulihan khittah. Tim 7 itu melahirkan pokok-pokok pikiran tentang strategi pemulihan

[271] Wawancara dengan KH A. Muchit Muzadi, 27 Februari 2008.

[272] Kelompok G adalah sebuah kelompok muda NU yang sering berkumpul di rumah H. Said Budairi di gang G Mampang Prapatan, Jakarta. Kelompok inilah yang melahirkan pemikiran NU ke khittah NU 1926. Dalam sebuah pertemuan bersejarah pada bulan Mei 1983, yang dihadiri oleh 24 kader NU yang pro pembaruan (karena itu disebut Majelis-24), didiskusikan berbagai gagasan yang ingin diajukan kelompok pembaru di dalam Munas. Kader NU yang terlibat dalam majelis ini antara lain Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Musthofa Bisri, Muhammad Thohir, Sahal Mahfudz, Muchit Muzadi, M. Zamoni, Mahbub Djunaidi, Abdullah Syarwani, H. Said Budairi, Slamet Effendy Yusuf, Masdar Farid Mas'udi, Asep Hadipranata, Tholhah Hasan, HM Munasir, Sjaiful Mudjab, Umar Basalim, Cholil Musaddad, Ghafar Rahman, Moh. Ichwan Sam, Musa Abdillah, Musthofa Zuhad, Daniel Tanjung, dan Ahmad Bagdja. Baca Martin van Bruinessen, *NU*....., hal. 119.

Khittah 1926. Tim 7 diketuai oleh Abdurrahman Wahid, didampingi M. Said Budairy sebagai sekretaris. Dalam rapat komisi itu yang paling alot adalah ketika Gus Dur pada jam 02.00 WIB sempat menyatakan tidak setuju NU menerima Pancasila. Ia meminta keputusan itu ditunda dulu. Padahal sebelum perhelatan itu, Gus Dur, dr. Fahmi Dja'far Saifuddin, dr. Muhammad Thohir dan Slamet Effendy sudah mengucapkan ikrar di rumah Gus Dur di Cilandak Jakarta. Ikrar itu sudah dicapai dengan mantap dan diakhiri dengan bersalaman. Namun sungguh mengejutkan di detik-detik akhir itu Gus Dur, sang pemimpin tim 7, tiba-tiba menyatakan tak setuju.[273]

Sesudah itu lalu Fahmi Saifuddin, M. Said Budairy, Slamet Effendy, dan Gus Dur bertemu. Mereka menanyakan kepada Gus Dur tentang alasan penolakannya terhadap asas Pancasila yang kala itu sudah harus diambil keputusan oleh NU. Jawaban Gus Dur ternyata sangat sepele. "Saya teringat bapakku. Yang merumuskan sembilan kata itu kan termasuk ayah saya", tutur Slamet Effendy menirukan jawaban Gus Dur.[274] Jawaban Gus Dur tersebut spontan membuat banyak orang terkejut. Ia dapat menerima setelah dilobi oleh Kelompok G.[275] Sebagaimana catatan sejarah NU, kala itu terjadi perundingan dimana para aktivis muda mencoba meyakinkan beberapa kiai besar tentang asas Pancasila. Yang penting bagi para kiai, jika yang dimaksud dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah tauhid, mereka setuju. Pemerintah dengan berbagai cara kala itu juga terus menjelaskan bahwa sila pertama Pancasila dalam pengertian umat Islam adalah tauhid.[276] Di

[273] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[274] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[275] Kelompok G adalah kelompok yang menjadi inisiator pertemuan Majelis 24, terdiri dari Fahmi Saifuddin, M. Said Budairy, Slamet Effendy.

[276] Perdebatan tentang ini ditulis secara baik oleh Andree Feillard. Baca Andere Feilard, *NU vis-a-vis Negara.....*, hal. 242-245.

tengah perdebatan itu, Kiai Tolchah Mansoer adalah salah satu dari kalangan orang tua yang mendukung gerakan kaum muda.[277]

Kesaksian menarik datang dari Kiai Ali As'ad. Di forum Munas, menurutnya, banyak yang menangis dan membaca istighfar atas penerimaan NU terhadap Pancasila. Namun berkat argumentasi yang disampaikan oleh Tolchah akhirnya banyak yang memahami. Bagi Tolchah, sila demi sila dalam Pancasila berdasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam Islam. Bukan satu kesatuan yang sehingga mempresepsikan pancasila sebanding dengan agama.[278]

Sebagai pakar hukum tata negara, Tolchah dapat menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif ketatanegaraan.[279] Secara detail, Tolchah memberikan penjelasan tentang kedudukan asas organisasi dengan hukum Islam atau Islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Drs. Cecep Syarifuddin yang turut terlibat dalam forum itu, justifikasi akademik asas tunggal Pancasila didukung oleh para akademisi seperti Tolchah Mansoer. Ia memberikan pandangan dari perspektif filosofis, sosiologis, politis dan yuridisnya.[280] Dalam kesaksian KH Idris Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan, Tolchah berdebat cukup lama dengan kyai Ahmad Siddiq sampai semalam dengan

[277] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[278] Wawancara dengan KH. Ali As'ad, 5 Maret 2008.

[279] Dalam ingatan KH A. Muchit Muzadi yang terlibat dalam Munas itu, perdebatan tersebut hanya mempermasalahkan redaksi penerimaan Pancasila. Gus Dur berangkat dari logika pengetahuan keislaman pesantren semata, sedangkah Tolchah Mansoer memang merupakan pakar hukum tatanegara. Artinya, dalam hal ini Tolchah bisa menjelaskan tentang pentingnya Pancasila dalam perspektif ketatanegaraan maupun dalam pandangan Islam. Wawancara dengan KH A. Muchit Muzadi, 27 Februari 2008.

[280] Wawancara dengan Prof. Drs. Cecep Syarifuddin, 15 Januari 2008.

argumentasi yang tak bisa diragukan.[281] Hal ini dikuatkan oleh penuturan Imam Anshori Sholeh. Menurut kesaksiannya, walaupun selama ini yang kita ketahui perumus asas tunggal adalah Kyai Ahmad Siddiq, pemikiran-pemikiran ilmiahnya dari sudut pandang hukum adalah Tolchah Mansoer. Kyai Ahmad Sidiq berdialog dengan Tolchah sampai pada kesimpulan penerimaan dari aspek hukumnya. Lebih lanjut, Imam Anshori Sholeh menuturkan:

> *"Dengan aspek hukum, di situ justru ada sintesa yang bagus; kajian Pancasila dari aspek hukumnya. Jadi kita menerima Pancasila tidak hanya latah asal menerima, melainkan melalui kajian hukum yang mendalam dan sangat kuat. Ormas Islam yang pertama menerima asas tunggal adalah NU dan itu dianggap sebagai lompatan yang sangat besar dan berguna bagi perkembangan negara berikutnya. Jika sekarang ada sekelompok orang yang mencoba untuk mengubah asas itu ya susah, karena itu disusun dengan rumusan yang matang. Itu yang saya anggap sebagai jasa besar beliau. Jadi tidak hanya menerima tanpa argumen hukum yang jelas, tatapi menguji dari aspek hukumnya."*[282]

Peran penting Tolchah dalam forum ini juga di kemukakan oleh KH Ghozali Masroeri, yang kala itu menjadi sekretaris Steering Committee (SC) Munas tersebut. Menurutnya, dalam memberikan argumentasi Tolchah tidak hanya menggunakan ilmu hukum, tetapi kitab-kitab salaf. Disebagai ketua tim perumus, Tolchah ikut menyusun redaksinya sehingga tidak bertentangan degan agama dan sejalan dengan hukum negara. Dari situlah akhirnya lahir rumusan Pancasila sebagai asas dan ahlussunah waljamaah tetap sebagai aqidah.[283]

Memang, dalam forum Munas, pidato resmi tentang pentingnya penerimaan asas tunggal disampaikan oleh Kiai

---

[281] Wawancara dengan KH Idris Abdul Hamid, 6Januari 2008

[282] Wawancara dengan Imam Anshori Sholeh, 16 Januari 2008

[283] Wawancara dengan Drs. KH Ghozali Masroeri, 5 Pebruari 2008

Ahmad Siddiq. Namun pidato itu belum tentu bisa berakhir dengan keputusan persetujuan terhadap argumentasi kiai tersebut jika tidak ada yang mengawal di forum-forum selanjutnya pada Munas itu. Fajrul Falaakh mencatat, kalau bukan karena kegigihan argumentasi Tolchah Mansoer, bukan saat itu NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Menurut Moh. Fajrul Falaakh, putra sulung Tolchah Mansoer yang kala itu menjadi Ketua PC PMII Yogyakarta, Mahbub Djunaidi pernah menulis surat yang berisi bahwa Tolchah Mansoer merupakan tokoh kunci di balik penerimaan asas Pancasila oleh NU.[284]

Sebagai pakar hukum tata negara, Tolchah tentu mengetahui posisi hukum Islam maupun Pancasila dalam teori *Stufen bauw des rechtnya* Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky berkaitan dengan tata urutan norma hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Ia tentu menyadari bahwa Pancasila sebagai hukum dasar "*grundnorm"* atau "*Staats-fundamentalnorm*" negara Indonesia yang terbentuk dan berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh komponen bangsa terdapat nilai-nilai Islam di dalamnya. Selain itu Tolchah sudah banyak menulis tentang Pancasila dan Islam sebagaimana dalam bukunya yang berjudul *Peranan Umat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* yang ia tulis pada tahun 1971, jauh sebelum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang berisi kewajiban bagi semua ormas/orsospol untuk mencantumkan asas Pancasila dalam AD/ART organisasinya.[285] Dengan bukti karya ini mustahil Tolchah menolak Pancasila, sebab Tolchah telah menulisnya jauh sebelum NU memperdebatkan tentang hal ini.

---

[284] Wawancara dengan Drs. Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc., 27 April 2009.

[285] Moh. Tolchah Mansoer, *Peranan Ummat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah IAIN Sunan Kalijaga), 1971.

Dengan argumentasi ketatanegaraan, Tolchah berhasil memberikan pengertian dan pemahaman kepada para ulama untuk menerima asas Pncasila dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun, langkah ini tidak lantas membuat hubungan NU dengan penguasa membaik. Sebagai kekuatan *civil society* yang besar NU mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Di masa-masa selanjutnya pada masa Orde Baru NU terus dipinggirkan dari arena perpolitikan tanah air. Tampaknya Tolchah sadar sepenuhnya, bahwa penerimaan NU terhadap asas tunggal merupakan pengorbanan yang besar. Untuk hal ini Tolchah mengatakan: "NU itu seperti perempuan yang tidak pakai baju. Meskipun perempuan ini sudah tidak pakai baju tetap tidak ada yang tertarik". Artinya, pengorbanan NU waktu itu dengan menerima asas tunggal tidak diapresiasi sama sekali.[286]

Namun begitu, langkah yang diambil oleh NU ini merupakan terobosan penting dalam perkembangan proses kebangsaan di Indonesia. Sebab, alasan penerimaan ini bukanlah alasan pragmatisme politik, melainkan telah melibatkan berbagai argumentasi keagamaan dan ketatanegaraan yang kuat. Meskipun dalam berbagai literatur sejarah NU, tidak banyak yang mengungkap peran Tolchah dalam perdebatan tentang asas tunggal Pancasila, namun sesungguhnya ia punya andil yang tidak sedikit. Peran penting ini masih terus dimainkan setelah Munas dan Muktamar itu berlangsung. Ia terus berupaya memberikan pemahaman terhadap beberapa komponen masyarakat atas sikap NU ini. Kala itu gelombang penolakan asas tunggal masih terus muncul, terutama di kalangan mahasiswa dan pemuda. Di Yogyakarta, misalnya, elemen organisasi mahasiswa yang menolak ide Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, di antaranya kelompok Usroh, Komando Jihad, PNDI (Pengkajian Nilai Dasar Islam). Di antara tokoh mahasiswa saat itu adalah Idham Chalid Hasibuan (Jakarta), Saefudin (Bali), Muhayyat (Cilacap), Nur Muhdiota (Malaysia). Namun, setelah Munas

[286] Wawancara dengan Much. Romahurmuziy, 10 September 2007.

NU 1983, Tolchah menjelaskan dasar penerimaan asas Pancasila kepada mereka. Pada akhirnya banyak di antaranya menerima gagasan-gagasan tersebut.[287]

Upaya mengawal keputusan bersejarah ini masih berlanjut pada Muktamar NU ke-27 yang dilangsungkan setahun kemudian. Sebagaimana dicatat dalam sejarah NU, hasil dari Munas ini selanjutnya dibawa dan disahkan pada Muktamar NU ke-27 pada 8-12 Desember 1984, yang bertempat di pesantren yang sama. Dalam Muktamar ini Tolchah bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi Khittah dan Organisasi, mendampingi KH. Chamid Wijaya yang bertindak sebagai ketua. Posisi ini tampaknya dipercayakan kepada Tolchah dengan maksud untuk mengawal keputusan Munas agar bisa dikukuhkan dalam Muktamar, karena dalam Munas Tolchah telah membidangi materi ini. Muktamar bersejarah itulah yang telah mengukuhkan keputusan-keputusan penting yang telah disepakati dalam Munas, salah satunya adalah Pemulihan Khittah 1926 dan penerimaan asas Pancasila oleh NU.[288]

Keputusan penting tentang penerimaan asas Pancasila dikenal dengan "Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang berisi: 1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantika agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama; 2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam; 3) Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia; 4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat

[287] Wawancara dengan KH Abdul Fatah, 20 Januari 2008.

[288] Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 01/MNU-27/1984 tentang Pengukuhan dan Pengasahan Keputusan-Keputusan Munas Alim Ulama NU 983di Situbondo Jawa Timur. Baca *Laporan Muktamar NU Ke-27*....., hal. 8.

Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya; dan 5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.[289]

Muktamar juga berhasil mengadakan penyesuaian anggaran dasar organisasi. Kalau anggaran sebelumnya Islam merupakan asas dan Pancasila serta UUD 1945 sebagai "landasan perjuangan", maka anggaran dasar yang baru menjadikan Pancasila sebagai asas tetapi segea diikuti dengan kalimat "bahwa NU adalah organisasi keagamaan yang berakidah Islam menurut paham *Ahlussinnah wal jamaah* dan mengikuti salah satu dari empat madzhab.[290] Para pengamat menilai, keputusan-keputusan di atas merupakan perubahan penting dalam hubungan antara NU dengan negara. Dalam pembahasaannya terjadi tarik menarik alot yang melibatkan banyak perspektif, baik perspektif fiqih, politik maupun hukum tata negara.

Melihat fakta sejarah di atas, dapat dibaca bahwa sesungguhnya peran Tolchah tidak sedikit, meskipun dalam sejarah tidak pernah dicatat. Salah satu bukti penguat bahwa peran Tolchah sangat penting dan dielukan adalah adanya desakan beberapa komponen dalam Muktamar Situbondo yang mendorong Kia Tolchah untuk maju sebagai Ketua Umum PBNU, namun, ia tidak berkenan.[291] Memang, dalam Muktamar Situbondo tersebut, Tolchah sempat muncul sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum PBNU, selain Abdurrahman Wahid. Bahkan kemunculan ini sempat terjadi pada beberapa muktamar NU. Nama Tolchah muncul terutama dari kalangan

---

[289] Lampiran Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 03/MNU-27/1984. Baca juga Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1989, hal. 160

[290] Martin van Bruinessen, *NU*....., hal. 122

[291] Wawancara dengan Prof. Yahya Umar, Ph.D, 29 September 2008

muda, selain nama Mr Kusnu dari Surabaya dan Subhan ZE.[292] Asnawi Latif menuturkan, dalam Muktamar Situbondo, mestinya yang layak menjadi ketua Umum adalah Tolchah Mansoer. Namun ia kurang disenangi, karena kritisnya sama pak Idham. Kala itu yang cocok dan sehaluan dengan Tolchah adalah Imron Rosyadi dan Ahmad Sukri. Sebab Semuanya oposan sama pak Idham.[293]

Muktamar tersebut akhirnya memilih Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 1984-1989. Dalam kepengurusan hasil Situbondo tersebut, Tolchah Mansoer menjadi salah satu Rois Syuriyah.[294] Memegang jabatan ini, Tolchah tetap mengusung idealismenya. Ia mengakui kecewa terhadap banyak tokoh-tokoh NU yang tidak lagi memegang idealisme, tetapi sebaliknya berlomba untuk kekuasaan dan harta. Menurut Asnawi Latif, Tolchah juga mengungkapkan kekecewaan terhadap PBNU yang banyak menempatkan orang-orang yang bukan kader. Kala itu memang banyak orang yang yang tiba-tiba masuk menjadi pengurus PBNU tanpa melalui jenjang kaderisasi NU yang semestinya.[295] Dalam pandangannya, mau tidak mau, suka tidak suka untuk

---

[292] Wawancara dengan Prof. Dr. Tholhah Hasan, 18 Januari 2008.

[293] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007. Di forum Muktamar tersebut Tolchah juga menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya. Sebagaimana diketahui, menjelang Muktamar Situbondo Kiai Ahmad Siddiq mengemukakan konsep bahwa satu-satunya sistem pemilihan pemimpin menurut *ahlussunnah wal jamaah* adalah dengan menggunakan mekanisme *ahlulhalli wal aqdi*. Pendapat ini dikritisi oleh Tolchah Mansoer. Menurutnya, suksesi kepemimpinan dalam Islam sejak Abu Bakar hingga masa Ali bin Abi Tholib menggunakan mekanisme yang tidak sama. Wawancara dengan Drs. KH Ghozali Masroeri, 5 Pebruari 2008.

[294] Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Nomor: 03/MNU-27/1984 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 1984-1988.

[295] Wawancara dengan Drs. H. Asnawi Latif, 25 September 2007.

menjadi pemimpin NU itu harus melalui proses kaderisasi, pembinaan yang bagus, pengalaman spiritual, pengalaman keagamaan, pengalaman intelektual, pengalaman merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NU. Apa yang dia gambarkan adalah adanya perjenjangan kaderisasi. Menurut Tolchah, seorang pemimpin NU harus pernah di IPNU, IPPNU, PMII, atau GP Ansor dan lain-lain.[296]

Dengan jabatan ini Tolchah Mansoer semakin punya ruang untuk berbuat dalam NU. Komitmennya untuk menjaga ideologi *ahlussunnah wal jamaah* terus diperjuangkan lewat berbagai cara. Andi Jamaro Dulung, mantan Ketua PMII Makassar yang kini menjabat sebagai Ketua PBNU mengenang komitmen Tolchah Mansoer ini. Dalam suatu kunjungan ke PW NU Sulawesi Selatan, Tolchah Mansoer menegaskan agar NU dan warga nahdliyin memegang kuat ideologi *ahlussunah wal jamaah ala nahdliyah*. Dengan argumentasi ala intelektual, kata-katanya menjadi sangat mudah dipahami.[297] Di mata Andi, Tolchah Mansoer adalah seorang cencekiawan NU yang sangat mengagumkan. Gagasan-gagasannya tentang NU telah banyak mewarnai perjalanan organisasi ini.

Sayang, meski gagasan-gagasnnya tentang NU sangat bagus, ia tidak menuliskannya. Sebagaimana diungkapkan oleh SLamet Effendy Yusuf, salah satu satu yang kurang dari Kiai Tolchah adalah merumuskan gagasannya tentang NU. Tulisan-tulisannya sebagian besar adalah gagasan-gagasannya tentang negara dan hukum. Meski begitu, tidak adanya karya Tolchah tentang NU ukan berarti ia tak mencintai NU. Tolchah adalah kader yang sangat militant dan mencintai organisasi tradisionalis ini. Ia ingin NU maju. Ia ingin sarjana-sarjana NU mengerti khasanah NU di satu sisi. Dan di sisi yang lain, ia juga

[296] Wawancara dengan Drs. H. Ichwan Sam, 29 September 2008.

[297] Wawancara dengan Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, 30 April 2009.

ingin para kyai NU mengeri tentang perkembangan-perkembangan kontemporer.[298]

Yang menarik, meski sudah menduduki posisi sebagai Rois Syuriyah, sebuah jabatan tertinggi di PBNU, ia tetap menjadi tokoh yang membasis. Hal ini dibuktikan dengan jabatannya sebagai Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggalnya, yang disebut dengan RW Tri Komplek yang terdiri dari daerah Samirono Baru, Komplek Kolombo dan Demangan Baru. Upayanya untuk meneruskan cita-citanya di wujudkan dengan mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Assunni Darussalam. Sayang, sebelum yayasan ini berkembang, Tolchah telah wafat. Di bawah asuhan menantunya, KH Ahmad Fatah, kini yayasan yang bertempat di Tempelsari, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta ini berhasil mengelola berbagai jenjang pendidikan.

Tidak hanya dalam kegiatan keagamaan Tolchah mendedikasikan dirinya. Kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan sosial mendorongnya juga aktif dalam berbagai gerakan sosial. Salah satu yang menjadi *concern* Tolchah Mansoer adalah persoalan *land-reform*. Abdullah Syarwani menuturkan:

> *Dulu petani NU luar biasa kuatnya, dan jalan yang ditempuh cukup bagus. Dulu ada isu kapitalisme bagi pemilik tanah yang cukup luas. Meskipun ada pemikiran yang cukup bagus, namun dalam prakteknya itu benar-benar meminggirkan umat. Cara perampasannya kebablasan. Petani-petani NU menjadi korban. Sehingga harus kita bela hak-haknya.*[299]

Ia mendorong Abdullah Syarwani untuk untuk memimpin gerakan advokasi tersebut. Saat itu NU membuat lembaga advokasi Islam untuk melakukan pembelaan terhadap warga NU yang menjadi korban dari land-reform. Dalam lembaga tersebut Tolchah Mansoer bertindak sebagai penasihat.

---

[298] Wawancara dengan Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007.

[299] Wawancara dengan H. Abdullah Syarwani, SH, 27 Januari 2008.

Menurut Abdullah Syarwani, lembaga itu sampai menangani beberapa kasus di Yogyakarta sampai Lampung. Beberapa di antaranya mampu dimenangkan.

Kiprah dan komitmennya dalam dunia organisasi dan gerakan kultural serta politik di atas menunjukkan bahwa Tolchah termasuk tokoh penting dalam perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan perjalanan bangsa ini secara umum. Di internal Nahdlatul Ulama ia termasuk tokoh yang memiliki prinsip dan menegakkan prinsip itu secara elegan. Sementara di kancah kebangsaan yang lebih luas, ia berperan dalam berbagai dimensi, sebagai aktivis sejak muda hingga tua, menjadi politisi di masa muda, menjadi akademisi dan intelektual serta menjadi kiai di masa tuanya. Minimnya dokumentasi sejarah tentang tokoh ini, banyak orang berpendapat bahwa seolah ia adalah tokoh yang terlupakan.[]

BAB IV
Intelektual Sejuta Khasanah: Dari Hukum Tata Negara, Demokrasi, HAM, hingga Pendidikan Pesantren

Bangsa Indonesia memiliki banyak ahli Hukum Tata Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang telah ada empat generasi pakar Hukum Tata Negara yang terdiri dari guru besar dan doktor di bidang Hukum Tata Negara dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia.[300] Generasi pertama merupakan perintis bagi tumbuh dan berkembangnya studi Hukum Tata Negara di Indonesia. Mereka ini adalah para sarjana hukum berkebangsaan Indonesia yang belajar dari sarjana hukum Belanda. Termasuk dalam generasi ini antara lain, Prof. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Djokosutono, Prof. Notonogoro, Prof. A.G. Pringgodigdo, dan Prof A.K. Pringgodogdo.

Generasi kedua adalah para sarjana hukum yang menjadi mahasiswa atau asisten dosen dari para sarjana hukum generasi pertama. Pada generasi ini dapat disebut beberapa nama antara lain, Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL., dari Universitas Indonesia,[301] Prof. Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH., dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Padmo Wahyono, SH., dan Prof. Dr. Harun Al Rasid, SH., Prof. Dr. Azhari, SH., dan Prof. Dr. Hamid S. Attamimi, SH.,[302] dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sri

[300] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2007, hal. 32-35.

[301] Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menjadi doktor pada tahun 1963 dengan disertasi yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Mekanisme Demokrasi Pancasila, Pembagian Kekuasaan Negara*.

[302] Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menjadi doktor pada tahun 1991 dengan disertasi yang berjudul *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Aanalisis Mengenai Keputusan Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Pelita I-Pelita IV.*

Soemantri, SH., dari Universitas Padjadjaran,[303] Prof Dr. Solly Lubis, SH., dari Universitas Sumatera Utara.[304] Sedangkan pakar Hukum Tata Negara yang masuk dalam generasi ketiga antara lain, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., dari Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Philippus Hadjon, dari Universitas Airlangga, Dr. Adnan Buyung Nasution, SH., dari Universitas Utrecht, Belanda, Dr. Albert Hasibuan, SH., dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Soewoto, SH., dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mahfud MD, SH., dan Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH., dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan Prof. Dr. Yuril Ihza Mahendra, SH., dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH., dari Universitas Hasauddin, dan Prof. Dr. Mu'thie Fajar, SH., dari Universitas Brawijaya.

Adapun pakar Hukum Tata Negara generasi keempat antara lain, Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., Prof. Dr. Safri Nugraha, SH., dan Prof. Dr. Maria Farida, SH., Dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ramli Hutabarat, Prof. Dr. I Gede Panca Astawa dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Amzulian Rivai dari Universtitas Sriwijaya dan banyak lagi guru besar maupun doktor lainnya di bidang Hukum Tata Negara yang lulus setelah masa reformasi tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Dari sekian banyak deretan nama-nama pakar Hukum Tata Negara tersebut di atas, ada satu nama dari kelompok pakar Hukum Tata Negara generasi kedua yang jarang sekali disebut. Padahal kalau kita teliti dan telusuri rekam jejaknya, ia memiliki keahlian dan pemikiran tentang ketatanegaraan Indonesia yang sangat progresif pada zamannya. Ia memiliki ketajaman analisis yang luar

---

[303] Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran ini menjadi doktor pada tahun 1978 dengan Disertasi yang berjudul *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.*

[304] Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara ini baru menjadi doktor pada tahun 1983 dengan judul disertasi *Perkembangan Garis Politikdan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Garis besar Pelaksanaannya di Sumatera Utara.*

biasa terhadap berbagai permasalahan ketatanegaraan di Indonesia. Ia juga memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pakar hukum segenerasinya, maupun generasai sebelumnya, bahkan generasi sesudahnya hingga sekarang. Ia adalah Prof. Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH., Ketua Umum pertama Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

A. Pakar Hukum Tata Negara Generasi Kedua

Mohammad Tolchah Mansoer, demikian nama lengkapnya, adalah doktor Hukum Tata Negara pertama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.[305] Ia menyelesaikan studi doktoralnya dengan disertasi *"Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia"*. Disertasi ini telah berhasil ia pertahankan di depan sidang terbuka Universitas Gadjah Mada (UGM) di bawah pimpinan Ketua Senat Prof. Ir. Harjono Danusastro pada tanggal 17 Desember 1969. Sebagai promotor dari disertasinya adalah Prof. Abdul Gaffar (AG) Pringgodigdo,[306] sedangkan panitia penilai terdiri atas Prof. Notosoesanto, SH sebagai anggota merangkap ketua, Prof. Moeljatno, SH, Prof. A. Soehardi, SH, Prof. Ali Affandi, SH, sebagai anggota. Panitia penilai ini dibantu oleh Joeniarto, SH, Siti Soemari Hartono, SH, serta Soerastri Isminingsih, SH.[307]

Melihat judulnya, disertasi tersebut bersifat progresif futuristik. Penelitian dalam disertasinya masuk dalam kategori

[305] Wawancara dengan Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, 13 Maret 2008. Lihat juga Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*.....hal. 33.

[306] A.G. Pringgodigdo adalah Sekretaris Negara pertama era Presiden Soerkarno, Menteri Kehakiman saat Indonesia menjadi bagian dari RIS, mantan dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dan mantan Presiden Universitas Airlangga Surabaya.

[307] Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia* (Jojakarta: Percetakan Radya Indria), 1970, hal. 5 .

penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Secara spesifik, disertasi tersebut meneliti tentang pembagian atau pengaturan kekuasaan (*distribution of power*) lembaga eksekutif dan legislatif negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementera (UUDS) 1950, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kemudian dikomparasikan dengan konstitusi negara Amerika Serikat. Selain itu, disertasi ini juga menguraikan sejarah penyusunan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1945 sampai akhirnya kembali kepada UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara Indonesia.

Dalam disertasinya, ia mengemukakan beberapa kritik, saran, maupun ide-ide konstruktif yang di kemudian hari ide-ide tersebut ternyata sama dengan yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam merekonstruksi dan mereformasi sistem hukum ketetanegaraannya, khususnya pascareformasi 1998 sampai sekarang. Beberapa pendapat dan saran konstruktif-progresif dalam disertasi Tolchah itu antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar sementara dan perlunya untuk diamandemen.[308] *Kedua*, seorang presiden seharusnya tidak boleh menjadi presiden lebih dari dua kali masa jabatan.[309] *Ketiga*, kedudukan wakil presiden

[308] *Ibid*., hal. 9, 107-108. Pasca Reformasi 1998, telah dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945.

[309] *Ibid.*, hal. 171. Lihat juga Mastuqi HS, M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka), 1995, hal. 111, juga Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak Mengenal Watak; Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri), 1994, hal. 398. Dalam amandemen pertama UUD 1945, ketentuan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembeli dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

harus diatur dengan jelas dalam undang-undang dasar.[310] *Keempat,* perlu adanya ketegasan dalam undang-undang dasar bahwa selama menjabat lima tahun, presiden tidak bisa dijatuhkan, kecuali apabila menyimpang dari ketentuan undang-undang dasar, GBHN (pada waktu itu), dan tindakan-tindakan kriminal dengan pidana berat.[311] Pemikiran-pemikiran ini ia kemukakan dalam sebuah disertasi doktoral pada tahun 1969, saat bangsa Indonesia masih berada dalam tahap awal era Orde Baru yang tatanan sistem hukum ketatanegaraanya belum mapan. Karena itu tidak berlebihan apabila Jimly Asshiddiqie memasukkannya sebagai salah satu sarjana Hukum Tata Negara Indonesia generasi kedua.

Apabila Ismail Suny tercatat sebagai doktor Hukum Tata Negara pertama di Universitas Indonesia (UI) dan juga doktor Hukum Tata Negara pertama di Indonesia, maka Tolchah adalah doktor Hukum Tata Negara pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan doktor Hukum Tata Negra kedua di Indonesia. Selisih gelar doktor antara keduanya terpaut enam tahun. Dalam jeda waktu enam tahun tersebut tidak ada doktor Hukum Tata Negara yang diluluskan oleh kedua perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tersebut. Ia juga mengulas dan mengkritik beberapa pendapat Ismail Suny sekaligus menjadikan buku disertasinya sebagai salah satu referensi disertasinya. Doktor Hukum Tata Negara di belakang Tolchah adalah Sri Soemantri yang memperoleh gelar doktor dari

---

[310] *Ibid.,* hal. 163. Pascaamandemen, ketentuan mengenai kedudukan wakil presiden diatur cukup jelas dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945.

[311] *Ibid.,* Hal. 373. Dalam amandemen ketiga UUD 1945 ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Pasal 7A menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1978, selisih sembilan tahun dari Tolchah.

Kepakaran Tolchah di bidang Hukum Tata Negara juga diakui oleh teman diskusinya yang juga seorang pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Sri Soemantri. Menurut Sri Soemantri, pemikiran ketatanegaraan Tolchah sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. A.G. Pringgodigdo, promotor disertasi doktoralnya yang mengetahui dan ikut menjadi pelaku sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Pemikiran A. G. Pringgodigdo yang dimaksud yaitu menggunakan pendekatan penelitian dari aspek sejarah ketatanegaraan. Karena itu, dalam disertasinya Pak Tolchah juga melakukan penelitian tentang hukum ketatanegaraan Indonesia dari aspek sejarah dan komparasi, disertai ide-ide progresifnya.[312]Selain itu, Sri Soemantri juga mengakui kepakaran Tolchah dengan menjadikan buku disertasi Tolchah sebagai buku referensi utama setiap kali ia mengajar mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi.[313]

Membaca pemikiran Tolchah tidak cukup apabila hanya dengan membaca buku disertasinya. Disertasi hanya merupakan sebagian kecil dari luasnya pemikiran dan gagasan-gagasan yang ia miliki. Banyak sekali ide-ide cemerlangnya tentang ketatanegaraan lainnya mulai dari Pancasila, konstitusi negara, demokrasi, administrasi pemerintahan, HAM, hingga persoalan agama kontemporer. Potret bahwa ia adalah seorang pakar tampak jelas dari ide maupun saran yang ia kemukakan. Ia juga banyak menuangkan gagasan-gagasannya dalam berbagai buku dan ide-idenya juga biasa dimuat di media masa maupun majalah saat itu.

Dalam penelusuran penulis, setidaknya ada 12 buku ketatanegaraan yang ditulis oleh Tolchah. Buku-buku tersebut antara lain: *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*

[312] Wawancara dengan Sri Soemantri, 15 Mei 2008.
[313] Wawancara dengan Sri Soemantri, 15 Mei 2008.

(Jogjakarta: Pertjetakan Radya Indria, 1970),[314] *Beberapa Soal Tentang Undang-Undang Dasar 1945*, (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1970), *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia & Islam*, (Bandung: Alumni, 1977), *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*, (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1972),[315] *Hukum Tatanegara Sesudah Pemilihan Umum 1971: Suplemen Buku Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), *Kepercayaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*: *Hasil Keputusan Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuhuddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,1971), *Kedudukan Penetapan Presiden Di Dalam Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta: "Sumbangsih" Papringan, 1971), *Peranan Ummat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta, Lembaga Penerbitan Ilmijah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1971),[316] *Konsep Dasar Islam Tentang Negara*, (Purworejo: Perguruan Tinggi Islam Imam Puro, 1977), *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, (Yogyakarta: Binacipta, 1979), *Masalah Referendum*, (Yogyakarta: Jurusan HTN/HTP, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1984),[317] *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah*,

[314] Diterbitkan juga beberapa kali oleh PT Pradnya Paramita Jakarta pada tahun 1976 dan tahun 1983.

[315] Buku ini juga ditebitkan oleh penerbit Nur Cahaya Yogyakarta pada Tahun 1981.

[316] Buku ini merupakan naskah ceramah Tolchah dalam Musjawarah 'Alim 'Ulama NU seluruh Indonesia di Tebuireng, Jombang Tanggal 15-18 April 1971.

[317] Buku ini ditulis bersama Harun Al Rasid, Syaifullah Mahyuddin, SF Marbun.

(Yogyakarta: Gema, 1981).[318] Dari berbagai buku tetang ketatanegaraan yang ia tulis di atas, sudah sangat cukup bagi kita untuk menyebut bahwa ia adalah pakar Hukum Tata Negara Indonesia.

Membaca buku-buku di atas, banyak orang tentu mengira bahwa Tolchah adalah seorang guru besar Hukum Tata Negara di almamater kebanggaannya, setidak-tidaknya dosen Hukum Tata Negara di UGM.[319] Akan tetapi, walaupun Tolchah adalah doktor Hukum Tata Negara pertama dari UGM, Tolchah tidak mengajar di Fakultas Hukum UGM.[320] Kepatuhannya kepada para kiai dan tokoh-tokoh NU waktu itu mengikhlaskan dirinya mengabdikan ilmu dan hidupnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 1963 sampai akhir hayatnya ia mengabdi sebagai tenaga pengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Ia pernah mengajar di Fakultas Ushuluddin, Fakultas Adab sampai akhirnya menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah.[321] Karena itu

---

[318] Buku tipis ini dicetak dua kali oleh Penerbit Gema Tahun 1972 dan 1981, juga pernah dimuat oleh majalah *Al-Jami'ah* (Majalah IAIN Sunan Kalijaga) No. 5 Th.IX, September 1970. Namun Mahbub Djunaidi dalam pengantar edisi kedua mengatakan bahwa buku ini pernah diterbitkan oleh Harian Merdeka Solo Tahun 1947 dengan judul "*Rakyat-Kekuasaan Pemerintah"*.

[319] Hal ini karena, jika di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ada Ismail Suny sebagai doktor Hukum Tata Nagara pertamanya dan menjadi guru besar di almamaternya, di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) ada Taufik Sri Soemantri Martosuwignyo sebagai doktor pertama Hukum Tata Negaranya dan juga menjadi guru besar di almamaternya, maka di Universitas Gadjah Mada (UGM) ada Tolchah. Namun, ia tidak menjadi dosen di UGM. Wawancara dengan Prof Dr. Harun Al-Rasyid, SH, 12 Maret 2008. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*...., hal. 33.

[320] Keterangan ini diperoleh dari wawancara dengan Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudloh, 21 Januari 2008, wawancara dengan Abdullah Syarwanie, SH, 27 Januari 2008, wawancara dengan Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, 13 Maret 2008.

[321] Soeleman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah,* (Surabaya: Kalista dan LTNU Jawa Timur), 2007, hal. 288.

tidak mengherankan apabila sebagian besar karya-karyanya diterbitkan oleh lembaga penerbitan di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain produktif menulis buku ketatanegaraan, Tolchah juga memiliki keahlian lain. Ia produktif menulis dan menterjemahkan buku-buku agama dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Di antara buku-buku agama yang ia tulis dan terjemahkan adalah: *Pokok-Pokok Ahlussunah wal Jamaah*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1974). *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Boleh Diperselisihkan antar Sesama Umat Islam*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1982),[322] *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985),[323] *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),[324] *Sajak-Sajak Burdah Imam Muhammad Al-Bushiri*, (Yogyakarta: Adab Press UIN Sunan Kalijaga, 2006),[325] *Progres Masa Depan Mahasiswa IAIN Ditinjau Dari*

[322] Tolchah Mansoer menulis buku ini bersama Masyhur Amin berasal dari kitab *Mâ Lâ Yajûzu fîhi al-Khilâf baina al-Muslimîn.*

[323] Buku ini merupakan terjemahan dari kitab Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf. Yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Tolchah Mansoer bersama KH. Nur Iskandar Albarsani yang samapai sekarang masih diterbitkan.

[324] Buku ini ditulis bersama Mu'in Umar, Asymuni A. Rahman, Kamal Muchtar.

[325] Nama lengkap penulis sajak-sajak ini adalah Syarafuddin Muhammad al-Bushiri penyair Arab berasal Barbar, Afrika Utara, lahir di Mesir sekital 1212 M . Ia terkenal sekali hanya karena antologinya *Al-Burdah* ("Mantel"). Ia pernah tinggal lama di *Darussalam* (Yeruselam) kemudian di Hijaz. Puisi-puisinya yang masyhur itu ditulis di Mekah. Pada mulanya ia menderita penyakit lumpuh. Dalam tidurnya penyair ini konon bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang datang kepadanya dan menyelimutinya dengan mantelnya. Bushiri terkejut bangun dan melompat, sehingga ketika itu juga ia sembuh dari kelumpuhannya. Lalu ia menulis puisinya yang luar biasa itu, lembut dan mengharukan, sebagai dedikasi dan eulogi kepada Nabi Muhammad. Bushiri meninggal sekitar tahun 1294 M di Iskandaria. *Al-Burdah* terjemahan bahasa Inggris *The Scarf* dilakukan oleh Faizullah Bahi (1893

Segi Sosial & Politik, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1968).

Tulisan-tulisan Tolchah juga akrab menyapa pembaca Harian *Pelita* Jakarta, *Masa Kini* dan *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta pada era akhir 60-an sampai awal 80-an. Di harian *Kedaulatan Rakyat* sedikitnya ada 60 judul artikel tulisannya. Artikel-artikel tersebut antara lain: "*Persaudaraan Islam*" (1 Januari 1967), *"Berbakti Kepada Tuhan"* (15 September 1967), *"Mengapa Kita Hasud"* (27 oktober 1967), *"Ukhuwah Islamiyah"* (26 April 1968), dan "*Keikhlasan dan Perbuatan"* (3 Januari 1969). Selain biasa menulis di surat kabar, ia juga menulis di majalah seperti *Aula* Surabaya, *Bangkit* Yogyakarta, dan *Gema* Yogyakarta.[326]

Penguasaan Tolchah di bidang Hukum Tata Negara[327] dan kealimannya dalam agama, menjadikan ia sebagai *prototipe* intelektual-kiai yang dikagumi dan disegani di kalangan Nahdlatul Ulama saat itu. Ia sering dijadikan tempat rujukan untuk bertanya tentang masalah ketatanegaraan oleh kader-kader NU. Dalam sebuah suratnya kepada Asnawi Latif, ia pernah menjawab beberapa pertanyakan tentang ketatanegaraan yang diajukan kepadanya dengan meminta Asnawi Latif untuk membaca buku disertasinya beserta buku suplemen lain yang telah ia tulis. Ia berpendapat bahwa buku tersebut banyak mengemukakan pandangannya tentang masalah-masalah

---

M) dan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Moh. Tolchah Mansoer. SH. (http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/Perkenalan.html).

[326] Mastuqi HS, M. Ishom El-Saha, *Intelektualisme Pesantren....*, hal. 108.

[327] Tolchah biasa menulis kata Tata Negara dengan Tatanegara (disambung dalam satu kata). Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh cara berfikir bahasa Belanda yang menyebut *staatsrecht* dalam satu kata. Begitu juga dalam bahasa Jerman yang ditulis dalam satu kata yaitu *verfassungsrecht*. Pakar Hukum Tata Negara lain yang menggunakan kata Tatanegara (disambung dalam satu kata) adalah Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Tatanegara di Indonesia*, dan Sri Soemantri dalam bukunya *Perbandingan Hukum Tatanegara.*

ketatanegaraan yang dipertanyakan oleh Asnawi Latif yang memang saat itu sedang aktual diperdebatkan.[328]

Berkat keahlian yang dimiliki, Tolchah tampil sebagai sosok yang menjadi "lem perekat" antara kaum santri dan pelajar atau mahasiswa baik di organisasi, di dunia profesi, maupun di masyarakat. Ia tampil sebagai simbol pemersatu antara kiai dan intelektual yang kala itu masih sering senjang, bahkan sering terjadi kesalahpahaman, sehingga satu sama lainnya belum bisa saling menerima. Ia menjadi titik temu antara "kaum sarungan" dan "kaum abangan" yang masih phobia dengan Islam. Ia mampu mensinergikan keduanya menjadi intelektual-kiai yang mampu menjelaskan hal-hal yang kemungkinan "tidak dimengerti" oleh kalangan kiai, maupun yang tidak dipahami oleh para intelektual.

Bentuk kongkrit sosok intelektual-kiai yang memiliki pribadi negarawan dan kecintaan yang mendalam kepada tanah air Indonesia dan Pancasila, ia tuangkan dalam sebuah buku "*Peranan Umat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945*". Buku ini adalah naskah ceramah yang ia sampaikan dalam acara Musyawarah Nasional 'Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) seluruh Indonesia di Tebuireng Jombang tanggal 15-18 April 1971. Dari buku kecil ini tercermin bahwa ia adalah pakar Hukum Tata Negara yang "menjelma" menjadi kiai dengan derajat mumpuni. Pandangan kebangsaannya menampakkan pribadinya sebagai sosok nasionalis-religius sejati. Hal tersebut dapat kita buktikan di akhir tulisannya yang mengatakan:

> *"Dengan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya, sudah cukup bagi umat Islam*

[328] Contoh dari persoalan yang saat itu ramai didiskusikan adalah apakah setiap warga negara berhak menjadi presiden atau tidak? Bagaimana dengan warga negara keturunan China? dan persoalan-persoalan hukum ketatanegaraan yang lain. Saat itu ia menulis bahwa sudah muncul "madzhab" baru dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini sebagai ditulis dalam surat pribadi Tolchah Mansoer kepada Asnawi Latif, tanggal 23 Desember 1977.

Indonesia untuk mengembangkan segala cita-cita dan aspirasinya."[329]

Tentunya Tolchah menulis kesimpulan ini bukan tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang. Ia pasti mengetahui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban syari'atnya, setelah mengetahui isi dan substansi dari konstitusi dan aspirasi yang berkembang di kalangan umat Islam. Bahwa aspirasi umat Islam bisa direalisasikan tergantung kemauan bersama dari umat Islam itu sendiri melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah untuk membuat regulasi yang menjamin dan melindungi umat Islam dalam menjalankan agamanya.

Buku-buku lain yang ia tulis juga menunjukkan karakter dan pemikiran yang menguatkan kesimpulan bahwa ia pakar Hukum Tata Negara. Dalam bukunya "*Demokrasi Sepanjang Konstitusi"*, ia membuktikan dirinya sebagai seorang demokrat-konstitusionalis. Buku tersebut merupakan pidato kuliah pembukaan sekaligus pelantikannya sebagai Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang pada tanggal 16 Pebruari 1971. Buku *"Beberapa Soal Tentang Undang-Undang Dasar 1945*" menunjukkan dirinya sebagai orang yang mengerti akan undang-undang dasar dengan segala seluk-beluk persoalannya. Buku tersebut adalah naskah pidatonya pada saat Dies Natalies ke IV Universitas Tri Bakti Kediri pada tanggal 21 September 1970. Buku "*Hukum, Negara, dan Masyarakat"* merupakan bukti bahwa ia mengerti hukum dan permasalahan-permasalahan yang ada pada sebuah negara. Buku tersebut adalah rangkuman pidatonya pada *Dies Natalies* ke XVIII Fakultas Hukum UNU Surakarta Pada tanggal 16 Januari 1977. Tolchah juga mengerti persoalan tentang hak asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat kita baca dalam bukunya "*Hak Asasi Manusia, dan Islam."* buku ini merupakan naskah ceramahnya saat mengisi kuliah *studium general* di Universitas Islam Bangdung (UNISBA) pada tanggal 20 Juni 1977.

[329] Tolchah Mansoer, *Peranan Umat Islam....,* hal. 44.

Buku-buku maupun artikel yang ditulis oleh Tolchah banyak menggunakan rujukan atau referensi data primer berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki penguasaan bahasa asing yang memadai. Meskipun hampir seluruh literatur Hukum Tata Negara dan hukum umum lainnya menggunakan bahasa Inggris atau Belanda karena faktor aliran hukum *anglo saxon* atau *eropa continental* yang berkembang di Asia berasal dari dunia Barat, namun ia juga biasa mengutip buku berbahasa Arab yang di dalamnya terdapat pendapat hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum dari negara-negara Arab.

Ada satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh para pakar hukum Indonesia, tapi menjadi kebiasaan Tolchah dalam menulis, yaitu ia biasa mengutip dasar, dalil, atau keterangan untuk menguatkan argumentasinya dengan mengambil dasar *naqli* dari sisi agama Islam di akhir tulisannya. Tradisi ini adalah suatu hal yang sangat langka dilakukan oleh pakar hukum Indonesia sampai sekarang, baik itu bersumber dari Al-Qur'an, Hadist Nabi, serta pendapat ulama *salaf* maupun *kholaf* terkemuka di dunia, termasuk dalam buku disertasi doktoralnya. Selain itu, berbagai referensi berbahasa asing yang dia kutip (terutama yang berbahasa Arab) banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pembaca yang kurang atau tidak mengerti maksudnya untuk memahaminya.[330] Ini menunjukkan penguasaan pakar Hukum Tata Negara ini terhadap bahasa Arab memang tidak diragukan lagi.

Dari sudut yang lain Tolchah adalah sosok ulama besar yang berwawasan luas. Ia memiliki pemikiran keislaman yang maju, moderat, dan terarah dalam konteks *ahlussunah wal jamaah.*[331] Ia mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan

[330] Kemungkinan besar Tolchah melakukan ini karena ia menyadari bahwa para pakar hukum di Indonesia kebanyakan hanya menguasai bahasa Inggris atau Belanda, dan *awam* terhadap bahasa Arab termasuk bahasa Al-Qur'an maupun Hadist meskipun para pakar tersebut mayoritas beragama Islam.

[331] Wawancara dengan Drs. KH. Ghozali Masroeri, 10 Februari 2008.

pengetahuan umum. Ia adalah intelektual-kiai berkepribadian santun, ikhlas, sederhana, *care* dan 'open' terhadap generasi muda, serta merakyat.[332] Berbagai karakter dan kepribadian positif yang melekat padanya membuat ia dikagumi dan dicintai oleh ulama dan umatnya.[333] Karena itu, ia bisa dijadikan sebuah cerminan sosok ideal kaum santri dan ulama masa kini, khususnya di kalangan *nahdliyin*. Ia menguasai bahasa Inggris, Arab, Belanda, Indonesia, Madura, dan Jawa tentunya. Keluasan wawasan dan kecintaanya akan ilmu terpotret dari ribuan koleksi buku dan kitab-kitab besar yang tersimpan di perpustakaan pribadinya.[334]

Doktor Hukum Tata Negara ini juga mengajarkan berbagai kitab kuning di rumahnya Komplek Colombo no. 21 Yogyakarta. Mulai hari Senin sampai Kamis setiap ba'da subuh dan ba'da ashar ia meluangkan waktu untuk *mbalah* kitab. Garasi rumah ia sulap menjadi pesantren bagi dosen dan

---

[332] Keterangan ini dikemukakan oleh hampir seluruh narasumber yang berasal dari kalangan tokoh NU, mulai dari teman seperjuangan di IPNU, aktifis-aktifis PMII Yogyakarta tahun 60-an sampai pertengahan 80-an, juga teman-teman dia waktu di Syuriah PBNU hasil Mu'tamar Situbondo tahun 1984.

[333] KH. Masykur (tokoh NU dan mantan Menteri Agama RI) dalam sebuah pidatonya menyebutkan bahwa Tolchah adalah sosok ulama dan ilmuan. Lihat *Kedaulatan Rakyat,* 21 Oktober 1986. Sementara itu Paku Alam VIII dalam pidato pelepasan jenazahnya mengatakan bahwa Tolchah adalah sosok pemimpin yang bijak. Lihat Mastuqi HS, M. Ag, M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren...*, hal. 108. KH. Bisri Musthofa (Pengarang Kitab Tafsir *Al-Ibriz* dan pendiri Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien, Leteh, Rembang, Jawa Tengah), juga kagum dan mengakui kealiman Tolchah Mansoer dalam ilmu dunia dan akhirat dengan membuat syair- syair pujian kepadanya yang dia serahkan langsung kepada Tolchah di kediamannya, Komplek Colombo No. 21 Yogyakarta.

[334] Tolchah Mansoer adalah seorang "kutu kitab", bahkan sampai setelah dia meninggal dunia masih ada kiriman kitab-kitab dari Timur Tengah yang dipesan ketika dia masih hidup yang di alamatkan ke Pondok Pesantren Krapyak. Wawancara dengan KH. Idris Hamid, 6 Januari 2008.

mahasiswa yang ingin menjadi santrinya. Di antara kitab-kitab salaf yang Ia ajarkan adalah kitab *Ihya' Ulumuddin* karya monumental guru besar Imam Ghazali, *Fathul Qarib*, *Alfiah* Ibnu Malik, *Ibnu Aqil*, Sahih Buhari Muslim, *Tajridu Sharih* dan *Riyadus Sholihin*. Sebelum mulai pengajian ia mempunyai kebiasaan melantunkan sajak-sajak *Al Burdah* karya Imam Muhammad Al-Busiri.[335]

Karena dalam penelitian ini penulis hanya merangkum dan menyimpulkan berbagai pemikiran Tolchah dari beberapa buku karyanya, dan beberapa tulisannya di media masa yang masih bisa dilacak oleh penulis, juga dari beberapa buku yang pernah mengulas tentang pemikiran Tolchah sebelumnya, maka buku ini belum cukup untuk dikatakan mewakili pemikirannya secara utuh. Dengan banyaknya disiplin yang ia geluti, tampaknya tidak berlebihan jika sosok ini disebut sebagai intelektual sejuta khasanah. Berikut ini akan kita telusuri pemikiran-pemikirannya dalam berbagai disiplin.

B. Negara, Hukum, dan Pemerintahan

Sebagai seorang pakar Hukum Tata Negara, Tolchah memiliki banyak pemikiran tentang ketatanegaraan. Di antara pemikiran-pemikiran itu antara lain pemikirannya tentang negara, hukum, dan pemerintahan yang kemudian dikomparasikan dalam konsep Islam. Pemikirannya tentang konsep negara dapat kita baca dalam buku kecilnya *Konsep Dasar Islam Tentang Negara*.[336] Menurutnya, unsur utama dalam sebuah negara adalah adanya rakyat, teritorial, pemerintah, dan kedaulatan. Dari empat unsur negara di atas, ia lebih menekankan pada unsur rakyat dan pemerintah dari unsur yang lainnya. Dalam hal ini ia mengkomparasikan konsep negara dari dunia Barat tersebut dengan Al-Qur'an Surat An-

[335] Berdasarkan wawancara dengan Drs. Adnan Harahap, 15 Maret 2008; Drs. H. Ichwan Sam, 29 September 2008; Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., 29 September 2007; Drs. H. Hafidz Ma'sum, 7 Januari 2008; dan Prof. Jahya Umar, Ph.D., 29 September 2008.

[336] Buku ini merupakan makalah Tolchah pada acara sarasehan dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad Saw pada tanggal 2 April 1977 di Aula Utama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nisa' Ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatlah engkau sekaian kepada Allah dan taaatlah kepada rasul, dan orang-orang yang memerintah di antara kamu sekalian. Apabila engkau sekalian berselisih dalam satu hal, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan rasul-Nya apabila memang engkau sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itulah yang baik dan ta'wil (jalan) yang paling bagus".[337]

Secara umum negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Dalam pandangan Tolchah, negara didefinisikan sebagi suatu organisasi manusia yang memiliki peralatan dan tujuan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaanya itu digunakan untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi manusia baik lahir maupun batin. Sehingga dalam suatu negara harus terdapat wilayah, rakyat, pemerintah, tujuan serta penyelenggara tujuan itu.[338] Dengan demikian negara adalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan bernegara segala permasalahan akan diatur secara terorganisir sehingga kepentingan bangsa dalam rangka melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat terwujud.

Tolchah menyebut ada lima dasar negara dalam Islam yaitu:[339] *Pertama*. Keimanan. Sebagaimana dasar negara kita adalah Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, keimanan adalah dasar utama dalam bernegara. *Kedua*. Pengaturan yang baik menyangkut hubungan antara pemerintah dan rakyat. *Ketiga*. Tujuan penyelenggaraan untuk keluhuran manusia lahir dan batin. *Keempat*. Prinsip musyawarah. *Kelima*. Kesabaran

[337] Tolchah Mansoer, *Konsep Dasar Islam Tentang Nagara*, (Purworejo: Perguruan Tinggi Islam Imam Puro), 1977, hal. 7.

[338] *Ibid.*, hal. 8.

[339] *Ibid.*, hal. 10.

dalam menyelenggarakan segala sesuatunya. Kelima dasar tersebut menurut Tolchah harus ada dalam sebuah negara yang bercita-cita menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dalam sebuah negara juga harus mengedepankan persamaan hak dan kewajiban, persamaan martabat manusia. Dalam hal ini ia mengutip ayat Al Qur'an Surat Al Hujurat Ayat 13 yang artinya: "Wahai sekalian manusia, engkau sekalian telah kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan engkau sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah mereka yang paling taqwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Waspada".[340]

Selain itu, negara juga harus mengakui persamaan perlakuan di depan hukum dan pengadilan sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw yang artinya: "Kehancuran orang-orang sebelum kamu dahulu adalah disebabkan ketidakadilan mereka, apabila yang mencuri golongan elitnya, dibiarkan saja, tidak dipidana. Tetapi bila rakyat jelata, orang-orang lemah yang mencuri, ditegakkan pidana atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah anak putri Muhammad mencuri, pastilah kupotong tangannya".[341] Hadits ini Tolchah lontarkan sebagai kritik sosial terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia saat itu dirasakan banyak disalahgunakan.

Berkaitan dengan hak kebebasan perseorangan, Tolchah memandang bahwa kebebasan itu harus dilihat dalam konteks kemaslahatan umum. Karena itu, kebebasan perseorangan yang menyebabkan kerusakan umum haruslah ditolak. Karena itu, negara harus menjaga hak-hak warganegara berdasarkan kemampuan dan kecakapannya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak memiliki, dan hak untuk menyatakan pendapat. Tugas pemerintah dalam hal ini menurutnya adalah

[340] *Ibid.*, hal. 14.

[341] Ibnu Diba' Asy Syaibani, *Taisirul Wusul ila Jamiil Ushul*, Jilid II hal. 14. Dalam hal ini Tolchah mengutip peferensi dari kitab karangan Ibnu Diba' tersebut yang kemudian ia terjemahkan.

menciptakan keadilan, memberikan hak rakyat dalam berbicara.[342]

Sebagai sarjana hukum, Tolchah juga mengungkapkan pandangannya tentang hukum. Sebagaimana para sarjana hukum pada umumnya, ia merasakan bahwa semakin banyak membaca buku dan tulisan tentang hukum, para sarjana hukum semakin kesulitan memberikan definisi tentang hukum. Sebab setiap definisi selalu saja ada yang salah, setidaknya ada kekurangan-kekurangannya. Akhirnya, yang didapatkan oleh para sarjana itu adalah keragu-raguan dan hanya mampu memberikan definisi ”sementara” tentang hukum.[343] Definisi ini akan memungkinkan seseorang memasukkan batasan-batasan ke dalam definisi tersebut terhadap hal-hal yang belum masuk di dalamnya. Semakin sedikit rumusan, semakin banyak interpretasinya. Sebaliknya, semakin luas rumusan maka makin sedikit penafsiran yang bisa dimasukkan, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan-penambahan baru dan di sisi lain terjadi ketidakpuasan karena kacaunya rumusan yang diberikan.[344]

Nampaknya pandangan Tolchah tentang hukum ini, dipengaruhi oleh pendapat Van Apeldorn, seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang memang pemikirannya banyak diadopsi oleh sarjana hukum Indonesia. Profesor hukum dari negeri Belanda ini berpendapat bahwa tidak nungkin memberikan definisi utuh tentang hukum. Tolchah berpendapat bahwa hukum terdiri atas peraturan-peraturan tentang tingkah laku. Namun ia juga juga mengutip pendapat Van Apeldorn dengan mengatakan: ”tetapi masih ada lagi aturan-aturan lain tentang tingkah laku yang bukan hukum. Semua aturan yang mengandung peraturan-peraturan untuk perbuatan manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia,

[342] Tolchah Mansoer, *Konsep Dasar.....*, hal. 18-19.

[343] Mohammad Tolchah Mansoer, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, (Bandung: Alumni), 1977, hal. 41.

[344] *Ibid.,* hal. 44.

disatukan dengan mana etika. Etika memuat aturan-aturan tentang agama, moral, dan kesusilaan".[345]

Lebih lanjut Tolchah mengutip tulisan Van Apeldoorn mengatakan:

> *"Dahulu pernah terjadi aturan-aturan tersebut tidaklah dibeda-bedakan. Didalam sebuah larangan, dalam Talmud dan Al-Qur'an kita mendapatkan berbagai macam aturan agama, moral, dan aturan-aturan hukum secara campur aduk. Sebab orang memandang itu semuanya sebagai yang berasal dari Tuhan. Memang antara aturan-aturan itu terdapat hubungan yang dekat, tetapi bagaimanapun juga membiarkannya dengan tidak membedakan barulah kemudian orang sadar untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut".*[346]

Ia menjelaskan bahwa Van Apeldoorn memberikan batasan tentang hukum seminimal mungkin, atau bahkan semaksimal mungkin, sehingga mencakup seluruhnya. Namun, masih ada aturan aturan lain yang sekalipun berupa aturan tapi bukan hukum.[347] Ia juga berpendapat bahwa Van Apeldoorn juga membagi aturan-aturan yang mengatur tentang tingkah laku menusia menjadi dua yaitu, aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang dinamakan hukum, dan aturan lain yang meskipun mengatur tingkah laku manusia tapi bukan hukum, melainkan masuk dalam bidang moral, agama, dan kesusilaan. Aturan-aturan yang mengatur manusia sebagai mahluk individu disebut moral, sedangkan aturan-aturan yang mengatur manusia sebagai mahluk sosial dinamakan hukum.[348]

Dalam konteks Indonesia, Tolchah definisi hukum sebagai suatu ikhtiar manusia yang dalam ikhtiarnya itu dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

---

[345] Teks dikutip dalam bahasa Belanda diterjemahkan oleh Tolchah Mansoer

[346] *Ibid.,* hal. 45.

[347] *Ibid.,*

[348] *Ibid.,* hal. 46.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bertujuan melindungi segenap manusia dan tempat tinggalnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bersifat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[349]

Persoalan pemerintahan juga menjadi perhatian Tolchah. Ia berpendapat bahwa pemerintah (eksekutif) mempunyai peran yang sangat penting dalam bernegara. Sebagai salah satu unsur sebuah negara, pemerintahan adalah pengendali arah sebuah negara. Tugas pemerintah sebagai pemegang pelaksana kekuasaan dalam sebuah negara, terlepas dari besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki, sesuai dengan keadaan negara dan aspirasi rakyatnya. Pemerintah memiliki peran penting bahkan memegang peranan yang utama dalam menentukan kehidupan dan arah bangsa ke depan. Dengan tegas ia mengatakan ”Sungguh jelas bahwa tidak pernah ada suatu masyarakat tanpa pemerintahan, lebih-lebih dalam masyarakat modern.”[350] Lebih lanjut ia menambahkan bahwa eksistensi pemerintah dan negara merupakan suatu hal yang mutlak berdasarkan kebutuhan manusia.[351]

C. Demokrasi dan Proses Ketatanegaraan Indonesia

”so that democracy can be defined as the political and social framework of a society based on principles of freedom, or as the body for a would be free spirit”.

Kalimat di atas adalah penggalan tulisan Roger H. Solttu dari bukunya “*An Introduction to Politics”* yang dikutip oleh Tolchah dalam sebuah tulisannya ”Demokrasi dan Prinsip Mayoritas.”[352] Artikel yang mengupas tentang persoalan

---

[349] *Ibid.,* ha. 67.

[350] *Ibid.,* hal 38

[351] *Ibid.,* Dalam buku ini Tolchah menyebutkan setidaknya ada tiga unsur utama sebuah negara, yaitu: pemerintah, rakyat, dan wilayah.

[352] Tolchah Mansoer, “Demokrasi dan Prinsip Mayoritas” dalam *Gema Muslimin* Edisi II. Juni-Juli 1954.

demokrasi ini ia tulis di akhir tahun 1953 saat ia masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik (HESP) UGM Yogyakarta.[353] Artikel ini dimuat di Majalah *Gema Muslimin* Edisi II bulan Juni-Juli 1954. Nampaknya ia memiliki tradisi mengutip kalimat atau kata-kata tokoh dunia terkemuka dibagian awal setiap kali menulis. Saat itu bangsa Indonesia belum ada pemilu yang merupakan manifestasi demokrasi yang ia tulis. Meskipun sudah ada partai politik, namun DPR dan pejabat negara lainnya masih diangkat berdasarkan penunjukan, sehingga demokrasi saat itu masih dianggap semu.

Pengalaman dan kematangan Tolchah dalam berorganisasi, pilihan dunia pendidikan umum yang ia tempuh, serta kegemarannya membaca buku-buku politik dan hukum dari dunia barat, menjadikan ia sebagai sosok yang tertarik dan jatuh hati dengan demokrasi. Demokrasi ia anggap sebagai kerangka kerja sosial dan politik dari masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, atau sebagai badan dari ruh kebebasan sebagai mana yang dikemukakan oleh tokoh demokrasi idolanya itu. Ia juga mengkritik bangsa Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi, namun belum segera menyelenggarakan pemilu padahal sudah delapan tahun merdeka.[354]

Ketika menulis tentang demokrasi, Tolchah sebagaimana para sarjana ilmu politik menyebutkan bahwa demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti memerintah. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dari dua kata ini Ia menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.[355]

---

[353] Saat itu Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik masih digabung menjadi satu fakultas.

[354] Baca *Gema Muslimin.*

[355] Dalam mengartikan demokrasi Tolchah mengutip beberapa pendapat dari R. Kranenburg dalam bukunya *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtswetenschap* (hal. 12); buku Celier Vedel *Introduction a la Science Politique* (hal. 64) yang mengatakan *"la democratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple*", demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat; juga buku Celier Vedel

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Ia berpendapat bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini tampak jelas dari konstistusi negara yang digunakan, baik dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) maupun Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Demokrasi harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam garis terdepan dari segala hal. Ini berarti bahwa sifat-sifat kemanusiaan yang asasi mendapat pelayanan yang sepatutnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena itu Tolchah menulis bahwa persoalan tentang demokrasi berhubungan erat dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada manusia, dan tidaklah aneh bila pada abad-abad terdahulu demokrasi telah lama diperbincangkan, bahkan menjadi dasar dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ia meyakinkan bahwa hal ini telah dibuktikan dalam sejarahnya Aristoteles, Plato, dan negara-negara Yunani kuno.[356]Namun menurutnya, demokrasi tidak berarti kebebasan dalam artian manusia boleh berbuat semaunya. Karana bila hal ini dituruti, maka yang terjadi adalah anarki, kekacauan yang merajalela, dan akhirnya hanya pertentangan yang terjadi. Kebebasan bukanlah berarti meninggalkan batas-batas yang harus ada atau yang harus diadakan untuk menghindari segala akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi. Dalam hal ini Ia mengatakan:

> *"Kebebasan semata bukanlah demokrasi, tetapi hanya sebagai tanda pengenal dari berlakunya demokrasi. Dengan pengertian bahwa di dalam demokrasi harus berlaku kebebasan-kebebasan, dan ini dibatasi. Dan yang*

---

yang lain yang berjudul *Manuel Elementaire de Droit Constitutionel* (hal. 242) yang mengistilahkan demokrasi sebagai "*un gouvernement de chacun par chacun"*, demokrasi merupakan sebuah pemerintahan tiap orang untuk tiap orang. Kemudian Tolchah Juga mengutip pendapat Abbas Mahmud Al-Aqqad dalam kitabnya *Ad-Dimukratiyyah fil Islam* (hal. 74) yang membagi demokrasi dalam bidang yaitu: *Ad-Dimukratiyatu Assiyaasiah, Ad-Dimukratiyatu al Iqtihadiah, Ad-Dimukratiyatu Al-Ijtimaiyyah*.

[356] Lihat *Gema Muslimin,* hal. 158.

berhak memberikan batasan-batasan ini adalah masyarakat itu sendiri".[357]

Demokrasi harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi yang paling depan dari hal-hal yang lain, dengan demikian demokrasi harus menghargai hak-hak yang ada pada diri manusia. Dalam hal ini Tolchah menyebutnya sebagai *political right* (hak politik) yang perumusannya ia kutip dari bukunya Ann Jacobsen, Ph.D dan Miriam H. Lipman, MA, *An Outline of Political Science.*

"Underlying the concep of political liberty as the idea that as many citizens as possible should share in the exercise of political rights and that the law of the state should represent the will of majojority of its inhabbitans. Obviously, of course, it is not possible to give equal governmental power to all. Government offices must be filled on basis of capacity to serve. There must be some limitations on the electorate, which is never entire population. Obviously an infant cannot be given political right. The problem of the state in converring political right is so to confer them that they will be used wisely. So, to organized the governmental organts that legal sovereignty and political sovereignty will very nearly coincide. [358]

Dengan demikian Tolchah beranggapan bahwa dalam negara demokrasi sebanyak mungkin rakyat harus ikut serta menentukan hak politik dan hukum, dimana negara harus mewakili kemauan mayoritas dari penduduknya (dengan kata lain suara terbanyak adalah menentukan).[359]

Hak lain yang menurut Tolchah harus ada dalam negara yang demokrasi adalah *civil right* (hak-hak sipil), yaitu hak-hak perorangan yang harus dijamin dan dilindungi oleh oleh pemerintah. Dalam hal ini ia mengutip pendapatnya J.J Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social.* Hak-hak yang dimaksud antara lain, *the right to life* (hak untuk hidup), *the*

[357] *Ibid.*

[358] *Ibid.,* hal. 158.

[359] *Ibid.,* hal. 159.

right to personal freedom (hak akan kemerdekaan perseorangan), *the right to contrac* (hak untuk mengadakan perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesejahteraan umum), *the right of property* (hak akan hak milik), *the right to earn a livelihood* (hak dalam mencari matapencaharian), *the right of freedom of belief* (hak akan kemerdekaan keyakinan), *the right of speech and press* (hak akan kemerdekaan berbicara dan pers), *the right of family relationships (*hak akan hubungan keluarga), *procedural rights* (hak-hak prosedural dalam tindakan sipil dan kriminal, seseorang ketika diadili harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara), *the right of equality before the law* (hak yang sama di hadapan hukum), *the right of association* (hak berserikat).[360]

Dari tulisan di atas, Tolchah menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi ketika bangsa Indonesai mau menjadi negara demokrasi. Prasyarat-prasyarat yang ia kemukakan pada saat itu belum sepenuhnya di jamin dan dipenuhi oleh bangsa Indonesia karena masih berada dalam masa transisi politik dan hukum yang belum stabil. Meskipun pada tahun 1955 bangsa Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama kalinya untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante, namun pada akhirnya juga terjadi gejolak politik yang berujung pada pembubaran konstituante yang anggotanya dipilih melalui proses pemilu yang demokratis.

Kondisi politik yang tidak stabil ini terus berlanjut sampai pada awal-awal era Orde Baru. Pada saat itu bangsa Indonesia dikendalikan oleh pemerintahan yang represif di bawah kendali militer dan Golongan Karya. Demokrasi hanya menjadi *lips service* pemerintah semata untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan bangsa Indonesia baru mengadopsi

[360] Bangsa Indonesia baru meratifikasi covenan tentang hak-hak sipil dan politik pada tahun 2005, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Keputusan ini diambil lima puluh tahun setelah Tolchah menulis tentang demokrasi, berdasarkan

prasyarat demokrasi yang dikutip oleh Tolchah pada tahun 2005 setelah meratifikasi *covenant* tentang hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan oleh Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB), berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 50 tahun setelah Tolchah menulis tentang demokrasi.

Karena itu Tolchah mengingatkan bahwa ada watak-watak lain pada manusia yang menghalang-halangi pertumbuhan demokrasi. Karakter ini menyebabkan demokrasi akan tenggelam dalam jurang yang dalam dan seolah olah tidak timbul lagi. Sehingga yang muncul adalah sang diktator yang tidak memberikan hak apa-apa kepada yang diperhambanya kecuali "kewajiban kamu ialah menerima dan pelakukan perintah kami". Manusia tidak lain hanya dipandang sebagai mesin otomatis yang bisa digerakkan secara mekanis yang tidak berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya. Mereka yang pandai menjilat atasan, menyikut kanan-kiri dan menginjak bawahan itulah yang akan mendapat kedudukan terdepan dan hak-hak istimewa.[361]

Ketika sebuah negara dipimpin oleh seorang diktator, maka ia akan membawa demokrasi jatuh ke pelimpahan yang sekotor-kotornya. Karena itu Tolchah mengingatkan kita dalam sebuah bukunya *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah*.[362] Dalam buku ini ia mengulas tentang bagaimana konsep melanggengkan kekuasaan menurut pemikiran Shang Hyang dan Macchiavelli. Buku kecil itu diawali dengan tulisan yang kata-kata dari Shang Hyang, negarawan Tiongkok abad 4 SM: "*a weak people means a strong state and a strong state means*

[361] Lihat *Gema Muslimin*, hal. 160.

[362] Buku ini ditulis oleh Tolchah pada tahun 1970. Pada saat itu kondisi pemerintahan Indonesia sangat represif dan militeristik. Buku tipis ini dicetak dua kali oleh Penerbit Gema Tahun 1972 dan 1981, juga pernah dimuat oleh majalah *Al-Jami'ah* (Majalah IAIN Sunan Kalijaga) No.5 Th.IX, September 1970. Namun Mahbub Djunaidi dalam pengantar edisi kedua menyatakan bahwa buku ini pernah diterbitkan oleh Harian Merdeka Solo Tahun 1947 dengan judul "*Rakyat-Kekuasaan-Pemerintah"*.

a weak people. Therefore a country, which has the right way is concerned with weakening the people".[363] Dari kata-kata Shang Hyang ini ia kemudian membandingkannya dengan tulisan Niccolo Macchiavelli dalam bukunya *Il Principe.* Buku ini ditulis oleh Niccolo Macchiavelli sebagai hadiah ulang tahun kepada penguasa Folrence de Medici. Yang menjadi titik perhatian dalam buku *Il Principe* ini adalah kalimat yang berbunyi:[364]

> *" You must know, then, that there two methods of fighting, the one by law, the other by force: the first method is that of men, the second of beasts; but as the first method often insufficient, one must have recourse to the second. It is therefore necessary for a prince to know well how to use both the beast and the man…….the parable of this semi animal, semi human teacher is meant to indicate that a prince must know how to use both natures, and that the one without the other is not durable. A prince being thus obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps and a lion to frighten wolves. Those that wish to be only a lion do not understand this…"*[365]

---

[363] Rakyat lemah, berarti pemerintah kuat dan pemerintah kuat berarti rakyat lemah. Karena itu sebuah negara yang menempuh jalan yang benar, harus berkonsentrasi untuk melemahkan rakyatnya.

[364] Tolchah Mansoer, *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah*, (Yoyakarta: Gema) 1981, hal. 14.

[365] Artinya: Jadi tuan harus tahu, ada dua metode untuk berjuang, yang satu menggunakan hukum, sedangkan yang lainnya dengan kekuatan, metode yang pertama adalah untuk manusia, sedangkan yang kedua untuk binatang buas; tetapi apabila cara yang pertama tidak berhasil, haruslah digunakan cara yang kedua. Kerena itu perlu bagi seorang pangeran yang berkuasa mengetahui dengan baik bagaimana menggunakan dua metode binatang buas dan manusia itu….. Perumpamaan dari guru yang setengah binatang dan setengah manusia ini adalah untuk menunjukkan sesungguhnya pangeran berkuasa itu haruslah tahu bagaimana menggunakan dua cara itu, dan mengetahui satu metode

Menurut Tolchah, baik Shang Hyang maupun Macchiavelli sampai berteori demikian tidak lain adalah untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaan pada waktu itu. Shang Hyang berusaha melemahkan rakyat, yang satu berusaha agar para penguasa bawahan yang mulai renggang hubungannya dengan pusat bisa semakin berkurang.[366] Namun, ia meyakinkan bahwa manusia memiliki sifat ingin bebas. Karena itu, manusia tidak akan mau hanya sekedar menjadi mesin otomatis yang hanya menerima perintah saja tanpa diberikan hak sama sekali. Manusia ingin bisa mengembangkan segala cita-citanya, ingin bebas dalam berbuat tanpa campur tangan dari siapapun, dan hal ini berakibat pada pemberontakan terhadap ikatan-ikatan yang mengekangnya.[367]

Tolchah mengabarkan kepada kita bahwa sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur. Negara yang berdasarkan Pancasila tidak akan memberikan kesempatan lolosnya jalan pikiran Shang Hyang atau Macchiavelli. Karena teori yang dikembangkan oleh keduanya bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[368] Dalam konteks negara Pancasila, ia menambahkan bahwa negara kita menganut paham demokrasi dalam berbagai bidang. Tidak hanya bidang politik, tapi juga bidang sosial dan ekonomi. Yang dimaksud demokrasi politik

---

saja tanpa satu lagi tidaklah tahan lama. Jadi pangeran, berkuasa harus tahu dengan baik bagaimana ia bertindak. Ketika sebagai binatang wajib meniru kancil dan singa. Sebab, singa tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari perangkap-perangkap, dan kancil tidak bisa melindungi dirinya dari serigala-serigala. Karena itu ia harus bertindak sebagai kancil untuk bisa mengenal perangkap-perangkap, dan sebagai singa untuk menakuti serigala-serigala. Mereka yang hanya ingin menjadi singa saja tidak mengerti ini.

[366] Tolchah Mansoer, *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah*, (Yoyakarta: Gema), 1981, hal. 14.

[367] *Ibid.,*

[368] *Ibid.,*

menurutnya adalah sila ketiga dan keempat, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sedangkan demokrasi sosial ekonomi adalah sila kedua dan kelima yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradap dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[369]

Pada bagian akhir tulisannya dalam buku *Demokrasi Sepanjang Konstitusi,* Tolchah menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat menentukan bentuk dan coraknya serta ikut serta dalam penyelenggaraanya untuk mewujudkan cita-citanya. Ia adalah suatu pemerintahan dari rakyat yang harus sesuai dengan pandangan hidup rakyat itu sendiri, yaitu Pancasila. Disini rakyat yang menentukan pemerintahan bukan sebaliknya. Pemerintah hanyalah "menyelenggarakan" kepentingan dan keinginan rakyat dan "memimpin" rakyat berdasarkan pikiran dam jiwa rakyat yang berpancasila itu. Dan untuk mengetahui semuanya itu jalan yang termudah adalah melalui partai politik.[370]

Demokrasi tidak akan ada tanpa pengakuan terhadap hak asasi warga negaranya. Sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi,Tolchah menyebutkan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun menurutnya, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang memuat pasal tentang HAM secara lebih detail dengan mengadopsi

---

[369] Dr. Moh. Tolchah Mansoer, SH, *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*, (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga), 1972, hal. 23.

[370] *Ibid.* Di akhir buku ini Tolchah juga mengutip pendapat dua ulama Islam yang salaf dan yang khalaf tentang musyawarah atau demokrasi. Yang pertama adalah pendapat Abul Hasan Almawardi dalam kitabnya *Adabu Ad-Dunya wa Addien*, dan yang kedua adalah pendapat Mahmud Uqqad dalam kitabnya *Ad-Dimuqratiyyah fil Islam.*

sebagian besar yang tercantum dalam *Universal Declaration Of Human Right*.[371]

Dalam hal ini Tolchah mengatakan:

> *"Apa yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar akan tetapi juga tidak dilarang bukanlah berarti tidak ada perhatian para pembentuk Undang-Undang Dasar terhadap hak-hak asasi itu. Pencantuman beberapa hak itu mungkin dianggap sebagai prioritas utama dari para penyusun sebagai hal yang pokok. Di samping itu perlu diperhatikan asas Pancasila kita. Yang jelas berkat demokrasilah negara kita bisa bertahan, dan berkat demokrasi pula kita kembali ke negara kesatuan. Artinya rakyat dengan seluruh jiwa dan keyakinannya mendukung negara untuk tetap satu, ada, dan merdeka".*[372]

Satu langkah maju dalam proses demokratisasi di tanah air yang ia cacat adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang kedudukan MPR/DPR dan DPRD. Namun lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, undang-undang itu dipandang mengalami kemunduran. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tidak ada sistem pengangkatan, kecuali untuk golongan peranakan dan Irian Barat.[373] Bila Pancasila dijalankan dengan baik dan benar, maka seluruh bangsa Indonesia akan merasakan bahwa negara yang

---

[371] Dibandingkan dengan UUDS 1950, ketentuan HAM di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) relatif sedikit, hanya 7 (tujuh) pasal saja masing-masing Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 31 dan 34, sedangkan di dalam UUDS 1950 didapati cukup lengkap pasal-pasal HAM, yaitu sejumlah 35 pasal, yakni dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 42. Jumlah pasal di dalam UUDS 1950 hampir sama dengan yang tercantum di dalam *Universal Declaration of Human Rights.* Setelah amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 terdapat penambahan pasal yang mengatur tentang HAM dengan menambahkan BAB X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

[372] Moh. Tolchah Mansoer, *Demokrasi Sepanjang.....,* hal. 39.

[373] *Ibid.,* hal. 44.

dilandasinya itu adalah negara seluruh rakyat dan rakyat secara bersama-sama merasa memiliki negara. Oleh karena itu, pergeseran dan persentuhan negatif tidak akan terjadi.[374]

Kebanggaan Tolchah terhadap Pancasila juga ia singgung pada bagian akhir disertasi doktoralnya. Secara tegas Tolchah berpesan agar kita semua melaksanakan seluruh sistem ketatanegaraan kita dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sebagai bangsa dan negara berdasarkan ideologi Pancasila yang untuk kepentingan agamapun cukup memberikan ruang yang sebaik-baiknya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan jalan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga mengutip kalimat mantan Presiden Soeharto sesaat setelah dilantik menjadi presiden di depan Sidang ke V MPR yang mengatakan: [375]

> *"Sejak semula perjuangan Orde Baru itu mempunyai dua tema pokok: pertama, mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kedua, menegakkan kehidupan konstitusional termasuk di dalamnya mengembalikan kehidupan demokrasi yang sehat dan memperbaiki alat-alat demokrasi. Menegakkan kehidupan konstitusional adalah alat yang merupakan jaminan obyektif agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang oleh penguasa. Oleh karena itu sejak semula kami melihat bahwa antara meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan kehidupan konstitusional itu tidak bertentangan satu sama lainnya, melainkan dalam melaksanakan kedua tugas tersebut harus diserasikan".*

Masih terkait dengan demokrasi Tolchah membenarkan teori pemerintahan yang dikemukakan oleh Polybios bahwa bahwa di setiap system pemerintahan mengandung "*zelfvernietiging*", apalagi apabila segala hal-hal yang bisa mempertahankan suatu sistem yang baik itu tidak dipertahankan. Namun, belum tentu suatu benih

---

[374] *Ibid.,* hal. 21.

[375] Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek....*, hal. 371.

"*zelfvernietiging*" akan melahirkan suatu sistem yang secara tertib dikemukakan oleh Polybios.[376] Belum tentu dari monarki akan lahir tirani, mungkin saja berubah menjadi demokrasi atau republik konstitusional.[377]

Sebagaimana kita ketahui, konsep pemerintahan yang paling tua menurut Polybios adalah monarki, kemudian tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi ochlokrasi dan kembali kepada Monarki. Begitu juga seterusnya. Teori ini adalah pengembangan dari teori Sistem pemerintahannya Aristoteles.[378] Polybios juga mengatakan bahwa setiap sistem pemerintahan mengandung benih yang merusak diri "*zelfvernietiging*" yang menyebabkan hubungan kausalitas antara sistem pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.[379] Monarki timbul karena ada orang yang lebih kuat, cerdas yang melebihi segalanya dari orang pada umumnya sehingga ia menjadi penguasa pertama. Mula mula ia orang yang berbakat baik, jujur, adil, dan selalu berbuat untuk kepentingan orang banyak. Tapi penggantinya berganti haluan menjadi tidak lagi adil, tidak jujur, dan hanya mementingkan urusannya sendiri sehingga pemerintahannya menjadi tirani.[380] Ketika tirani sudah merajalela, akan muncul beberapa orang yang prihatin yang berusaha untuk mengatasinya. Bila berhasil, lahirlah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh beberapa orang yang dikenal dengan sistem pemerintahan aristokrasi. Awalnya sistem pemerintahan ini ditujukan untuk kepentingan umum, tapi lama

---

[376] Polybios adalah ahli nagara Yunani yang hidup tahun 204-144 SM.

[377] Tolchah Mansoer, *Rakyat, Kekuasaan...*, hal. 28.

[378] Aristoteles, (384 SM - 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan. etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat.(http://wapedia.mobi/id/Aristoteles), 14 Maret 2008.

[379] Tolchah Mansoer, *Rakyat, Kekuasaan...*, hal. 25.

[380] *Ibid.*

kelamaan berubah hanya memperhatikan kepentingan penguasa saja sehingga berubah menjadi oligarki.[381] Apabila hal tersebut terus terjadi, maka rakyat akan melakukan tindakan pemberontakan dan sebagainya karena kepentingan mereka diabaikan oleh penguasa. Rakyat akan tampil menuntut dan menjaga hak hak mereka, sehingga lahirlah pemerintahan demokrasi, pemerintahan oleh orang banyak.

Pada awalnya pemerintahan ini baik untuk keadilan dan kesejateraan. Kemudian rakyat mendewa-dewakan kebebasan, menyalahgunakan kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya. Namun karena rakyat sendirilah yang berkuasa, mereka tidak bisa mengambil tindakan. Yang duduk di pemerintahanpun tidak lagi memperhatikan bakat dan kecakapan, yang bisa menduduki jabatan hanya mereka yang punya pengaruh saja, bisa mengancam, rakyat dipesona dengan bermacam macam hal, termasuk kekayaan, sehingga demokrasi tidak lagi demokratis tapi berubah menjadi "ochlo" rakyat yang hinalah yang memerintah, lahirlah sistem pemerintahan ochlokrasi. Tentu hal ini tidak boleh diteruskan. Kelak, akan lahir seorang yang bijaksana, hebat, yang akan melakukan perlawanan atau perebutan kekuasaan, sehingga lahirlah monarki atau diktator.[382]

Dalam buku Tolchah yang lain, ia mengajak kita untuk membuka kembali dokumentasi sejarah berkaitan dengan situasi dan perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di awal orde baru. Kita bisa mendapatkan banyak data-data sejarah dan beberapa kritik dan pemikiran konstruktifnya terhadap politik dan hukum ketatanegaraan waktu itu. Meskipun menurut penulis metode penyampaian dan penulisan ide-ide tersebut kurang sistematis. Buku tersebut adalah *Hukum Tatanegara Sesudah Pemilihan Umum 1971*.

Ditulis oleh Tolchah bahwa berdasarkan Pasal 1 TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966, pemilihan umum yang bersifat lansung, umum, bebas, dan rahasia harus diselenggarakan

[381] *Ibid.*

[382] *Ibid.*

selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Namun karena undang-undang tentang pemilihan umum dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang seharusnya sudah diselesaikan oleh DPR dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal ditetapkannya TAP MPR tersebut tidak dapat terlaksana,[383] maka keluarlah TAP MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 yang menunda pelaksanaan pemilihan umum menjadi paling lambat 5 Juli 1971.[384] Setelah selama tiga tahun tertunda, pada tanggal 17 Desember 1969 Presiden mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang-Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-undang ini menjadi landasan hukum pada pelaksanaan Pemilu 3 Juli 1971.[385]

Ada beberapa hal yang dikritisi oleh Tolchah dari isi Undang-Undang Pemilu tersebut. Di antara pasal yang ia kritik adalah ketentuan Pasal 4 yang mengatur tentang daerah pemilihan. Berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu tersebut, daerah pemilihan DPR pusat adalah daerah tingkat I (Propinsi). Menurut Tolchah, ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menyatakan bahwa daerah pemilihan adalah Negara Republik Indonesia. Artinya, apabila ada partai di satu propinsi kekurangan suara, bisa ditambah dengan suara dari propinsi lain, sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia. Karena penyederhanaan seharusnya tidak berarti tidak memberikan perwakilan.[386]

Hal lain yang ia kritisi adalah persoalan dwi fungsi ABRI. Namun ia tidak mempersoalkan duduknya ABRI dalam

[383] TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966 ditetapkan tanggal 5 Juli 1966.

[384] Moh. Tolchah Mansoer, *Hukum Tatanegara Sesudah Pemilihan Umum 1971,* (Jakarta: Pradnya Paramita), 1978, hal. 67.

[385] *Ibid.,* hal. 69. Tolchah mempertanyakan penetapan TAP MPRS Nomor XI/MPRS/1966 yang menugaskan penyusunan dua Undang-Undang yang harus selesai dalam waktu 6 bulan.

[386] *Ibid.,* hal. 75.

lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan melalui pengangkatan yang memang pada saat itu dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi melegalkan bahkan menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dan potensi yang ada dalam masyarakat. ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus sejalan karena ABRI merupakan kesatuan yang utuh untuk menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[387] Selain dua hal di atas, dalam buku tersebut Tolchah juga mengemukakan gagasan bahwa bila terjadi Pemilu yang tingkat partisipasi pemilihnya kurang dari lima puluh persen, maka Pemilu harus diulang atau dianggap tidak sah.[388]

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Tolchah mengkritik ketentuan Bab II yang mengatur tentang keangotaan DPR melalui pengangkatan bagi Golongan Karya di luar unsur angkatan bersenjata. Menurut Tolchah, ketentuan pasal tersebut menguntungkan Golongan Karya (Golkar) dalam mendapatkan kursi di DPR. Kesempatan pertama diperoleh oleh Golkar melalui pemilihan umum, sedangkan yang kedua diperoleh melalui pengangkatan.[389]Tolchah juga menulis tentang keheranannya kepada DPR-GR saat itu yang anggotanya terdiri dari berbagai partai politik dan suaranya pun melebihi suara Golkar dan ABRI, tapi menyetujui ketentuan dalam pasal tentang pengangkatan anggota DPR tersebut.[390] Ia menilai bahwa ada kekhawatiran dari partai-partai politik saat itu bahwa kalau tidak menerima pasal tersebut, mereka akan

[387] *Ibid.*, hal. 89.

[388] *Ibid*., hal. 91.

[389] *Ibid.*, hal. 93.

[390] Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1968, Jumlah Anggota DPR adalah 414 yang terdiri dari partai-partai (meliputi PNI, NU, Parkindo, Katolik, PSII, Perti, IPKI, Murba, Parmusi) sejumlah 247, Golongan Karya 92, dan ABRI 75.

dicap sebagai ”orde lama” dan tidak bisa masuk dalam ”orde baru”.[391]

Kemenangan Golkar sebagai satu organisasi yang baru saja muncul pada pemilu 1971 dengan menguasai 62,8 persen kursi DPR adalah suatu keajaiban menurut Tolchah.[392] Hal ini ia kemukakan karena partai-partai politik pada saat itu gencar melakukan kampanye merata di seluruh propinsi, namun ternyata suaranya tidak signifikan, tertinggal jauh dari Golkar yang saat itu tidak menyebut dirinya sebagai partai politik.[393]Akibat kemenangan Golkar saat itu, partai-politik berada dalam posisi terdesak, bahkan tidak mempunyai peranan apa-apa, sehngga Golkar menentukan segala-galanya.[394] Namun ada hal menarik yang perlu dicermati di sini. Meskipun Golkar menguasai 62,8 persen kursi DPR, namun kursi ketua DPR dan MPR diserahkan kepada KH. Idham Chalid.[395]Menurut Tolchah hal tersebut terjadi karena langkah politik Golkar yang disampaikan oleh Mayjen Ali Murtopo (tokoh pembina Golkar dan aspri Presiden Soerharto) yang meminta KH. Idham Chalid untuk menjadi Ketua DPR.

Dalam penilaian Tolchah, kemenangan mutlak yang diraih Golkar yang ditopang oleh ABRI dalam pemilihan umum 1971 menjadikan Golkar mengendalikan seluruh tatanan hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menempatkan 648 kursi di MPR, Golkar bisa merubah konstitusi.[396] Karena untuk merubah undang-undang dasar

---

[391]*Ibid.*, hal. 94.

[392] Dalam hal ini Tolchah mengutip pidato Rektor Universitas Gajah Mada dan pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Seperempat Abad Universitas Gadjah Mada, 1949-1974 yang diterbitkan oleh Panitia Dies Natalies Universitas Gajah Mada, hal. 24.

[393] Pada waktu Orde Baru, Golkar menyatakan dirinya bukan partai politik.

[394] *Ibid.*, hal. 16-17.

[395] Waktu itu Idham Khalid menjabat Ketua Tanfidziah PBNU dan menjadi anggota DPR dari Partai NU.

[396] Anggota MPR saat itu berjumlah 920 yang terdiri dari Golongan Karya 392, ABRI 230, Persatuan Pembangunan 126, dan

harus dihadiri oleh 2/3 anggota, dan ketetapannya dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir. Dengan demikian Golkar sebenarnya bisa melakukan perubahan terhadap konstitusi saat itu jika mereka mau.

Dalam bukunya *Kedudukan Penetapan Presiden Di Dalam Zaman Orde Baru,* Tolchah menulis bahwa sejak keluarnya TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak Sesuai Dengan undang Undang Dasar 1945, maka tidak dibenarkan lagi dikeluarkannya Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang baru.[397] Argumen Tolchah ini berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 6 TAP MPRS Nomor XIX/MPRS 1966 yang menginstruksikan peninjauan kembali semua Ketetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1958 dan tidak membenarkan keluarnya Penetapan Presiden dan Peraturan Peraturan Presiden yang baru, juga TAP MPRS Nomor XX/ MPR 1966 yang tidak mencantumkan lagi Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai sumber hukum.[398]

Tolchah juga kurang sependapat dengan cara yang di tempuh oleh Pemerintah dan DPR waktu itu dalam melakukan

---

Demokrasi Pembangunan 52, serta Utusan Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah (Gubernur) 120.

[397] Dr. Tolchah Mansoer, SH, *Kedudukan Penetapan Presiden Dalam Zaman Orde Baru,* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, Papringan), 1971. hal. 9. Dalam Pasal 6 TAP MPR No. XIX/MPRS/1966 dnyatakan bahwa sejak ditetapkannya ketetapan ini, maka tidak dibenarkan lagi dikeluarkan penetapan-penetapan presiden dan peraturan peraturan presiden yang baru. Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia, tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia adalah: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan MPR, (3)Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Keputusan Presiden, (6) Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

[398] Dalam prekteknya pemerintahan Orde Baru masih tetap mengeluarkan Peraturan Presiden.

peninjauan kembali berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang menurutnya sama dengan cara yang ditempuh oleh DPRGR dalam menerima Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961. Menurut Tolchah, selama pengganti berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden belum ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, sebaiknya penetapan maupun peraturan Presiden tersebut diberi saja bentuk formilnya. Sedangkan hal-hal lainnya ditentukan pada saat yang tepat.[399]

D. Kekuasan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

"The distinguishing characteristic of what as know as presidencial or conggresial government is the almost complete separation of the executive and the legislative departments, and their independence vis-avis each other".

Kalimat di atas adalah penggalan tulisan Gertrude Ann Jacobsen dan Mariam H. Lipman dalam bukunya *An Outline of Political Science* yang dikutip oleh Tolchah untuk menguatkan argumentasinya tentang system pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang ditulis dalam buku disertasinya *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Negara Indonesia.* Buku disertasi ini merangkum pemikiran-pemikiran Tolchah mengenai permasalahan-permasalahan di lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia. Persoalan pertama yang diungkap oleh Tolchah adalah mengenai system pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dalam pemikiran Tolchah, sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial di mana kepala pemerintahannya adalah Presiden. Ciri lain dari sistem presidensial ini adalah bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Artinya kedudukan

[399] Tolchah, *Kedudukan Penetapan Presiden .....,* hal. 6.

Presiden tidak tergantung kepada DPR. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Selain itu Presiden juga dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden.[400]

Namun Tolchah lebih lanjut menegaskan bahwa sistem presidensial yang dianut di Indonesia ini hanya sebatas dalam artian kabinet dikepalai oleh seorang Presiden, bukan dari segi pertanggungjawabannya. Sebab saat itu pihak eksekutif dalam pemerintahan harus bertanggung jawab kepada MPR. Dengan demikian Indonesia saat itu juga meniru sistem pemerintahan parlementer karena Presiden selaku mandataris harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itu. Ia menguatkan argumentasinya bahwa apabila yang dimaksud dengan sistem presidensial sebagaimana yang dikatakan oleh Gertrude Ann Jacobsen dan Mariam H. Lipman yang mengatakan bahwa ” *the distinguishing characteristic of what as know as presidencial or conggresial government is the almost complete separation of the executive and the legislative departements, and their independencevis-avis each other”*. Apabila kita mengacu pada definisi di atas, maka sistem pemerintahan kita bukan presidensial murni. Sebab Presiden dalam pemerintahan Indonesia tidak hanya berkuasa di lembaga eksekutif saja, tetapi juga memiliki hak legislasi untuk membuat Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945,[401] bahkan juga mempunyai hak yudikatif dalam hal memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.[402] Dengan

---

[400] Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH, *Pembahasan Beberapa Aspek.....,* hal 110.

[401] Sebelum amandemen, Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: ”Presiden memegang kekuasan membentuk Undang-Indang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.” setelah amandemen (ke 1) yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 ketentuan tersebut diubah menjadi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

[402] Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek……,* hal. 169.

demikian di Indonesia tidak ada pemisahan secara penuh antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden juga harus bertanggung jawab kepada MPR, sehingga dia bergantung kepada MPR.[403]

Masalah lain yang dibahas oleh Tolchah adalah mengenai masa jabatan Presiden. Menurutnya jabatan Presiden perlu dibatasi dengan hanya dua kali masa jabatan saja. Pemikiran ini sejalan dengan Konstitusi Amerika Serikat soal masa jabatan Presiden yang berbunyi "*no person shall be elected to the office of the president more than twice"*.[404] Dalam pandangan Tolchah, hasil amandemen ke 22 yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat mengenai pasal tentang masa jabatan Presiden ini ada baiknya dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, dengan dibatasinya jabatan pemimpin akan selalu terjadi regenerasi kepemimpinan.[405]Pemikiran untuk membatasi masa jabatan Presiden ini akhirnya dianut juga oleh bangsa Indonesia di era reformasi pasca tumbangnya orde baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto. Dalam amandemen pertama UUD 1945, ketentuan mengenai masa jabatan presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima

[403] *Ibid.*, hal. 119. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden harus dipertanggung jawabkan kepada MPR selaku pelaksana kedaulatan rakyat , ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ke tiga, ketentuan tersebut dirubah menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

[404] Tidak ada seorangpun yang dipilih untuk menjabat sebagai presiden lebih dari 2 kali. Ini adalah hasil amandemen Konstitusi Amarika Serikat yang ke 22 yang ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 1951. Sebelumnya, sejak ditetapkan pada 17 September 1787 tidak ada ketentuan yang membatasi jabatan Presiden, dan baru dibatasi setelah Presiden Franklin Delano Roosevelt menjadi Presiden Amerika empat kali berturut turut.

[405] *Ibid*., hal. 171.

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam buku disertasi yang ia pertahankan di hadapan Sidang Senat UGM, di samping dokter pribadi yang khusus hadir mendampingi untuk mengontrol penyakit jantung yang ia derita sejak muda, di depan keluarga dan para sahabat tercinta yang turut hadir ini, ia juga menyampaikan beberapa ”dalil” (saran) berkaitan dengan lembaga eksekutif di Indonesia. Saran-saran tersebut antara lain, kedudukan Wakil Presiden perlu diatur dalam undang-undang dasar agar kedudukannya lebih jelas, hendaknya ada ketegasan bahwa selama lima tahun memerintah, Presiden tidak bisa dijatuhkan, kecuali apabila menyimpang dari Undang-Undang Dasar, GBHN (saat itu), dan tindak kriminal dengan pidana berat.[406] Pemikiran-pemikiran ini di kemudian hari juga dimuat dalam amandemen ketiga UUD 1945 tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Pasal 7A menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tigapuluh tahun lebih setelah Tolchah menulis, baru ide itu di pakai.

Berkaitan dengan lembaga legislatif Tolchah berpendapat bahwa dalam ketentuan keanggotaan MPR (waktu itu) ada hal-hal yang belum sepenuhnya jelas, yaitu mengenai siapa yang berhak duduk mewakili golongan. Untuk itu ia mengusulkan perlu adanya penjelasan khusus.[407] Demikian juga perihal persidangan yang hanya setahun sekali, ia mengusulkan agar ditinjau kembali. Dengan hak MPR yang minim itu, lembaga tersebut ia anggap tidak dapat bertindak

[406] *Ibid*., hal. 373.

[407] *Ibid*., hal. 120.

efektif untuk mengawasi mandatarisnya.[408]Karena itu, sebenarnya DPR bisa saja dianggap sebagai ”MPR sehari-hari” dengan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, karena semua anggota DPR adalah anggota MPR. Sebagai sebuah lembaga yang bersifat menghadapi banyak tugas, terutama masalah perundang-undangan, sudah sepantasnya DPR lebih banyak melakukan sidang.[409]

Dalam hal menetapkan undang-undang dasar dan GBHN, Tolchah berpandangan bahwa lembaga manapun diperbolehkan untuk merencanakan dan mengajukan konsepnya masing-masing, dengan syarat ketetapan akhir tetap ada pada MPR. Hal ini sesuai dengan fungsi MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang berhak menetapkan undang-undang dasar.[410] Hal ini tentunya merupakan bagian dari wujud penyerapan aspirasi maupun pemberdayaan dan pengikutsertaan peranserta kelompok masyarakat dalam menyusun undang-undang maupun undang-undang dasar.

Selain di bidang eksekutif dan legislatif, Tolchah juga memiliki pemikiran dan gagasan di bidang yudikatif yang tidak kalah kritis. Ia mengungkap kembali perdebatan antara Mr. Muh. Yamin dengan Soepomo dalam persidangan yang dilakukan PPKI ketika menyusun undang-undang dasar soal perlunya sebuah lembaga yang bertugas sebagai penguji *yudicial review*. Menurutnya harus ada lembaga yang bertugas melakukan pengujian apakah peraturan perundangan yang satu bertentangan dengan peraturan di atasnya sampai kepada masalah apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan dengan undang-undang dasar atau tidak, dan karenanya dinyatakan tidak berlaku.

Hak menguji itu harus diberikan kepada lembaga seperti Mahkamah Agung atau lembaga lainnya yang memiliki tugas sama. Meskipun sudah ada mekanisme banding dan kasasi dalam proses peradilan, itu tidak cukup bagi warga yang merasa

---

[408] *Ibid*., hal. 123.

[409] *Ibid*., hal. 123 dan 181.

[410] *Ibid*., hal. 124.

dilanggar hak konstitusionalnya. Harus ada hak banding yang bersifat final terhadap produk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kenyataaan seperti ini, ia berpendapat agar hak *toestsing recht* bagi Mahkamah Agung itu diperluas lagi. Sebab, hak *toestsing recht* maupun *yudicial review* itu penting sekali untuk melindungi warga negara yang merasa dilanggar haknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara hukum. Mengingat memorandum DPRGR yang disahkan oleh TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 pada tanggal 19 Juni 1966 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya termasuk undang–undang terhadap undang-undang dasar. [411]

Pemikiran Tolchah mengenai perlunya lembaga *yudicial review* yang bertugas untuk menguji apakah sebuah undang undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 baru ada di Indonesia dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Fungsi utama MK sebagai mana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24c, Ayat (1) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

E. Konstitusi Negara

Sebagai pakar Hukum Tata Negara, Tolchah banyak menulis persoalan-persoalan ketatanegaraan yang berkembang saat itu. Tulisan-tulisan itu ada yang hanya berupa artikel yang kemudian dimuat di media masa, ada yang berupa makalah yang dipresentasikan dalam forum-forum seminar atau diskusi, dan ada yang ia tulis dalam sebuah buku. Di antara materi hukum ketatanegaraan yang pernah ia tulis adalah pembahasan tentang konstitusi. Dalam buku *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*, Tolchah menulis bahwa Konstitusi adalah hukum dasar yang meliputi ketentuan-ketentuan yang tertulis maupun

[411] Tolchah Mansoer, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945* (Bandung: Alumni), 1977, hal. 106.

yang tidak tertulis.[412] Nampaknya ia menganggap bahwa konstitusi tidak hanya meliputi hukum dasar yang tertulis dalam undang-undang dasar saja, tapi ada hukum dasar yang tidak tertulis namun merupakan konstitusi. Pendapat ini ia kemukakan karena ada negara-negara yang konstitusinya tidak tertulis dalam undang-undang dasar melainkan hanya bersumber dari konsensus tidak tertulis atau yurisprudensi yang berlaku di masyarakat dan memiliki kekuatan hukum di atas undang-undang biasa seperti yang ada pada negara Inggris.

Ia menguraikan beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan cukup rinci. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius dalam uraiannya adalah mengenai Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini yang ia kutip adalah alenia yang menyatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, bersatu, adil dan makmur".[413]Dari rumusan ini ada dua hal yang disimpulkan

---

[412] Dr. Moh. Tolchah Mansoer, *Demokrasi Sepanjang Konstitusi,* (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga), 1972. Dalam memberikan terminology tentang Konstitusi, Tolchah mengutip pendapat banyak pakar hukum baik Barat maupun Arab. Pendapat yang pertama dikutip adalah pendapat Mr. J.H.P. Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetenschap in Nederland* halaman 123, kemudian pendapatnya Frederic Austin Ogg dalam dalam dua bukunya *English Government and Politics,* edisi kedua halaman 57 dan *Introduction to the Study of The Law and the Constitution* halaman 22, Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* tahun 1951 halaman 241-241, juga pendapat Abul A'la al-Maududi dalam buku yang dihimpun oleh Achmad Faishal yang berjudul *Shiyaghatul Mu'jizah li Masyru'i Dusturil Islami.*

[413] Pembukaan Undang-Undang Dasar menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar, begitu juga berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal II aturan tambahan menyatakan bahwa dengan ditetapkannya

oleh Tolchah: *Pertama*, diakuinya perjuangan organisasi-organisasi sebelum lahirnya kemerdekaan Indonesia. Baik itu partai politik, organisasi pendidikan, atau apa saja yang pada waktu itu mengabdi kepada bangsa dan tanah air dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, sosial politik dan sebagainya, telah mengantarkan Indonesia kepada Indonesia merdeka. *Kedua*, Indonesia yang diantarkan itu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atau setidak-tidaknya itu semua harus diciptakan.[414]

Tolchah juga mengutip alinea terakhir UUD 1945 yang mengatakan, "kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dari alenia di atas, ada tiga hal yang mendapatkan perhatian serius dari Tolchah, yaitu: *Pertama*. Tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; *Kedua*. Alat untuk mewujudkan tujuan adalah kemerdekaan

perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal.

[414] Dr. Moh. Tolchah Mansoer, *Demokrasi Sepanjang*...., hal. 20.

kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat; *Ketiga*. Dasar Negara adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[415]

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dasar negara (poin ketiga) ini yang kemudian dalam Memorandum DPRGR 9 Juni 1966 disahkan oleh MPRS dengan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada tanggal 5 Juli 1966. Tolchah juga menulis bahwa baru pada tanggal 5 Juli 1966 Pancasila mendapatkan nama resminya. Yaitu, berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX /MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966. Saat itulah Pancasila secara legal ditetapkan sebagi dasar negara.

Dalam Memorandum DPRGR angka I/3/A/C dinyatakan bahwa:

> *"Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara merupaka suatu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPRS hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD berwenang menetapkan dan merubah UUD, karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Dalam keadaan yang demikian tadi, maka pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya"*[416]

Karena memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966 telah diterima oleh MPRS sebagai sebuah ketetapan, maka ia berpendapat bahwa republik kita adalah negara Republik Pancasila. Dan karena dalam memorandum dikatakan bahwa merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar berati

[415] *Ibid.*

[416] *Ibid.,* hal. 22.

pembubaran negara, maka "pembubaran isi Pembukaan Undang-Undang Dasar" adalah "pembubaran Republik Pancasila".[417]

Sebagaimana pendapat para pendiri bangsa yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945, Tolchah berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar sementara. Ia mengutip pendapat para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menyusun konstitusi ini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar kilat, undang-undang dasar sementara. Pendapat ini sudah ia kemukakan dalam disertasinya. Ia menambahkan bahwa Soekarno sebagai ketua yang memimpin sidang PPKI itu sendiri juga mengatakan demikian.[418] Menurut Tolchah, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sangat dimungkinkan karena peluang itu diatur dalam Pasal 37 undang-undang dasar tersebut, sekalipun cara yang diberikan olehnya cukup sulit. Pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang dasar tidak bisa dirubah sebenarnya bukan termasuk masalah hukum, melainkan masalah politik. Bahkan ia berpendapat bahwa tidak menyetujui diperbolehkannya perubahan undang-undang dasar adalah bertentangan dengan undang-undang dasar itu sendiri, dan termasuk dalam kategori tidak melaksanakan undang-undang dasar secara murni.[419]

Lebih lanjut ia menulis:

---

[417] Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 menyatakan menerima isi Memorandum DPRGR tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. TAP MPR ini telah dicabut oleh TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 juga sudah tidak berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan TAP MPR sudah tidak lagi menjadi sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan.

[418] Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH, *Pembahasan Beberapa Aspek.....,* hal. 9- 10.

[419] *Ibid.*

"Argumentasinya yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang-dasar yang bersifat sementara, ini tidak hanya karena Bung Karno sebagai pemimpin sidang pada waktu itu mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar sementara dan kilat, tapi hal tersebut juga nampak dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang dasar beserta aturan peralihannya. Undang-undang dasar bersifat sementara bukanlah penafsiran atau pendapat yang bersifat politis, melainkan pendapat yuridis sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar tersebut."[420]

Dalam disertasinya ini ia juga mengulas tentang Piagam Jakarta. Ia kembali menegaskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Piagam Jakarta dengan perubahan alenia kedua sesudah perkataan "ke depan pintu gerbang" ditambah dengan kata "kemerdekaan" sehingga menjadi "ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia" dan alenia keempat setelah kata "Ketuhanan" ditambah dengan kata "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan membuang tujuh kata dari Piagam Jakarta yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[421]

Meskipun dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1945 Piagam Jakarta tidak masuk dalam diktum dan hanya masuk dalam konsideran sehingga hanya mempunyai nilai historis semata, namun Tolchah menilai bahwa ia mempunyai pencerminan di dalam pasal-pasal tentang ketuhanan dan keagamaan dalam undang-undang dasar. Di sisi lain, kalau kita mau memperbandingkan bagaimana kekuatan konsideran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka semangatnya sama dengan bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar

[420] *Ibid.,* hal. 108.

[421] *Ibid.,* hal. 73. Lihat juga Dr. Tolchah Mansoer, *Peranan Umat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,* (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga), 1971, hal 37.

1945 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuatan yang tidak bisa dipisahkan.[422]

Tolchah sependapat dengan Prof. Dr. Ismail Sunny, SH MCL yang mengatakan pengakuan Piagam Jakarta sebagai ”menjiwai” dan ”merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945” adalah keyakinan Presiden dalam kapasitas sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan sebagai pribadi. Bahwa Piagam Jakarta menjiwai undang-undang dasar sehingga dalam undang-undang dasar itu nanti ada hal-hal sebagai pencerminan dari Piagam Jakarta.[423]

F. Umat Islam dan Pancasila

Tingkat perhatian yang tinggi akan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, membesarkan niat Tolchah untuk menularkan pemahamannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada umat Islam Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pakar Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum UGM ini untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang beberapa hal yang kurang di mengerti tentang negara ini dalam perspektif ketatanegaraan. Salah satu “sosialisasi” yang ia lakukan untuk menjelaskan masalah ketatanegaraan Indonesia kepada umat Islam ialah dengan menulis buku *Peranan Umat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*[424]

Tolchah mengawali tulisannya dengan mengutip penjelasan tentang lima Dasar Negara yang di kemukakan oleh Mr. Muh Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yaitu, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan (peradaban luhur, bertuhan, dasar negara yang berasal dari peradaban agama), peri kerakyatan (permusyawaratan), dan kesejahteraan rakyat (keadilan sosial). Dikutip oleh Tolchah

---

[422] *Ibid.,* hal. 74.

[423] *Ibid*

[424] Buku ini merupakan naskah ceramah Tolchah dalam Musyawarah 'Alim 'Ulama NU seluruh Indonesia di Tebuireng, Jombang tanggal 15-18 April 1971.

bahwa khusus untuk peri yang ketiga, Muh. Yamin memberikan penjelasan tambahan bahwa bangsa Indonesia yang akan merdeka itu ialah bangsa yang beradab luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan sendirinya kita menyadari bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan yang akan melindungi negara Indonesia merdeka.[425]

Berkaitan dengan peri ketuhanan, Tolchah menjelaskan kronologis sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dari lahirnya Pancasila. Dalam hal ini ia mengutip pidato Muh. Yamin dalam rapat PBUPKI untuk menguatkan argumentasinya yang mengatakan bahwa:

> *"Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dengan Tuhannya sendiri-sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk nabi Muhammad Saw, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yaitu dengan tiada "egoisme" agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.[426]*
>
> *Marilah kita amalkan, kita jalankan agama baik Islam maupun Kristen, Katholik, Hindu, Budha dengan cara yang berkeadaban. Yaitu, hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w telah memberi cukup bukti tentang verdraagzaamheid, tentang bagaimana menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini menyatakan bahwa*

[425] Dr. Tolchah Mansoer, *Peranan Umat Islam....* hal. 8.

[426] Tolchah mengutip pernyataan Moh Yamin dalam bukunya yang berjudul *Naskah Persiapan UUD 1945"* Jilid I, hal. 77-78.

prinsip negara kita ialah "ketuhanan yang berkebudayaan" , ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat mengormati satu sama lain. Hatiku akan "berpesta raja" jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[427]

Adapun terkait dengan peri kerakyatan yang dikemukakan oleh Muh Yamin, Tolchah mengatakan bahwa inti dari peri itu ialah permusyawaratan. Dalam pandangan Tolchah permusyawaratan adalah suatu hal yang sudah lazim dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat As Syura Ayat 38 yang mengatakan bahwa segala urusan mereka dimusyawarahkan. Perintah ini menurutnya jelas dan terang. Ditambahkan Tolchah bahwa dalam sejarah Rasulullah Saw dan para khalifah yang empat (*Khulafaur Rasyidun*) permusyawaratan bersama juga dilaksanakan. Dalam pelaksanaan dasar itu, umat Islam atau wakilnya dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan atau pelaksanaan Negara. Ia menambahkan bahwa musyawarah adalah kekuatan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena musyawarah membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan membesarkan tanggung jawab warga negara dan menimbulkan kewajiban yang mengikat hati.[428]

Dalam buku tersebut Tolchah juga mengutip isi Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966 yang ditandatangani oleh ketua DPRGR H.A. Sjaichu.[429] Memorandum tersebut menjelaskan tentang lahirnya Pancasila sekaligus dengan Piagam Jakarta dalam angka 1/3/A/B sebagai berikut: "Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno

[427] Ini adalah pendapat Prof. Mr. Muh. Yamin yang dikutip oleh Tolchah Mansoer.

[428] *Ibid.,* hal. 9.

[429] Memo ini kemudian menjadi TAP MPR NO XDX MPRS/1966.

pada 1 Juni 1945 yang kini terkenal sebagai 'Pidato lahirnya Pancasila'."

Hal lain yang ia tulis dalam buku tersebut adalah tentang undang-undang dasar dan hubungannya dengan Piagam Jakarta. Ia berpendapat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Piagam Jakarta. Pendirian ini menurutnya mempunyai arti yuridis dan historis. "Apakah karena kurang tujuh kata dan adanya perubahan redaksi yang tidak merubah makna lalu bukan dianggap Piagam Jakarta? Tidak! Ia tetap Piagam Jakarta meskipun tujuh kata yang dihapus itu bagi umat Islam merupakan inti, bahkan jiwa dari seluruh ajaran dan keyakinan Islam".[430]Lebih lanjut ia menambahkan, "apabila kita tidak mengakui sebagai Piagam Jakarta, akan berarti menghilangkan peran sejarah wakil-wakil umat Islam baik dalam Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan berarti pula kita tidak mengakui peranan umat Islam dalam menyusun negara Republik Indonesia, khususnya tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945.[431]

Subtansi Piagam Jakarta juga tercermin dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Menurut Tolchah, pasal ini merupakan jaminan bagi penduduk untuk beragama menurut keyakinannya, yang berarti Islam harus dijamin keislamannya oleh negara, begitu pula yang Kristen, Katholik, Budha dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa terkait dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang menyangkut kepercayaan dan syari'at agama, negara harus mengizinkan, bahkan menjaminnya tanpa kelompok lain boleh ikut mencampurinya. Ia memberikan contoh hukum perkawinan bagi umat Islam,

[430] Tolchah Mansoer, *Peranan Umat Islam.....*, hal. 37.

[431] *Ibid.*

maka berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 harus diatur.[432] Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini muncul tiga tahun setelah Tolchah menulis pendapatnya ini.

Diakhir tulisannya Tolchah menyimpulkan bahwa dengan UUD 1945 yang meliputi pembukaan dan batang tubuhnya, sudah cukup bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan segala cita-cita dan aspirasinya. Meskipun ini dengan syarat semua pihak berlaku jujur dan bertanggung jawab.[433] Kesimpulan ini menandakan bahwa Tolchah adalah sosok negarawan yang memahami betul Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia tidak hanya seorang pakar Hukum Tata Negara yang mengerti hukum, tapi ia juga intelektual muslim, kiai dengan banyak pengikut yang memiliki nasionalisme tinggi. Sosok seperti Tolchah adalah pribadi langka di Indonesia. Dan ia adalah kader IPNU.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka tidak mengherankan apabila Tolchah merupakan salah satu tokoh terdepan bersama para kiai seperti Kiai Achmad Siddik menerima Pancasila sebagai asas *Jam'iyyah* NU pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983. Penerimaan tersebut tidak semata karena ada permintaan dari pemerintah agar setiap organisasi masyarakat maupun organisasi sosial politik menggunakan asas Pancasila dalam AD/ARTnya, karena saat

---

[432] *Ibid.*, hal. 39. (Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 Indonesia memiliki Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Terhadap hal-hal yang bersifat Khusus tentang perkawinan yang berlaku bagi umat Islam, diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

[433] *Ibid.*, hal. 44. Diakhir tulisan Tolchah juga mengutip pendapat Imam Abu Hasan Al-Mawardy tentang konsep "kedaulatan rakyat" dalam kitabnya *Adabu ad-Dunya wa ad-Dien* halaman 259, (Shahih Bukhori Juz 8, Bab Ar-Raqaiq halaman 127), (Sunan Abu Dawud, Jilid II, halaman 426), (*Ihya' Ulumuddien*, Juz XVI *Al-qur'an* Surat *Al-anbiya'* ayat 11, Surat *Al-Anfal* ayat 25, dan surat *Al-Baqarah* ayat 256), *Kitaabul Imlaa'ah,* halaman 3036).

itu belum ada undang-undang yang mengharuskan. Penerimaan itu melalui proses musyawarah mufakat dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Para ulama menerima Pancasila karena di dalamnya terdapat tauhid.

G. Islam dan Hak Asasi Manusia

Di zaman orde baru jarang sekali buku yang menulis tentang hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia mulai banyak didiskusikan dalam berbagai forum menjelang akhir tahun 1990-an. Satu di antara buku yang menulis tentang HAM adalah buku *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak Asasi Manusia, dan Islam,* karya Tolchah Mansoer. Ia menulis buku ini tahun 1979 di saat bangsa Indonesia saat itu masih tabu membicarakannya.

Selama ini apabila kita berbicara tentang hak-asasi manusia (HAM), maka orientasi kita selalu tertuju kepada negara-negara Barat, bahkan kepada sejarah negara-negara Barat yang dimulai dari zaman Yunani Kuno, zaman Imperium Romawi, dan hampir tidak pernah terdengar bagaimana hak asasi manusia dalam sejarah dunia Timur. Bahkan bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Demak, dan kerajaan-kerajaan lain di tanah air, tidak kita telusuri. Padahal kita mendengar rakyat di zaman kerajaan-kerajaan yang silam di tanah air kita, hidup dengan aman, tentram, dan sejahtera. Bukankah itu menunjukkan sudah terlaksananya hak-hak asasi manusia, setidak-tidaknya sebagian besarnya. Hal ini yang menjadi kritik awal Tolchah dalam bukunya. [434]

Hak Asasi Manusia yang lahir di abad modern dan disahkan oleh oleh dunia pada tanggal 10 Desember 1948 dengan nama *Universal Declaration of Human Right* berisi pernyataan umum hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal tentang berbagai hak-hak asasi, sebagai suatu standar umum pencapaian bagi semua rakyat dan bangsa-bangsa dengan tujuan agar setiap individu dan masyarakat yang

[434] Dr. Moh. Tolchah Mansoer, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hal Asasi Manusia dan Islam,* (Bandung: Alumni), 1979, hal. 71.

mengingat deklarasi ini berusaha dengan jalan pengajaran dan pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan yang dimilikinya, dan dengan tindakan-tindakan yang progresif, baik nasional maupun internasional.

Dalam buku tersebut Tolchah menulis tentang HAM dari sudut pandang Islam. Ia menulis bahwa Islam yang lahir di abad keenam, di tengah gejolak bangsa-bangsa yang waktu itu masih memperbincangkan martabat manusia, di tengah tengah-tengah kekuasan yang absolut dan diktator, telah memperkenalkan hak asasi manusia melalui Nabi Muhammad dengan Al-qur'an dan sunahnya.[435] Argumentasi yang ia kemukakan bukan tanpa dasar. Ia mengutip dan menginventarisasi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang memiliki arti atau subtansi yang sama dengan yang ditulis dalam deklarasi *Universal Declaration of Human Right.*

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang ia kutip antara lain; *Pertama*. Surat Al-Baqarah Ayat 34: "Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat: bersujudlah engkau sekalian kepada Adam! Semuanya bersujud, kecuali Iblis. Ia membangkang dan menyombongkan diri, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang kafir". Ayat ini menunjukkan pemulyaan oleh Allah SWT akan kedudukan manusia, bahkan di depan para malaikat sekalipun.[436]*Kedua*. Surat Al Isra' ayat 70: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, dan kami beri pula mereka rizki yang baik-baik, dan juga mereka kami utamakan dengan suatu kelebihan atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan". Kedua ayat ini mengandung hak yang termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan dan Pasal 3 Piagam Hak Asasi Manusia yang diakui oleh PBB. Hak tersebut adalah hak manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahluk yang paling mulia.[437]

Kebebasan berfikir, menuntut ilmu, dan bertindak sebagaimana diataur dalam Pasal 26 Deklarasi HAM, ia

[435] *Ibid.,* hal 115.

[436] *Ibid.,* hal. 116.

[437] *Ibid.*

mengemukakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain; *Pertama*. Surat Az-Zumar ayat 9: "katakanlah Muhammad, samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak tahu? Yang ingat kepada Allah hanyalah mereka yang cerdik pandai saja". *Kedua*. Surat Toha ayat 114: "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan tambahkanlah kepadaku ilmu". *Ketiga*. Surat At-Taubah ayat 122: "Tidak seyogyanya bagi orang-orang yang beriman seluruhnya pergi ke medan perang. Mengapa dari tiap golongan tidak saja ada sebagian dari mereka yang pergi menuntut pengetahuan agama untuk kelak memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar kelak mereka dapat kembali menjaga diri mereka". *Keempat.* Surat Ali Imron ayat 191-192: "Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, dan perbedaan malam dan siang, adalah merupakan pertanda bagi orang-orang yang cerdik pandai. Yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, yang selalu memikirkan kejadian langit dan bumi, kemudian mereka berkata: ya Tuhan kami, seluruh yang engkau ciptakan ini tidaklah sia-sia, maha suci Engkau ya Tuhan, jauhkanlah kami dari api neraka" Ayat-ayat ini menganjurkan seseorang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan kebebasan untuk memilih disiplin ilmu. Dalam pandangan Tolchah, substasi ayat tersebut sama dengan apa yang dalam pasal 26 Deklarasi HAM.[438]

Berkaitan dengan persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan martabat manusia yang luhur, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Deklarasi HAM, Tolchah mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang antara lain; *Pertama*. Surat Al-Hujurat Ayat 13: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau sekalian kami ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan engkau semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidaklah lain agar tejadi saling kenal mengenal. Sesungguhnya diantara kamu semua yang paling

[438] *Ibid.,* hal. 17.

mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa kepadanya. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha mengenal". *Kedua.* Surat Al-Maidah ayat 8: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah, sebab keadilan lebih dekat kepada ketaqwaan. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Tahu atas apa yang engkau sekalian kerjakan." *Ketiga.* Surat An-Nisa' ayat 58 dan 135: "Apabila engkau sekalian mengadili manusia, hendaklah engkau melakukannya dengan adil". Dan: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah, walaupun atas dirimu sendiri, atau atas kedua orang tuamu, dan kaum kerabatmu, apabila ia (tergugat) kaya atau miskin, Allah lebih tahu tentang kemaslahatannya. Janganlah engkau sekalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Bila engkau sekalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang engkau sekalian kerjakan".[439]

Keempat. Hadits riwayat Abu Dawud dan An Nasa'i: "Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa lantaran apabila ada golongan elitnya yang mencuri, mereka biarkan saja, tetapi bila orang orang jelata dan orang-orang lemah yang mencuri mereka tegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya". Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mengakui persamaan di depan hukum, tidak berlaku dispensasi hukuman, dan tidak ada hak-hak *privillage,* sekalipun ia seorang tokoh.

Kelima. Yurisprudensi yang dilakukan oleh sahabat Umar dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang menulis: "Perlakukanlah sama antara manusia itu dalam majlismu dan di hadapanmu serta di dalam Mahkamah Pengadilanmu, sehingga orang yang elit tidak akan terlampau

[439] *Ibid.,* hal. 125.

mengharap ketika engkau teledor, dan orang-orang jelata tidak berputus harap dari keadilanmu". Keterangan ini Tolchah kutip dari kitab *A'laamul Muwaqqilin*, Juz I, halaman 72, karangan Ibnul Qoiyim Al-Jauziah.

Mengenai pengapusan perbudakan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 dan dan 4 Deklarasi HAM, Tolchah mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain; *Pertama.* Surat Al-Balad Ayat 11-13 Allah berfirman: "Tetapi ia tidak menempuh jalan yang sulit lagi sukar. Tahukah engkau apa jalan yang sulit lagi sukar itu? yaitu memerdekakan budak". Ayat ini sebagai jawaban ketika Allah berkata dalam surat yang sama Ayat 4: "Sesungguhnya telah kami jadikan manusia di dalam kesulitan dan tantangan". Menurut Tolchah, subtansi ayat di atas sama dengan bunyi Pasal 1 dan Pasal 4 Deklarasi HAM.[440] *Kedua, Atsar* Khalifah Umar bin Khattab ketika suatu ketika, anak Amru bin 'Aas (Gubernur Mesir zaman Khalifah Umar bin Khattab) memukul seorang Qibti karena ia mendahuluinya. Lalu ia melaporkan peristiwa tersebut kepada Umar. Umar pun memanggil Amru bin 'Aas dan anaknya. Setelah semuanya datang –termasuk orang Qibti-, bertanyalah Umar kepada orang Qibti tersebut: "Inikah yang memukulmu?" dijawab: "ya". Umar berkata: "Pukullah dia". Akhirnya orang Qibti tersebut memukulnya sampai ia minta supaya dihentikan. Kemudian Umar berkata kepada orang Qibti tersebut, "Tambahilah wahai anak orang-orang mulia!". Dan Umar pun berpaling kepada Amru bin 'Aas seraya berkata: "Sejak kapan wahai Amru bin 'Aas engkau memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka telah melahirkannya bebas merdeka?". Atsar ini dikutip oleh Tolchah dari kitab *At-Tasyri' Al-Islami, Khawasuhu wa Marokhiluhu* oleh Abu Zahrah.[441]

Dari dari dalil-dalil di atas, Tolchah berpemikiran bahwa Islam tidak membenarkan adanya perbudakan. Sebab manusia dilahirkan merdeka. Karena itu perbudakan-perbudakan yang dulunya ada, selalu oleh Islam dicari jalan untuk

[440] *Ibid.*

[441] *Ibid.,* hal. 121-122.

membebaskannya. Baik berupa tebusan, fidyah dan lain sebagainya.[442]

Kebebasan berpendapat, bermusyawarah, dan mengemukakan pikiran dalam pandangan Tolchah juga tercakup dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini ia mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat berikut ini; *Pertama*. Surat Al-Ashri, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, berbuat kebajikan, dan pesan memesan tentang kebenaran dan kesabaran". *Kedua*. Surat Ali Imran Ayat 104: "Adakanlah padamu sekalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kebajikan, dan mencegah kemugkaran". Ayat-ayat tersebut memiliki persamaan dalam Deklarasi HAM Pasal 14 Ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 30.[443]

Masalah kebebasan beragama dan hak setiap warga dalam pemerintahan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 Deklarasi HAM, ia mengutip beberapa dasar dari Al-Qur'an dan Hadist. *Pertama*. Surat Al-Baqarah Ayat 256: "Tidak ada paksaan di dalam agama". *Kedua*, Surat An-Nahl ayat 125: "Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik, dan ajaklah mereka berdiskusi dengan jalan yang lebih baik". *Ketiga.* Hadits Nabi Muhammad Saw yang mengatakan: "Siapa memusuhi orang Dzimmi (orang yang tidak beragama Islam dan bernaung dibawah pemerintahan Islam) berarti akulah lawannya. Dan siapa yang aku menjadi lawannya, kelak di hari kiamat akulah lawannya".[444] *Keempat*. *Atsar* Imam Ali bin abi Thalib, Khalifah yang keempat pernah mengatakan: "Mereka membayar jizyah (pajak) adalah agar harta mereka seperti harta kita, dan darah mereka seperti darah kita". Ketika masalah *jizyah* dikemukakan, banyak orang yang salah paham seolah-olah begitu berat dan diskriminatif perlakuan atas orang-orang yang bukan Islam. "Pemungutan *jizyah* tentu berdasarkan

[442] *Ibid.,* hal. 123.

[443] *Ibid.,* hal. 126.

[444] *Ibid.*

kemampuan mereka. Selain itu mereka tidak dikenakan zakat, sedangkan bagi umat Islam dikenakan wajib zakat, disamping pungutan-pungutan lain apabila pemerintah memandangnya perlu". Begitu Tolchah menjelaskan.[445]

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kemudian, dalam mengajak orang untuk menganut agama Islam tidak melalui pemaksaaan tapi dengan hikmah dan nasehat yang baik. Selain itu beban yang tanggung warga negara juga berimbang bahkan umat Islam lebih banyak menanggung beban daripada beban mereka yang bukan Islam, sedangkan hak mereka untuk terpelihara segala-galanya sama seperti yang berlaku bagi umat Islam.[446] Ini adalah bentuk perlindungan bagi orang yang beragama selain Islam, yang berarti kebebasan bagi pemeluk agama lain.

Hal lain yang juga menjadi pembahasan dalam HAM adalah masalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi HAM tentang perkawinan dan jaminan rumah tangga. Sebenarnya persoalan perkawinan banyak kita dapatkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan Islam tidak pernah menseyogyakan umatnya hidup tanpa isteri yang berarti juga tidak membenarkan seorang wanita hidup tidak mempunyai suami, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Attabattul.* Dalam hal ini Tolchah mencontohkan firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21: "Dan di antara kebesarannya, Allah menciptakan pasangan bagi kamu dari kalangan kamu, agar engkau sekalian tinggal bersama isterimu, dan Allah pun menjadikan dalam perkawinan itu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal tersebut menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir".[447]

Hak lain yang juga ia tulis adalah hak untuk menempati rumah kediaman dan tempat tinggal. Tolchah mengutip firman Allah dalam surat *An-Nur* Ayat 27-28: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah-rumah yang

[445] *Ibid.*

[446] *Ibid.*

[447] *Ibid.*

bukan rumahmu sampai engkau meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, itulah yang lebih baik bagi kamu sekalian, semoga engkau sekalian selalu ingat. Dan apabila engkau tidak mendapati penghuninya seorangpun, janganlah engkau masuk ke dalam rumah itu sampai engkau sekalian diizinkan, dan apabila dikatakan kepadamu kembalilah, hendaklah engkau sekalian kembali. Itulah yang lebih bersih bagi kamu sekalian, dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang engkau sekalian kerjakan". Ayat ini tentu subtansinya ada dalam Pasal 12 dan Pasal 25 yang diantaranya membahas tentang perumahan.[448]

Kemudian, tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 Deklarasi HAM, Tolchah kembali mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:[449] *Pertama.* Surat Al-Mulk Ayat 15: "Allah yang menjadikan bumi mudah bagimu, berjalanlah engkau sekalian di seluruh penjurunya, dan makanlah dari rizki Allah, dan kepadanyalah kamu sekalian kelak dibangkitkan kembali." *Kedua*. surat Al-Mu'minun Ayat 51: "Wahai para utusan, makanlah dari yang baik-baik, dan bekerjalah yang baik-baik", *Ketiga*. Surat Hud Ayat 61: "Allah telah menjadikan engkau sekaian dari tanah, dan menjadikan engkau sekalian yang memakmurkan di bumi itu". *Keempat*. Surat Al-A'raf Ayat 32: "katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah ia keluarkan untuk hambanya, dan siapa pula yang telah mengharamkan rizki-rizki yang baik?". *Kelima*. Surat Al-Baqarah Ayat 168: "Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi yang halal dan yang baik, dan janganlah engkau sekalian mengikuti jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata".

Ditambahkan oleh Tolchah bahwa Islam juga menjamin adanya hak milik. Pencurian atas hak milik dan juga harta benda dalam Islam akan diberikan sanksi sebagaimana firman Allah

[448] *Ibid.,* hal. 130.

[449] *Ibid.,* hal. 132.

dalam Surat Al-Maidah Ayat 38: ”Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya”. Tentu saja ada batasan mencuri yang bagaimana yang dipotong tangannya itu.[450] Selain itu, masih banyak hak lain yang dimiliki oleh manusia seperti ikut di dalam pemerintahan juga diatur dalam Al-Qur’an. Hal ini menurutnya tersirat dalam firman Allah Surat Al-Ashr dan Surat Asy-Syura Ayat 38: ”Mereka selalu bermusyawarah”, juga Surat Ali Imran Ayat 159: ”Ajaklah Muhammad mereka bermusyawarah di dalam urusan”.[451]

Namun yang utama dan terutama dari berbagai hak asasi manusia di atas menurut Tolchah adalah firman Allah dalam Surat Al-Qasshas Ayat 77: ”Dan berbuat baiklah engkau sebagimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat bencana di muka bumi”. Karena itu, menjalankan hak-hak asasi manusia tidak berarti membuat kerusakan dan anarkhi.[452]

Hak-hak asasi manusia dikemukakan sedemikian panjang dalam Al-Qur’an tidak lain adalah untuk mengemukakan keagungan dan ketinggian martabat manusia. Namun ini tidak berarti kepentingan orang banyak harus dikorbankan. Sepenuh-penuhnya hak asasi manusia dipenuhi akan terjadi pergolakan, dan kadangkala terjadi benturan dengan kepentingan orang banyak. Namun mementingkan kepentingan orang banyak yang telalu banyak, berarti membuat sempit ruang gerak kepentingan individu. Itulah sebabnya, di dalam masyarakat Indonesia dikenal suatu sistem yang dinamakan gotong royong, yang tidak lain mengandung pengertian saling pengertian antar sesama.

H. Kesejahteraan Sosial

Sebagai seorang intelektual, Tolchah juga memperhatikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Gagasan-gagasannya biasa ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang dimuat

[450] *Ibid.,* hal. 133.

[451] *Ibid.,* hal. 134.

[452] *Ibid.*

di surat kabar saat itu. Salah satu yang menjadi *concern* pemikirannya ialah masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diterima sebagai nasib sebagaimana dipahami oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Dalam sebuah tulisannya "*Syuhada Engkau Tidak Mati*" yang dimuat di GEMA No. 3 Tahun 1975 Tolchah mengatakan bahwa adalah sebuah kemustahilan jika seseorang ingin menjadi kiai tanpa belajar agama. Dengan kata lain, menurutnya, semua hal yang diinginkan oleh seseorang, termasuk kesejahteraan, tentulah membutuhkan perjuangan dan ikhtiar.[453]Kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan ini secara tepat dan menyeluruh. Perlu diketahui bahwa pada masa itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program transmigrasi. Menyikapi hal ini, ia berpendapat bahwa program transmigrasi hendaknya tidak hanya berorientasi pada upaya pemindahan penduduk saja, tetapi lebih ditekankan pada upaya pemecahan permasalahan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat kecil khususnya di bidang ekonomi. Hal ini penting sekali karena jika kemiskinan tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan gejolak revolusi.[454]

Kesejahteraan sosial juga tidak akan tercapai tanpa didukung oleh suatu lingkungan yang sehat. Lingkungan sosial yang buruk tidak hanya akan meyebabkan kerusakan alam, tetapi juga mengganggu kualitas hidup masyarakat. Kerena itu dalam pandangan Tolchah, pembangunan lingkungan juga tidak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan ekonomi. "Tak pelak lagi, pembangunan lingkungan yang sehat, serasi, dan seimbang baik lahir maupun batin harus

[453] Mastuqi HS, M. Ag, M. Ishom El-Saha, M. Ag, *Intelektualisme Pesantren…..,* hal. 109.

[454] *Ibid.*

diciptakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat",[455] demikian ia menulis.

I. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari prinsip perjuangan yang ditempuh oleh Tolchah. Ia mengimplementasikan prinsip dakwah itu dengan berbagai bentuk dan cara. Salah satu cara *amar ma'ruf nahi munkar* yang ia lakukan adalah dengan menulis. Dalam pandangan Tolchah ada empat sarana yang bisa menunjang penyampaian dakwah Islamiyah.[456] *Pertama,* pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini tidak diragukan lagi kemampuan dan pengorbanannya. Ia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Sebagai bukti nyata akan kepedulian tersebut, terutama pendidikan Islam, adalah kegigihannya untuk mendirikan pondok pesantren Assunni Darussalam di Sleman, Yogyakarta.

Kedua, organisasi. Sebagai aktivis organisasi, Tolchah mendudukkan organisasi disamping merupakan sarana yang paling efektif untuk berdakwah, juga sebagai wahana pembinaan kader menuju insan yang sempurna. Yaitu kader yang tidak hanya tertarik terhadap hal-hal yang bersifat duniawi semata, tetapi juga selalu memperhatikan sisi ukhrawi. Ia juga menghimbau kepada setiap pimpinan organisasi agar mendirikan sarana pendidikan dan sarana sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. Sarana seperti itu, menurutnya bisa mempermudah jangkauan dan efektifitas dalam dakwah.

Ketiga, menulis. Di samping dua jalur sebagaimana disebut di atas, Tolchah juga memanfaatkan media tulis sebagai sarana dakwah kepada masyarakat. Dakwah lewat tulisan lebih efektif dan bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Karya tulisnya di samping berupa buku, juga artikel yang dimuat di beberapa media cetak, baik majalah maupun koran harian.

Keempat, lisan. Sebagian besar waktu Tolchah digunakan untuk *beramar ma'ruf nahi munkar*, termasuk

---

[455] *Ibid.*

[456] Saifullah Ma'sum (ed), *Menapak Jejak*..... hal. 108.

melaui lisan. Tolchah dikenal sebagai da'i segala lapisan. Ia memenuhi undangan masyarakat dari manapun mereka berasal. Bahkan ia tidak segan segan menggenjot sepeda *ontel* naik turun gunung. Dalam berdakwah, ia selalu menggunakan gaya bahasa yang sederhana, bahasa yang gampang diterima oleh siapa saja yang mendengarkannya.

Tolchah menggunakan keempat sarana dakwah yang ia kemukakan itu dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dari keempat sarana dakwah di atas, yang paling banyak bisa kita lacak pemikiran pemikirannya adalah melalui tulisan. Tulisan-tulisannya seputar persoalan dakwah saat itu sering dimuat di surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, sebuah harian terbesar di Yogyakarta. Selain menulis di surat kabar, ia juga biasa mengisi kegiatan seminar atau forum diskusi. Salah satu makalahnya berkaitan dengan persoalan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah makalahnya *"Pola Dakwah Dekade 80-an"*. Makalah ini ia sampaikan pada Pertemuan Ilmiah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1980.

Mengenai strategi dakwah, Tolchah berpendapat bahwa keberhasilan dakwah sangat terkait dengan sejauhmana seseorang dapat memanfaatkan sarana kultural yang terdapat dalam suatu masyarakat. Pendapat ini merupakan hasil refleksi dari keberhasilan "Walisongo" dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ketajaman analisis terhadap situasi masyarakat Jawa dengan segala perwatakan Budhanya yang telah mendarah daging itu berpadu dengan intelektualitas para wali yang brilian sehingga membuahkan suatu ilham bagaimana Islam menjadi efektif disebarluaskan dalam masyarakat. Ia mencontohkan, Sunan Kalijaga dalam dakwahnya menggunakan gamelan sebagai alat untuk mengundang masyarakat agar secara berbondong-bondong dapat mengikuti dakwah yang dilakukannya, karena saat itu gamelan merupakan salah-satu alat yang paling digemari oleh masyarakat Jawa, sehingga media tersebut dianggap sangat efektif dalam misi menyebarkan ajaran Islam.[457]

[457] *Ibid.,* hal. 110.

Di samping menggunakan budaya yang terdapat dalam masyarakat, fasilitas lain yang ia anggap penting dalam berdakwah adalah masjid dan media masa. Masjid bisa dipergunakan untuk mengkaji buku-buku keislaman secara terorganisir dan rapi, juga dapat dipergunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah sosial keagamaan. Sementara media masa sebagai sarana dakwah yang sangat strategis karena media masa memiliki jangkauan yang sangat luas dan lebih lama jangka waktu berlakunya. bahkan generasi yang akan datang dapat mengambil manfaat dari materi dakwah tersebut.[458]

Poin penting dari tulisan singkat Tolchah dalam makalah ini ialah bahwa kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini karena hakikat tujuan dakwah itu sendiri adalah menciptakan kesejahteraan sosial lahir dan batin.[459]

J. Islam dan Kesehatan

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang di kutip oleh Tolchah dalam tulisannya *Islam dan Kesehatan*.[460] Sosok kiai yang satu ini memiliki ulasan tersendiri tentang kesehatan dalam pespektif Islam. Pokok-pokok pemikiran mengenai hal ini dapat kita temukan dalam tulisannya yang dimuat oleh Majalah Bangkit tahun 1985 itu. Pemahamannya tentang keislaman menjadikan ia bisa menjawab berbagai persoalan kontemporer yang mengemuka di masyarakat saat itu, termasuk persoalan kesehatan dalam perspektif Islam.

Islam merupakan agama yang mengatur persoalan lahir dan batin manusia, baik langsung maupun tidak lansung, termasuk masalah kesehatan manusia. Banyak amalan-amalan ibadah atau yang kelihatannya ibadah, pada hakikatnya mempunyai arti besar bagi pembinaan kesehatan manusia. Berwudlu, mandi, berkumur, khitan, memakan makanan yang

---

[458] *Ibid.*

[459] *Ibid.*

[460] Tulisan Tolchah Mansoer dalam Majalah Bangkit No.53/TH.VI. 1985.

halal dan bersih, menjauhi minuman yang memabukkan, larangan berhubungan seksual dengan isteri yang dalam keadaan haid (menstruasi), anjuran menyembelih binatang qurban dengan tertib dan baik, bahkan juga puasa di bulan Ramadhan (wajib) dan puasa sunah di hari-hari yang lainnya. Ini semua merupakan pendidikan dan pengantar tindakan untuk menjadi manusia yang sehat dan agar hidup bertanggung jawab.

Berwudlu misalnya, mengapa berwudlu dengan air? ini tidak lain mengandung juga ajaran tentang kebersihan.[461] Disunahkan pula sebelum berwudlu untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Bahkan orang yang shalat tapi dalam dirinya masih ada najis yang menempel, maka shalatnya itu tidak sah. Tempat untuk sholat juga supaya bersih. Demikian juga pakaian yang kita gunakan untuk shalat juga harus bersih dari najis. Dalam Islam juga ada kewajiban untuk mandi.[462] Dari beberapa contoh aktifitas di atas, Tolchah menyimpulkan bahwa semua amalan-amalan itu menyerukan dan menganjurkan akan kebersihan. Kebersihan ini yang dengan sendirinya membawa kepada adanya kesehatan. Di samping itu, masih ada nilai yang lain yang utama, yaitu beribadah kepada Allah SWT.[463]

Diulas cukup luas oleh Tolchah dalam tulisan itu mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan manusia yang bersifat ibadah *mahdhah* yang di dalamnya memuat nilai-nilai kebersihan yang bermuara pada kesehatan. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa:[464]

> *"Kewajiban shalat dilakukan dengan berdiri mensyaratkan kita harus kuat dan sehat. Baru apabila sakit kita boleh melakukannya dengan tidak berdiri. Kewajiban haji juga juga diperuntukkan bagi orang sehat dan mampu, artinya mampu secara badani dan mampu pula dari segi*

[461] Tolchah Mansoer, *Islam dan Kesehatan*, Majalah Bangkit No.53/TH.VI. 1985, hal. 7.

[462] *Ibid.*

[463] *Ibid.*, hal. 8.

[464] *Ibid.*

harta, kendaraan, dan lain sebagainya. Bagi yang sakit, yang tidak mampu, kewajiban itu tidak ada. Ini berarti orang yang akan menunaikan ibadah haji harus sehat dan kuat melakukan segala kewajiban haji."

Dari argumentasi ini, Tolchah menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam memerintahkan kita untuk menjadi sehat dan kuat agar berbagai kewajiban fisik yang dibebankan oleh Allah kepada kita bisa dilaksanakan dengan sempurna. Kewajiban-kewajiban yang disebut adalah kewajiban yang bersifat ibadah. Selain itu ada kewajiban-kewajiban yang bersifat mu'amalah dan munakahah. Misalnya kewajiban mencari nafkah untuk memberi nafkah kepada anak isteri. Lebih dari itu Tolchah menambahkan bahwa Islam tidak hanya mengatur sikap fisik dan tindakan kita yang memiliki implikasi terhadap kesehatan. Islam juga mengatur hal-hal yang bersifat psikis yang akan berpengaruh kepada yang fisik. Berkali-kali Allah menyarankan agar kita jangan marah, selalu tersenyum kepada saudara-saudara kita, semuanya ini untuk tidak membuat beban dalam jiwa dan batin kita. Bahkan kita tidak boleh mempunyai prasangka buruk tentang Allah SWT, sehingga dengan demikian kita menghadapi dunia ini dengan penuh kegairahan dan kegembiraan. Sehingga batin kita sehat badan kita pun juga sehat.

Dalam tulisannya ini Tolchah banyak sekali mengutip ayat dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menekankan kepada kita akan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Beberapa ayat yang ia sebut antara lain: *Pertama*. Surat At-Taubah Ayat 108: "Dan Allah itu suka kepada orang-orang yang bersih". *Kedua*. Surat Al-Mudatsir Ayat 4: "Dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan". *Ketiga*. Surat Asy-Syu'ara Ayat 80: "Dan apabila aku sakit, Dialah (Allah) yang menyembuhkanku". *Keempat.* Hadits Nabi Muhammad Saw: "Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, menyukai kebaikan, bersih, menyukai kebersihan, Allah dermawan, menyukai kedermawanan, pemurah, menyukai kemurahan. Karena itu bersihkanlah pekaranganmu".(Dikutip Tolchah dari kitab Faidlul Qadir:II/239). *Kelima.* Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah: "Rasulullah Saw datang kepada kami, dia melihat seorang laki-

laki yang rambutnya kusut masai, tidak karu-karuan. Nabi berkata: apakah orang ini tidak mempunyai sesuatu untuk membereskan rambutnya?. Dan dia melihat lagi seorang yang lain bajunya kotor. Nabi berkata: apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk mencuci pakaiannya?". (Dikutip oleh Tolchah dari kitab Sunan Abu Dawud II/176).

Keenam. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Dari Usamah bin Syarik berkata: aku berada di sisi Nabi Saw dan kemudian datang beberapa orang badui, mereka berkata kepada Nabi: ya Rasullah, apakah kami harus berobat? Nabi berkata: ya, wahai hamba Allah berobatlah, sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan penyakit-penyakit, kecuali Ia pun menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit. Meraka bertanya: apa itu Nabi?. Nabi menjawab: "tua (pikun)". (Dikutip Tolchah dari kitab Zadul Ma'ad III/66). *Ketujuh*. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Dari Abu Darda' berkata: Rasulullah Saw berkata: sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obat, dan dibuatlah untuk tiap penyakit itu obatnya, berobatlah engkau, dan janganlah engkau berobat dengan yang haram". *Kedelapan*. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah: Nabi Saw berkata: janganlah engkau yang mempunyai sakit menular mendekati orang yang sehat".H.R. Bukhari. (Dikutip oleh Tolchah dari kitab Umdatul Qari XXI/288). *Kesembilan*. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i: "Dari Abdurrahman bin Auf berkata: apabila engkau sekalian mendengar di suatu negeri terjadi wabah *tha'un* (pes, epidemi, penyakit menular), janganlah engkau memasuki negeri itu. Dan apabila wabah tersebut menimpa suatu negeri, janganlah orang yang di negeri itu keluar dari situ melarikan diri dari padanya".(Dikutip Tolchah dari kitab Umdatul Qari XXI/259).

Selain mengutip ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan, tulisan Tolchah juga banyak mengutip ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan kepada kita agar kita menjadi pribadi, masyarakat dan bangsa yang kuat. Beberapa ayat yang ia kutip tersebut antara lain: *Pertama*. Surat Al-Qasshas Ayat 26 yang menceritakan sikap salah seorang putri Nabi Syu'aib yang menginginkan supaya

Nabi Musa diangkat sebagai pekerja bagi Nabi Syu'aib. Putri itu berkata: "Berkatalah salah seorang putri Nabi Sy'aib itu: wahai ayahanda, angkatlah ia sebagai pekerja, sebab sebaik-baik orang yang engkau akan angkat sebagai pekerja ialah orang yang kuat lagi terpercaya". *Kedua.* Surat Al-Baqarah Ayat 247 yang menceritakan umat pada waktu itu meminta kepada Syamwil (Samual) tentang seorang pemimpin negara: "Dan nabi mereka berkata kepada meraka: sesungguhnya Allah yang telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. Mereka berkata: bagaimana Thalut menjadi raja atas kami, padahal kamilah yang lebih berhak daripadanya untuk menjadi pemegang kendali pemerintahan, di samping itu ia juga tidak mempunyai harta yang cukup. Nabi tadi menjawab: sebab Allah telah memilihnya, dan Allah telah menambahkan kepadanya keluasaan ilmu dan jasmani yang perkasa. Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah itu Maha Luas, lagi Maha Mengetahui".[465]

Dari dua ayat yang dikutip oleh Tholchah ini, yang dapat disimpulkan adalah terpilihnya Nabi Musa sebagai pekerjanya Nabi Syu'aib karena ia memiliki kondisi badan yang kuat dan terpercaya, sedangkan Thalut diangkat sebagai raja karana ia diberi Allah ilmu dan badan yang sehat dengan harapkan agar dapat mengendalikan pemerintahan dan kekuasaan yang baik. Dengan demikian ia akan dapat berbuat untuk kemanfaatan kerajaan serta umat yang diperintahnya. Sehingga umat dan kerajaan itu merasakan kesejahteraan dan mendapatkan pimpinan serta tuntunan yang tepat.

Kondisi kita sekarang yang berada dalam era teknologi menuntut seluruh pemusatan perhatian agar dapat menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi tanah air dan bangsa kita, serta agama. Sebab, persoalan yang kita hadapi sekarang semakin *complicated*. Berbagai persoalan dan tantangan muncul silih berganti. Pembangunan demi pembagunan menuntut pelaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu agar tujuan kita sebagai bangsa dan sebagai umat

[465] *Ibid.,* hal. 10.

yang beragama bisa tercapai, Tolchah mengharuskan kita untuk menjaga kondisi tubuh yang sehat dan kuat agar bisa menyelenggarakan semua tugas dan tantangan.[466]

Ada kekhawatiran pada diri Tolchah, kalau-kalau generasi kita yang akan datang menjadi lemah, apalagi kalau generasi kita yang sekarang ini sudah menjadi generasi yang lemah dan sakit-sakitan. ”Bagaimana kita akan membentuk generasi yang akan datang menjadi kuat kalau kita sendiri sekarang sebagai generasi pembentuknya itu lemah dan sakit-sakitan?”[467] begitu Tolchah berargumentasi. Apabila kita memperhatikan ulasan yang ditulis oleh Tolchah tentang Islam dan kesehatan ini, Kita akan menemukan bagaimana ajaran-ajaran Islam nampak nyata kepada kita menyerukan dan mendorong kepada kita kehidupan yang sehat, baik jasmani maupun ruhani.[468]

K. Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Keberadaannya sangat dibutuhkan karena pendidikan di Pesantren mengajarkan pelajaran akhlak dan agama. Sampai saat ini pesantren masih diakui sebagai sistem pendidikan yang asli dari sistem pendidikan nasional. Anggapan seperti ini muncul bukan tanpa sebab. Pesantren lahir bersamaan dengan awal masuknya Islam ke nusantara. Gaya dan sistem pendidikan yang dipakai oleh penyebar agama Islam pada awal masuk ke nusantara sama halnya dengan pesantren masa kini. Tentu saja, ada banyak perubahan dan modifikasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pemikiran terakhir Tolchah yang bisa dilacak dalam tulisan ini adalah pandangannya tentang sistem pendidikan pesantren. Menurut Tolchah, maksud sebenarnya dari didirikannya pesantren adalah untuk membentuk manusia yang siap pakai, mempunyai akhlak yang baik dan mampu menjawab

---

[466] *Ibid.*

[467] *Ibid.,* hal. 9.

[468] *Ibid.,* hal. 19.

tantangan yang dihadapi masyarakat.[469] Sistem pendidikan dan pengajarannya masih banyak menakankan pada pemahaman kitab-kitab klasik yang merupakan karya agung para ulama sejak mulai periode tabi'in. Meskipun para santri ketika di pesantren tidak mendalami ilmu sedalam Imam Syafi'i, namun dalam proses menuntut ilmu sebenarnya juga terdapat diskusi dua arah lewat forum *bahtsul masa'il*. Apa yang dipelajari di pesantren sebenarnya sama dengan apa yang dipelajari di sekolah umum dari segi metodologinya. Dalam kitab-kitab klasik tersebut juga memiliki tingkat keilmiahan yang cukup tinggi. Bahkan Tolchah merasa kagum kepada para ulama dahulu hanya dengan membaca kitab-kitab kuning dan segala keterbatasannya dapat memecahkan hal-hal yang baru seperti bayi tabung, bank air susu ibu, yang sebelumya ia sendiri ragu untuk bisa memecahkannya.[470]

Tolchah memiliki gagasan Pesantren sekarang harus ditunjang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu pesantren harus memiliki tenaga pengajar yang cukup dan mumpuni. Sebuah Pesantren tidak cukup kalau hanya ada satu kyai yang harus mengajar kepada ribuan santri. Kalau ini terjadi, maka kiai hanya akan membaca dan menterjemahkan kitab yang diajarkannya, tanpa memberi penjelasan lebih dalam terhadap pandangan-pandangannya mengenai sebuah persoalan yang lebih luas. Ia mengatakan bahwa biasanya seorang santri akan kerasan tinggal di pesantren jika kiainya sanggup memberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Jika tidak, maka santri akan pindah ke pesantren lain atau pulang. Jadi yang diberikan di pesantren baru taraf menengah, dan perlu dilanjutkan ke taraf yang lebih lanjut atau taraf akademis. Ia mencontohkan Imam Syafi'i yang setelah belajar kepada Imam Malik masih pergi berguru lagi kepada orang lain.[471]

---

[469] Tolchah Mansoer, *Keilmuan di Pesantren diterima Sebagai Suatu keyakinan,* (Jakarta: P3M, Majalah Pesantren, Edisi Perdana), 1984, hal. 43.

[470] *Ibid.*

[471] *Ibid.,* hal. 44.

Menurut Tolchah, keilmuan di pesantren selama ini lebih diterima sebagai keyakinan, sedangkan disekolah umum sebagai pengetahuan. Yang dimaksud keyakinan misalnya, jika Tuhan itu dijelaskan satu oleh kiai, ya sudah, tidak perlu dibahas kenapa harus satu. Apabila kita mau sholat, harus berwudlu, tidak dipertanyakan kenapa harus demikian. Sedangkan di sekolah umum tidak demikian, misalnya besi dipanaskan mengembang. ini bisa dijelaskan apa sebabnya, berapa ukuran pengembangannya.[472] Lebih lanjut ia mencontohkan beberapa hal dalam mu'amalah yang harus diterima dengan keyakinan. Misalnya laki-laki dan perempuan untuk bisa berhubungan secara halal, mereka harus melalui perkawinan, tidak bisa asal *podo senenge* (suka-sama suka). Kalau orang mau memperoleh barang dari orang lain harus dengan cara jual beli, dan itu semua masih sebagi ibadah.[473]

Dalam pesantren sebenarnya juga ada diskusi. Letak dialog antara santri dan kiai muncul saat kiai memberi kebebasan kepada santrinya jika santri menemukan dalil-dalil Qur'an maupun Hadist, maka kiai akan memberikan ulasan. Jika santri salah dalam mengemukakan pendapatnya, maka kiai akan meluruskannya. Bahkan jika ada santri yang cemerlang, kiai memberikan tempat istimewa untuk berdialog dengannya secara langsung. Dalam hal ini Tolchah mencontohkan Imam Malik menghormati pikiran Imam Syafi'i, sampai pada hal-hal yang bertentangan sekalipun. Akhirnya Imam Sayafi'i mendirikan madzhab baru.[474]

Tolchah mengarahkan kepada para santri agar dalam proses belajar seharusnya tidak hanya menerima saja. Pendidikan di pesantren harus bisa sejajar dengan pendidikan akademis dalam mempelajari ilmu. Harus ada pengarahan kepada para santri agar memiliki cakrawala baru dalam berfikir. Pendidikan tidak cukup hanya sekedar tahu dan hafal seperti pada tingkat menengah. Di tingkat akademis ada proses diskusi,

---

[472] *Ibid.*

[473] *Ibid.*

[474] *Ibid.,* hal. 45.

jika tidak setuju harus berdebat dan bila setuju harus memberi alasan-alasannya. Dalam *fiqh* misalnya, masalah *Thaharah* atau rukun Islam yang harus diamalkan, secara akademis harus ditanyakan kenapa harus diamalkan, bagaimana dulu para ulama menetapkan hukumnya.[475]

Ada beberapa pesantren yang dalam penilaian Tolchah telah memiliki beberapa perguruan tinggi, tetapi polanya belum memadai dan cakrawalanya belum luas sehingga perlu untuk di evaluasi. Perguruan tinggi yang demikian kurang memberikan kesempatan berfikir kepada santri atau mahasiswanya. Untuk itu harus disiapkan sarananya, tenaga pengajar, metodologi dan literatur yang memadai. Ini yang diperlukan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Ia berpendapat bahwa kebutuhan yang paling kita perlukan sekarang ini adalah perpustakaan yang menyiapkan berbagai buku, kitab bacaan bagi para santri.[476]

Terakhir, Tolchah mendambakan munculnya pemikir-pemikir baru dari kalangan pesantren. Sebab, kalau tidak ada pemikir-pemikir yang menguasai ilmu agama yang mendalam dari kalangan pesantren, kita akan mandeg dan Islam tidak akan berkembang. Tetapi bukan berarti Islam berubah, karena itu hanya dalam metodenya. Sama saja dengan orang yang pergi haji, dulu pakai perahu kecil, kemudian kapal api, dan sekarang pakai kapal terbang. Jadi metodenya yang harus digali terus menerus.[477] Ia percaya bahwa suatu saat nanti akan hadir generasi dari pesantren yang berpemikiran Islami yang dapat melakukan pembaharuan.[478] *Wallahu a'lamu bishawab*.[]

[475] *Ibid.*
[476] *Ibid.*
[477] *Ibid.*
[478] *Ibid.*

BAB V
Moh. Tolchah Mansoer:
Potret Ideal Generasi Bangsa

Menyusuri perjalanan hidup Moh. Tolchah Mansoer seakan kita menyusuri masa silam yang penuh inspirasi dan kekaguman. Ia lahir dari kalangan orang biasa. Ayahnya, Mansoer, hanya seorang pedagang kecil di Malang. Kehidupan keluarganya juga sangat sederhana dan dijalani dalam keterbatasan. Namun, dari latar belakang yang biasa ini ia tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan luar biasa karena ia telah turut menorehkan sejarah penting dengan tampil sebagai tokoh yang berbagai dimensi, yaitu aktivis, politisi, akademisi, dan kiai.

Embrio keragaman dimensi ini tampaknya sudah mulai terbentuk sejak kecil serta ditempa dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Dari sisi intelektualisme, komitmen keilmuannya telah tumbuh sejak kecil. Di samping berperilaku sebagai anak kecil sebagaimana umumnya, ia sudah tertarik pada dunia keilmuan. Di samping belajar di sekolah formal. sejak kecil Tolchah adalah kutu buku. Ditunjang dengan kebiasaaan dan dukungan buku sang kakak, Utsman Mansoer, Tolchah tumbuh sebagai anak cerdas yang memiliki minat baca yang sangat besar. Hingga tua kegemarannya membaca masih terus dipertahankan. Minat pada dunia intelektualisme inilah yang selanjutnya membentuk Tolchan menjadi seorang intelektual dan pakar hukum tata negara terkemuka di masa-masa selanjutnya.

Selain embrio intelektualnya, Tolchah juga tumbuh sebagai seorang aktivis sejak masih remaja. Ia memutuskan menjadi aktivis sejak sekolah di SMP dengan aktif dalam organisasi pelajar, organisasi keagamaan dan berbagai organisasi pergerakan untuk kemerdekaan. Aktivitasnya dalam organisasi di masa-masa awal ini telah membentuknya menjadi seorang aktivis penting dalam sejarah gerakan pelajar di Indonesia. Berpijak pada idealismenya, bersama beberapa mahasiswa, ia merintis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), sebuah organisasi yang dicita-citakannnya menjadi wadah penyatuan pelajar umum, pelajar pesantren (santri). Idealismenya sebagai aktivis inilah yang selanjutnya

membentuknya menjadi seorang organisatoris, politisi dan aktivis NU hingga masa tua.

Karakter dan idealisme yang dibangun itu mengantarkannya menjadi politisi muda NU di Yogyakarta pada tahun 50-an. Ia menjadi anggota DPRD Yogyakarta di saat masih kuliah. Perjalanan politiknya menanjak ketika ia dipercaya mewakili NU untuk duduk menjadi anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) Propinsi Yogyakarta, sebuah ”kabinet” di bawah Gubernur. Di Selain jabatan pemerintahan, ia masih meluangkan waktu untuk ngurusi NU dan mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Selepas dari jabatan BPH ia menghabiskan waktunya untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi. Selaian menjadi dekan, kemudian pembantu rektor, di IAIN Sunan Kalijaga, Tolchah juga tercatat pernah memimpin serta menjadi dosen di beberapa universitas dan sekolah tinggi di beberapa daerah.

Komitmennya dalam dunia akademik inilah yang selanjutnya mengantarkannya menjadi intelektual terkemuka. Pendidikan umum yang dienyamnya pada akhirnya menjadikan pria keturuan Madura ini sebagai doktor pertama di lingkungan NU. Prestasi ini sungguh merupakan lompatan luar biasa, di saat NU sebagai organisasi tradisionalis kala itu masih miskin intelektual yang berbasis disiplin keilmuan umum. Lebih dari itu, berbekal ketekunannya dalam menggeluti disiplin hukum tata negara sejak S.1 hingga doktoral di Universitas Gadjah Mada, Tolchah menjadi seorang pakar Hukum Tata Negara terkemuka. Di UGM, ia adalah doktor Hukum Tata Negara pertama. Di kancah nasional, namanya tercatat dalam detetan pakar Hukum Tata Negara generasi kedua, segenerasi dengan ahli lain seperti Prof. Dr. Ismail suny, S.H., Prof, Dr. Sri Sumantri, S.H. dan Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, S.H. Sayang, karena persoalan politik, gelar profesornya dihambat hingga ia wafat. Di tengah konstelasi perpolitikan yang tidak berpihak pada NU, Tolchah memang sempat menjadi korban dari “politik peminggiran” yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Dari sisi pemikiran, Tolchah Mansoer, adalah akademisi yang cerdas, kritis dan konsisten. Pemikirannya tentang ketatanegaraan Indonesia dikenal sebagai pemikiran yang sangat progresif. Pemikirannya tersebar dalam berbagai buku dan artikel

tentang berbabagai tema, mulai dari hukum, negara, dan pemerintahan, demokrasi konstitusi negara, hak asasi manusia, dan lain-lain. Selain itu ia juga menulis tentang berbagai persoalan sosial, keagamaan dan pendidikan. Puluhan karya yang ditulisnya dalam bidang Hukum Tata Negara, hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian dan pengembangan ketatanegaraan Indonesia. Bahkan, pemikiran-pemikirannya tersebut di kemudian hari ternyata sama dengan yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam merekonstruksi dan mereformasi sistem hukum ketetanegaraannya, khususnya pascareformasi 1998 sampai sekarang.

Tidak hanya itu, di samping menekuni ilmu umum, komitmennya yang tinggi pada studi keislaman yang dipelajarinya secara otodidak mengantarkannya menjadi intelektual muslim deretan terdepan pada masanya. Selain dikenal sebagai seorang intelektual dan organisator yang handal, Moh. Tolchah Mansoer juga dikenal sebagai seorang kiai. Meskipun tidak *nyantri*, dalam pengertian yang wajar, penguasaannya dalam ilmu keislaman sangat mengagumkan. Konon, ia mempelajari ilmu agama secara otodidak. Kealimannya inilah yang mengantarkannya menjadi seorang ulama tersohor pada masanya. Ia menjadi tempat belajar agama bagi para mahasiswa, dosen, ustadz bahkan kiai-kiai di Yogyakarta. Garasi mobil di rumahnya kompleks Colombo 21 berubah seperti menjadi "pesantren".

Tidak hanya mengajar ngaji, di tempat itu Tolchah juga melakukan kaderisasi dan mendampingi aktivis gerakan anak muda NU. Darah gerakannya yang tertanam sejak muda tampaknya masih tertancap kuat. Rumahnya di Komplek Colombo 21 itu menjadi "markas" gerakan muda di kota pelajar itu. Mahasiswa dan kalangan aktivis muda NU kerap berdiskusi di rumahnya, dan menjadikannya sebagai rujukan dari berbagai masalah sosial, politik dan kemahasiswaan. Lebih dari itu, Tolchah Mansoer dan Colombo 21 adalah tempat di mana para mahasiswa mengadu dan meminta perlindungan dari tindakan represif penguasa. Karena itu, tak jarang Tolchah dituduh sebagai "*backing*" demonstrasi mahasiswa. Kesediaan Tolchah menjadi "*backing*" mahasiswa merupakan wujud sikap oposisinya terhadap Orde Baru. Sikap oposisi inilah yang salah satunya berakibat pada

penghambatan pengajuan gelar guru besarnya. Politik nasional yang berimbas pada politik kampus memang menjadi kisah tragis yang dihadapi oleh Tolchah dan keluarganya.

Dalam kehidupan sehari-hari Tolchah juga dikenal sebagai orang yang sederhana. Meski pernah dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis pada pemerintahan daerah, Tolchah tetap mengedepankan kehidupan yang bersahaja. Kebersahajaan ini tampak dari pola hidup, penampilan dan kebiasaan-kebiasaannya. Dalam keluarga ia adalah ayah pendidik. Anak-anaknya dididik sendiri dengan pengetahuan agama, di samping mereka menempun pendidikan formal yang beragam. Ia dan keluarganya memang dikenal sebagai figur yang sangat peduli dengan pendidikan generasi muda. Anak-anaknya yang kini tersebar dalam beragam profesi merupakan buah dari pendidikan yang diajarkannya.

Di samping mengajar agama dam menjadi bapak pada aktivis muda, ia juga aktif dalam dunia dakwah. Hingga masa akhir hayatnya, ia menghabiskan waktunya berdakwah, bahkan hingga keluar masuk pelosok pedesaan. Dalam periode ini juga ia masih meniti khidmat di organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan organisasi ini ia telah turut menorehkan sejarah penting. Dalam momen sejarah penting pemulihan khittah NU 1926 dan penerimaan NU atas asas tunggal Pancasila, ia tak absen. Bahkan, berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini, Tolchah merupakan salah satu tokoh kunci di balik keputusan bersejarah itu. Ia turut memberikan pencerahan tentang pentingnya khittah dan penerimaan asas Pancasila.

Meski tidak kita temukan dalam sejarah formal NU, terdapat fakta sejarah di mana saat Munas Alim Ulama NU tahun 1983 menemui kebuntuan, Kiai Tolchah tampil dengan tidak hanya menjelaskannya dari perspektif Islam, melainkan dengan kapasitasnya sebagai pakar Hukum Tata Negara, ia merupakan satu-satunya orang yang memberikan perspektif dari sisi ketatanegaraan tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Dengan penjelasan inilah, kebuntuan tersebut diatasi. Perdebatan semalam suntuk dalam Munas tersebut antara Kiai Tolchah dengan Gus Dur juga menjadi catatan yang menunjukkan bahwa peran kiai ini tidak kecil. Konon, perdebatan itulah yang menjadi kunci

penting bagi perubahan pandangan NU tentang Pancasila dan negara.

Memang, penguasaan Tolchah di bidang Hukum Tata Negara dan ke'aliman ilmu agamanya, menjadikannya sebagai *prototipe* intelektual-kiai yang dikagumi dan disegani di kalangan Nahdlatul Ulama saat itu. Berkat keahlian yang dimiliki, Tolchah tampil sebagai sosok yang menjadi "lem perekat" antara kaum santri dan pelajar atau mahasiswa baik di organisasi, di dunia profesi, maupun di masyarakat. Ia tampil sebagai simbol pemersatu antara kiai dan intelektual yang kala itu masih sering terjadi "kesalahfahaman" atau saling curiga antar keduanya sehingga satu sama lainnya belum bisa saling menerima. Ia menjadi titik temu antara "kaum sarungan" dan "kaum abangan" yang masih phobia dengan Islam. Ia mampu mensinergikan keduanya menjadi intelektual-kiai yang mampu menjelaskan hal-hal yang kemungkinan "tidak dimengerti" oleh kalangan kiai, maupun yang tidak dipahami oleh para intelektual.

Tolchah dari sudut yang lain adalah sosok ulama besar yang berwawasan luas. Ia memiliki pemikiran keislaman yang maju, moderat, dan terarah dalam Konteks *ahlussunah wal jamaah.* Ia mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Ia adalah intelektual-kiai berkepribadian santun, ikhlas, sederhana, *care* dan 'open' terhadap generasi muda, serta merakyat. Berbagai karakter dan kepribadian positif yang melekat padanya membuat ia dikagumi dan dicintai oleh ulama dan umatnya. Karena itu, ia bisa dijadikan sebuah cerminan sosok ideal kaum santri dan ulama masa kini, khususnya di kalangan *nahdliyin*. Ia menguasai bahasa Inggris, Arab, Belanda, Indonesia, Madura, dan Jawa tentunya. Keluasan wawasan dan kecintaanya akan ilmu terpotret dari ribuan koleksi buku dan kitab-kitab besar yang tersimpan di perpustakaan pribadinya.

Sebagai seorang kiai, ia memiliki pandangan kebangsaan nasionalis-religius. Hal tersebut dapat kita buktikan ketika ia mengatakan bahwa UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya, sudah cukup bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan segala cita-cita dan aspirasinya. Pendapat yang ia sampaikan bukan tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang. Ia pasti mengetahui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban syari'atnya, setelah mengetahui isi dan subtansi dari konstitusi dan aspirasi yang berkembang di kalangan umat Islam. Bahwa aspirasi umat Islam bisa direalisasikan tergantung kemauan bersama dari umat Islam itu sendiri melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah untuk membuat regulasi yang menjamin dan melindungi umat Islam dalam menjalankan agamanya.

Demikianlah, peran multidimensi yang dimainkan oleh Tolchah membuatnya kerap dijuluki sebagai aktivis-politisi-intelektual-kiai. Jika diklasifikasikan berdasarkan episode kehidupannya, di masa remaja Tolchah adalah aktivis pelajar, di masa muda ia adalah politisi, di masa tua ia adalah seorang akademisi dan di masa berikutnya tampil sebagai seorang kiai yang intelektual. Semua demensi dalam perjalanan itu dilaluinya dengan prinsip dan pandangan hidup yang kuat. Saat menjadi aktivis pelajar, Tolchah adalah aktivis yang konsisten. Pada saat menjadi politisi, Tolchah tampil sebagai politik yang berintegritas. Pada saat menjadi intelektual, Tolchah merupakan intelektual yang independen dan kritis. Dan, di saat menjadi kiai, Tolchah adalah kiai yang membumi. Tentu masing-masing dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesemuanya bertaut, membentuk sosok Tolchah sebagai sosok yang istimewa dan unik. Idealisme dipeganginya tak pernah padam. Di sinilah, tampaknya, tak berlebihan untuk menjulukinya sebagai generasi bangsa yang ideal.

Peran multidimensional yang dibangun di atas landasan idealisme tersebut merupakan peran yang jarang ditemui di masa sekarang. Ia merupakan sosok yang tidak saja langka, melainkan juga pribadi unik yang telah menginspirasi banyak orang untuk belajar, berkarya dan mengabdikan diri dalam kehidupan kemasyarakatan. Sepanjang hidupnya, Tolchah menghabiskan waktu untuk menelurkan karya-karya besar dan mendedikasikan dirinya dalam kerja-kerja sosial. Mengingat semakin kompleksnya tantangan perubahan, peran-peran semacam itu menjadi penting untuk diteladani. Kegigihan dan kesuksesan Moh. Tolchah Mansoer dalam mengarungi dunia gerakan dan keilmuan mestilah menjadi inspirasi bagi generasi kini dan mendatang. []

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

A. Kiai Nan Cendekia

Oleh: Drs. H. Abdullah Syarwanie, SH

Bagi warga Nahdlatul Ulama, pria gagah berperawakan sedang yang bersahaja ini dikenal sebagai tokoh kiai yang cakap berpidato. Di banyak mimbar yang dihadiri ribuan hadirin maupun forum terbatas, uraian pidato ceramah Pak Tolchah selalu menarik. Isi pidatonya bernas, berupa nasihat yang selalu bernada *amar ma'ruf nahi munkar*; Mengajak kepada kebaikan dan mencegah tindakan munkar yang dewasa itu juga tepat dengan suasana politik. Beberapa kali penulis mengikuti perjalanan dakwah keliling beliau ke daerah-daerah di wilayah sekitar Magelang dan Semarang. Sebagai mahasiswa dan aktifis, perjalanan da'wah mengikuti beliau terasa amat menyenangkan. Di semua tempat yang dihadiri, Pak Tolchah disambut masyarakat dengan antusias. Pidato yang disampaikan selalu menggunakan bahasa rakyat (bahasa Indonesia popular diselingi bahasa Jawa) dan diperkaya humor ceria. Kemampuan pidato seperti itu mencirikan Pak Tolchah sebagai pemimpin masyarakat, sekaligus sebagai komunikator ulung . Komunikasi atau silaturahmi beliau juga punya ciri khas, yaitu tradisi menyalami ratusan tangan hadirin ketika berpamitan pulang meninggalkan forum. Hal ini selalu beliau lakukan dengan cara mengulurkan tangan dari jendela mobil yang kacanya dibuka ketika kendaraan yang ditumpangi perlahan keluar meninggalkan lapangan tempat beliau berpidato. Meskipun terasa penat cara menyalami satu persatu hadirin yang mendekatinya, namun beliau lakukan dengan sabar dan senyum gembira.

Pak Tolchah yang selama bermukim di Yogyakarta menjadi "guru" para kaum muda NU, khususnya mahasiswa dan pelajar yang bergabung dalam IPNU/IPPNU dan PMII kesan saya tidak pernah lelah melakukan kaderisasi. Saya dan kawan-kawan mahasiswa NU yang studi di UGM dengan setia menjadi "*shanstrie"* atau murid politik beliau. Melalui berbagai diskusi yang dilakukan di ruang garasi rumah di komplek Kolombo, yang sebulan sekali disulap menjadi ruang pengajian untuk penyadaran sosial dan politik, Pak Tolchah sebenarnya sedang melakukan kaderisasi kepemimpinan NU. Yang

menarik bagi saya, pendekatan yang beliau lakukan adalah *political consciousness*, penyadaran politik kebangsaan. Kaum NU dengan segala kebersahajaan yang dimilikinya memang terkesan tradisional. Namun mereka mestilah cerdas, kreatif dan harus *adreng* dengan keilmuan yang berlandaskan iman keagamaan atau moral. Cinta kepada tanah air juga sikap yang tidak boleh ditawar. *Hubbul wathan minal iiman*, ucapan itu juga selalu muncul manakala kita sedang mendiskusikan situasi tanah air dan masalah kemasyarakatan. Masyarakat terpelajar atau yang disebut Al-Farabi dalam kitabnya yang masyhur *Madinatul Fadhilah* (diterjemahkan menjadi *Negara Utama*) sebagai *alijtima' kamilah* adalah sumberdaya manusia yang handal untuk membangun suatu bangsa yang bertamaddun, masyarakat madani. Jadi, jika NU, sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, berkehendak memiliki peranan dalam upaya membangun bangsa, pilihannya adalah NU harus menjadi masyarakat terpelajar. Sekurang- kurangnya hal itulah yang saya tangkap dari nalar pemikiran beliau. Praktik pak Tolchah di bidang politik juga istiqomah mengikuti pendekatan *intellectual politics*, politik pencerdasan, suatu faham yang beliau yakini dari awal kebenarannya, khususnya bagi warga NU yang ingin terjun ke dunia politik. Saya menduga latar belakang beliau yang meski tamatan sekolah Taman Dewasa Raya tetapi beliau sejak muda mampu membaca kitab kuning dengan baik selalu melekat dan gayut dengan gaya dan sifat beliau menyikapi setiap permasalahan.

Beliau yang mengajar bidang keagamaan di IAIN dan pernah menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin adalah alumni Fakultas Hukum UGM. Tamat dari Fakultas HSEP, saat itu masih digabung jurusan hukum, ekonomi dan sosial politik dan kuliah bersama di Pagelaran, Keraton Ngayogyakarto. Doktor dalam bidang ilmu ketatanegaraan juga diraih di UGM. Disertasi beliau tentang perimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan promotor Prof. A.G. Pringgodigdo. Tema itu sebenarnya sekaligus menengarai munculnya kritik atas suasana kuatnya dominasi kekuasaan eksekutif dan menempatkan peranan legislatif yang terpinggirkan. Sebagai mahasiswa senior waktu itu, saya sering mendapat kehormatan

mengantar draft disertasi untuk Prof. Pringgodigdo dan sebaliknya membawa kembali ke Pak Tolchah setelah dikoreksi dan diberikan catatan-catatan tambahan dari promotor utamanya. Meskipun beliau memperoleh gelar sarjana dan doctor dari UGM, tetapi status resminya adalah pengajar tetap di IAIN. Jadi yang sangat mengesankan adalah beliau ulama sejati. Kiai yang sekaligus cendekiawan atau ilmuwan. Layaklah jika saya menyebutnya sebagai "kiai nan cendekia ". Gelar guru besar atau professor yang disandangnya diperoleh di Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta (IAIN), tempat beliau memberikan kuliah selama bertahun-tahun.

Pak Tolchah juga dikenal sebagai kiai yang kritis. Dengan caranya yang cerdik, beliau memiliki kekhususan tersendiri untuk berargumen. Kegemarannya membaca juga luar biasa. Tidak sebatas pada buku atau referensi keilmuan semata, tetapi juga buku-buku komik popular seperti *Pendekar Bodoh, Bo Punshu* karangan Koo Ping Ho yang satu tema bisa menjadi buku cerita menarik berjilid-jilid. Nama-nama Cina yang puluhan dan hampir sama penyebutannya itu dihafalnya di luar kepala. Beliau juga dikenal dengan kemampuan berargumen seperti pendekar silat yang sulit ditebak arah gerakannya, seperti diceriterakan dalam buku Pendekar Bodoh itu. Suatu ketika, sewaktu beliau belajar menyetir mobil untuk memperoleh SIM, dengan didampingi petugas polisi lalu lintas di samping beliau mengemudi, mobil yang dikendarainya tidak terkendali naik trotoar jalan. Tentu saja sang polisi menegurnya dengan keras, kurang santun, lantaran tidak tahu jika Pak Tolchah adalah salah seorang anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tolchah tidak marah bahkan dengan senyumnya yang khas menjelaskan kepada polisi yang mendampinginya bahwa ini adalah contoh yang tidak boleh dilanggar pengemudi (mobil jalan melanggar batas trotoar). Sikap humornya yang lain dapat diceritakan kisah ketika beliau ingin membeli salah satu obat ke apotik. Tanpa resep beliau hanya memberikan kartu nama dengan gelar Dr. yang baru diperolehnya dengan keterangan pendek tentang jenis obat yang dimaksud. Sang apoteker spontan meminta pak Tolchah untuk menulis resep dengan dalih supaya dicarikan

obat yang tepat. ”Saya tidak bisa membuat resep obat” kata Pak Tolchah. Dr. saya bukan dokter (dr) medis sebagamana dipahami keliru oleh sang apoteker tersebut.

Awal mengenal Pak Tolchah dan keluarganya adalah ketika saya menjadi mahasiswa dan aktifis organisasi mahasiswa NU (PMII). Masih segar dalam ingatan ketika putra-puteri beliau masih kecil. Irul atau Fadjrul Falaakh yang kini dosen di Fakultas Hukum UGM, misalnya saat itu masih bocah dan belajar di Sekolah Dasar. Romy, adik Fajrul yang saat ini menjadi politisi, ketemu kembali dengan saya di suatu pertemuan para duta besar se-Timur Tengah dan Asia Timur/Selatan saat rapat koordinasi di Jeddah, Saudi Arabia tahun 2006. Ketika usai menjadi moderator diskusi dengan Pak Suryadharma, seorang anak muda gagah dan nampak cerdas mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Romy putra Pak Tolchah. Wajah dan tampilan Romy amat mirip dengan ayahnya. Alhamdulillah, tidak menyangka jarak waktu dua dasawarsa sejak wafatnya pak Tolchah saya bertemu kembali dengan putra-putri beliau yang adalah juga para ilmuwan cerdas seperti ayahnya .

Jakarta , 11 Februari 2006

Abdullah Syarwani adalah alumni Fak. Hukum UGM Yogyakarta (1969). Staf peneliti proyek pedesaan di LP3ES Jakarta Turut aktif bersama H. Abdurrachaman Wahid dan Dr. Fahmi Saifuddin almarhum untuk mengembangkan NU sebagai organisasi modern ditahun- tahun awal berdirinya Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (1986/87). Direktur Eksekutif di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (1982-1992), Anggota DPR RI (1999-2001) setelah aktif menjadi sekretaris Majlis Pakar DPP PPP mendampingi Prof Dr.Baharudin Lopa Alm. Terakhir memangku Duta Besar LBBP RI di Beirut , Republik Lebanon (2003-2006) .

B. Sosok Ideal Kaum Santri Masa Kini

Oleh: Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, M.Si.

Dewasa ini dunia pesantren dihadapkan pada tantangan yang cukup berat mengenai orientasi dan visi pendidikannya. Di satu sisi pesantren dituntut mempertahankan tradisi dan identitas kulturalnya sebagai lembaga pendalaman ilmu-ilmu agama dan pembinaan moral. Sementara di kalangan masyarakat sudah sangat kuat arus yang berorientasi pada sekolah-sekolah umum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan ini tidak hanya menyangkut tuntutan orientasi pragmatisme di dunia pendidikan, tetapi juga menyentuh wilayah epistemologis tentang dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan umum.

Idealnya pesantren memang harus mampu menyediakan kebutuhan pendidikan masyarakat baik bidang agama, umum, maupun pembinaan moral sekaligus. Sebab misi awal pesantren adalah untuk dakwah, pendidikan, pengembangan sosial dan ekonomi serta memelihara tradisi. Akan tetapi dalam prakteknya tuntutan itu tidaklah mudah untuk diwujudkan. Di samping terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, hal ini juga menyangkut beratnya beban kurikulum dan keterbatasan kemampuan daya serap santri untuk menguasai semua materi pelajaran. Artinya tidak banyak kalangan santri yang bisa berhasil menguasai kitab-kitab kuning sebagai cerminan penguasaan ilmu-ilmu agama, yang sekaligus juga sukses di bidang pendidikan umum.

Dalam konteks di atas, saya menggambarkan sosok KH. M. Tolhah Mansoer (almarhum) sebagai cerminan ideal kaum santri masa kini. Beliau sangat mumpuni dalam penguasaan kitab-kitab kuning sekaligus juga mempunyai karir akademik yang cemerlang di bidang pengetahuan umum. Karir akademik beliau di perguruan tinggi ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sampai mendapat gelar doktor di bidang hukum tata negara. Sementara itu, karya-karyanya di bidang *fiqh* dan *ushul fiqh* cukup membuktikan penguasaan beliau di bidang pengetahuan agama, termasuk terjemahannya terhadap kitab "*ushul fiqh*" (dasar-dasar penetapan hukum Islam) karya seorang ulama Mesir, Abdul Wahab Khallaf, yang

cukup terkenal dan banyak digunakan di kampus-kampus IAIN dan kalangan pesantren.

Secara pribadi, ketika kuliah di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya tidak hanya membaca karya-karya beliau tetapi juga secara langsung ikut pengajian kitab kuning yang beliau asuh di kediamannya, daerah perumahan Colombo Yogyakarta. Memang terkesan aneh karena banyak sekali mahasiswa dan civitas akademika IAIN sebagai pusat kajian ilmu-ilmu keagamaan, justru mengaji kepada beliau yang berlatar belakang akademik pengetahuan umum dari UGM.

KH. M. Tolhah Mansoer adalah sosok yang gigih belajar dan mengejar harapan masa depannya. Beliau memang menempuh jalur pendidikan umum untuk mewujudkan cita-citanya. Akan tetapi sebagai warga NU yang lahir dari kalangan pesantren, walaupun secara akademik formal menempuh jalur pendidikan umum untuk menentukan orientasi masa depannya, KH. M. Tolhah Mansoer tetap mempelajari secara gigih dan otodidak ilmu-ilmu keislaman sehingga beliau sangat mendalami dan menjadi rujukan kalangan luas di bidang ini. Semangat seperti ini perlu ditauladani oleh generasi NU berikutnya, bahwa walaupun secara akademik formal berkarir di bidang pengetahuan umum bukan berarti seseorang abai dan tidak mempelajari ilmu-ilmu agama. Dengan cara ini, orang itu berarti telah ikut memelihara dan menda'wahkan Islam, memperkuat bangunan tradisi dan menanamkan nilai-nilai moral agama pada masyarakat.

Mengamati, membaca karya-karyanya dan pengalaman berinteraksi (mengaji) dengan beliau, saya berangan-angan bahwa ke depan dari kalangan NU dan pesantren harus banyak lahir sosok seperti beliau; sosok yang menguasai kitab kuning, karir akademiknya yang cemerlang di bidang pengetahuan umum, sangat kuat berpegang pada tradisi NU dan pesantren, serta sosok pemimpin dan organisator yang mumpuni. Pada masa mudanya beliau berhasil memimpin IPNU dengan menjadi Ketua Umum PP IPNU selama tiga periode berturut-turut, dan selanjutnya selalu terlibat dalam kepengurusan NU baik di daerah maupun di tingkat pusat (BPNU).

Sebagai akademisi yang menguasai ilmu-ilmu umum dan keislaman, KH. M. Tolhah Mansoer mampu menganalisis dan memadukan ilmu agama sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji. Sebagai contoh, beliau mampu mengkaji dan menbuat garis relevansi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum ketatanegaraan modern. Sementara sebagai intelektual ia mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya agar senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Lebih dari itu, belaiu tidak hanya dikenal sebagai intelektual dan pemimpin organisasi, tetapi juga dikenang sebagai ulama kharismatik, penuh kebijaksanaan dan kearifan dalam mensikapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Figur KH. M. Tolhah Mansoer sejatinya memberi inspirasi pada generasi NU dan pesantren untuk menata dan menyiapkan kader-kader yang mampuni secara keilmuan, kepemimpinan dan komitmennya pada tradisi dan nilai-nilai moral. Untuk itu pesantren harus segera berbenah diri, terutama mencari terobosan-terobosan baru tentang sistem pendidikan yang tepat untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Sebab jika tidak, maka pesantren sebagai pusat lembaga pendidikan NU akan sulit berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Akibatnya anak-anak NU akan mencari lembaga pendidikan berkualitas di luar lingkungan NU sehingga kelak mereka bisa tercerabut dari akar dan identitas kulturalnya. Situasi semacam ini akan menghambat proses regenerasi dan reproduksi kader-kader NU baik secara sosial maupun kepemimpinan.

Harus kita sadari bahwa tantangan yang akan dihadapi NU ke depan akan semakin berat. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, dengan basis kultural dan corak pemahaman keagamaan yang dimilikinya, NU diharapkan dapat mengambil peran-peran kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang strategis. Tidak hanya itu, dengan potensi yang dimilikinya, NU bahkan dapat mengambil peran penting di kancah internasional, baik menghadapi pergolakan di internal dunia Islam maupun hubungan dunia Islam yang semakin konfrontatif dengan dunia

Barat yang sering melahirkan perilaku kekerasan dan antagonistik.

Pertama-tama yang harus dilakukan tentunya adalah penguatan di internal masyarakat NU yang kebanyakan masih terbelakang, terutama aspek pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia atau bidang pendidikan. Oleh karena itu, kalangan NU dan pesantren harus bisa merubah visi dan orientasi pendidikannya, bukan semata-mata berorientasi pada aspek memelihara agama dan membina akhlak masyarakat, tetapi juga pendidikan umum agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka dengan sendirinya masyarakat NU akan mampu bersaing dalam berakses pada pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, dan pada gilirannya bisa mengambil peran-peran kemasyakatan dan kebangsaan yang lebih luas.

Yang lebih mendasar lagi adalah bahwa pesantren akan lebih bermakna strategis jika bisa mendidik orang untuk memahami Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, artinya Islam yang bisa memberikan jawaban terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas. Sebab dunia ini berkembang dalam kubangan-kubangan kebudayaan yang beragam tetapi bersamaan dengan itu juga terjadi interaksi antar kelompok, antar kultur, antar sub-kultur dan antar peradaban secara lebih luas. Pesantren harus berangkat dari kesadaran bahwa perkembangan sosial, termasuk perkembangan umat Islam, tidaklah bersifat tunggal, tetapi tergantung pada proses interaksi dalam lingkungan besarnya, termasuk pada tataran global.

Pemahaman Islam sebagai *rahmatan lil-alamin* artinya bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia baik di bidang sosial, kebudayaan maupun ekonomi. Keberadaan Islam tidak sekedar mengayomi dan sadar bahwa bangsa ini berbeda-beda suku, agama dan budaya, tetapi juga bisa menjawab seluruh persoalan kepentingan alam semesta. Dalam konteks inilah perlunya pesantren memperluas muatan pendidikannya, dengan tetap mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini.

Untuk memperoleh energi transformasi, pesantren juga harus terbuka pada informasi pengetahuan baru. Ke depan pesantren harus membuka diri terhadap informasi dan bacaan yang lebih luas. Pesantren memang harus tetap membangun pengetahuan yang berakar pada tradisi milikya, untuk memelihara identitas dan akar kulturalnya. Akan tetapi pesantren harus mau terbuka dan memperluas muatan pendidikannya, mau mempelajari ilmu-ilmu lain sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sebab ada kecenderungan orientasi pendidikan masyarakat NU mulai bergeser ke sekolah-sekolah umum di luar karena pesantren tidak bisa menyediakannya. Yang lebih penting lagi, pesantren harus menjadi laboratorian bagi keperanan sosial para santri di masyarakat dalam wilayah pengabdian yang lebih luas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, NU sebagai *jam'iyyah* (organisasi) dituntut mengambil peran penting dalam upaya membantu dan memfasilitasi pengembangan pesantren sebagai pusat kultural dan pendidikan yang mewarnai identitas sosial NU sebagai *jama'ah*. Hubungan yang sinergis antara NU sebagai *jam'iyyah* dan pesantren sebagai pusat pendidikan dan kultural ini diharapkan akan menjadi kekuatan besar bagi upaya pengembangan masyarakat. Untuk menopang upaya tersebut, diperlukan bangunan pengetahuan yang merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu agama sebagai etos teologis dan panduan moral, pengetahuan umum sebagai instrumen praktis dan pijakan tradisi sebagai identitas sosial. Dalam konteks inilah sosok KH. M. Tolhah Mansoer menjadi relevan untuk ditauladani. Kita sebagai gernerasi NU wajib berterima kasih atas jasa-jasa beliau. Semoga ilmu, pengabdian dan tauladan yang beliau berikan menjadi amal *jariyah* yang dapat mengantarkan beliau memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah SWT.[]

Jakarta, September 2008

Arief Mudatsir Mandan adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ketua DPP PPP dan Ketua Yayasan Forum Indonesia Satu (FIS).

C. Santri, Akademisi, dan Politisi

Oleh: Prof. Drs. Cecep Syarifudin

Mengenang sosok Mas Tolchah (demikian saya biasa memanggil Dr. KH. Moh. Tolchah Mansoer, SH) mengingatkan kembali memori saya akan potret perjalanan masa muda saya saat menempuh kuliah di Yogyakarta yang dimulai pada tahun 1961. Saat itu saya benar-benar merasakan hangatnya keakraban dan kesahajaan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari Mas Tolchah.

Bukan merupakan suatu hal yang berlebihan bila banyak orang memandang Mas Tolchah sebagai figur yang sederhana, disiplin, dan cerdas. Di bidang akademis, Mas Tolchah adalah sarjana hukum dan doktor hukum tata negara dari UGM. Di bidang agama ia adalah santri atau kiai muda kala itu- yang bersama kiai Anwar Musaddad biasa mengisi kuliah subuh di masjid kampus IAIN Sunan Kalijaga dan masjid Jami' Syuhada' Yogyakarta. Di bidang politik beliau saat itu adalah anggota BPH DIY bidang Ekonomi mewakili unsur Partai NU. Ketiga hal di atas melekat penuh pada sosok Mas Tolchah dalam rutinitas kesehariannya yang ditunjang dengan penampilan yang santun dan bersahaja. Beliau adalah politisi, santri, dan intelektual kharismatik dengan integritas keulamaan yang tidak diragukan.

Posisi yang saat itu disandang oleh Mas Tolchah bukanlah sebuah kebetulan, bukan juga merupakan warisan dari orang tuanya, atau pemberian cuma-cuma dari penguasa. Perjuangan, pengorbanan ditunjang dengan intelektualitas dan pergerakan mulai dari PII, IPNU, dan NU menjadikan ia matang dalam segala hal. Saat itu mas Tolchah menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh kami. Selama berada di Yogyakarta, saya sering bersilaturrahim ke rumahnya di komplek Colombo No 21. Kami biasa berdiskusi ataupun sekadar *ngobrol* biasa layaknya senior dengan yuniornya. Setiap kali saya berkunjung ke rumah Kiai Anwar Musaddad sebagai sesama perantauan yang berasal dari Garut, saya juga juga menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mas Tolchah. Tradisi ini muncul karena sikap Mas Tolchah yang ramah kepada siapa saja yang berkunjung ke rumahnya sehingga menjadikan para tamu

merasa nyaman dan betah bahkan ingin kembali untuk datang lagi ke rumahnya.

Kontribusi Mas Tolchah terhadap umat dan NU juga tidak diragukan lagi. Sikapnya yang berani dan kritis menjadikan dia diidolakan oleh aktivis mahasiswa kala itu terutama yang dari unsur NU. Saat Munas Alim Ulama NU di Jombang menjelang Pemilu tahun 1971, sebagai ketua tim perumus rekomendasi Munas Pak Tolchah menjadi salah satu di antara sekian banyak kiai yang berani menyerukan agar umat Islam memilih partai Islam. Dengan tanpa *tedeng aling-aling*, dalam rekomendasi Munas beliau meneskan bahwa 'wajib hukumnya' bagi umat Islam untuk memilih partai Islam.

Rekomendasi itu keluar bukan karena Mas Tolchah anti militer atau anti pemerintah atau anti Pancasila, melainkan bentuk *ijtihad* dalam rangka menegakkan demokrasi di negara Indonesia yang saat itu dipasung oleh penguasa melalui militer dan Golkar. Pada waktu itu pemerintah terlampau menunjukkan otoritarianismenya dengan pendekatan kekuasaan, sehingga NU sebagai partai politik peserta pemilu saat itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk memberikan penyeimbang. Satu-satunya yang kita miliki saat itu adalah fatwa itu. Akhirnya rekomendasi itu diangkat oleh NU.

Fatwa itu dikeluarkan oleh ulama tidak lain adalah sebagai bentuk *warning* dan penyeimbang terhadap sikap otoriter pemerintah. Apalagi pada saat itu partai Islam berjumlah empat, yaitu NU, Parmusi, Perti dan PSII. Sehingga dipandang mempunyai *bargainning position* yang cukup. Menurut saya itu merupakan keberanian yang luar biasa dari Mas Tolchah sebagai ketua Tim Perumus Rekomendasi.

Dalam setiap langkah Mas Tolchah juga sangat berhati-hati, selalu mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Termasuk dalam persoalan penerapan asas Pancasila bagi setiap ormas dan orsospol. Justifikasi akademik tentang penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU juga didukung oleh orang-orang seperti Mas Tolchah, baik dari segi filosofis, sosiologis, politis dan yurudisnya. Saat itu, NU adalah ormas Islam yang pertama kali menerima asa tunggal.

Satu hal yang menjadi karakteristik Pak Tolchah adalah sikapnya yang tegas, disiplin, hati-hati, dan selalu konsekuen terhadap apa yang dikatakannya. Jika 'ya' beliau katakan 'ya', sebaliknya jika 'tidak' ya katakan 'tidak'. Saya mendambakan akan datangnya sosok-sosok Mas Tolchah yunior yang akan membawa kemajuan bagi NU, umat Islam, dan bangsa Indonesia. Amien.[]

Jakarta, 30 April 2009

Prof. Drs. Cecep Syarifudin adalah anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI.

D. Prototipe Pemimpin NU Ideal

Oleh: Drs. Hilmi Muhammadiyah, M.Si

Muktamar NU 1984 di Situbondo mempunyai magnet luar biasa. Tingkat publisitas yang cukup tinggi mendorong warga NU untuk berduyun-duyun ke Pondok Salafiyyah Syafiiyyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo yang diasuh oleh KH. R. As'ad Syamsul Arifin. Muktamar itu bersejarah dalam perjalanan NU, karena melahirkan keputusan strategis kembalinya Nahdlatul Ulama ke khittah dan terjadinya regenerasi kepemimpinan yang fundamental. Pada saat itu saya baru berusia 22 tahun menjabat sebagai Sekretaris PC IPNU Kota Ujung Pandang. Saya pun memutuskan untuk berangkat ke Situbondo via kapal laut. Ada obsesi besar yang menguatkan langkah saya untuk datang ke sana, yaitu saya ingin mencium tangan KH. R. As'ad Syamsul Arifin, dengan niat *tabarruk* untuk menjadi salah satu dari puluhan ribu santrinya meski cuma untuk beberapa hari. Selain itu, saya juga bertemu dengan dua tokoh yang sudah banyak diperbincangkan ide dan gagasannya, yaitu KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid yang saat itu lebih populer disebut Gus Dur.

Sesampainya di arena Muktamar, saya tidak hanya berhasil melihat dan mencium tangan kiai kharismatik itu secara langsung, tapi saya juga menemukan satu idola baru, KH. Tolchah Mansoer, salah satu pendiri dan Ketua Umum Pertama PP IPPU yang sebelumnya hanya saya kenal lewat tulisan saja. Kiai yang semasa mudanya mengabdikan hidupnya untuk mengurus dan membesarkan IPNU ini cukup populer di arena Muktamar. Beliau masuk dalam jajaran kandidat Ketua Umum PBNU menggantikan Dr. KH. A. Idham Chalid bersaing bersama Gus Dur. Saya mendapatkan cukup banyak informasi tentang Pak Tolchah dari muktamirin. Dari arena muktamar itu pula saya tahu bahwa Pak Tolchah selain seorang ulama, ia memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara, sebuah disiplin ilmu umum yang masih sangat langka ditekuni oleh kader NU saat itu. Kesimpulan saya, Pak Tolchah adalah sosok kiai intelek, *low profile*, humoris, sederhana, dengan tutur kata yang sistematis.

Dari pertemuan saya dengan Pak Tolchah di arena Muktamar Situbondo, memunculkan rasa kagum dan bangga dalam diri saya kepadanya sebagai senior di IPNU. Pak Tolchah memberikan inspirasi kepada saya untuk terus aktif dan mengabdi di IPNU sampai akhirnya saya menjadi ketua umumnya. Selain itu, prestasi akademis yang diraih oleh Pak Tolchah juga memberikan motivasi kepada saya sebagai aktifis untuk bisa mensinergikan kemampuan organisatoris dan kemampuan intelektual secara bersamaan, sehingga IPNU tidak menjadi organisasi yang hanya bisa melahirkan para politisi tapi juga mampu dan memiliki intelektual-intelektual di berbagai disiplin ilmu sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada bangsa ini. Saya pikir ini adalah tipologi ideal seorang pemimpin dan aktifis muda NU, dan itu telah dicontohkan oleh *founding father* IPNU yang satu ini.

Khittah NU hasil Muktamar Situbondo tahun 1984 telah memberi semangat kaum *nahdliyin* untuk ber-NU kembali. Gairah itu juga merasuk ke Ujung Pandang Sulawesi Selatan. Pada 1986, PWNU Sulawesi Selatan menyelenggarakan Harlah NU, sebuah Harlah yang terbesar dalam sejarah NU di Ujung Pandang pasca kebangkitan kembali NU. Pada acara tersebut, saya bertemu kembali dengan Pak Tolchah yang datang sebagai sebagai salah satu ketua syuriyah PBNU. Saya sangat gembira ketika kiai-kiai NU lokal menugasi saya untuk "mengawal" beliau selama berada di Ujung Pandang, sebuah kesempatan yang sangat saya tunggu-tunggu. Malam itu, sejak pukul 20.00 WIT saya "menemani" Pak Tolchah. Kami berdiskusi bangak tentang IPNU dan NU, dari diskusi itu saya menyimpulkan bahwa Pak Tolchah adalah seorang kiai yang berwawasan luas. Ia memiliki penguasaan agama yang mumpuni ditunjang dengan intelektualitas yang tinggi. Tak terasa malam sudah larut. Jam menunjukkan pukul 01.00 WIT . Saya mulai terserang kantuk. Di hotel Marannu ……, …… Kota Ujung Pandang itu, juga di malam itu, Pak Tolchah mengatakan, "Nak, tidurlah dulu. Saya masih mau shalat." Saya baru terjaga pas waktu shalat Shubuh dan saya menemukan Pak Tolchah masih sedang shalat. Dari kejadian ini saya menyimpulkan bahwa Pak Tolchah adalah sosok yang memadukan intelektualitas dan

religiusitas. Sosok Pak Tolchah menyiratkan kepemimpinan ideal bagi suatu organisasi jam'iyyah NU.

Pak Tolchah adalah tokoh NU yang komplit. Ia menguasai Hukum Tata Negara yang menjadi basis pengembaraan intelektualnya. Gelar Sarjana Hukum dan Doktornya ia peroleh dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia pernah menjadi angggota DPRD, pernah menjadi pejabat pemerintah sebagai anggota BPH, ia seorang dosen di IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa kampus swasta, ia seorang senior yang miliki banyak kader yang sekarang menjadi orang besar di negeri ini, ia juga pernah menjadi rektor di beberapa universitas, selain itu ia juga seorang kiai besar yang biasa berdakwah ke berabagai daerah. Namun kebesaran nama dan jabatan yang ia duduki, tidak membuatnya lupa diri. Ia memiliki keshalehan spiritual dan keshalihan sosial luar biasa yang salah satunya saya buktikan malam itu.

Intelektualitas dan religiusitas adalah dua pilihan strategis NU. Intelektualitas akan melahirkan manusia beradab sehingga menjamin kelangsungan generasi yang mempunyai etos pencarian ilmu pengetahun, kreatif dan produktif. Sedangkan religiusitas merupakan garansi atas "jalan lurus" ilmu pengetahuan. *Ikhwan l-Shafa* di akhir abad 10 M. mengingatkan kegagalan ilmu pengetahuan yang hanya dilandasi oleh materi. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* membahasakan, "kebersihan hati adalah landasan proses pencarian ilmu pengetahuan." Tampaknya Pak Tolchah mengerti benar tentang ini dan mempraktekkanya dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan lahir dan batin, dunia dan akhirat, intelektualitas dan religiusitas mewarnai perjalanan hidupnya.

Sekarang sudah banyak ditemukan kader NU yang mengikuti jalan hidup Pak Tolchah, kader yang menempuh jalur pendidikan umum sebagai basis intelektualitasnya, namun juga memiliki penguasaan agama yang ia peroleh dari pesantren. Kader yang memadukan intelektualitas dan religiusitas untuk mengabdi kemada umat. Untuk generasi ini, saya sering menyebut mereka sebagai penganut aliran *Tholhawiyyah*, sebuah mazhab hidup masyarakat *nahdliyin ter*-utama IPNU yang memimpikan peradaban Islam di Indonesia.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Cibubur, Medio Mei 2009

Hilmi Muhammadiyah, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU masa khidmat 1997-2000. Ketuia Presidium Nasional Majelis Alumni IPNU.

E. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Generasi Kedua

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.

Sebagai seorang akademisi di bidang hukum tata negara, saya mengenal Dr. M. Tolchah Mansoer, S.H. sebagai salah satu ahli hukum tata negara generasi kedua, bersama-sana denga ahli lain seperti Prof. Dr. Ismail sunny, S.H., Prof, Dr. Sri Sumantri, S.H. dan Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, S.H. Namun demikian, di kalangan ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara saat ini, beliau kurang dikenal mungkin hanya karena beliau bukan merupakan tenaga pengajar di fakultas hukum, melainkan di IAIN Yogyakarta. Padahal beliau merupakan salah satu tokoh yang produktif menulis buku, termasuk buku-buku hukum tata negara.

Di antara karya-karya beliau yang penting dalam studi hukum tata negara misalnya adalah Beberapa Soal Tentang UUD'45 (1970); Demokrasi Sepanjang Konstitusi (1971); Hukum Tata Negara Sesudah Pemilihan Umum 1971 (1978); Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak asasi Manusia & Islam.(1979); Sumber Hukum dan Urutan tertib Hukum Menurut UUD RI'45 (1979); serta Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia (1983).

Buku-buku tersebut merupakan sumber pengetahuan hukum tata negara yang sangat penting untuk memahami ketatanegaraan pada konteks saat itu, serta merekonstruksi perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Dari karya-karya Dr. M. Tolchah Mansoer, SH, kita dapat mengetahui bahwa beliau memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan dan ilmu hukum ketatanegaraan yang mendalam. Penguasaan kedua bidang ilmu tersebut dituangkan dalam pemikiran-pemikiran baru yang sangat sesuai dengan konteks Indonesia. Pemikiran beliau di satu sisi memberikan landasan dan jalan bagi aktualisasi hukum Islam di bidang ketatanegaraan, dan di sisi lain memperkaya perkembangan hukum tata negara. Kemampuan tersebut saat ini sudah sangat jarang dimiliki oleh ahli hukum tata negara kita.

Dalam satu tulisan beliau yang berjudul Peranan Ummat Islam dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pantjasila dan

Undang² dasar 1945, beliau memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi berdasarkan ajaran Islam mengenai musyawarah berdasarkan surah Asy-Syura ayat 38 yang dengan jelas memerintahkan musyawarah dalam menjalankan urusan ummat manusia. Pelaksanaan perintah-perintah tersebut dapat dilihat dalam sejarah Rasulullah dan empat kholifah sesudahnya. Sejarah pada waktu itu menunjukkan bahwa musyawarah dijalankan dengan baik sehingga semua umat dapat turut serta dalam menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan negara. Dr. Moh. Tolchah Mansoer, S.H. memegaskan ”Musyawarah mendjadi kekuatan, karena memberikan kesempatan kepada orang jang berkepentingan, membesarkan tanggung djawab warga negara, dan menimbulkan kwadjiban jang tidak mengikat hati.”

Dr. Moh. Tolchah Mansoer, S.H. juga mengemukakan tiga kelebihan atau manfaat yang diberikan oleh demokrasi dalam bentuk musyawarah. Pertama, dengan dasar musyawarah manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan ketuhanan dengan membuka pikiran dalam melaksanakan musyawarah sesama manusia. Kedua, melalui musyawarah, negara tidak dijalankan oleh seorang manusia atau pikiran seseorang saja, tetapi dilaksanakan oleh semua golongan. Ketiga, permusyawaratan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kekhilafan atau kelakuan penyalahgunaan kekuasaan seseorang yang berkuasa. Beliau memegaskan: ”Pemusyawaratan membawa negara kepada tindakan jang betul dan menghilangkan kesesatan.”

Keahlian Dr. Moh. Tolchah Mansoer, S.H. tidak hanya berada pada tataran konsepsional dasar, melainkan juga meliputi pamahaman terhadap ketentuan yang praktis operasional. Hal itu dapat dilihat dari salah satu karya beliau yang berjudul Hukum Tata Negara sesudahy Pemilihan Umum 1971.. Dalam mengungkapkan fakta dan melakukan analisis, beliau senantiasa obyektifitas. Pada saat menganalisis kemenangan Golkar pada pemilu 1971 misalnya, beliau secara tegas menyatakan bahwa kemenangan tersebut karena Golkar memiliki ”Penunjang Pokok”, yaitu ABRI. Berdasarkan kenyataan tersebut, beliau menyatakan bahwa ABRI memiliki

tiga tugas, yaitu sebagai pegawai, pengaman negara; sebagai tentara yang juga bertugas di luar bidang kemiliteran namun tetap berkedudukan sebagai militer; serta membentuk organisasi lain yang sama sekali bukan militer, tetapi tetap merupakan bagian dari politik ABRI.

Pemikiran yang obyektif dan prospektif dari Dr. M. Tolchah Mansoer, S.H. adalah bagian dari khasanah perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Hal itu akan selalu diperlukan bagi setiap orang yang hendak mempelajari hukum tata negara serta perkembangan hukum tata negara Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya berharap pemikiran hukum beliau dalam karya-karyanya dapat diterbitkaan kembali agar dengan mudah dapat diakses dan dipahami oleh generasi saat ini dan di masa yang akan datang. Karya-karya tersebut akan menjadi amal jariyyah yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

Semoga beliau mendapatkan ketenangan di sisi Allah. SWT. Amien.

Jakarta, 30 April 2008

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. adalah pakar hukum tata negara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

F. Sang Pencinta Burdah

Oleh: Prof. Dr. H. Machasin, MA.

Melukiskan seorang yang unik dan kompleks sebagaimana Pak Tolchah Mansoer memang tidak mudah. Hal ini dimungkinkan karena pribadinya yang memiliki karakter kuat, bersamaan dengan itu pula label melekat pada dirinya. Ia seorang intelektual yang kiai, politisi yang seniman, organisator yang juga seorang guru. Di atas semuanya, dialah Tolchah Mansoer, seorang pribadi yang hangat dan bersahabat.

Perjalanan waktu memang sudah cukup panjang sejak kami, saya dan teman-teman, belajar secara "informal" kepada almaghfurlah Pak Tolchah di kompleks Colombo itu, namun gambaran tentang pergaulan dengan beliau masih sangat jelas di dalam ingatan. Saat itu pertengahan tahun 1970-an, Romi (M. Romahurmuziy –ed.) masih dalam kandungan dan Enthis (Choirotun Chisaan –ed.) masih belum sekolah. Setiap sore, sehabis sholat asar kami bersila di garasi dengan kitab-kitab di atas meja kecil atau rehal. *Syarah Ibnu Aqil* atas *Alfiyah Ibnu Malik, Riyadl al-Shalihin* karya al-Nawawi, *al-Tajrid al-Sharih* (ringkasan hadis Shahih al-Bukhari) karya Ibn Mubarok, *al-Jauhar al-Maknun* (Balaghah), *al Muhtashar al-Syafi ala Matn al-Kafi* (Arudl) di baca dalam lima hari selama seminggu. Minggu pagi, kadang-kadang saya masih datang ke kompleks Colombo untuk mengaji kitab lain lagi –kalau tidak salah, *Tafsir al-Jalalain* – dengan peserta yang lebih senior, seperti Pak Abu Tauchid, Pak Hasan Baidai, dan Pak Projodikoro. Membaca *nadzam* selalu merupakan pembuka pada pengajian sore. *Qala muhammadun huwa bnu maliki, ahmadu Rabbi Llaha khaira maliki, mushalliyan alan-Nabiyil-Musthafa, wa alihil-mustakmilin asy-syarafa. Wa asta'inu Llaha fi alfiyah…*

Di situlah tumbuh subur kecintaan kepada nadzam yang sebenarnya sudah ada sejak saya masuk madrasah ibtidaiah, apalagi setelah Pak Tolchah menerbitkan terjemahan *Burdah al-Bushiri*. Dituntunnya kami membaca *amin tadzakkuri jīranin bi-dzī salamī, mazajta dam'an jarā min muqlatin bi-dami*; *am habat ir-rūhu min tilqā'I kāzhimatin, wa awmadl al-barqu fi azh-zhalmā'i min idlami* … lalu diterangkannya bagaimana beliau menerjemahkan bait per bait. Kalimat-kalimat beliau

yang pendek dan *imposing*, memberikan kesan mendalam dalam hati mengenai bagaimana sebuah puisi keagamaan dimengerti dan dihayati. Demikian juga, penggambaran beliau mengenai lambang-lambang kebahasaan yang ada dalam Burdah *wa-atsbat al-wajdu khatthai 'abratin wa-dlanā, mitsl ul-bahāri 'alā khaddaika wal-'anami* (dan pula oleh rasa rawan yang karena cinta telah memberikan dua bekas untaian tangis dan kerinduan. Untaian, seperti mawar kuning yang harum semerbak, dan mawar merah yang menyala pada kedua pipimu).

Walaupun gambaran ini mungkin kurang dapat dibayangkan pada waktu itu, penjelasan beliau membawa penulis kepada suasana kesenduan seseorang yang pisah dengan kekasihnya. Bagaimana air mata yang mengalir turun melewati pipi digambarkan dengan dua garis seperti mawar kuning dan mawar merah tidak penting benar ketika penjelasan lisan beliau sudah berhasil menimbulkan keterlibatan rasa kami dengan kesenduan sang penyair. Barulah kemudian setelah lewat lebih dari tiga puluh tahun, penulis menemukan bahwa ada beberapa ungkapan yang penerjemahannya kurang tepat, seperti *al bahar* yang diterjemahkan menjadi mawar kuning. Itu tidak penting, yang penting adalah bahwa terjemahan Pak Tolchah ini telah melahirkan kecintaan kepada keindahan bait-bait al Burdah, lebih dari sekedar bunyi dan lagunya ketika dinyanyikan.

Menerjemahkan sebuah karya sastra selalu tidak mudah. Ada orang yang menyerupakannya dengan memindahkan bunga teratai yang indah dari kolam ke darat. Bunganya memang dapat dipindahkan, tetapi keindahannya tidak serta. Akan tetapi, perbedaan dengan syair-syair yang keindahannya dapat dinikmati tidak melalui maknanya melainkan melalui efek bunyi yang ditimbulkan ketika syair-syair dibaca. Terjemahan tidak berfungsi memindahkan keindahan, namun lebih banyak memberikan tambahan kepada efek bunyi yang ditimbulkannya. Bait-bait Bushiri lebih banyak dibaca dalam bahasa Arab oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Karena itu, lagu lah yang penting; makna bait-bait itu baru didapat dari terjemahan dan terjemahan yang dengan setia mengikuti susunan kata-kata Arabnya justru lebih

bermanfaat dari pada yang menggunakan gaya bebas dengan mempertimbangkan citra keindahan bahasa Indonesia.[]

Prof. Dr. H. Machasin, MA. Alumni IAIN Sunan Kalijaga. Kini menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Agama RI. Pada saat di Yogyakarta pernah mengikuti pengajian kitab bersama Tolchah Mansoer.

G. Pelopor Gerakan Pelajar NU

Oleh: H.M. Said Budairy

Berdirinya organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada tahun 1954 merupakan peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita ketahui, NU lahir pada tahun 1926 sebagai jam'iyah diniyah yang didirikan oleh para ulama, umumnya para kiai pemimpin pesantren dan didukung oleh para santri. Lalu merupakan jaringan besar pesantren seantero negeri.

NU yang menitik beratkan programnya pada pendidikan, dakwah dan keperdulian terhadap kesejahteraan umatnya, kadernya adalah para kiai dan santri-santri di pesantren-pesantren. Oleh dinamika sejarah, ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya, berdiri partai-partai. Kekuatan Islam waktu itu berhimpun dalam Patrtai Masyumi, termasuk Nahdlatul Ulama sebagai anggota istimewanya.

Melalui muktamarnya di Palembang tahun 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi dan memproklamirkan diri sebagai Partai Nahdlatul Ulama. Berdiri sebagai partai politik, tidak bisa lepas dari konsekwensinya, yaitu harus punya kader di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal kader-kader NU yang tadinya memang sebagai jam'iyah diniyah, menumpuk di pesantren-pesantren saja. Kecuali hanya amat sangat sedikit yang menempuh pendidikan di luar sekolah-sekolah agama dan pesantren.

Sebagai contoh, ketika Saudara Bachtiar (almarhum) dan saya mendirikan IPNU Cabang Malang pada awal 1955, mencari seorang yang berasal dari sekolah umum sulit sekali. Saudara Bachtiar bersekolah di Sekolah Teknik Menengah (STM) dan saya di SMA Negeri Malang. Belakangan baru bertemu dengan Saudara Munsif Nachrawi (pelajar SMA juga, kemudian pernah menjadi Sekjen IPNU), berhasil mendirikan IPNU Cabang Malang, sekaligus mempersiapkan Kongres IPNU pertama yang dihadiri oleh Presiden Soekarno pada 1955 di kota Malang.

Maka ketika mesin partai NU mulai dijalankan, terasa tidak mungkin ditunda lagi untuk mulai membangun kader-kader yang juga berpendidikan umum. Pada momentum inilah,

2 tahun setelah berdirinya Partai Nahdlatul Ulama, organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) didirikan. Sejak itu makin terasa adanya kebutuhan perlunya keseimbangan antara dunia pendidikan -umum dan agama- untuk membangun kader yang siap bertarung dalam medan perjuangan.

Walaupun jumlahnya masih amat sedikit, di kota pelajar seperti Yogyakarta mulai terlihat putra-putra orang NU mulai ada yang menempuh pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi agama maupun umum, yang punya peran dalam mendorong lahirnya IPNU. Masa-masa itu, kader-kader putra orang-orang NU yang menempuh pendidikan tinggi, di antaranya adalah Sofyan Kholil, Tolchah Mansoer, Musa Abdillah, Ismail Makky, Fatih, Asrof Wibisono, dan lain-lain. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa NU yang menjadi aset penting bagi masa depan NU. Mereka yang kemudian melahirkan dan menggerakan serta mengembangkan IPNU dengan pemimpin utamanya Tolchah Mansoer..

Meskipun saat itu IPNU lahir di saat NU sedang dalam posisi sebagai partai politik dan tengah mempersiapkan Pemilu 1955, namun kelahiran organisasi ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan politik semata. Perintisan lahirnya IPNU diinisiasi dari bawah, yaitu oleh para pelajar dan mahasiswa. IPNU diproyeksikan sejak lahir sebagai wadah kaderisasi yang berdimensi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Diversifikasi pengkaderan bagi NU suatu keniscayaan jika tidak hendak keteteran melanjutkan perjalanan sejarahnya.

Sebagai salah seorang pendiri, Tolchah Mansoer adalah orang yang memiliki pendirian kuat untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Secara pribadi, beliau merupakan anak muda NU kala itu yang menempuh pendidikan umum hingga ke jenjang perguruan tinggi, tidak hanya monoton pada pesantren semata. Kala itu ia menjadi satu-satunya putra NU yang menempuh jalur pendidikan umum hingga menggapai doktor. Dengan kriprahnya dalam pendirian dan pengembangan IPNU, Mas Tolchah merupakan pelopor gerakan pelajar NU.

Bukan itu saja, Mas Tholchah juga yang menjadi pelopor menjalin hubungan yang semakin erat antar keluarga-keluarga NU. Ia mempersunting Ketua Umum Ikatan Pelajar Puteri

Nahdlatul Ulama (IPPNU), Dra. Umrah yang merupakan cucu pendiri NU K.H. Wahab Hasbullah, putri K.H. Wahib Wahab. Langkah ini kemudian dicontoh oleh ketua umum –Ketua Umum IPNU berikutnya mempersunting Ketua Umum-Ketua Umum IPPNU. Drs. Tosari Widjaya mempersunting Dra Susy, Drs. Asnawi Latif mempersunting Dra. Machsanah dan saya kira banyak lagi yang bukan ketua umum menjalin antara IPNU – IPPNU.

Karena kantor Pimpinan Pusat IPNU berada di Yogyakarta, maka segala macam urusan di pusat pemerintahan negara, PP IPNU membentuk kantor Perwakilan PP IPNU di Jakarta. Memperoleh kepercayaan sebagai Ketua Perwakilan PP IPNU ketika itu adalah A.A. Murtadho (almarhum, terakhir Duta Besar RI di Bagdad), Mahbub Junaidi (almarhum), H.A. Chalid Mawardi (terakhir Duta Besar RI di Damaskus), saya sendiri dan beberapa kawan lain.

Saat itu kantor PPP IPNU numpang di kantor Gerakan Pemuda Ansor Jalan Pegangsaan Timur (sekarang jalan Proklamasi) nomor 46. Tugas dan aktivitas Pimpinan Pusat IPNU di Jakarta lebih banyak diserahkan kepada perwakilan di Jakarta, terutama karena orang-orang yang di Jakarta lebih banyak tahu perkembangan organisasi-organisasi pemuda dan pelajar di Jakarta. Ada federasi-federasi organisasi pemuda dan pelajar, seperti PORPISI, misalnya, di mana IPNU bergabung di sana. Sedangkan Mas Tolchah berkonsentrasi di Yogyakarta.

Berbicara tentang Mas Tolchah, terutama dalam kiprahnya di IPNU, yang paling menonjol adalah motivasinya yang kuat untuk terus berusaha mengembangkan IPNU dan ingin menjadikan IPNU sebagai satu-satunya wadah pengembangan kader NU. Sebagai Ketua Umum pertama, beliau mengidealkan IPNU menjadi wadah besar bagi semua kader NU yang menempuh pendidikan di sekolah umum, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Semua potensi muda terdidik ini bernaung dalam satu wadah candradimuka yang bernama IPNU. Beliau sangat gigih mempertahankan pendirian tersebut. Namun, melihat realitas dan dorongan teman-teman mahasiswa saat itu, beliau merasakan bahwa keinginan itu sulit untuk bisa dilanjutkan. Dengan berbagai proses dan perdebatan

yang cukup penjang, maka akhirnya IPNU melahirkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi baru tersebut sebagai kelanjutan Departemen Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat IPNU.

Satu alasan mendasar mengapa PMII harus didirikan adalah kenyataan bahwa ada kebutuhan yang berbeda antara pelajar dan mahasiswa, terutama dalam kaitannya dengan program yang selalu tidak ketemu. Di samping itu ada kepentingan untuk masuk dan mengambil peran dalam berbagai federasi organisasi kemahasiswaan. Jika NU tidak mempunyai organisasi mahasiswa, maka kita tidak akan mempunyai wakil di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dan organisasi federasi lainnya. Jadi, memang ada kebutuhan riil yang mau tidak mau harus beda penanganan kader-kader yang tingkatnya sudah mahasiswa dan yang tingkatnya masih pelajar.

Sebenarnya pada awalnya desakan pendirian PMII ini berbenturan dengan pendirian Mas Tolchah, sehingga menimbulkan perdebatan panjang. Ia beralasan bahwa saat itu pendirian organisasi mahasiswa NU belum mendesak, karena IPNU baru saja berdiri dan tengah melakukan konsolidas internal, di samping potensi mahasiswa NU masih terbatas. Untuk merespon aspirasi yang berkembang tersebut, pada Muktamar Cirebon Mas Tolchah menawarkan solusi dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi itu yang selanjutnya dipimpin oleh Ismail Makky. Itu merupakan kompromi antara yang berpendirian belum dibutuhkannnya organisasi mahasiswa tersendiri dan yang beranggapan adanya kebutuhan akan wadah untuk mahasiswa yang berdiri sendiri. Kala ini depertemen tersebut sudah berjalan, namun ternyata kebutuhan mahasiswa belum seluruhnya terpenuhi. Akhirnya dalam konferensi besar di Kaliurang kemudian ditetapkan 13 orang untuk mempelopori lahirnya PMII. Termasuk saya diantaranya yang masih hidup. Mas Tolchah memimpin langsung konferensi tersebut. Ini menunjukkan bahwa akhirnya Mas Tolchah menyetujui gagasan berdirinya PMII.

Dari sisi pribadi, ada satu hal yang saya kagum dengan Mas Tolchah, yaitu terkait dengan intelektualitasnya. Setiap kali menyampaikan sesuatu, bukan hanya kitab yang menjadi

referensinya, melainkan juga rujukan-rujukan ilmiah ilmiah lainnya. Memang, kala itu dalam lingkungan NU masih tarasa ada jarak antara seorang intelektual dengan kiai-kiai atau santri. Keistimewaan Tolchah adalah kemampuannya dalam menguasai dua bidang keilmuan, umum dan agama, secara bersamaan. Beliau tidak saja mumpuni dalam ketatanegaraan, namun juga mumpuni dalam bidang hukum-hukum agama.[]

Jakarta, 26 April

M. Said Budairy, lahir di Malang, 12 Maret 1936, adalah mantan Wartawan/Wampred Duta Masyarakat (1960-1971); Pemimpin Perusahaan Harian Pedoman 1972 – l973, Wapemred Harian Pelita (1973-1982); Direktur PP LAKPESDAM NU (1987-l995), Penasehat LAKPESDAM NU (1995 – 2000), Ombudsman Majalah PANTAU (2001-2003), Anggota DPR-GR, sekretaris/pelapor Pansus UU NO. 11 Tahun l966 tentang Ketentuan Pokok Pers, Anggota Badan Pekerja MPR-RI (1977-1982), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2001-2004), kini menjabat Ketua Komisi Infokom Majelis Ulama (MUI) Pusat, dan Wakil Ketua Komite Indonesia Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi/KIP3.

H. Tokoh yang Terlupakan

Oleh: Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si

Awal tahun 1969 adalah saat yang cukup penting dalam hidup saya, salah satunya karena saat itu untuk pertama kalinya saya bertemu dengan KH. Moh. Tolchah Mansoer. Saat itu saya mulai masuk IAIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah dosen IAIN Sunan Kalijaga, sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Propinsi DIY, sebuah lembaga pelaksana pemerintah pembantu gubernur. Selama pergaulan saya dengan Pak Tolchah, banyak kenangan indah yang tak bisa terlupakan. Hubungan saya dengan beliau mungkin bisa disebut seperti murid dengan guru, atau kadang-kadang juga teman.

Ketika kami aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pak Tolchah Mansoer adalah pembina PMII Yogyakarta yang sesunggunya. Kedekatannya dengan mahasiswa, terutama PMII, menjadikan beliau sebagai guru dan tokoh yang menyelesaikan berbagai persoalan. Hampir setiap minggu kami datang ke rumahnya di kompleks Colombo 21. Karena seringnya kami bermain dan berdiskusi, atau hanya sekadar ngoblor di sana, maka rumah beliau bagaikan markas anak-anak muda. Beliau selalu membuka diri bagi siapa saja. Bahkan selain membawa persoalan yang hendak dimintakan nasehat kepada Pak Tolchah, terkadang kami ke sana hanya untuk numpang makan. Sehingga tidak heran jika kemudian banyak mahasiswa yang menganggap beliau tidak melulu sebagai guru (dosen) semata, tetapi lebih sebagai bapak dan teman. Bahkan beliau tidak sungkan untuk memberikan bimbingan kepada siapapun, baik bimbingan akademik maupun moral.

Kedekatan inilah yang kemudian menjadikan beliau sebagai tempat berlindung (patron) bagi mahasiswa dan aktivis muda NU di Yogyakarta kala itu. Pada tahun 1972, ketika NU dan gerakan muda NU tergencet oleh kekuasaan, Pak Tolchah adalah orang yang paling berani membela. Ketika banyak mahasiswa ditahan akibat menghalangi pelantikan Kol. Bakri Sahid sebagai Rektor IAIN yang didrop oleh pemerintah, beliau selalu memberikan dukungan moral kepada mahasiswa. Meskipun terkadang tidak menyetujui cara-cara keras

mahasiswa yang ”nakal”, beliau tidak pernah menghalangi. Paling-paling beliau hanya bilang ”kalian itu gimana sih?”.

Keberaniannya berseberangan dengan penguasa akhirnya membuat karir akademisnya dihambat. Meskipun sudah lama diajukan dan telah memenuhi kualifikasi, gelar profesornya terhambat, dan baru turun setelah beliau meninggal. Terus terang saja saya menyesalkan kepada negara, khususnya Departemen Agama waktu itu, yang begitu kejam sama Pak Tolchah. Kala itu memang tokoh-tokoh NU dimarginalkan oleh rezim Orde Baru. Saat itu nuansa politik kampus memang sangat kental, tapi kami berusaha terus melawannya. Di sana pimpinan kampus dipegang bukan oleh orang-orang NU, tetapi kami teguh dan memegang organisasi-organisasi kemahasiswan. Dewan Mahasiwa, Senat Mahasiswa dan pers mahasiswa kami pegang. Dalam konstelasi itu Pak Tolchah selalu berada di balakang kami.

Begitu besar dukungan beliau terhadap gerakan mahasiswa –dan pemuda. Salah satu yang paling menonjol dari beliau adalah beliau selalu memberi kebebasan ruang gerak dan berekspresi kepada kami. Kalau beliau tidak setuju, beliau mencoba mengatakannya dengan argumen-argumen yang rasional. Argumen-argumen beliau lebih banyak ditujukan bagaimana peranan kaum muda untuk bisa menjadi agen perubahan dimasa mendatang. Barangkali karena beliau adalah seorang doktor ketatanegaraan, yang beliau singgung nampaknya juga tidak jauh dari bidang keilmuannya.

Demikian juga dengan pemikiran beliau tetang ketatanegaraan. Salah satu pemikiran beliau yang paling fundamental adalah konsistensi setiap pemikiran ’harus kembali kepada konstitusi’. Pemikiran beliau tampak dalam disertasinya tentang pergeseran kekuasaan eksekutif dan legislatif bersasarkan Undang-Undang Dasar. Bahkan beliau tidak jarang memberikan orasi-orasi yang berkaitan dengan konstitusi. Karena itulah segala sesuatu yang beliau lakukan selalu didasarkan pada hukum. Hal itu cukup memberi warna pada teman-teman di Yogyakarta.

Karakteristik yang paling menonjol dari beliau adalah kepiawaiannya dalam tutur kata, baik dalam bangku kuliah

maupun mimbar dakwah. Saat berceramah, beliau mengunakan bahasa yang santun, populer, tidak asal ngomong. Beliau merupakan intelektual yang menguasai dua disiplin keilmuan, yaitu ia sebagai pakah hukum tata negara di satu sisi dan sebagai ahli agama (kiai) di sisi yang lain. Kedua keilmuan itu mengakar dalam diri Pak Tolchah. Sampai masa tuanya, beliau banyak menulis di berbagai jurnal dan majalah. Yang disayangkan orang sekaliber pak Tolchah hanya hidup di Yogyakarta. Barangkali karena itulah beliau tidak cukup dikenal dalam sejarah NU. Dengan kiprah yang begitu penting, termasuk dalam perintisan gerakan pelajar dan mahasiswa NU di masa-masa awal, kini ia seolah menjadi tokoh yang terlupakan.

Setelah kiprahnya di IPNU berakhir, selanjutnya beliau melanjutkan perjuangannya di NU. Pertama sebagai Ketua ISNU dan pernah menjadi Wakil Ketua PWNU Yogyakarta. Beliau termasuk orang NU yang terlupakan di tengah-tengah jasanya yang besar. Pada saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Pak Tolchah menjadi ketua komisi Khittah dan Organisasi sedangkan saya bertindak sebagai sekretarisnya. Komis tersebut merupakan komisi yang paling banyak menyedot perhatian publik, termasuk di dalamnya adalah soal penerimaan NU terhadap asas Pancasila. Tolchah merupakan orang yang berjasa dalam perjalanan sejarah NU kala itu.

Kepakarannya dalam bidang ketatanegaraan memang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam perkembangan NU dan bangsa ini pada umumnya. Gagasannya tentang negara sudah sangat banyak menelorkan buku-buku. Karya-karyanya tentang politik dan ketatanegaraan hingga kini masih terus menjadi rujukan kajian hukum tata negara di berbagai perguruan tinggi. Sayang, Pak Tolchah tidak merumuskan dan menuliskan gagasan-gagasanya tentang NU. Padahal ia termasuk orang yang sangat peduli akan masa depan NU. Ia menginginkan sarjana-sarjana NU menguasai khasanah NU di satu sisi. Di sisi lain beliau juga mengharapkan para kiai NU tahu dan memahami perkembangan-perkembangan jaman. Itu yang selalau beliau katakan.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Di masa tuanya beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Ia rajin keliling daerah Yogyakarta dan sekitarnya untuk menyampaikan secaramah keagamaan. Waktu itu saya mengkritik beliau, ”Untuk apa sih pak Tolchah itu *keluyuran* malem-malem. Maqomnya pak Tolchah bukan itu. Biarin serahkan saja sama orang yang lain”. Jawab beliau, ”ya gak bisa”. Tapi setelah tua saya baru tahu maknanya, yaitu komunikasi dengan umat.[]

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mantan Ketua PC PMII Yogyakarta, Mantan Ketua Umum PP GP Ansor 1985-1995, Anggota FPG DPR RI (1992-2009).

I. Pakar Hukum Tata Negara Progresif

Oleh: Prof. Dr. Sri Soemantri, SH

Perkenalan saya dengan Pak Tolchah Mansoer adalah sebuah ketidaksengajaan. Sekitar 40 tahun yang lalu saya dikenalkan oleh teman saya, dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) bernama Haidir Ali yang masih ada hubungan famili dengan beliau dan sama-sama keturunan Madura. Karena kami sama-sama berasal dari Jawa Timur (saya dari Tulungagung) menjadikan hubungan kami mudah akrab, sehingga dalam berbagai obrolan maupun diskusi kita sudah terbiasa menggunakan *logat* 'Jawa timuran' sembari menikmati *lotek* Bandung.

Hubungan saya dengan Pak Tolchah semakin intensif ketika beliau menempuh studi doktoralnya di UGM dan menulis disertasi berjudul *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia* di bawah bimbingan Prof. A.G. Pringgodigdo. Dari satu diskusi ke diskusi yang lain, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain yang berkaitan tentang hukum ketatanegaraan, kami mulai ada kecocokan dan persamaan pandangan. Kita sama-sama mendalami Hukum Tata Negara. Saya juga tidak tahu, begitu diperkenalkan, kami sudah langsung cocok, sehingga dari berbagai obrolan dan diskusi yang semula biasa menggunakan bahasa Indonesia, beralih ke bahasa Jawa Timur (*ngoko*).

Setahu saya, beliau adalah satu-satunya mahasiswa doktoral Hukum Tata Negara yang dipromotori oleh Prof. A.G. Pringgodogdo, seorang guru besar Hukum Tata Negara di UGM yang sekaligus mantan Sekretaris Negara pertama). Saya tidak tahu cara apa yang dipakai oleh beliau untuk merayu pak Pringgodigdo sehingga mau menjadi promotornya, padahal waktu itu pak Pringgo sudah mengajar dan menjadi presiden di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Sebagai mahasiswa bimbingan Prof, A.G. Pringgodigdo, pemikiran-pemikiran ketatanegaraan Pak Tolchah sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Prof. A.G. Pringgodigdo. Pemikiran-pemikirannya identik sekali dengan pemikiran Prof A.G. Pringgodigdo, yaitu selalu menekankan atau melakukan pendekatan dari aspek sejarah ketatanegaraan. Karena itu,

dalam disertasinya Pak Tolchah juga melakukan penelitian tentang hukum ketatanegaraan Indonesia dari aspek sejarah, disertai ide-ide progresifnya. Pendekatan sejarah dilakukan oleh beliau tentu tidak lepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran Prof. A.G. Pringgodigdo selaku promotornya yang mengetahui dan ikut menjadi pelaku sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak dibentuknya BPUPKI dan PPKI, karena Prof. A.G. Pringgodigdo terlibat di dalamnya.

Sebagai orang yang sama-sama menjadi mahasiswa Prof. A.G. Pringgodigdo, kami mempunyai banyak persamaan pemikiran. Meskipun saya mahasiswa Prof. A.G. Pringgodigdo di Fakultas HESP UGM cabang Surabaya (sebelum saya terpilih sebagai anggota Konstituante untuk daerah pemilihan Jawa Timur yang akhirnya mempertemukan saya dengan MR Utrech), sedangkan beliau mahasiswa Prof. A.G. Pringgodigdo di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di antara persamaan pemikiran yang masih sempat saya ingat adalah ketika kami mendiskusikan tentang format atau sistem perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi yang mengalami masa pergantian undang-undang dasar beberapa kali. Dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kami pernah mendiskusikan format pergantian undang-undang dasar, sampai pada upaya Bung Karno untuk tampil menjadi Presiden pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer yang pada waktu itu dipegang oleh Perdana Menteri.

Menurut kami, sistem amandemen yang pas untuk diterapkan dalam merubah konstitusi Indonesia adalah sistem amandemen yang dianut oleh Amerika Serikat. Jadi, ada dua macam sistem amandemen Undang Undang Dasar. *Pertama*, sistem amandemen yang diintrodusir oleh Perancis, di mana kalau UUD diubah, maka yang muncul adalah UUD yang baru setelah perubahan tanpa mencantumkan UUD yang telah diubah. Sistem ini mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia pada waktu merubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke Konsitusi RIS, dan dari Konstitsi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara(UUDS) 1950. *Kedua,* sistem

amandemen yang dianut oleh Amerika Serikat, yaitu apabila undang-undang dasar diubah maka undang-undang dasar yang lama tetap dilampirkan. Istilah ini menurut MPR Indonesia disebut dengan sistem *adendum*. Dan ternyata sistem yang dianut oleh Amerika Serikat itulah yang akhirnya dipakai oleh Negara Indonesia untuk mengamandemen konstitusinya pasca-reformasi.

Dari berbagai diskusi tersebut saya melihat Pak Tolchah sebagai sosok pribadi yang terbuka, sebuah ciri khas orang Jawa Timur yang melekat betul padanya. Selain itu ia memiliki pemikiran-pemikiran yang maju ke depan (*progresive futuristic*) di bidang hukum ketatanegaraan di Indonesia, di saat orang yang mendalami Hukum Tata Negara masih langka. Waktu itu yang terkenal baru Prof. Ismail Suny. Saya sendiri baru selesai doktoralnya tahun 1978.

Sebagai bentuk pengakuan saya akan kepakaran beliau di bidang Hukum Tata Negara, saya setiap kali mengajar mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi, buku pertama yang harus didiskusikan bersama-sama oleh mahasiswa saya adalah buku disertasi Pak Tolchah, karena buku tersebut sarat dengan sejarah ketatanegaraan, sesudah itu baru buku disertasinya Prof. Ismail Suny.

Kemudian, dalam berbagai komunikasi ini akhirnya sampailah pada Fajrul Falaakh yang ternyata juga mendalami Hukum Tata Negara. waktu itu Pak Tolchah mau "mengenalkan" ke saya untuk menjadi dosen di Fakultas Hukum UNPAD yang waktu itu saya menjabat sebagai dekannya. Sebenarnya sudah ada kesepakatan antara saya dengan Pak Tolchah agar Fajrul mengajar saja di UNPAD, tapi ternyata Fajrul telah diangkat menjadi dosen di UGM.

Hubungan kami dengan keluarga Pak Tolhcah tidak hanya terjalin dalam hubungan intelektual semata, tapi juga hubungan kekeluargaan. Waktu Fajrul Falaakh menikah, saya khusus datang dari Bandung ke Yogyakarta untuk menghadiri resepsi pernikahannya sebagai penghormatan kepada anak seorang sahabat lama.

Semoga Pak Tolchah tenang disisiNya dan pemikiran-pemikran progresifnya di bidang ketatanegaraan bisa menjadi amal shaleh baginya. Amien.

Jakarta, 15 Mei 2008

Prof. Dr. Sri Soemantri M, SH, adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung, Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.

J. Tempat Mencari "Suaka"

Oleh: Prof. Jahja Umar, PhD.

Moh. Tolchah Mansoer yang saya kenal adalah seorang intelektual, sekaligus politisi. Setelah selesai berkiprah dalam dunia politik, termasuk yang terakhir adalah menjadi anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Propinsi DIY, Tolchah Mansoer berkonsentrasi di dunia akademis sebagai dosen di IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa kampus swasta di Yogyakarta dan beberapa kota lain. Di samping memiliki karir politik yang cukup gemilang, perjalanan intelektual Pak Tolchah juga sangat membanggakan. Dia merupakan doktor hukum tata negara periode awal di Universitas Gajah Mada.

Menurut saya, Pak Tolchan adalah orang langka. Pada tahun 1969 dia sudah menjadi doktor, padahal waktu itu orang yang meraih gelar sarjana saja masih jarang. Bahkan dia juga pernah disebut sebagai salah satu kandidat rektor IAIN Sunan Kalijaga dan dinominasikan sebagai calon Menteri Agama pada tahun 1971. Namun karena kondisi politik NU saat itu yang kurang menguntungkan, peluang itu akhirnya hilang bahkan menjadikan beliau terpinggirkan.

Pak Tolchah memiliki kepatuhan dan loyalitas yang tinggi terhadap kiai. Hal ini dibuktikan ketika Menteri Agama KH. Muh Dahlan memintanya untuk membantu membesarkan IAIN Yogyakarta, beliau tidak berani menolaknya. Padahal saat itu sebenarnya beliau dibutuhkan untuk mengajar di Fakultas Hukum UGM. Permintaan kiai Dahlan itu dimaksudkan agar nantinya beliau dapat menjadi rektor menggantikan Bapak Prof. Sunaryo yang sudah lanjut usia. Keberadaannya di IAIN hampir bisa diterima oleh semua orang karena perbendaharaan intelektual pribadinya yang mumpuni. Hal itu juga yang mengantarkan Pak Tolchah menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin mengalahkan pesaingnya Dr. Mukti Ali, seorang intelektual lulusan Mc Gill University.

Karena perubahan politik nasional, terutama pasca Pemilu 1971, pak Tolchah tidak lagi menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuludin. Dia hanya menjadi dosen biasa. Pengebirian karir pak Tolchah berlanjut bahkan gelar guru besarnya tidak bisa keluar hingga wafatnya. Ada kabar burung

bahwa setiap kali berkas persyaratan guru besarnya sampai di Departemen Agama, berkasnya dikurangi oleh orang tertentu, sehingga tidak pernah lengkap jika akan diproses. Menurut saya kalau tidak ada intervensi dari luar, orang yang amat produktif menulis seperti dia seharusnya sudah menjadi profesor. Para muridnya saja waktu itu sudah banyak yang menjadi profesor.

Di tengah-tengah pengekangan itu, Pak Tolchah 'menghibur diri' dengan banyak menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan diberbagai media seperti harian *Kedaulatan Rakyat* dan *Sinar Harapan*. Hampir setiap minggu ide-ide dan pemikirannya tentang masalah sosial, politik, agama, atau ketatanegaraan dimuat di harian terbesar di kota Yogyakarta itu. Selain itu, Pak Tolchah juga menulis beberapa buku.

Pada saat situasi politik bergolak, di mana rezim Orde Baru melakukan tindak represif terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk mahasiswa, Pak Tolchah tidak tinggal diam. Beliau memberikan dorongan moral ketika para mahasiswa diintimidasi dan direpresi. Kadang-kadang saya merasa kasihan kepada pak Tolchah ketika melihat ulah nakal anak-anak mahasiswa yang sering *'nongkrong'* di rumahnya. Ada suatu kebiasaan setelah mereka melakukan demontrasi, mereka berkumpul di rumah beliau di Kompleks Colombo 21. Dari segi politis tindakan ini memunculkan anggapan seolah-olah mereka itu disuruh pak Tolchah, padahal sama sekali tidak. Bahkan mereka tak pernah memberi tahu pak Tolchah sebelumnya. Saat itu pak Tolchah masih menjadi anggota BPH propinsi DIY, orang kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Namun, karena kedekatan beliau dengan mahasiswa terutama aktifis PMII, kemudian dijadikan sebagai *bemper,* tempat berlindung dan bersembunyi sehabis demonstrasi.

Pemerintah dan militer saat itu berprasangka bahwa pak Tolchah adalah orang di balik domonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Apalagi saat ada di antara mereka yang ditangkap dan ditahan di Korem, Pak Tolchahlah yang akan direpotkan untuk membebaskan mereka. Ya, itulah namanya anak-anak, kepada siapa lagi mereka harus berlindung kalau

tidak kepada orang tuanya. Pak Tolchah menjadi semacam tempat pencarian ”suaka” para mahasiswa tersebut.

Di akhir usianya, Pak Tolchah lebih banyak menghabiskan waktu dengan syiar dan pendalaman terhadap ilmu agama. Dia lebih banyak beraktivitas dakwah dan ceramah ke berbagai daerah sekitar Yogyakarta. Garasi mobilnya diubah menjadi ”pesantren” bagi para santri yang terdiri dari mahasiswa dan dosen untuk mengaji. Biasaya dia mengawali pengajiannya dengan membaca syair *Alburdah* karya Imam Albusiri yang kemudian diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Suatu ketika saya sempat kaget karena melihat Kiai Ali Ma’sum pengasuh pondok pesantren Krapyak hadir ditengah-tengah pengajiannya di Colombo 21.

Di samping ”menyulap” garasi mobil menjadi pesantren, rumah Pak Tolchah juga sering dijadikan sebagai markas diskusi anak-anak PMII. Meskipun saya kos di depan rumah Prof. KH Anwar Musaddad dan bersebelahan rumah dengan pak A.R. Baswedan di Taman Yuwono, tetapi untuk diskusi masalah-masalah gerakan dan kemahasiswaan, saya lebih banyak datang ke rumah Pak Tolchah yang letaknya cukup jauh. Suasana di rumah Pak Tolchah sangat nyaman bagi kami untuk dijadikan sebagai tempat dikusi ditunjang dengan tuan rumah yang sangat familiar. Bahkan ketika ada teman-teman yang kelihatan ada kecocokan atau ketertarikan dengan mahasiswa perempuan, tak jarang beliau mengambil inisiatif untuk menjodohkan, termasuk yang saya alami sendiri. Bagi saya pribadi, Pak Tolchah adalah orang tua saya sendiri.

Ketika saya mau menikah, Pak Tolchah bersama Bu Umroh mengantarkan saya untuk melamar istri saya ke rumah mertua di Pekalongan. Demikian juga ketika saya bekerja menjadi *medical representatif* (tenaga pemasaran obat), garasi rumahnya sempat saya jadikan sebagai tempat penyimpanan obat, padahal saya tidak tinggal di sana. Pak Tolchah mempersilahkan karena melihat kondisi saya yang saat itu masih susah. Dia orang yang selalu *welcome*.

Pak Tolchah juga tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan nasihat kepada kami. Sampai-sampai ketika saya sudah kuliah di Universitas California (AS) komunikasi

kami juga tidak putus, meski saat itu kami belum bisa kirim email seperti yang dilakukan orang saat ini. Setiap kali saya telpon, dia selalu minta agar saya meneleponnya pada jam 6 sore, yang berarti jam 4 pagi waktu California. *"Mengapa Pak?",* tanya saya. Beliau menjawab *"kalau kamu telpon jam 4 pagi, di sini kan jam 6 sore, nanti kamu bisa dengar adzan magrib dari sini (dari TV), di sana kan tidak ada azan'.* Saya terharu mendengarkan jawaban itu, meski dia sampaikan dengan nada sedikit bercanda. Ternyata dia masih memperhatikan saya, meski saya saat itu sudah tinggal di Amerika.

Ada satu pesan Pak Tolchah kepada saya yang tidak bisa saya lupakan. Suatu ketika dia berkata: "Lebih baik menjadi doktor dulu kemudian jadi politisi, daripada menjadi politisi lalu baru menjadi Doktor. Karena orang akan beranggapan bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut politisi seilmiah apapun itu tetap akan dinilai politis. Sebaliknya, sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang doktor, sepolitis apapun tetap dianggap ilmiah". Karena itulah, dia menyarankan agar saya tidak mengikuti 'gayanya'. Sayangnya, setelah menjadi doktor saya tak berminat menjadi politisi!

Pak Tolchah juga mempuyai gaya hidup sederhana. Tampaknya beliau menerapkan pola hidup cukup dan tidak bergaya hidup mewah. Beliau menyukuri dan menikmati apa yang ada pada dirinya sebagai suatu anugrah dari Tuhan. Sebagai contoh tentang kesederhanaannya, sewaktu beliau masih menjabat sebagai anggota BPH Yogyakarta, saya tidak menemukan yang namanya kulkas itu di rumahnya. Ketika saya bertanya kenapa pak Tolchah tidak membeli kulkas, dia menjawab: "Es batu kan sudah banyak yang jual, beli saja es yang sudah jadi".[]

Jakarta, 3 Mei 2009

Prof. Jahya Umar, Ph.D. adalah alumni UGM. Melanjutkan kuliah di California University. Mantan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, juga pernah menjabat sebagai Dirjen Bagais Departemen Agama. Kini konsultan Bank Dunia di Indonesia.

CATATAN PENUTUP
"Melahirkan Kembali" Pak Tolchah
Oleh: Idy Muzayyad, M.Si.

..... berdirinja organisasi Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama' tidak hanja sekedar mengumpulkan kawan baik dari pesantren, dari sekolah2 menengah Nahdlatul 'Ulama' dan umum ataupun dari universitet2. Bukan hanja itu. Ada dasar jang bersifat ideologisch jang menjebabkan dia tumbuh. Dia mempunjai sebab dan memiliki principe idoelogisch jang memerlukan *ideologiese dranger* jang melaksanakannja walau bagaimana djuga zaman dan orang berkata tentangnja....
(Moh. Tolchah Mansoer)

***

Lahirnya buku ini melahirkan dua kutub persepsi yang berseberangan; rasa bangga sekaligus rasa malu. Mengapa? Ada rasa bangga karena dengan buku ini kita sebagai generasi muda NU, khususnya IPNU, mengetahui bahwa dalam sejarah awal organisasi pelajar ini terdapat seorang tokoh yang patut dibanggakan, yakni Moh. Tolchah Mansoer. Di samping ikut merintis, ia memimpin organisasi ini pada tiga periode awal (1954-1961).

Namun, di sisi lain, dengan membaca buku ini kita juga patut merasa malu, karena sebagai pewarisnya kita belum mampu sepenuhnya meniru prestasi sebagaimana yang dicapai olehnya. Jangankan melebihi, sekadar menyamainya atau bahkan sedikit mendekati capaiannya saja, kita merasa kewalahan alias belum mampu. Termasuk secara pribadi, sebagai Ketua Umum PP IPNU (2006-2009), saya benar-benar merasa bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan sosok beliau yang tergolong luar biasa. Sungguh!

Meskipun waktu tidak mempertemukan saya langsung dengan Pak Tolchah (biarlah saya menyebutnya begitu) , namun ketokohan beliau terus membayang. Kebetulan saya banyak bersentuhan dengan ruang dan dimensi dimana pada masa lalu Pak Tolhah bersentuhan dengan semua itu; Yogyakarta. Keberadaan saya sebagai mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1995-2003),

Sekretaris PC IPNU Kota Yogyakarta (1998-2000) dan Ketua PW IPNU DIY (2001-2003) mendorong saya untuk dikenalkan dengan sosok Pak Tolhah. Apalagi saya juga kenal baik dengan salah satu putri beliau, Choiratun Chisaan yang aktif sebagai Ketua PW Fatayat NU DIY, karena sering 'ngantor' bersama di Sekretariat GMNU DIY, di Sodagaran (sebelah Tompeyan). Bersit keinginan menulis biografi tentang pak Tolchah sudah ada saat itu, namun baru sebatas impian.

Maka segera setelah kepengurusn PP IPNU masa khidmat 2006-2009 dilantik, keinginan menjawab rasa penasaran sekaligus penghormatan terhada Pak Tolhah kemudian mendorong saya untuk menunjuk tim penulis agar bekerja seperlunya untuk menulis biografi. Kebetulan juga, sebelum ini belum pernah dibuat biografi Pak Tolchah yang komprehensif. Entah kenapa? Ataukah benar perkataan sebagian senior yang menyebutkan Pak Tolchah sebagai 'Tokoh yang Terlupakan' seperti yang dituliskan Mas Slamet? (Slamet Effendy Yusuf-ed.)

Padahal dengan menulusuri kehidupan Pak Tolchah, akan menyingkap juga sejarah dan kenangan hamper semua aktifis NU yang tumbuh dan berproses di Yogyakarta. Tampaknya semua mantan aktifis NU alumnus Yogyakarta pasti bersentuhan dengan Pak Tolchah. Karena beliaulah Bapak aktifis NU kala itu. Sehingga wajar bila para senior alumni Yogyakarta yang sudah 'menjadi orang' di mana-mana saat ini, merespon dengan baik dicampur haru ketika dimintai kontribusi tulisan dan kesaksian untuk kelengkapan buku ini.

Dari Garasi rumah yang disulap menjadi forum kajian rutin, Pak Tolchah tak lelah melakukan kaderisasi. Seperti dikisahkan oleh Pak Abdullah Syarwanie. Garasi rumah di komplek Kolombo sebulan sekali disulap menjadi ruang pengajian untuk pendidikan sosial dan politik. Kalau diresapi secara benar, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Tolchah merupakan bentuk kaderisasi kepemimpinan NU. Sehingga hampir semua aktifis NU Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 70-80-an, merupakan besutan Pak Tochah. Hal seperti inilah yang jarang dilakukan oleh tokoh zaman sekarang, yang mungkin lebih asik dengan 'dunia'nya sendiri.

Idealisme Sang Kiai-Intelektual

Melalui buku ini kita dibawa kepada masa lalu kehidupan Pak Tolchah yang penuh dengan keteladanan, pengalaman dan cita-cita besar. Banyak *uswatun hasanah* yang bisa kita pelajari dan kita jadikan rujukan dalam mengarungi medan perjuangan yang masih sangat penjang. Membaca buku ini berarti menyelami masa lalu, sekaligus "menghadirkannya" di masa sekarang untuk menumbuhkan inspirasi bagi generasi kini dan mendatang.

Sebagaimana yang diketahui, Pak Tolchah adalah seorang *founding fathers* terpenting dalam organisasi IPNU. Ia merupakan pelopor, pendiri, dan penggerak pada masa awal berdirinya. Menurut data sejarah, idealisme IPNU merupakan refleksi dari idealisme Pak Tolchah. IPNU dicita-citakan olehnya menjadi wadah bagi pelajar umum dan pelajar pesantren. "Pertemuan" kedua kekuatan ini, dalam padangannya, akan menjadi kekuatan kaderisasi yang penting dalam perkembangan *jamiyyah* NU. Ia memegang teguh pendirian ini. Lebih dari sekadar visi organisasi, komitmen itu seolah melekat dalam dirinya. Pak Tolchah merupakan sosok ilmuan sekaligus santri.

Berawal dari kegelisahannyalah IPNU didirikan. Berbekal samangat ideologi *ahlussunnah waljamaah*, ia bersama teman-teman mendiskusikan, merancang, dan merumuskan organisasi pelajar sebagai rumah kader *nahdhiyyin*. Di kawasan Bumijo, dekat Tompeyan Yogyakarta mereka *mendessain* organisasi pelajar NU. Saat penulis masih tinggal di kawasan tersebut (selama menjadi pengurus PW IPNU Yogyakarta, tinggal di daerah Tompeyan), menyadari betul, betapa sulitnya mendirikan organisasi kepelajaran Nahdhatul Ulama di luar daerah basisnya.

Siapa pun akan tahu, bahwa Yogyakarta adalah tempat bersemainya Muhammadiyah. Tetapi justru, disitulah Pak Tolchah mampu bangkit dan bergerak bersama rekan-rekannya menapaki tangga oraganisasi demi memperjuangkan panji-panji *ahlussunnah wal jama'ah*. Inilah yang dimaksud oleh Pak Tolchah bahwa berdirinya IPNU bukanlah semata wahana 'kumpul bocah', yakni sekedar bertemunya anak-anak NU dari pesantren dan sekolah. Terdapat *sababul wurud* yang jelas, yakni perjuangan untuk menyelamatkan kader-kader muda NU agar tetap pada jalur ke-NU-annya dan tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi dari komunitas 'tetangga sebelah' yang tidak relevan dengan garis

ideologis NU. Dalam hal ini IPNU dalam gagasan Pak Tolchah berperan sebagai 'juru selamat' bagi kader-kader muda NU agar tidak tercerabut dari akar ideologi Aswaja.

Untuk konteks hari ini, ancaman dari ideologi terhadap generasi muda NU terasa makin gencar. Barangkali ada pengulangan sejarah sebagaimana dulu yang dirasakan Pak Tolchah. Ancaman terhadap faham 'Islam Tengah' oleh kelompok yang condong ke arah fundamentalis maupun liberalis semakin nyata. Karenanya IPNU seyogyanya tampil di depan untuk tetap menjaga agar kaum muda Islam di Indonesia tetap berada dalam garis moderasinya, yakni dengan semangat *tawassuth, tawaazun, tasammuh, i'tidal* serta *amar ma'ruf nahimunkar.*

Kontestasi beragamnya ideologi, terutama yang bernuansa *tatharruf* (ekstrim) baik kiri ataupun kanan, baik *tasyaddud* maupun *tasahhul* secara langsung akan menggerus ideologi tengah yang dianut oleh NU. Ancaman itu semakin nyata ketika ekspansi ideologi berkarakter Timur Tengah dan Barat mengepung secara bersamaan, sehingga cukup menggelisahkan suasana kebatinan kaum *nahdliyyin* yang beimplikasi pada bergesernya pola pikir dan pola tindak mereka.

Di samping itu, IPNU perlu terus berevolusi untuk menjawab problem sosial. IPNU didirikan tidak sekedar sebagai ikatan kosong tanpa visi dan orientasi. Ikatan pelajar ini juga bukan sekedar paguyuban pecinta Nahdhotul Ulama. Tetapi IPNU didirikan dengan semangat perjuangan dan pengabdian. Semangat untuk memperjuangkan hak-hak kaum pelajar. Semangat untuk mengabdikan diri pada kemaslahatan ummat. Oleh karenanya, bila kader tidak siap untuk berjuang dan mengabdi, maka beliau akan tersingkir oleh sejarah panjang IPNU. Ikatan Pelajar Nahdhotul Ulama adalah ruang yang elegan untuk belajar, berjuang, bertaqwa bagi setiap kader muda NU.

Pak Tolchah mengajarkan kepada kita bagaimana laku perjuangan dalam organisasi. Di tengah arus politik aliran yang cukup kuat, beliau tetap tegar mendirikan cabang-cabang IPNU di berbagai daerah. Ia sangat bersahaja, berpenampilan sederhana, naik-turun angkutan untuk datang ke berbagai daerah dalam rangka menyebarkan semangat berjuang bagi kaum muda NU. Masa mudanya dihabiskan untuk perjuangan kaum pelajar NU, bahkan

hingga tua dan meninggalnya Tolchah merupakan sosok pemikir terdepan di kalangan Nahdhatul Ulama.

Satu hal yang cukup menarik untuk diungkap secara khusus, beliau bukanlah putra mahkota dari pesantren ternama. Bukan pula putra saudagar atau bangsawan kaya raya. Tapi beliau lahir dari seorang pedagang kecil di sudut pasar besar Malang. Namun justru karena itulah kearifannya ditempa dan terbangun menjadi sosok yang idealis dan visioner. Karena dari kalangan masyarakat sederhana itulah, yang mengebabkan beliau bisa bergaul tanpa rasa sungkan dan *pakewuh*, disertai dengan penuh keta'dziman.

Di tengah zaman pancaroba, Pak Tolchah dididik dan dibesarkan orang tuanya. Beliau ikut berjuang dalam barisan pasukan republik. Pak Pak Tolchah menikmati lukanya saat harus meninggalkan sekolah, karena agresi Belanda II. Beliau memahami masa-masa sulit tersebut, sebagaimana beliau memahami dirinya sendiri. Di tengah kemelut itu, beliau tetap belajar. Belajar kepada keraifan-kearifan yang dijumpainya. Belajar pada ibu, ayah, kakak, dan guru-gurunya. Belajar pada kearifan alam, keraifan sosial, dan belajar kepada kesahajaan masyarakat disekitarnya. Inilah Pak Tolchah, yang terus mengambil hikmah sekalipun di masa sulit.

Pada tahapan berikutnya beliau menjadi pribadi yang bersahaja dan arif, sekalipun kedudukan dan posisinya sangat membanggakan. Pak Tolchah tetap mencintai masyarakat dan ummatnya. Beliau mewakafkan hidupnya untuk Nahdhatul Ulama, mengabdikan diri untuk kemaslahatan warga NU. Siapapun yang mengenal pribadinya secara langsung akan terkenang dan merekam segenap kebaikan dan perjuangannya. Tokoh ini adalah ayah yang hangat, kakak yang perhatian, saudara yang menyenangkan, santri yang penuh keta'dziman, guru yang mencerahkan, sahabat yang membanggakan dan pemimpin yang membahagiakan.

Sekarang pribadi mengagumkan tersebut telah lama berlalu. Generasi kita hanya ditinggali jejek rekamnya yang luar biasa dalam berjuang dan mengabdi kepada umat. Dan sekali lagi kita hanya dapat meneladaninya sebagai bukti kecintaan kita terhadap Ibnu Mansoer tersebut. Meneladani apa yang telah menjadi laku perjuangannya. Meneladani apa yang telah menjadi pemikiran-

pemikirannya. Dan meneruskan semangat pengabdiannya untuk berkhidmat kepada IPNU, berkhidmat memperjuangkan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah*.

Pertanyaannya, mampukah kita? Setelah hampir 55 tahun IPNU didirikan, semangat membara tersebut terus berkobar menerangi anak zamannya. Sudah menjadi keharusan bagi IPNU hari ini, untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulunya, dalam bentuk upaya menyiapkan diri untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam Nahdhatul Ulama, dan menyiapkan kadera masa depan dengan lebih baik. Kita rindu dengan Pak Pak Tolchah, dan berharap kelahiran Tolchah-Tolchah yang lain untuk perjuangan IPNU di masa yang akan datang. Rasa-rasanya inilah bentuk penghormatan pada orang tua, pendahulu kita. Perjuangan ini terus berlanjut.

Mengagumi masa lalu, membanggakan sejarah, menghormati pendahulu bukan semata romantisme. Kita tidak boleh hanya berhenti pada *maqam* 'termenung' dengan masa lalu itu, namun kita seharusnya tergerak untuk melakukan sesuatu. Artinya, perlu ada gerakan yang dilakukan oleh IPNU masa kini, dengan berbasis refleksi sejarah masa lalu.

Pola gerakannya sudah digariskan oleh ulama NU, yakni *'almuhafadzah 'alalqadim ash-shalih wal-akhdzu biljadid al-aslah'*. Kita patut melestarikan hal-hal yang baik dan sudah dicapai, sembari melakukan inovasi terhadap hal-hal baru yang lebih baik. Pola atau formula ini penting mengingat tantangan zaman yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada saat Pak Tolchah masih hidup dan berjuang.

Zaman yang berubah, tentu memerlukan penyikapan yang berbeda. Spirit yang telah ditanamkan Pak Tolchah tetap akan menjadi pijakan, namun tidak bisa diterapkan secara begitu saja, melainkan kita konstekstualisasikan dengan perkembangan hari ini. Apalagi tantangan yang dihadapi generasi saat ini, dalam banyak sisi lebih berat dibanding tantangan yang dihadapi generasi lalu. Karenanya diperlukan keteguhan memegang prinsip ditambah dengan kreativitas serta kelihaian dalam berselancar di gelombang zaman baru.

Mari kita songsong masa depan, sambil belajar pada kearifan pendahulu kita pada masa lalu, salah satunya adalah kepada "sang pelopor", *Allahu yarham* Pak Tolchah.[]

DAFTAR SUMBER

SUMBER PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung, M.Hum, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999

Alfas, Fauzan, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan,* (Jakarta: PB PMII), 2004

Alfian, Ibrahim, *Tentang Metodologi Sejarah,* (Yogyakarta: UGM Press), tt

Asshiddiqie, Jimly, Prof. Dr. SH, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* (Jakarta: Buana Ilmu Populer), 2007

Azra, Azyumardi, Prof. Dr. dan Drs. Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Depag RI), 1998

Barton, Greg, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS), cet. Ke-6, 2006

Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKiS), cet. V, 2008

Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2003

Fadeli, H. Soeleiman dan Mohammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista-LTNU NU Jawa Timur), 2007

Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,* (Yogyakarta: LKiS), 1999

Frederick, William H. dan Soeri Soeroto (Peny), *Pemahaman Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES), 1982

Furchan Arif, H. MA, Ph.D, dan H. Agus Maimun, MA, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah,* Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press), 1969

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia), 1992

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta, Gramedia), 1985

Kristanto, JB., *1000 Tahun Nusantara*, (Jakarta: Kompas), 2000

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (Yogyakarta: Bentang Budaya), 2001

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana), 1994

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: mizan), 2005

Mandan, Arif Mudatsir (ed.), *Subhan Z.E. Sang Maestro: Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern,* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu), 2001

Mansoer, M. Tolchah dkk., *Sedjarah Perdjuangan IPNU dari Masa ke Masa*, (Jogjakarta: Jajasan Lima Empat), 1964

Mansoer, Mohammad Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Negara Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita), cet. Ke 3, 1983

Mansoer, Moh. Tolchah, *Sumber Hukum dan Urutan Tata Tertib Hukum* (Yogyakarta: Bina CItpa), 1979

Mansoer, Moh. Tolchah, *Peranan Ummat Islam Dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah IAIN Sunan Kalijaga), 1971

Mansoer, Moh. Tolchah, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hal Asasi Manusia dan Islam* (Bandung: Alumni), 1979

Mansoer, Moh. Tolchah, *Demokrasi Sepanjang Konstitusi* (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga), 1972

Mansoer, Moh. Tolchah, *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah,* (Yoyakarta: Gema), 1981

Mansoer, Moh. Tolchah, SH, *Kedudukan Penetapan Presiden Dalam Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset), 1971

Mansoer, Moh. Tolchah, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945,* (Bandung: Alumni), 1977

Mansoer, Moh. Tolchah, *Hukum Tatanegara Sesudah Pemilihan Umum 1971,* (Jakarta: Pradnya Paramita), 1978

Mansoer Moh, Tolchah, SH, *Konsep Dasar Islam Tentang Negara* (Purworejo: Perguruan Tinggi Islam Imam Puro), 1977

Mansoer Moh. Tolchah Dr., *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung: Alumni, 1977

Mansoer, Moh. Tolchah, *Beberapa Soal Tentang Undang-Undang Dasar 1945*, (Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1970),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Kepercaayaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*: *Hasil Keputusan Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuhuddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,1971),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Kedudukan Penetapan Presiden Di Dalam Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta: "Sumbangsih" Papringan, 1971),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Masalah Referendum*, (Yogyakarta: Jurusan HTN/HTP, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1984),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Rakyat, Kekuasaan, Pemerintah*, (Yogyakarta: Gema, 1981).

Mansoer, Moh. Tolchah, *Pokok-Pokok Ahlussunah wal Jamaah*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1974).

Mansoer, Moh. Tolchah, *Masalah-Masalah Keagamaan Yang Tidak Boleh Diperselisihkan Antar Sesama Umat Islam*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1982),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),

Mansoer, Moh. Tolchah, *Sajak-Sajak Burdah Imam Muhammad Al-Bushiri*, (Yogyakarta: Adab Press UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Mansoer, Moh. Tolchah, *Progres Masa Depan Mahasiswa IAIN Ditinjau Dari Segi Sosial & Politik*, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1968).

Ma'shum, Saifullah (ed.), *Kharisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU,* (Bandung: Penerbit MIZAN), 1998

Mastuqi HS, M.Ag. dan M. Ishom El-Saha, M.Ag, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka), 1995

Notosusanto, Nugroho, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah,* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata), 1964

Ridho, Mujtahidur, *Reinventing IPNU: Mengayuh Sampan di Perkampungan Global* (Yogyakarta: eL-Kutz) 2003

Roeder, OG, *Who's Who in Indonesia: Biographies of Prominent Indonesia Personalities in All Fields* (Jakarta: Gunung Agung), 1971

Romahurmudziy, Muchammad dkk (ed.), *Sejarah Perjalanan IPPNU 1955-2000,* (Jakarta: Pimpinan Pusat IPPNU), 2000

Sholeh, Asrorun Niam dan Sulthan Fathoni, *Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah: 50 Tahun Pergulatan dan Kiprah IPNU dalam Mengabdi Ibu Pertiwi,* (Jakarta: eLSAS), 2003

Siddiq, Achmad KH, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur), cet. VI, 2006

Sitompul, Einar M., *Nahdlatul Ulama dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka*

Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1989

Zuhri, Syaifuddin KH dkk, *PPP, NU dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Integrita Press), 1984

SUMBER DOKUMEN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Peladjar Nahdlatul 'Ulama', (Jogjakarta: PP IPNU), 1957

Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jakarta: PB PMII), 1985

Kenang-Kenangan Mu'tamar ke III, POR ke-I, Panel Discussion, dan Lustrum I Ikatan Peldajar Nahdlatul 'Ulama' (Yogyakarta, Bag. Publikasi/Dikumentasi Sekretariat Panitya Mu'tamar III & POR I IPNU), 1959

Laporan Muktamar NU Ke-27 (Jakarta: Panitian Penyelenggara Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama), 1984

Laporan Pertanggungdjawaban Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada Muktamar IV IPNU tanggal 11-14 Pebruari 1961 di Yogyakarta

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tanggal 3 Pebruari 1981 No. 1675/Tanf/PB/II-81

Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada H. Machbub Djunaidi, tanggal 29 Juni 1979

Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 12 Mei 1975

Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 20 Desember 1978

Surat pribadi Moh. Tolchah Mansoer kepada Drs. H. Asnawi Lathief, tanggal 23 Desember 1977

Surat pribadi dr. Fahmi Saifuddin kepada Moh. Tolchah Mansoer, tanggal 8 Agustus 1978

SUMBER JURNAL, SURAT KABAR DAN MAJALAH

Jurnal Prisma, Agustus, 1977
Harian Pagi Nasional, 16 Desember 1955
Kedaulatan Rakyat, 21 Oktober 1986
Sinar Harapan, 9 Februari 1984
Majalah *Gema Muslimin* Edisi II. Juni-Juli 1954
Majalah *Al-Jami'ah* No.5 Th.IX, September 1970
Majalah *Bangkit* No.53/TH.VI. 1985
http://wapedia.mobi/id, 14 Maret 2008
Majalah Pesantren, Edisi Perdana, 1984
Risalah Organisasi IPNU, edisi 1 th. 1 September 1961

SUMBER LISAN

1. Nyai Hj. Dra. Umroh Mahfudhoh. Istri (alm.) Moh. Tolchah Mansoer. Ia merupakan pendiri IPPNU, dan menjadi Ketua Pelaksana Harian pertama (1955). Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP Yogyakarta, dan pernah menjadi anggota FKB DPR RI (1999-2004). Tinggal di Tempelsari Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta.
2. Moh. Fajrul Falaakh, SH, M.Sc. Putra pertama Moh. Tolchah Mansoer, mantan Ketua PC PMII Yogyakarta, mengikuti jalur akademis sang ayah sebagai pakar hukum tata negara dari UGM, dan saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (KHN). Tinggal di Jl. Dato Tonggara No. 8 Kramatjati Jakarta Timur.
3. Dra. Choirotun Chisaan. Anak keenam Moh. Tolchah Mansoer, saat ini aktif di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LKPSM) Yogyakarta. Tinggal di Kompleks Colombo 21 dan Tempelsari Maguwoharjo, Yogyakarta
4. Ir. M. Romahurmuziy, MT. Putra bungsu Moh. Tolchah Mansoer. Kini menjabat Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP. Pada Pemilu 2009 terpilih menjadi anggota DPR RI (periode 2009-2014). Tinggal di Jakarta

5. Nyai Hj. Fathonah Ustman Mansoer. Istri (alm.) Utsman Mansoer, kakak Moh. Tolchah Mansoer. Tinggal di Jl. Slayer no. 10 Malang.
6. Hj. Khusnul Khotimah. Kakak sepupu Tolchah Mansoer. Pernah manjdi pengurus PP. Fatayat NU. Tinggal di Kampung Kidul Pasar Malang.
7. Nur Diana. Putri Nyai Hj. Fathonah Ustman Mansoer, keponakan Moh. Tolchah Mansoer. Tinggal di Malang
8. H. Ismail Makky (alm.). Teman satu generasi dengan Tolchah Mansoer. Pada masa kepemimpinan Tolchah Mansoer, ia menjabat sebagai Ketua Departemen Perguruan Tinggi PP IPNU. Dalam Muktamar IV di Yogyakarta, terpilih menjadi Ketua Umum PP IPNU menggantikan Tolchah Mansoer. (wafat pada April 2008)
9. Dr. KH. Thoha Abdurrahman. Mantan Ketua PC IPNU Magelang saat Tolchah Mansoer menjadi Ketua Umum PP IPNU. Di Yogyakarta, ia menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga. Semasa Tolchah Mansoer masih hidup, ia termasuk santri yang mengikuti pengajiannya Tolchah Mansoer. Tinggal di Yogyakarta.
10. KH Djamaluddin Abdullah Sadjad. Pengurus PP IPNU semasa Tolchah Mansoer. Kini mengasuh Pondok Pesantren Al-Halim di Kertosono Nganjuk, Jawa Timur.
11. KH Munsif Nachrawi. Putra KH. Nachrawi Thohir, mantan Ketua Umum PBNU. Pada periode awal IPNU, ia sudah mulai terlibat, menjadi Ketua PC IPNU Malang. Pada masa periode teakhir Tolchah Mansoer, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP IPNU. Kini mengasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah, Bungkuk, Singosari, Malang.
12. H. M. Said Budairy. Mantan wakil ketua Perwakilan PP IPNU di Jakarta pada saat Moh. Tolchah Mansoer menjadi Ketua Umum PP IPNU. Sejak muda aktif sebagai wartawan. Pernah menjadi Direktur PP LAKPESDAM NU (1987-l995), Ombudsman Majalah PANTAU (2001-2003), pernah menjadi anggota DPR-GR. Tinggal di Mampang Prapatan II No. 74 Jakarta.

13. Drs. H. Asnawi Latif. Mantan Ketua Umum PP IPNU ketiga. Yunior dan penerus Tolchah Mansoer di IPNU. Pernah menjadi anggota DPR RI dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Tinggal di Tebet Jakarta Selatan.
14. KH A. Muchit Muzadi. Mantan sekretaris KH. Ahmad Siddiq dalam perumusan makalah Khittah NU 1926. Kini menjadi Mustasyar PBNU (2004-2009). Tinggal di Jember.
15. H.M. Sobich Ubaid. Kawan seperjuangan Moh. Tolchah Mansoer di PP IPNU. Menantu KH. Wahib Wahab. Tinggal di Jakarta.
16. H. Cholid Mawardi. Kawan Perjuangan Moh. Tolchah Mansoer di PP IPNU, mantan KetuaUmum PP GP Ansor 1980-1985, Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jl. Raya Kelapa Dua No. 11 Rt 04 Rw 01 Gg. Masjid Al-Ittihad Kebon Jeruk Jakarta Barat
17. Mahfudhoh Ali Ubaid. Putri KH. Abdul Wahab Hasbullah, anggota FPPP DPR RI Periode 2004-2009. Tinggal di Jakarta.
18. Prof. Dr. KH M. Tholhah Hasan. Mantan pengurus PC IPNU Jombang, menjabat sebagai Menteri Agama pada masa pemerintahan Gus Dur, pendiri dan mantan Rektor Unisma Malang, kini menjabat sebagai Wakil Rais Aam PBNU. Tinggal di Jakarta
19. KH Nuril Huda. Mantan Ketua PC IPNU Tuban. Kini menjabat sebagai Ketua PP LDNU 2004-2009. Tinggal di Jakarta.
20. Drs. H. Ichwan Sam. Mantan Ketua PAC IPNU Gringsing Batang, Mantan Ketua PMII Komisariat Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mantan Sekretaris Jenderal PBNU 1991-1994, anggota FPG DPR RI 2004-2009, saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Pusat. Tinggal di Kompelsk Patria Jaya Pondokgede Jakarta.
21. Abdullah Syarwani, SH, Alumni FH UGM Yogyakarta, mantan Ketua PP Lakpesdam, peneliti LP3ES, mantan anggota FPPP DPR RI 1999-2004, mantan Dubes RI untuk Lebanon. Tinggal di Jakarta.

22. Prof. Drs. Cecep Syarifuddin. Mantan aktivis IPNU. Selama di Yogyakarta menjadi murid Moh. Tolchah Mansoer. Kini menjadi anggota FPKB DPR RI (2004-2009). Tinggal di Jakarta.
23. Prof. Jahya Umar, PhD. Alumni UGM. Melanjutkan kuliah di California University. Mantan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, juga pernah menjabat sebagai Dirjen Bagais Departemen Agama. Kini konsultan Bank Dunia di Indonesia. Pada saat kuliah di Yogyakarta ia adalah aktivis mahasiswa yang dibina oleh Tolchah Mansoer. Kini tinggal di Jakarta
24. Drs. H. Hafidz Ma'sum. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Anggota FPPP DPR RI (2004-2009).
25. KH Idris Abdul Hamid. Putra KH. Abdul Hamid Pasuruan, Alumni Pesantren Krapyak (1971-1978). Kini menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan.
26. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mantan Ketua PC PMII Yogyakarta, Mantan Ketua Umum PP GP Ansor 1985-1995, Anggota FPG DPR RI 1999-2009. Tinggal di Citra Grand Cluster Casile Garden Blok H-5 No. 18 Cibubur Jakarta
27. Prof. Drs. KH Projodikoro. Alumni IAIN Yogyakarta. Ia sempat mengaji kepada Pak Tolchah Mansoer. Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sekarang tinggal di Jl. Ori 1 No. 4 Papringan Yogyakarta
28. KH Abu Tauhid. Alumni IAIN Yogyakarta. Ia sempat mengaji kepada Pak Tolchah Mansoer. Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang mengasuh PONPES Minhajul Muslim, di belakang kampus UIN Yogyakarta.
29. H. Zein Badjeber. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Pasa saat Munas Alim Ulama di Situbondi tahun 1983, ia bertindak sebagai Steering Committee (SC). Anggota FPPP DPR RI 1999-2004. Tinggal di Jl. H. Mahmud No. 10 Kalibata Jakarta Selatan.
30. KH Ali As'ad. Alumni Pesantren Krapyak, Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota FPKB DPR RI

(1999-2004). Tinggal di Plosokuning Sleman Yogyakarta.

31. H. Imam Anshori Sholeh, SH. Alumni FH UGM Yogyakarta, yunior dan "santri" Moh. Tolchah Mansoer. Pernah menjabat sebagai Kepala Litbang harian Media Indonesia, dan anggota FPKB DPR RI (2004-2009).
32. KH Abdul Fatah. Menantu Moh. Tolchah Mansoer. Kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren As-Sunny Darussalam yang dirintis oleh Moh. Tolchah Mansoer. Juga mengajar di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga. Tinggal di Tempelsari Yogyakarta.
33. Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM), dan kini Direktur Program Doktor Universitas Jaya Baya Jakarta.
34. Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, SH. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI). Bersentuhan dengan Moh. Tolchah Mansoer sebagai sesama pemikir dan akademisi hukum tata negara.
35. Prof. Dr. Sri Sumantri. Pakar Hukum Tata Negara dari UNPAD, mantan Rektor Universitas Jaya Jakarta. Ia adalah kawan diskusi Moh. Tolchah Mansoer dan pengagum pemikirannya dalam bidang hukum tata negara.
36. Dra. Yis Sa'diyah Maksum adalah Putri Prof. KH. Anwar Musaddad. Dia cukup dekat dengan Tolchah Mansoer karena Tolchah sering berhubungan dengan ayahnya yang kala itu menjadi Ketua PP LPMa'arif NU.
37. KH. A. Hamid Baidlowi. Suami Hj. Dra. Aisyah Hamid Baidlowi, menantu KH Wahid Hasyim.
38. Drs. H. Adnan Harahap. Mantan Ketua BEM IAIN Yogyakarta, mantan Ketua PC PMII Yogyakarta, Ketua Ta'mir Masjid Istiqlal Jakarta.
39. KH. Ghozali Masroeri. Mantan Ketua PC IPNU Grobogan, Ketua Lajnah Falakiyah PBNU 2004-2009. Tinggal di Jl. Besi Blok D.VI No. 6 Pondok Jaya Bintaro Jaya Sektor 5 Jakarta
40. Prof. Dr. H. Machasin, MA. Alumni IAIN Sunan Kalijaga. Kini menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi

Departemen Agama RI. Pada saat di Yogyakarta pernah mengikuti pengajian kitab bersama Tolchah Mansoer.

41. Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si. Mantan Ketua PC PMII Makassar. Menjadi Wakil Ketua PBNU (2004-2009), Anggota FPPP DPR RI (2004-2009). Pernah menemani Moh. Tolchah Mansoer pada saat kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan.
42. Iskandar Tirtabrata, SH. Teman satu kelas Moh. Tolchah Mansoer di Fakultas HESP UGM Yogyakarta. Kini tinggal di Sokaraja Banyumas.
43. Mu'sinah, istri Djamaluddin Abdullah Sadjad. Ia adalah murid Tolchah di Madrasah Mu'alimat NU Yogyakarta. Kini tinggal di Kertosono Nganjuk Jawa Timur.

TENTANG PENULIS

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, lahir di Batang pada 15 Januari 1980. Mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Ngadirejo I, MTs. Sunan Kalijaga Bawang Batang, TMI Darul Amanah Sukorejo Kendal, Pondok Pesantren dan SMA Futuhiyyah Mranggen Demak. Gelar sarjana ia peroleh dari Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Kini, ia tengah menyelesaikan studi magister di Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Ia adalah aktivis IPNU sejak tahun 1993. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting IPNU Desa Ngadirejo, Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Reban, Pengurus Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Batang, Pemimpin Umum Buletin KADER PW IPNU Jawa Tengah, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Tengah, Redaktur Majalah Ma'arif, Koordinator Departemen Organisasi PP IPNU dan kini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat IPNU.

Di samping IPNU, aktivitasnya membentang dari dunia jurnalistik, gerakan sosial hingga gerakan lintas-agama. Ia pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah IDEA, redaktur majalah Al-Mihrab, Pemimpin Umum/Redaksi Newsletter ARUS, Koordinator Divisi Penelitian LAKPESDAM NU Kabupaten Batang, Direktur *Interreligious Studies Community* GALAKSI Semarang. Sejak tahun 2006 ia menjadi Presiden Konsorsium DERAP (Demokrasi Rakyat untuk Perubahan), sebuah perkumpulan gerakan sosial lokal. Dan kini, aktif di PP LAKPESDAM NU.

Buku yang pernah ditulis antara lain: *Demi IPNU: Upaya Memformat Gerakan IPNU Pasca-Kongres Surabaya* (2004), *Mengendalikan "Syahwat Politik" Kiai NU: Meneguhkan Khittah 1926 Sebagai Komitmen Gerakan* (2004), *Catatan Terserak: Dari Teologi hingga Gerakan Sosial* (2006), *Pilkada Batang 2006: Gerbang Demokratisasi Lokal* (2007) dan *Harmoni dan Kekuasaan: Politik Kerukunan Antara Agama Era Orde Baru dan Era Reformasi*. Kini juga masih aktif menulis di berbagai majalah, website dan surat kabar.[]

Zainul Arifin, lahir di Rembang, 15 April 1981. Memulai pendidikannya di SDN I Menoro Sedan Rembang (1988), Madrasah Diniyah Tarbiyatus Sibyan, Menoro Sedan Rembang (1990), SMPN I Kragan Rembang (1993), MAN Rembang (1996), Pondok Pesantren Darul Ulum Rembang (1996), Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang (1997), Pondok Pesantren MUS Sarang Rembang (1999). Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004. Saat ini sedang menyelesaikan Studi Magister di Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Jaya Baya Jakarta.

Saat menjadi mahasiswa aktif di BEMJ Peradilan Agama, PMII Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum, Lembaga Peradilan Semu Fakultas, mengikuti berbagai pelatihan *Legal Drafting* dan Pendidikan Advokat, lulus sebagai Advokat (anggota Peradi) tahun 2006, Anggota APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) DKI Jakarta sejak tahun 2006. Pada 2006-2007 menduduki jabatan sebagai anggota Student Crisis Centre (CSS) IPNU. Saat ini ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Pimpinan Pusat IPNU masa khidmat 2006-2009.[]

Fahsin M. Fa'al, lahir di Demak, 23 April 1982. Mengawali pendidikannya di RA. Siti Khodijah yang diasuh oleh Ibundanya. Selanjutnya belajar di SDN Gajah II (1994) dan MTs Al-Irsyad Gajah Demak (1997), sambil bersekolah di Madrasah Diniyyah Al-Irsyad tingkat Awaliyyah (1993) dan tingkat Wustho (1995). Berikutnya ia melanjutkan pendidikan di SMU Futuhiyyah Mranggen, Demak (2000) sambil sesekali mengikuti *sorogan* dan *bandongan* beberapa kitab kuning di pesantren setempat. Pada tahun 2000 "hijrah" ke kota pelajar dan memulai menempuh pendidikan tinggi di UIN (dulu IAIN) tepatnya di Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah tamat tahun 2004, tahun berikutnya berkesempatan mengikuti pendidikan di Pascasarjana pada almamater yang sama dengan konsentrasi Filsafat Islam lulus tahun 2007 dengan tesis berjudul : "Sirkularitas Dalam Konfigurasi Nalar Islam Indonesia" (dalam proses terbit). Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta sambil sesekali memfasilitasi berbagai pelatihan.

Saat menjadi Mahasiswa pernah menjadi Ketua Presidium Forum Dialog Mahasiswa Sejarah Islam se-Indonesia (FORDIMASI) dan Koordinator Bidang Jaringan Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI). Dalam intra kampus pernah sebagai Menteri Koordinator Politik dan Sosial Kampus (MENKOPOLSOSKAM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sementara dalam organisasi ekstra sempat mengabdi sebagai koordinator departemen Litbang Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indinesia (PC. PMII) Yogyakarta tahun 2004-2005. Sedangkan dilingkungan NU saat ini berkhidmat sebagai Wakil Sekretaris PW. IPNU Jateng masa khidmat 2006-2008.

Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan adalah buku berjudul: *Negara dan Revolusi Sosial : Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka* (2005). *Antroposentrisme NU: Dari Konfigurasi Politik Menuju Perjuangan Kemanusiaan* (2007). *Sejarah Kekuasaan Islam* (2008). Mengedit tiga buku *Ideologi Gerakan Pelajar* : *Rekonstruksi Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah Sebagai Ideologi IPNU* (2006), *Catatan Terserak; dari Teologi, hingga Gerakan Sosial* (2006), dan *Islam Nusantara,* (2007).[]

I.P.N.U

I.P.N.U